



WALIKOTA LANGSA
PROVINSI ACEH

QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KOTA LANGSA NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KOTA LANGSA TAHUN 2012-2017

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah menggunakan data dan informasi perencanaan penyusunan daerah yang salah satunya meliputi organisasi dan tata laksana pemerintah daerah;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa mengakibatkan perlu dilakukannya perubahan RPJM Kota Langsa untuk selanjutnya dikompilasi secara terstruktur berdasarkan aspek geografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu merevisi/merubah Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Langsa Tahun 2012-2017 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Langsa Tahun 2012-2017;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas perlu membentuk Qanun Kota Langsa tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Langsa Tahun 2012-2017;

- Menimbang :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);

3. Undang .#

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksana Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
13. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2012-2017 (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 56);
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 70 Tahun 2012 tentang RPJMA Tahun 2012-2017 (Berita Aceh Tahun 2012 Nomor 121);
15. Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Langsa Tahun 2007-2027 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 2);

16. Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Langsa Tahun 2012-2017 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Langsa Tahun 2012-2017 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2015 Nomor 19);
17. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Langsa Tahun 2012-2032 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 429);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA
dan
WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KOTA LANGSA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA LANGSA TAHUN 2012-2017.

Pasal I

Ketentuan dalam Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Langsa Tahun 2012-2017 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Langsa Tahun 2012-2017 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2015 Nomor 19), diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) RPJM Kota Tahun 2012-2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN UMUM KOTA LANGSA
- BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
SERTA KERANGKA PENDANAAN
- BAB IV : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
- BAB V : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
- BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VIII *

BAB VIII : INDIKASI PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB IX : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

BAB X : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

BAB XI : PENUTUP

- (2) Perincian sistematika RPJM Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diubah dan disesuaikan dengan perubahan materi yang berkaitan dengan target indikator kinerja daerah, kondisi keuangan daerah dengan asumsi-asumsi keuangan terkini serta perubahan struktur organisasi perangkat daerah tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal II

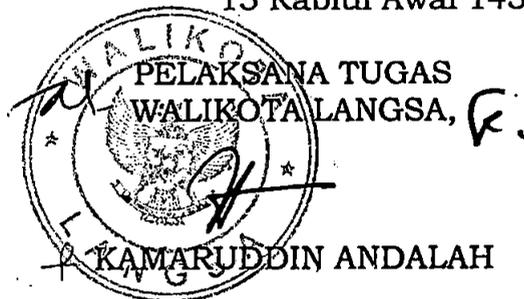
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa

pada tanggal 15 Desember 2016 M

15 Rabiul Awal 1438 H

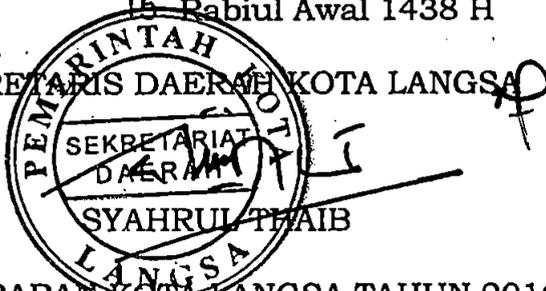


Diundangkan di Langsa

pada tanggal 15 Desember 2016 M

15 Rabiul Awal 1438 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA



LEMBARAN KOTA LANGSA TAHUN 2016 NOMOR 11

NOREG QANUN KOTA LANGSA, PROVINSI ACEH : (11/146/2016)

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

ADHB	:	Atas Dasar Harga Berlaku
ADHK	:	Atas Dasar Harga Konstan
AKB	:	Angka Kematian Bayi
AKH	:	Angka Harapan Hidup
AKHB	:	Angka Kelangsungan Hidup Bayi
ALE	:	Analisis Lingkungan Eksternal
ALI	:	Analisis Lingkungan Internal
AMH	:	Angka Melek Huruf
APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBK	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota
APK	:	Angka Partisipasi Kasar
APM	:	Angka Partisipasi Murni
APS	:	Angka Partisipasi Sekolah
ASB	:	Analisa Standar Biaya
Balita	:	Bawah Lima Tahun
BAPPEDA	:	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BBM	:	Bahan Bakar Minyak
BKKB & PP	:	Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
BKPP	:	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
BLHKP	:	Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan
BLUD	:	Badan Layanan Umum Daerah
BLUD RSUD	:	Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
BPHTB	:	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
BPM	:	Badan Pemberdayaan Masyarakat
BPR	:	Bank Pembiayaan Rakyat
BPS	:	Badan Pusat Statistik
BRR	:	Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara
BUP	:	Batas Usia Pensiun
c	:	<i>Celcius</i>
CBD	:	<i>Central Bisnis Distric</i>
CCTV	:	<i>Closed Circuit Television</i>
CPNS	:	Calon Pegawai Negeri Sipil
CPO	:	<i>Crude Palm Oil</i>
D1	:	Diploma 1
D2	:	Diploma 2
D3	:	Diploma 3
D4	:	Diploma 4
DAK	:	Dana Alokasi Khusus
DAS	:	Daerah Aliran Sungai
DAU	:	Dana Alokasi Umum
DBD	:	Demam Berdarah

DI	: Daerah Irigasi
DIPERINDAGKOP & UKM	: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
DISHUBKOMINFO	: Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi
DISPORABUDPAR	: Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata
DKPP	: Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian
DPKA	: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset
dpl	: Di Atas Permukaan Laut
DPRK	: Dewan Perwakilan Rakyat Kota
DUK	: Daftar Urut Kepangkatan
Fisipol	: Fisiologi Politik
ha	: Hektar
HAM	: Hak Asasi Manusia
HGB	: Hak Guna Bangunan
HGU	: Hak Guna Usaha
HM	: Hak Milik
HP	: Hak Pakai
HP	: <i>Handphone</i>
HPL	: Hak Pengelolaan Lahan
ICT	: <i>Information Communication Technologies</i>
ILO	: <i>International Labour Organization</i>
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
IPTEK	: Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
K1	: Kategori Satu
K2	: Kategori Dua
K3	: Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan
KARIS	: Kartu Istri
KARPEG	: Kartu Pegawai
KARSU	: Kartu Suami
KB	: Keluarga Berencana
KBLI	: Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
KDH	: Kepala Daerah
KDRT	: Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Kesbangpol	: Kesatuan Bangsa dan Politik
KK	: Kepala Keluarga
KKN	: Kolusi Korupsi dan Nepotisme
km	: Kilometer
KN	: Kementerian Negara
KP2T	: Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
KUA	: Kebijakan Umum Anggaran
LKIP	: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
LPM	: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
LPPD	: Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat

MA	:	Madrasah Aliyah
MCK	:	Mandi Cuci Kakus
MDG's	:	<i>Millenium Development Goals</i>
MI	:	Madrasah Ibtidaiyah
mm	:	Milimeter
MPU	:	Majelis Permusyawaratan Ulama
MTs	:	Madrasah Tsanawiyah
Nas	:	Nasional
NIK	:	Nomor Induk Kependudukan
NTP	:	Nilai Tukar Petani
OKP	:	Organisasi Kepemudaan
Ormas	:	Organisasi Kemasyarakatan
ORSOSPOL	:	Organisasi Sosial dan Politik
PAD	:	Pendapatan Asli Daerah
PAUD	:	Pendidikan Anak Usia Dini
PBB	:	Pajak Bumi dan Bangunan
PDB	:	Produk Domestik Bruto
PDRB	:	Produk Domestik Regional Bruto
Permendagri	:	Peraturan Menteri Dalam Negeri
PKB	:	Penyuluh Keluarga Berencana
PKH	:	Program Keluarga Harapan
PKK	:	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
PLKB	:	Petugas Lapangan Keluarga Berencana
PLN	:	Perusahaan Litrik Negara
PMDN	:	Penanaman Modal DaLam Negeri
PMKS	:	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
PNS	:	Pegawai Negeri Sipil
Pol WH	:	Polisi Wilayahul Hisbah
Polindes	:	Pos Bersalin Desa
Posyandu	:	Pos Pelayanan Terpadu
PP	:	Peraturan Pemerintah
PPAS	:	Prioritas Plafon Anggaran Sementara
PPh	:	Pajak Penghasilan
PUS	:	Pasangan Usia Subur
Puskesmas	:	Pusat Kesehatan Masyarakat
Pustu	:	Puskesmas Pembantu
RAPBK	:	Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota
Renstra	:	Rencana Strategis
RKA	:	Rencana Kerja Anggaran
RKA-PPKD	:	Rencana Kerja Anggaran Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah
RKA-SKPD	:	Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKP	:	Rencana Kerja Pemerintah
RKPD	:	Rencana Kerja Pembangunan Daerah
RKPK	:	Rencana Kerja Pembangunan Kota
RPJM	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah

RPJMK	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota
RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJP	:	Rencana Pembangunan Jangka Panjang
RSUD	:	Rumah Sakit Umum Daerah
RT	:	Rumah Tangga
RTH	:	Ruang Terbuka Hijau
RTR	:	Rencana Tata Ruang
RTRW	:	Rencana Tata Ruang Wilayah
S1	:	Strata 1
S2	:	Strata 2
S3	:	Strata 3
Satpol PP	:	Satuan Polisi Pamong Praja
Satpol PP & WH	:	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
SD	:	Sekolah Dasar
SDA	:	Sumber Daya Alam
SDM	:	Sumber Daya Manusia
SK	:	Surat Keputusan
SKPK	:	Satuan Kerja Perangkat Kota
SLTA	:	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
SLTP	:	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
SMA	:	Sekolah Menengah Atas
SMK	:	Sekolah Menengah Kejuruan
SOP	:	Standar Operasional Prosedur
SPAL	:	Saluran Pembuangan Air Limbah
SPM	:	Standar Pelayanan Minimal
SPPN	:	Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
SWOT	:	<i>Strength, Weakness, Opportunity, Threat</i>
TASPEN	:	Tabungan Asuransi Pegawai Negeri
TBC	:	<i>Tuberculosis</i>
TPA	:	Tempat Pembuangan Akhir
TPAK	:	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPD	:	Total Penerimaan Daerah
TPS	:	Tempat Pembuangan Sampah
TPT	:	Tingkat Pengangguran Terbuka
UCI	:	<i>Universal Child Immunization</i>
UGM	:	Universitas Gajah Mada
UKBM	:	Upaya Kesehatan Bersumber Daya Manusia
UKM	:	Usaha Kecil dan Menengah
UMKM	:	Usaha Mikro Kecil dan Menengah
UN	:	Ujian Nasional
UNDP	:	<i>United Nations Development Programme</i>
UU	:	Undang-Undang
UUPA	:	Undang-Undang Pemerintah Aceh
WH	:	Wilayatul Hisbah
WTP	:	Wajar Tanpa Pengecualian

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR SINGKATAN	i
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR GRAFIK	viii
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-2
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-4
1.4. Sistematika Penulisan.....	I-5
1.5. Maksud dan Tujuan.....	I-7
BAB II GAMBARAN UMUM KOTA	II-1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-13
2.3. Aspek Pelayanan Umum	II-29
2.4. Aspek Daya Saing Daerah	II-74
BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN	III-1
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu.....	III-2
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III-9
3.3. Kerangka Pendanaan	III-16
BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS	IV-1
4.1. Permasalahan dan Tantangan Pembangunan.....	IV-1
4.2. Isu-Isu Strategis.....	IV-9
BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN	V-1
5.1. Visi	V-1
5.2. Misi.....	V-2
5.3. Tujuan dan Sasaran	V-3
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	VI-1
6.1. Strategi Pembangunan	VI-1
6.2. Rumusan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Langsa	VI-4
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VII-1
BAB VIII INDIKASI PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN	VIII-1
8.1. Indikasi Program Prioritas	VIII-1
8.2. Pendanaan	VIII-2
BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH	IX-1
BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAEDAH PELAKSANAAN ..	X-1

10.1. Pedoman Transisi.....	X-1
10.2. Kaedah Pelaksanaan	X-1
BAB XI PENUTUP.....	XI-1

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.1	Hubungan RPJM Kota Langsa dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-4
Gambar 2.1	Peta Adminstrasi Kota Langsa	II-1
Gambar 2.2	Peta Ketinggian Kota Langsa	II-4
Gambar 2.3	Peta Kemiringan Kota Langsa.....	II-5
Gambar 2.4	Peta Klimatologi/Curah Hujan/Iklim.....	II-5
Gambar 2.5	Peta Penggunaan Lahan Kota Langsa.....	II-7
Gambar 2.6	Peta Rawan Bencana Kota Langsa.....	II-11

DAFTAR GRAFIK

		Halaman
Grafik 2.1	Jumlah Penduduk Kota Langsa Tahun 2012-2015	II-12
Grafik 2.2	Laju Pertumbuhan PDRB ADHB dan ADHK Kota Langsa Tahun 2011-2014	II-14
Grafik 2.3	Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK Kota Langsa Tahun 2011-2014	II-15
Grafik 2.4	Laju Implisit (Inflasi) Kota Langsa Tahun 2011-2014	II-17
Grafik 2.5	PDRB per Kapita ADHB Kota Langsa Tahun 2010-2014	II-18
Grafik 2.6	Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2012-2014 Kota Langsa	II-19
Grafik 2.7	Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2010-2014 Kota Langsa	II-20
Grafik 2.8	Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SD/SLTP/SLTA Tahun 2013-2015 Kota Langsa	II-21
Grafik 2.9	Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SD/SLTP/SLTA Tahun 2013-2015 Kota Langsa	II-22
Grafik 2.10	Perkembangan AKB dan AKHB Tahun 2012-2015 Kota Langsa	II-23
Grafik 2.11	Perkembangan Angka Harapan Hidup Tahun 2012-2015 Kota Langsa	II-24
Grafik 2.12	Rasio Penduduk yang Bekerja Tahun 2012-2014 Kota Langsa	II-26
Grafik 2.13	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Usia Pendidikan Dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) Tahun 2012-2015 Kota Langsa	II-30
Grafik 2.14	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Usia Pendidikan Menengah (usia 16-18 tahun) Tahun 2012-2015 Kota Langsa	II-31
Grafik 2.15	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik Tahun 2013-2015 Kota Langsa	II-38

Grafik 2.16	Banyaknya Jumlah Pelanggan Listrik PLN Tahun 2014 Kota Langsa	II-42
Grafik 2.17	Jumlah Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tahun 2013-2015	II-51
Grafik 2.18	Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan Tahun 2012-2014 Kota Langsa	II-54
Grafik 2.19	Persentase Penduduk Miskin Kota Langsa Tahun 2010-2014 Kota Langsa	II-60
Grafik 2.20	Garis Kemiskinan Tahun 2010-2014 Kota Langsa	II-61
Grafik 2.21	Jumlah Produksi Daging Ternak Tahun 2014 Kota Langsa	II-64
Grafik 2.22	Kontribusi Sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian Terhadap PDRB Tahun 2012-2014 Kota Langsa	II-67
Grafik 2.23	Kontribusi Sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu Terhadap PDRB Tahun 2012-2014 Kota Langsa	II-68
Grafik 2.24	Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian Terhadap PDRB Tahun 2012-2014 Kota Langsa ..	II-69
Grafik 2.25	Kontribusi Sektor Pengadaan Listrik Terhadap PDRB Tahun 2012-2014 Kota Langsa	II-70
Grafik 2.26	Kontribusi Sektor Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Terhadap PDRB Tahun 2012-2014 Kota Langsa	II-70
Grafik 2.27	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB Tahun 2012-2014 Kota Langsa	II-71
Grafik 2.28	Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor Terhadap PDRB Tahun 2012-2014 Kota Langsa ..	II-72
Grafik 2.29	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Tahun 2012-2014 Kota Langsa	II-73
Grafik 2.30	Nilai Konsumsi Rumah Tangga per Kapita ADHB Tahun 2012-2014 Kota Langsa	II-74
Grafik 3.1	Perkembangan Sumber Pendapatan Daerah Tahun 2012-2015 (Persen)	III-6
Grafik 3.2	Perbandingan Belanja Daerah Tahun 2012-2015 (Persen)	III-14

Grafik 3.3	Realisasi, Proyeksi dan Komposisi Keuangan Daerah Tahun 2012-2017	III-18
------------	---	--------

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Administrasi Kota Langsa Dirinci per Kecamatan dan Desa/Gampong	II-2
Tabel 2.2	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadataran Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Langsa Tahun 2015.....	II-13
Tabel 2.3	Jumlah Rumah Tangga Kota Langsa Menurut Kecamatan di Kota Langsa Tahun 2013-2014.....	II-13
Tabel 2.4	Nilai dan Kontribusi PDRB ADHK Kota Menurut Sektor Ekonomi Tahun 2010-2014.....	II-16
Tabel 2.5	Perkembangan Jumlah Balita Gizi Buruk Tahun 2012-2015 Kota Langsa.....	II-25
Tabel 2.6	Banyaknya Kegiatan Pelayanan Sertifikat Hak Atas Tanah yang Diterbitkan Tahun 2014 Kota Langsa ..	II-25
Tabel 2.7	Jumlah Tindak Kriminal Tahun 2012-2015 Kota Langsa	II-27
Tabel 2.8	Perkembangan Grup dan Gedung Kesenian Tahun 2012-2015 Kota Langsa.....	II-28
Tabel 2.9	Perkembangan Klub dan Gedung Olah Raga Tahun 2012-2015 Kota Langsa.....	II-28
Tabel 2.10	Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan Tahun 2012-2014 Kota Langsa.....	II-29
Tabel 2.11	Jumlah Pesantren, Ustadz dan Santri Tahun 2012-2014 Kota Langsa.....	II-33
Tabel 2.12	Rasio Posyandu Per Satuan Balita Tahun 2012-2015 Kota Langsa.....	II-33
Tabel 2.13	Jumlah Puskesmas, Poliklinik, Pustu, dan Polindes Tahun 2013-2015 Kota Langsa.....	II-34
Tabel 2.14	Jumlah Rumah Sakit Tahun 2012-2015 Kota Langsa	II-35
Tabel 2.15	Jumlah Dokter Tahun 2013-2015 Kota Langsa.....	II-36
Tabel 2.16	Jumlah Tenaga Medis per Satuan Penduduk Tahun 2013-2015 Kota Langsa.....	II-36
Tabel 2.17	Perkembangan Luas Irigasi Tahun 2013-2015 Kota Langsa	II-39

Tabel 2.18	Perkembangan Jumlah Masjid dan Meunasah Tahun 2014-2015 Kota Langsa	II-39
Tabel 2.19	Perkembangan Panjang Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar Tahun 2013-2015 Kota Langsa (km)	II-40
Tabel 2.20	Perkembangan Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor Tahun 2013-2015 Kota Langsa	II-41
Tabel 2.21	Perkembangan Rumah Tinggal Berakses Sanitasi Tahun 2013-2015 Kota Langsa	II-42
Tabel 2.22	Perkembangan Rumah Layak Huni Tahun 2013-2015 Kota Langsa	II-43
Tabel 2.23	Perkembangan Lingkungan Pemukiman Kumuh Tahun 2013-2015 Kota Langsa	II-43
Tabel 2.24	Perkembangan Indikator Urusan Perhubungan Tahun 2013-2015 Kota Langsa	II-47
Tabel 2.25	Penanganan Sampah Tahun 2012-2014 Kota Langsa	II-48
Tabel 2.26	Perkembangan Urusan Pertanahan Tahun 2012-2014 Kota Langsa	II-49
Tabel 2.27	Perkembangan Pelayanan Administrasi Kependudukan Tahun 2013-2015 Kota Langsa	II-50
Tabel 2.28	Perkembangan Partisipasi Perempuan Tahun 2013-2015 Kota Langsa	II-50
Tabel 2.29	Perkembangan Rasio Akseptor KB Tahun 2013-2015 Kota Langsa	II-52
Tabel 2.30	Jumlah Panti Asuhan dan PMKS yang Tertangani Tahun 2013-2015 Kota Langsa	II-53
Tabel 2.31	Perkembangan Indikator Usaha Kecil Menengah dan Koperasi Tahun 2013-2015 Kota Langsa	II-55
Tabel 2.32	Perkembangan Sarana Penyelenggaraan Seni Budaya Tahun 2012-2015 Kota Langsa	II-55
Tabel 2.33	Perkembangan Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2013-2015 Kota Langsa	II-56
Tabel 2.34	Perkembangan Indikator Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun 2014-2015 Kota Langsa	II-57

Tabel 2.35	Jumlah Polisi Pamong Praja, Personil Wilayahul Hisbah, Berbagai Pelanggaran dan Penyelesaian Ketertiban Tahun 2013-2015 Kota Langsa	II-58
Tabel 2.36	Perkembangan Indikator Pelaksanaan Syariat Islam Tahun 2013-2015 Kota Langsa	II-60
Tabel 2.37	Perkembangan Indikator Kepegawaian Tahun 2013-2015 Kota Langsa	II-62
Tabel 2.38	Perkembangan Luas Tanam, Luas Panen, dan Produksi Tanaman Pangan Tahun 2014 Kota Langsa.....	II-63
Tabel 2.39	Perkembangan Indikator Kepustakaan Tahun 2013-2015 Kota Langsa	II-67
Tabel 2.40	Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2012-2014 Provinsi Aceh	II-75
Tabel 2.41	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Tahun 2013-2015 Kota Langsa	II-76
Tabel 2.42	Pola Ruang Eksisting Kota Langsa	II-77
Tabel 2.43	Jumlah Bank dan Kantor Tahun 2013 Bank Kota Langsa.....	II-78
Tabel 2.44	Jumlah Hotel, Kamar dan Tempat Tidur pada Akomodasi Tahun 2015 Kota Langsa	II-79
Tabel 2.45	Perkembangan Indikator Pelayanan Perizinan Tahun 2013-2015 Kota Langsa	II-80
Tabel 2.46	Rasio Lulusan S1/S2/S3 . Tahun 2012-2014 Kota Langsa	II-80
Tabel 3.1	Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2012-2015	III-4
Tabel 3.2	Kontribusi Sumber Pendapatan Daerah Tahun 2012-2015	III-5
Tabel 3.3	Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal	III-7
Tabel 3.4	Derajat Desentralisasi Tahun 2012 - 2015 Kota Langsa.....	III-7
Tabel 3.5	Pengelompokan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2007 Untuk Kabupaten dan Kota	III-8
Tabel 3.6	Perkembangan Tingkat Kemandirian Tahun 2012 - 2015 Kota Langsa	III-9

Tabel 3.7	Realisasi Belanja Daerah Tahun 2012-2015.....	III-12
Tabel 3.8	Proporsi Realisasi Belanja Daerah Tahun 2012-2015	III-13
Tabel 3.9	Kondisi Pembiayaan Daerah Tahun 2012-2015.....	III-16
Tabel 3.10	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Daerah Tahun 2012-2015.....	III-16
Tabel 3.11	Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2012-2017	III-19
Tabel 3.12	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2012-2017	III-20
Tabel 3.13	Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2012-2017	III-21
Tabel 5.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....	V-3
Tabel 6.1	Strategi dan Arah Kebijakan	VI-5
Tabel 7.1	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kota Langsa.....	VII-2
Tabel 8.1	Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Kota Langsa Tahun 2013-2016	VIII-3
Tabel 8.2	Perkiraan Pagu Dana Indikatif Menurut Urusan dan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2013-2016	VIII-22
Tabel 8.3	Perkiraan Pagu Dana Indikatif Menurut Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2013-2016	VIII-29
Tabel 8.4	Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Kota Langsa Tahun 2017	VIII-40
Tabel 8.5	Perkiraan Pagu Dana Indikatif Menurut Urusan dan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017	VIII-67
Tabel 8.6	Perkiraan Pagu Dana Indikatif Menurut Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2017	VIII-72
Tabel 9.1	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	IX-3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa untuk menjamin terselenggaranya otonomi daerah maka diperlukan suatu sistem perencanaan pembangunan nasional dan sistem perencanaan pembangunan daerah yang mengacu pada penyelenggaraan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan harus berdasarkan pada azas demokrasi yang di dalamnya terkandung kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, partisipasi, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan, pemerataan dan kesatuan nasional. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan, perencanaan pembangunan daerah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Langsa Tahun 2012-2017 merupakan dokumen perencanaan komprehensif lima tahunan yang disusun berlandaskan visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota Kota Langsa. RPJM Kota Langsa Tahun 2012-2017 memuat program pembangunan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya, baik lintas perangkat daerah maupun kewilayahan, dengan berbagai sumber pendanaan.

Berdasarkan Pasal 240 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, terhadap RPJM Kota Langsa Tahun 2012-2017 perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi dalam rangka menyesuaikan dengan kebijakan nasional.

Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Langsa Tahun 2012-2017, RPJM Kota Langsa Tahun 2012-2017 perlu dilakukan perubahan sebagai akibat adanya penyesuaian substansi peraturan daerah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah dan terdapat perubahan materi peraturan daerah terkait dengan kebijakan nasional.

Materi muatan perubahan Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Langsa Tahun 2012-2017 berdasarkan hasil evaluasi serta review didasarkan pada pertimbangan :

1. Menyelaraskan target-target tahunan indikator kinerja daerah dengan perkembangan hasil pembangunan;
2. Menyesuaikan prediksi keuangan daerah dengan asumsi-asumsi keuangan terkini;
3. Memperjelas definisi setiap pernyataan indikator kinerja daerah;
4. Mencantumkan prakiraan kebutuhan pendanaan sampai dengan tahun 2017 pada setiap tahun dan juga pada setiap program sesuai dengan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RPJM Kota Langsa Tahun 2012-2017;
5. Menyesuaikan nomenklatur organisasi perangkat daerah dengan kondisi terkini.

Hasil evaluasi dan review menggambarkan bahwa realisasi capaian target yang ingin dicapai masih jauh dari yang diharapkan dan untuk mengejar target yang sudah direncanakan perlu dilakukan penyesuaian program/kegiatan baik yang sudah dilaksanakan maupun yang belum dilaksanakan dalam periode dua tahun mendatang.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Adapun dasar hukum yang mendasari evaluasi dan penyesuaian RPJM Kota Langsa Tahun 2012-2017 sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

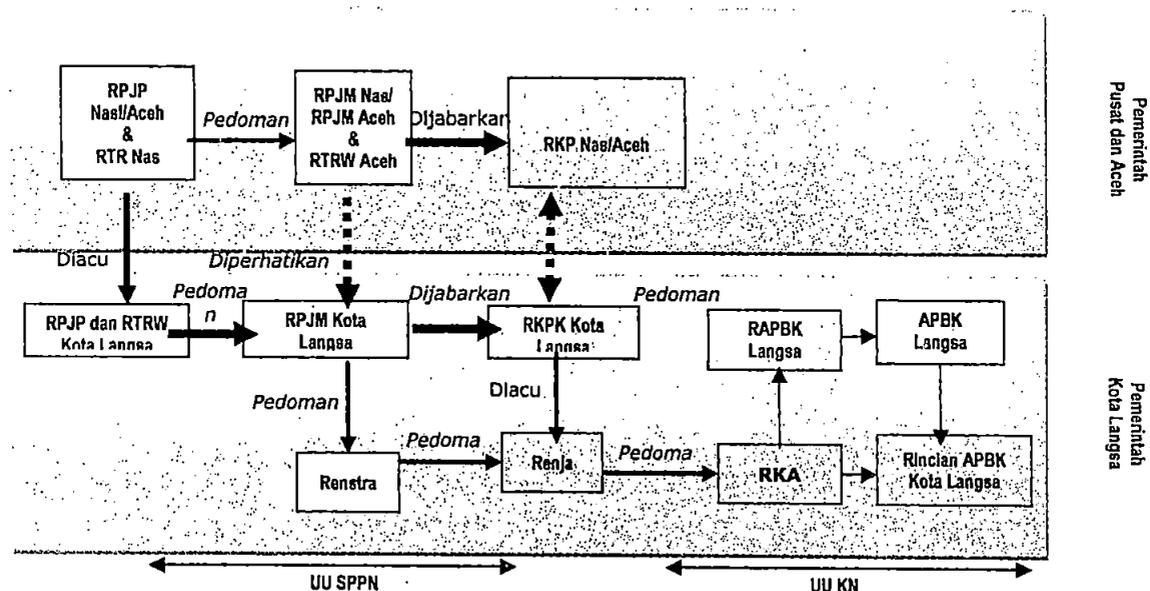
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksana Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
13. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2012-2017;
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 70 Tahun 2012 tentang RPJMA Tahun 2012-2017;
15. Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Langsa Tahun 2007-2027;
16. Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Langsa Tahun 2012-2017 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Langsa Tahun 2012-2017;
17. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Langsa Tahun 2012-2032;
18. Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Sebagai dokumen perencanaan yang taktis dan komprehensif, RPJM Kota Langsa Tahun 2012-2017 mempunyai kaitan yang erat dengan berbagai dokumen perencanaan, baik nasional maupun daerah. Dalam lingkup perencanaan nasional, revisi RPJM Kota Langsa Tahun 2012-2017 disusun dengan memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2010-2014 dan RPJM Nasional Tahun 2015-2019. Sebagai bahagian dari Provinsi Aceh, maka RPJM Kota Langsa juga memperhatikan RPJM Aceh Tahun 2012-2017. Sementara dalam lingkup Pemerintah Kota Langsa, RPJM disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Langsa Tahun 2007-2027 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Langsa Tahun 2012-2032.

Selanjutnya, RPJM Kota Langsa menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kota (Renstra perangkat daerah). Renstra perangkat daerah ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dan bersifat indikatif.

Gambar 1.1
Hubungan RPJM Kota Langsa dengan
Dokumen Perencanaan Lainnya



RPJM Kota Langsa juga dijabarkan ke dalam perencanaan tahunan kota berupa Rencana Kerja Pembangunan Kota (RKPK). RKPK memuat rancangan kerangka ekonomi kota, prioritas pembangunan kota, rencana

kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPJM Kota Langsa Tahun 2012-2017 berpedoman pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Adapun sistematika penulisan RPJM Kota Langsa sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KOTA

Memuat antara lain aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Menyajikan kinerja keuangan, kebijakan pengelolaan keuangan, dan kerangka pendanaan.

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Dirumuskan permasalahan dan tantangan pembangunan serta isu-isu strategis.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Visi dan Misi tetap dan tidak berubah, tujuan dan sasaran pembangunan perlu dilakukan penyederhanaan dan disesuaikan dengan kondisi terkini.

Memuat visi, misi, tujuan pembangunan, dan sasaran pembangunan kota selama lima tahun ke depan.

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisikan strategi pembangunan, dan arah kebijakan pembangunan kota yang harus ditempuh untuk pencapaian visi dan misi.

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat arah kebijakan yang bersifat umum untuk semua sektor pembangunan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan bagi seluruh perangkat daerah yang ada di kota.

BAB VIII INDIKASI PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

Menyajikan indikasi program prioritas dan kebutuhan pendanaan selama lima tahun ke depan.

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Memuat penetapan indikator kinerja yang meliputi pencapaian hasil penyelenggaraan pemerintahan dalam hubungannya dengan hasil pembangunan daerah pada setiap akhir periode perencanaan pembangunan.

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAEDAH PELAKSANAAN

Bab ini memuat kaidah pedoman transisi selama rentang waktu berakhirnya masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota pada tahun 2017, dan kaedah pelaksanaan seluruh program/kegiatan perangkat daerah yang harus mengarah kepada pencapaian visi dan misi.

BAB XI PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari RPJM yang menguraikan beberapa hal penting sebagai penutup dan saran-saran untuk kesempurnaan pelaksanaan RPJM ini.

1.5 Maksud dan Tujuan

1.5.1. Maksud

Review dan Perubahan RPJM Kota Langsa Tahun 2012-2017 disusun dengan maksud :

1. Menyediakan sebuah acuan resmi bagi pemerintah (eksekutif) dan DPRK (legislatif) di dalam menyusun Renstra perangkat daerah, RKPK, Renja perangkat daerah, serta APBK sekaligus menjadi acuan penentuan pilihan program pembangunan tahunan yang dibahas dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan kota secara berjenjang;
2. RPJM Kota Langsa Tahun 2012 - 2017 telah disahkan melalui Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Langsa Tahun 2012-2017 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Langsa Tahun 2012-2017, namun dalam pelaksanaannya terdapat pembentukan organisasi perangkat daerah Kota Langsa yang baru, maka perlu dilakukan penyesuaian kembali.

1.5.2. Tujuan

Tujuan review dan perubahan RPJM Kota Langsa Tahun 2012-2017 adalah:

1. Penyesuaian kembali dengan struktur organisasi perangkat daerah Kota Langsa yang baru sebagaimana telah disahkan melalui Qanun Kota Langsa Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa sebagai akibat dari terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
2. Hasil penyesuaian RPJM Kota Langsa ini akan menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Kota Langsa, dalam bentuk dokumen Rencana Kerja Pembangunan Kota (RKPK), sebagai landasan penyusunan KUA-PPAS dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (RAPBK).

BAB II

GAMBARAN UMUM KOTA

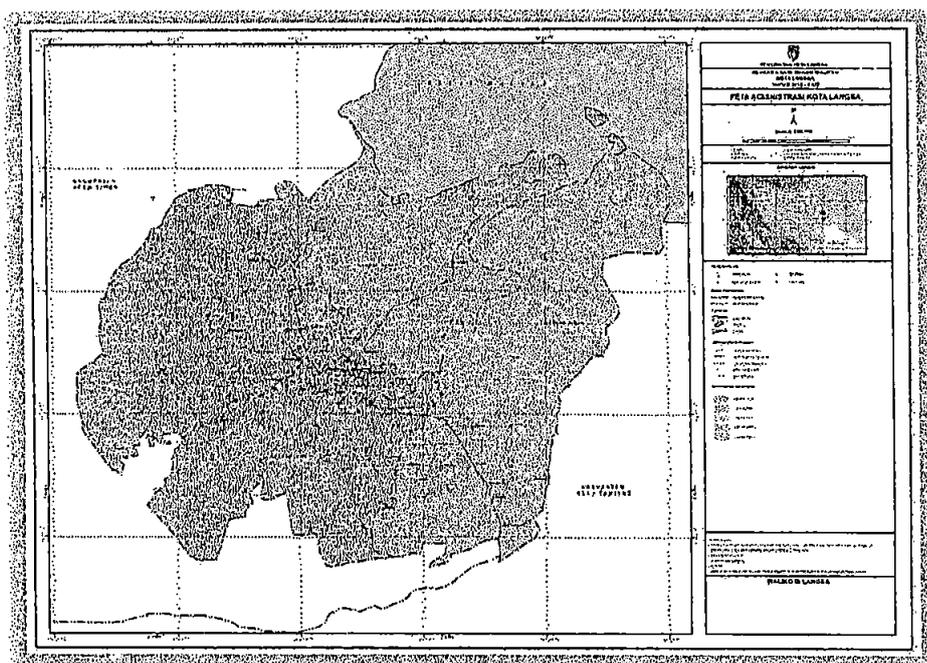
2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Geografi

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Letak geografis Kota Langsa berada pada koordinat $04^{\circ}24'35.68''$ - $04^{\circ}33'47.03''$ Lintang Utara dan $97^{\circ}53'14.59''$ - $98^{\circ}04'42.16''$ Bujur Timur, yang terdiri dari 5 kecamatan dan 66 gampong. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa, luas wilayah Kota Langsa adalah $262,41 \text{ km}^2$ dengan panjang garis pantai 16 km. Namun, dari hasil perhitungan citra satelit dan tapal batas Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa dan Aceh Tamiang, serta berdasarkan peta Provinsi Aceh/BRR, luas Kota Langsa adalah $23.982,93 \text{ ha}$, dengan panjang garis pantai 26 km.

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kota Langsa



Sumber : RTRW Kota Langsa Tahun 2012-2032

Adapun batas-batas administrasi Kota Langsa adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Selat Malaka;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Aceh Tamiang;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tamiang.

Tabel 2.1
Administrasi Kota Langsa Dirinci per Kecamatan dan Desa/Gampong

No	KECAMATAN	IBU KOTA KECAMATAN	DESA/GAMPONG
1.	Langsa Timur	Gampong Seuneubok Antara	Gampong Simpang Wie Gampong Buket Pulo Gampong Matang Panyang Gampong Matang Seutui Gampong Buket Rata Gampong Alue Pineung Gampong Alue Pineung Timue Gampong Alue Merbau Gampong Buket Meutuah Gampong Matang Cengai Gampong Cinta Raja Gampong Sukarejo Gampong Sungai Lueng Gampong Kapa Gampong Seuneubok Antara Gampong Buket Medang Ara
2.	Langsa Barat	Gampong Seuriget	Gampong Seuriget Gampong Serambi Indah Gampong PB. Teungoh Gampong PB. Beuramo Gampong Simpang Lhee Gampong Lhok Banie Gampong Matang Seulimeng Gampong Sungai Pauh Gampong Sungai Pauh Pusaka Gampong Sungai Pauh Tanjong Gampong Sungai Pauh Firdaus Gampong Telaga Tujuh Gampong Kuala Langsa
3.	Langsa Kota	Gampong Teungoh	Gampong Blang Seunibong Gampong Blang Gampong Alue Beurawe Gampong Teungoh Gampong Tualang Teungoh Gampong Mutia Gampong Daulat Gampong Gampong Jawa Gampong BP. Blang Pase Gampong Peukan Langsa
4.	Langsa Lama	Gampong Meurandeh	Gampong Pondok Kemuning Gampong Seulalah Gampong Seulalah Baru Gampong Pondok Pabrik Gampong Sidodadi Gampong Sidorejo Gampong Baro Gampong Meurandeh

No	KECAMATAN	IBU KOTA KECAMATAN	DESA/GAMPONG
			Gampong Meurandeh Tengah Gampong Meurandeh Dayah Gampong Meurandeh Aceh Gampong Sukajadi Kebun Ireng Gampong Asam Peutik Gampong Baroh Langsa Lama Gampong Batee Puteh
5.	Langsa Baro	Gampong Geudubang Aceh	Gampong Timbang Langsa Gampong Alue Dua Gampong Alue Bakaran Batee Gampong Birem Puntong Gampong Paya Bujuk Seulemak Gampong Pondok Kelapa Gampong Karang Anyar Gampong Paya Bujuk Tunong Gampong Geudubang Jawa Gampong Geudubang Aceh Gampong Sukajadi Makmur Gampong Lengkong

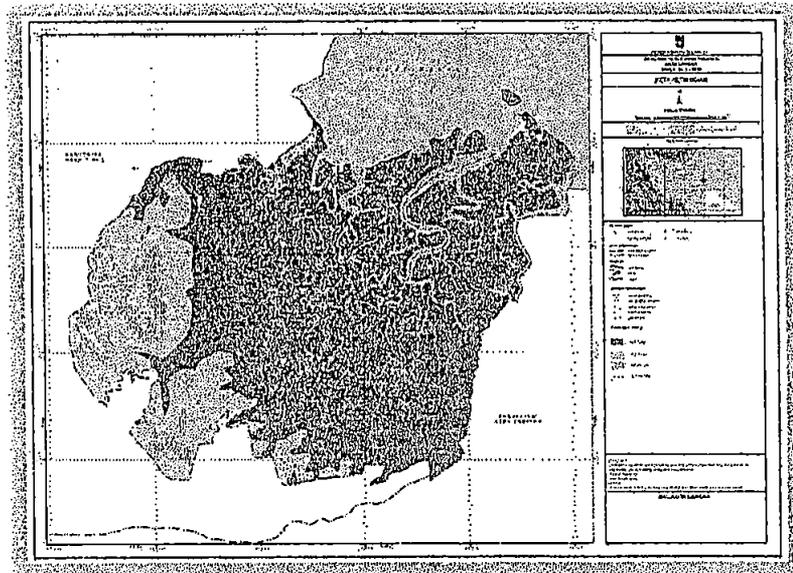
Sumber : RTRW Kota Langsa Tahun 2012-2032 (diolah)

Letak Kota Langsa yang berada di lintas jalan nasional di wilayah pantai timur Aceh juga merupakan peluang yang perlu dimanfaatkan secara optimal agar dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi terbesar di wilayah pantai timur Aceh, dengan memanfaatkan peluang strategis dari keberadaan daerah *hinterland* di sekitarnya. Selain itu, posisi Kota Langsa yang relatif dekat dengan perbatasan wilayah Sumatera Utara, memungkinkan kemitraan lintas daerah dalam menjalin transaksi perdagangan dan jasa serta pengembangan pariwisata. Karena itu, sebagai wujud upaya menjadikan Kota Langsa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan kota transit di wilayah pantai timur Aceh, akan diupayakan penyediaan infrastruktur maupun fasilitas layanan pendukung sektor perdagangan, jasa, dan pariwisata. Dengan demikian, fungsi keberadaan Kota Langsa sebagai kota transit diharapkan memberikan manfaat ganda (*multiplier effect*) dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi.

Posisi geografis Kota Langsa yang dikelilingi Selat Malaka tepatnya pada bagian utara, merupakan potensi dan peluang sangat besar untuk mewujudkan arus perputaran orang, barang, dan jasa melalui jalur laut, baik antar wilayah di pantai timur Aceh, pulau Sumatera, dan pulau-pulau lain di Indonesia. Peluang lainnya adalah menjalin aktivitas bisnis dan kegiatan perdagangan

internasional (ekspor-impor) dengan berbagai negara, seperti Malaysia, Singapura, dan lainnya. Hal tersebut sangat memungkinkan untuk diwujudkan, mengingat saat ini Kota Langsa telah memiliki fasilitas pelabuhan laut Kuala Langsa berikut dengan sejumlah infrastruktur penunjang yang relatif cukup memadai.

Gambar 2.2
Peta Ketinggian Kota Langsa

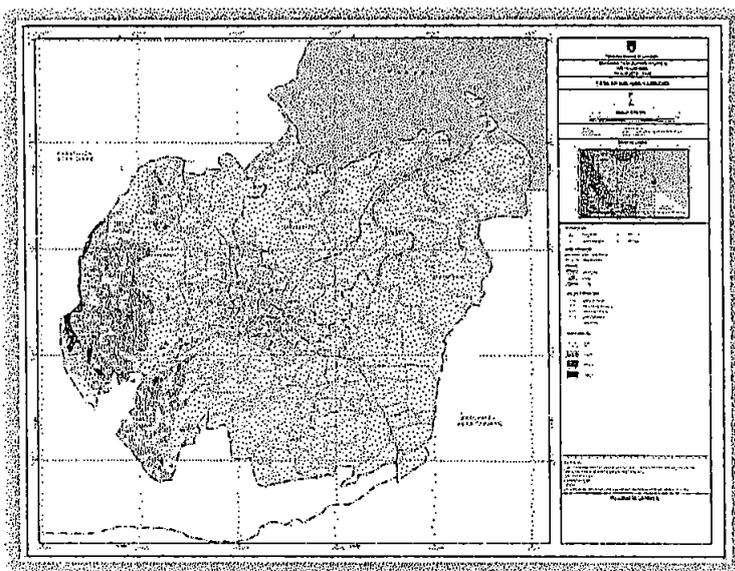


Sumber : RTRW Kota Langsa Tahun 2012-2032

2.1.1.2. Topografi

Kondisi topografi (ketinggian) Kota Langsa berkisar antara 0 - 25 meter di atas permukaan laut (dpl). Bentuk permukaan lahan (fisiografi), memiliki relief permukaan bumi yang cukup datar dengan kemiringan lahan antara 0 - 30%. Bentuk permukaan ini menandakan bahwa tingkat erosi relatif rendah, namun sangat rentan terhadap genangan khususnya pada saat terjadinya pasang dan gelombang air laut terutama pada wilayah bagian utara Kecamatan Langsa Barat atau pesisir pantai.

Gambar 2.3
Peta Kemiringan Kota Langsa

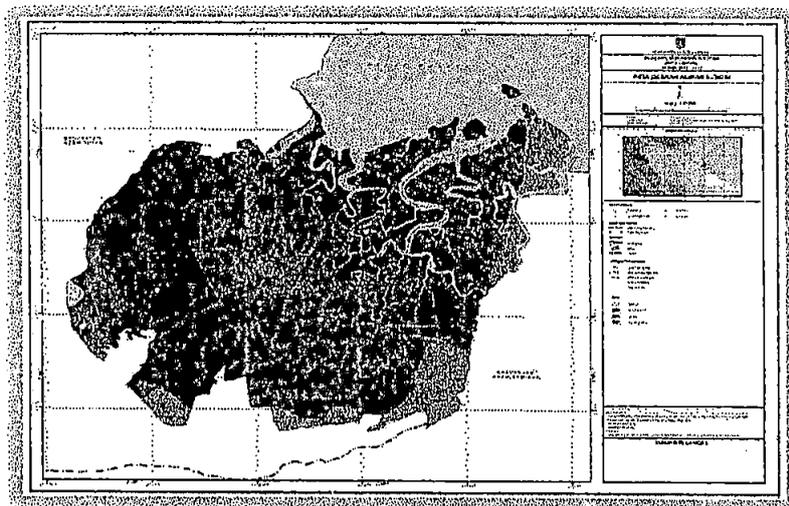


Sumber : RTRW Kota Langsa Tahun 2012-2032

2.1.1.3. Klimatologi

Kota Langsa memiliki iklim tropis yang dipengaruhi oleh iklim Muson sehingga menyebabkan adanya musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan terjadi dari bulan Mei sampai bulan Desember dengan curah hujan maksimal bulan September dan Oktober. Sedangkan musim kemarau terjadi dari bulan Januari sampai dengan bulan April dengan kemarau maksimal pada bulan Maret dan April. Curah hujan rata-rata di Kota Langsa 2.000 mm/tahun dengan rata-rata hari hujan 4 hari, sedangkan temperatur rata-rata 28°C - 32°C dengan kelembaban udara rata-rata 80%.

Gambar 2.4
Peta Klimatologi/Curah Hujan/Iklim



Sumber : RTRW Kota Langsa Tahun 2012-2032

2.1.1.4. Hidrologi

Sistem hidrologi di Kota Langsa terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu sistem hidrologi alami dan sistem hidrologi buatan. Sistem hidrologi alami terdiri dari sungai, sumur dan air tanah sedangkan sistem hidrologi buatan yaitu drainase. Kota Langsa memiliki satu sungai yaitu Krueng Langsa dengan warna air kekuning-kuningan.

Berdasarkan lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 390 Tahun 2007, Kota Langsa memiliki Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Lintas Kabupaten yaitu D.I. Paya Ketenggar/Alue Merbau. Sedangkan untuk Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah Kota, yaitu :

1. Daerah Irigasi Alue Jreng
2. Daerah Irigasi Asam Peutek
3. Daerah Irigasi Bukit Meutuah
4. Daerah Irigasi Matang Seutui
5. Daerah Irigasi Medang Ara
6. Daerah Irigasi Merandeh
7. Daerah Irigasi Simpang Wie
8. Daerah Irigasi Suka Makmur

2.1.1.5. Penggunaan Lahan

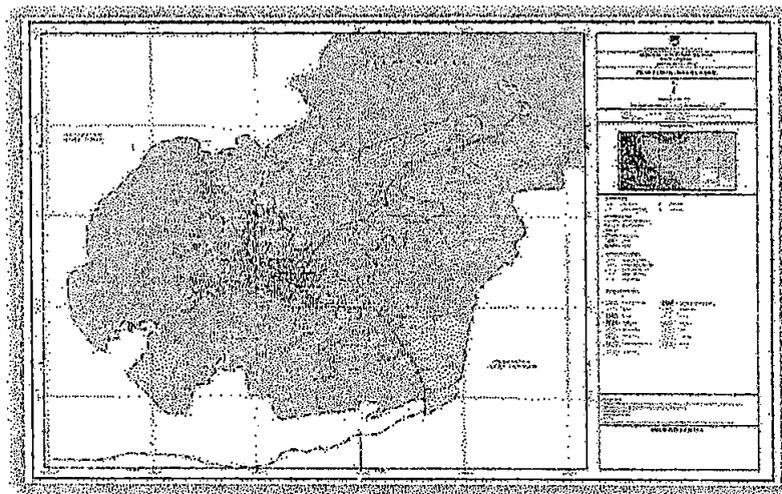
Secara umum Kota Langsa berbentuk konsentrik, hal ini disebabkan oleh aktivitas perkotaan yang berkembang dan terdistribusi oleh sistem jaringan jalan dan aktivitas perkotaan, seperti kegiatan perdagangan, pemerintahan, perindustrian dan kegiatan perkotaan lainnya, seperti :

- Sebelah utara, dibentuk oleh kegiatan industri dan jaringan jalan utama menuju ke kawasan pelabuhan;
- Sebelah selatan, dibentuk oleh sistem jaringan jalan utama dan beberapa fasilitas perkotaan lainnya, seperti : pendidikan, pemerintahan, tempat pembuangan akhir sampah dan perkebunan;
- Pusat kota, dibentuk oleh kegiatan *Central Bisnis Distric* (CBD), pemerintahan dan kesehatan;

- Sebelah barat, dibentuk oleh jaringan jalan alternatif dan kegiatan pemerintahan disekitarnya, industri ringan, sedang dan pergudangan;
- Sebelah timur, dibentuk oleh kegiatan pertanian.

Landskap Kota Langsa dicirikan oleh kondisi topografi yang tergantung mulai dari daerah pantai pada bagian utara kota sampai pada perbukitan pada bagian barat dan selatan kota. Disamping itu, landskap kota dicirikan juga oleh alur Sungai/Krueng Langsa yang mengalir pada bagian selatan kota serta kombinasi vegetasi berupa tanaman perkebunan kelapa sawit, karet dan tanaman pekarangan. Kondisi topografi dan keragaman vegetasi merupakan unsur fisik alam yang paling potensial bagi pengembangan estetika lingkungan kota. Secara sederhana landskap Kota Langsa dapat dikelompokkan pada beberapa tipe spesifik.

Gambar 2.5
Peta Penggunaan Lahan Kota Langsa



Sumber : RTRW Kota Langsa Tahun 2012-2032

a. Landskap Pedesaan

Kondisi landskap pedesaan sebagian besar terdapat pada daerah-daerah pinggiran kota terutama sepanjang jalan utama Medan - Banda Aceh serta pada bagian barat kota. Landskap tipe ini ditandai oleh dominannya lahan persawahan dan daerah perkebunan kelapa sawit dan karet. Perumahan sepanjang jalan masih bergaya sederhana dengan pagar tanaman khas pedesaan.

b. Lanskap Pantai Pesisir

Kondisi lanskap pantai/pesisir terdapat pada kawasan sepanjang jalan menuju pelabuhan Kuala Langsa. Pada kawasan ini dicirikan oleh sederetan kawasan permukiman nelayan dengan kondisi kumuh, dengan latar belakang daerah rawa-rawa dan daerah tambak udang yang dilengkapi dengan komunitas literal hutan bakau yang mulai terancam punah akibat berkembangnya kawasan permukiman dan tambak udang. Vegetasi hutan bakau tersebut merupakan tanaman asli dan hasil usaha penghijauan/rehabilitasi kawasan mangrove.

c. Lanskap Pusat Kota

Kondisi lanskap pada kawasan pusat kota ditandai oleh dua unsur utama fisik buatan yaitu jalan dan bangunan. Jalan Ahmad Yani merupakan koridor pergerakan utama yang paling penting, sehingga menjadi "*landmark*" Kota Langsa. Penataan pola hijau di sepanjang jalan terus dilakukan hingga saat ini.

Alun-alun dan taman kota di depan Pendopo Walikota merupakan daerah "*open space*" yang cukup menonjol di kawasan pusat kota. Salah satu bangunan yang cukup potensial menjadi "*landmark*" kota, seperti misalnya "*Gedung Joeang*" yang mempunyai nilai sejarah dan arsitektur yang cukup tinggi. Di Kota Langsa terdapat sejumlah monumen/relief dan bangunan artistik adat Aceh, yang umumnya diletakkan pada perapatan jalan sebagai monumen peringatan atau ornamen jalan.

Menara Masjid Raya Langsa merupakan *landmark* lainnya Kota Langsa. Hal ini disebabkan karena bangunan tersebut memiliki ketinggian yang sangat menonjol dibandingkan dengan bangunan lain, selain itu mesjid sangat sesuai dengan kultur masyarakat Kota Langsa yang mayoritas menganut agama Islam.

Adapun tutupan lahan di Kota Langsa, adalah sebagai berikut :

- Kecamatan Langsa Barat : mayoritas penggunaan lahan adalah rawa/tambak dan berada hampir di seluruh wilayah kecamatan. hutan mangrove terletak di sebelah utara kecamatan, dan permukiman berada di sebelah selatan kecamatan berbatasan dengan sebelah utara Kota Langsa,

dan terkonsentrasi di sepanjang jalan utama (jalan lintas Medan - Banda Aceh);

- Kecamatan Langsa Kota : mayoritas penggunaan lahan adalah untuk kawasan perdagangan dan jasa. Konsentrasi kegiatan perdagangan dan jasa terutama berlangsung di Kecamatan Langsa Kota yang merupakan pusat Kota Langsa. Selain itu penggunaan lahan lainnya adalah permukiman, perkantoran, pendidikan, yang hampir keseluruhannya terpusat di Jalan Ahmad Yani;
- Kecamatan Langsa Timur : penggunaan di sebelah barat kecamatan berupa lahan rawa, sawah, dan perkebunan. Di sebelah selatan berupa sawah dan perkebunan, sedangkan permukiman dan kegiatan perdagangan dan jasa terkonsentrasi di sepanjang arteri primer (jalan Langsa - Medan). Untuk kawasan permukiman tersebar juga di daerah-daerah yang menjadi kantong-kantong sentra produksi pertanian dan perkebunan;
- Kecamatan Langsa Lama : dominasi penggunaan lahannya adalah perkebunan sawit dan karet. Hampir seluruh lahan yang ada dimanfaatkan untuk tanaman karet dan sawit utamanya oleh BUMN PTP I Nusantara. Di sebelah selatan kecamatan terdapat hutan lindung darat, tempat pembuangan akhir sampah yang terletak di sebelah barat Gampong Pondok Pabrik sampai ke sebelah timur Gampong Pondok Kemuning. Di sebelah barat daya kecamatan tepatnya di Gampong Pondok Kemuning terdapat hutan produksi. Lokasi permukiman berada di sebelah utara kecamatan tepatnya di sepanjang jalan Ahmad Yani;
- Kecamatan Langsa Baro : dominasi penggunaan lahan berupa perkebunan sawit dan karet, serta diantara perkebunan sawit dan karet terdapat hutan produksi, yang berada di Gampong Geudubang Aceh. Lokasi permukiman sebelah timur kecamatan yaitu disepanjang jalan Ahmad Yani.

2.1.1.6. Kawasan Rawan Bencana

Kondisi topografi lahan di Kota Langsa yang sebagian besar merupakan dataran rendah dinilai memiliki potensi dan sangat rawan bencana alam banjir. Wilayah-wilayah yang dinilai rawan bencana banjir, terutama seperti di kawasan pusat perkotaan, kawasan dengan kondisi drainase yang kurang baik, serta kawasan yang berada di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS). Pada umumnya bencana banjir di perkotaan kerap terjadi ketika intensitas curah hujan tinggi, sementara drainase tidak berfungsi secara optimal akibat terbatasnya daya tampung debit air. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan serta membuang sampah sembarangan turut pula menjadi penyebab tersumbatnya saluran drainase sehingga air meluap ke jalan dan menggenangi kawasan permukiman warga kota. Bencana banjir harus ditanggulangi secara komprehensif mengingat dampaknya yang buruk terhadap aktivitas sosial-ekonomi, disamping juga rusaknya infrastruktur kota.

Kawasan rawan bencana yang terdapat di Kota Langsa terdiri atas:

a. Kawasan rawan gelombang pasang meliputi :

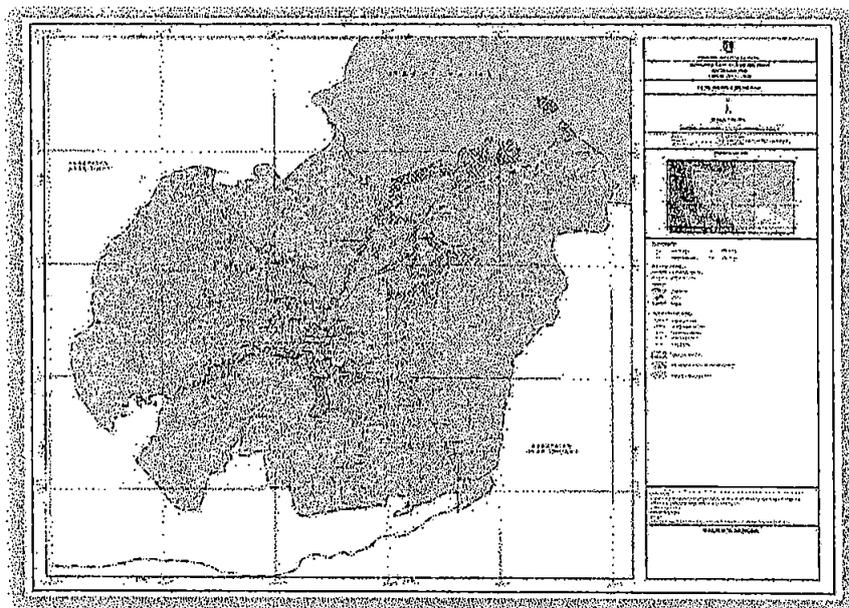
1. Gelombang pasang dengan intensitas tinggi terdapat di Gampong Telaga Tujuh, seluas 151,96 ha dan Kuala Langsa seluas 707,53 ha di Kecamatan Langsa Barat; dan
2. Gelombang pasang dengan intensitas sedang terdapat di Gampong Sungai Pauh seluas 96,53 ha di Kecamatan Langsa Barat, Gampong Baroh Langsa Lama seluas 32,60 ha di Kecamatan Langsa Lama, Gampong Sungai Lueng seluas 12,95 ha di Kecamatan Langsa Timur; dan
3. Gelombang pasang dengan intensitas rendah terdapat di Gampong Matang Seulimeng seluas 2,08 ha di Kecamatan Langsa Barat.

b. Kawasan rawan banjir dengan luas 378,54 ha, meliputi :

1. Gampong Paya Bujok Seuleumak, seluas 12,14 ha dan Gampong Birem Puntong seluas 17,86 ha yang berada di Kecamatan Langsa Baro;

2. Gampong Teungoh, seluas 37,48 ha dan Gampong Jawa seluas 18,09 ha yang berada di Kecamatan Langsa Kota; dan
3. Gampong Pondok Kemuning, seluas 74,19 ha, Gampong Seulalah seluas 30,40 ha, Gampong Pondok Pabrik seluas 9,50 ha, Gampong Sidodadi seluas 7,18 ha, Gampong Sidorejo seluas 20,41 ha, Gampong Baroh Langsa Lama seluas 32,16 ha, Gampong Baro seluas 16,51 ha dan Gampong Meurandeh 101,90 ha yang berada di Kecamatan Langsa Lama.

Gambar 2.6
Peta Rawan Bencana Kota Langsa



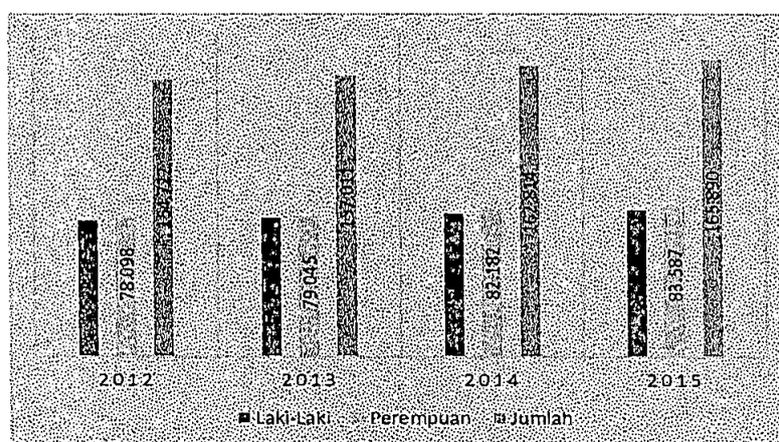
Sumber : RTRW Kota Langsa Tahun 2012-2032

2.1.2. Demografi

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Pertumbuhan penduduk Kota Langsa secara umum dipengaruhi oleh tiga komponen, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Sebagai kota yang berada di wilayah lintas utama Sumatera, Kota Langsa memiliki karakteristik penduduk yang heterogen. Pada tahun 2012, jumlah penduduk Kota Langsa adalah sebanyak 154.722 jiwa, jumlah ini terus meningkat secara

signifikan hingga mencapai sebanyak 165.890 jiwa pada tahun 2015. Distribusi dan sebaran jumlah penduduk kota relatif belum merata di setiap wilayah kecamatan. Pada tahun 2015, tercatat hampir 28,09 persen atau sebanyak 46.599 jiwa penduduk kota tinggal di Kecamatan Langsa Baro. Selanjutnya diikuti penduduk yang tinggal di wilayah Kecamatan Langsa Kota, yaitu sebanyak 40.178 jiwa atau 24,21 persen. Sedangkan jumlah penduduk yang berdomisili di Kecamatan Langsa Barat berjumlah 34.230 jiwa atau sekitar 20,63 persen, selebihnya, jumlah penduduk Kota Langsa terkonsentrasi di wilayah Kecamatan Langsa Lama dan Langsa Timur, masing-masing sebanyak 29.702 jiwa (17,90 persen) dan 15.181 jiwa (9,15 persen).

Grafik 2.1
Jumlah Penduduk Tahun 2012-2015 Kota Langsa (Jiwa)



Sumber : BPS Kota Langsa, 2016

Dengan luas wilayah yang mencapai 262,41 km² kilometer persegi (km²) dan didiami oleh 165.890 jiwa, rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kota Langsa tahun 2015 adalah sebanyak 692 jiwa per kilometer persegi. Kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Langsa Kota, yaitu sebanyak 6.597 jiwa per kilometer persegi, sedangkan yang paling rendah tingkat kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Langsa Timur, yakni sebanyak 194 jiwa per kilometer persegi.

Tabel 2.2
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk
Menurut Kecamatan di Kota Langsa Tahun 2015

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (km ²)
1	Langsa Timur	78,23	15.181	194
2	Langsa Lama	45,05	29.702	659
3	Langsa Barat	48,78	34.230	702
4	Langsa Baro	61,68	46.599	755
5	Langsa Kota	6,09	40.178	6.597
	Jumlah	239,83	165.890	692

Sumber : BPS Kota Langsa, Tahun 2016

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, jumlah rumah tangga di Kota Langsa dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 juga ikut mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 jumlah rumah tangga di Kota Langsa sebanyak 33.029 RT dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 36.102 RT.

Tabel 2.3
Jumlah Rumah Tangga Kota Langsa Menurut Kecamatan
Kota Langsa Tahun 2013-2014

No.	Kecamatan	2013	2014
1	Langsa Timur	2.893	3.304
2	Langsa Lama	7.022	6.462
3	Langsa Barat	6.817	7.448
4	Langsa Baro	9.923	10.143
5	Langsa Kota	8.372	8.745
	Jumlah	35.027	36.102

Sumber : BPS Kota Langsa, Tahun 2015

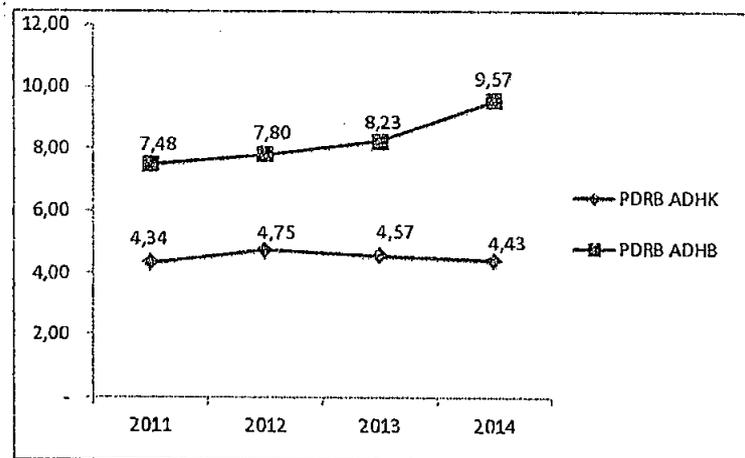
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
2.2.1.1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui potensi unggulan suatu daerah adalah komposisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Salah satu pendekatan dalam menghitung PDRB adalah menggunakan pendekatan produksi yang merupakan jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu.

PDRB Kota Langsa menurut lapangan usaha dirinci menjadi 17 kategori lapangan usaha dan sebagian besar kategori dirinci lagi menjadi sub kategori. Pemecahan menjadi sub kategori ataupun golongan ini disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009.

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah merupakan salah satu ukuran kinerja pembangunan daerah khususnya perekonomian. Pertumbuhan ekonomi ini dapat dilihat dari laju pertumbuhan PDRB harga konstan tahun 2010. Penggunaan harga tahun dasar 2010 bertujuan untuk menghilangkan faktor perubahan harga (inflasi) dan menggunakan faktor pengali harga konstan (*at constant price inflation factor*) sehingga diperoleh gambaran peningkatan produksi secara makro.

Grafik 2.2
Laju Pertumbuhan PDRB ADHB dan ADHK
Tahun 2011-2014 Kota Langsa (persen)

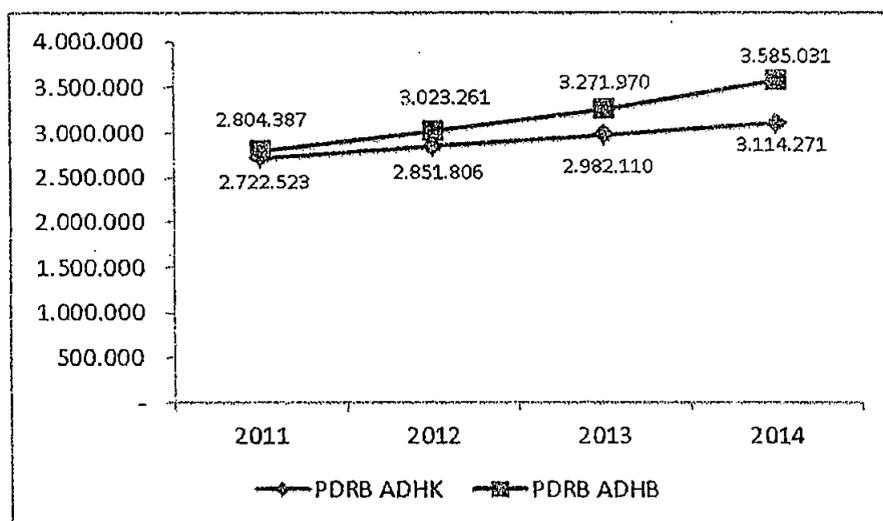


Sumber : BPS Kota Langsa, 2015

Perekonomian Kota Langsa pada tahun 2011 dengan menggunakan penghitungan metode baru tahun dasar 2010 mencapai 4,34%. Pada tahun selanjutnya, pertumbuhan ekonomi Kota Langsa di tahun 2012 terjadi lebih cepat mencapai 4,75%. Pada tahun tersebut pertumbuhan merata di segala kategori, mulai dari kategori pertanian hingga jasa-jasa. Perekonomian Kota Langsa mulai melambat di tahun 2013 dan tahun 2014 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2013 laju pertumbuhan ekonomi Kota Langsa melambat dengan

persentase 4,57% dan pada tahun 2014 pertumbuhan menjadi lebih lambat lagi menjadi hanya sebesar 4,43%.

Grafik 2.3
Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK
Kota Langsa Tahun 2011-2014 (Juta Rupiah)



Sumber : BPS Kota Langsa, 2015

Melambatnya pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh berbagai kategori. Salah satu kategori yang menurun laju pertumbuhannya yaitu kategori pertanian. Pada tahun 2014 laju pertumbuhan kategori pertanian berada pada level negatif yang artinya produksi kategori pertanian yang dihasilkan pada tahun 2010 turun drastis menjadi -0,64% dibandingkan dengan tahun 2013. Banyak faktor yang menyebabkan laju pertumbuhan di kategori pertanian menurun drastis, seperti turunnya harga jual komoditas tanaman perkebunan seperti karet dan kelapa sawit, ditambah lagi dengan semakin meningkatnya biaya perawatan tanaman seperti pupuk dan pestisida, serta cuaca yang tidak menentu, kemudian dengan adanya berbagai hama dan penyakit yang menimpa sebagian besar tanaman padi mengakibatkan kategori pertanian semakin menurun laju pertumbuhannya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Selain kategori pertanian, melambatnya laju pertumbuhan ekonomi Kota Langsa pada tahun 2014 juga disebabkan oleh kategori-kategori lain, diantaranya kategori industri pengolahan yang melambat sebesar 2,83% dan 2,33% pada tahun 2013 dan 2014, kategori pengadaan listrik dan gas yang juga melambat

sebesar 5,17%, kategori jasa keuangan dan asuransi yang laju pertumbuhannya menurun menjadi -2,95%, dan kategori jasa lainnya yang melambat 2,13% pada tahun 2014.

Tabel 2.4
Nilai dan Kontribusi PDRB ADHK Kota
Menurut Sektor Ekonomi Tahun 2010-2014

No.	Kategori	2010		2011		2012		2013*		2014**	
		Juta	%								
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	257.120	9,85	262.809	9,65	270.908	9,50	279.561	9,37	277.776	8,92
2	Pertambangan dan Penggalian	15.956	0,61	16.131	0,59	16.597	0,58	16.972	0,57	17.357	0,56
3	Industri Pengolahan	255.903	9,81	268.078	9,85	279.224	9,79	287.126	9,63	297.805	9,56
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4.273	0,16	4.398	0,16	4.590	0,16	4.730	0,16	4.843	0,16
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.192	0,05	1.258	0,05	1.339	0,05	1.399	0,05	1.456	0,05
6	Konstruksi	248.231	9,51	256.348	9,42	266.320	9,34	280.026	9,39	296.517	9,52
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	739.379	28,34	777.254	28,55	819.167	28,72	863.955	28,97	908.583	29,17
8	Transportasi dan Pergudangan	237.899	9,12	247.573	9,09	261.768	9,18	277.281	9,30	293.976	9,44
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	50.314	1,93	52.504	1,93	56.001	1,96	59.496	2,00	63.529	2,04
10	Informasi dan Komunikasi	150.484	5,77	157.331	5,78	169.697	5,95	178.199	5,98	190.281	6,11
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	76.950	2,95	85.803	3,15	86.951	3,05	88.871	2,98	86.250	2,77
12	Real Estate	115.748	4,44	120.100	4,41	124.832	4,38	129.975	4,36	136.773	4,39
13	Jasa Perusahaan	23.497	0,90	24.629	0,90	25.582	0,90	26.695	0,90	28.241	0,91
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	196.897	7,55	204.615	7,52	212.534	7,45	217.529	7,29	228.688	7,34
15	Jasa Pendidikan	46.262	1,77	47.996	1,76	49.201	1,73	51.322	1,72	53.662	1,72
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	127.916	4,90	132.304	4,86	140.097	4,91	148.839	4,99	156.905	5,04
17	Jasa Lainnya	61.165	2,34	63.392	2,33	66.999	2,35	70.134	2,35	71.628	2,30
	PDRB ADHK	2.609.185	100,00	2.722.523	100,00	2.851.806	100,00	2.982.110	100,00	3.114.271	100,00

Sumber : BPS Kota Langsa, Tahun 2015

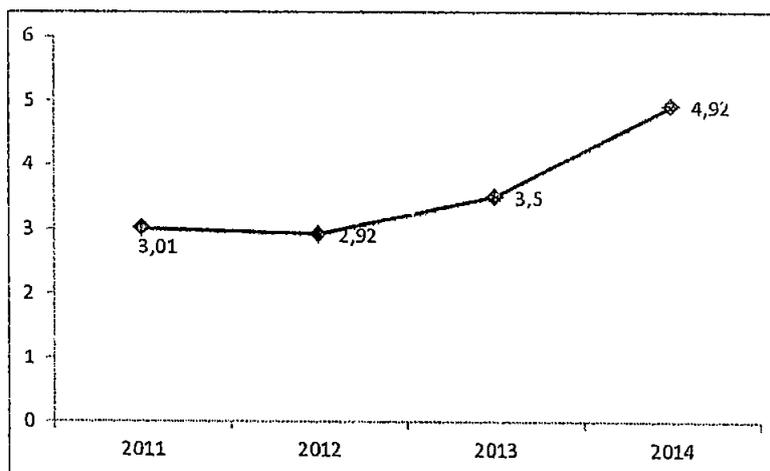
Keterangan: * : angka sementara
** : angka sangat sementara

2.2.1.2. Laju Inflasi

Dalam makro ekonomi, inflasi adalah proses meningkatnya harga dari sekelompok barang dan jasa secara terus menerus yang berkaitan dengan mekanisme pasar. Inflasi diukur sebagai persentase perubahan Indeks Harga Konsumen (indeks yang

mengukur harga rata-rata dari barang tertentu), deflektor Produk Domestik Bruto (menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua barang baru, atau indeks-indeks lain dalam tingkat harga keseluruhan. Inflasi dapat disebabkan antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau spekulasi, serta akibat adanya ketidaklancaran suplai dan distribusi barang. Jika besarnya tidak terkendali, inflasi akan mempengaruhi kondisi perekonomian masyarakat. Perhitungan inflasi di Kota Langsa dilakukan dengan perhitungan indeks harga implisit. Indeks ini merupakan perbandingan antara PDRB riil dengan PDRB nominal. Peningkatan indeks harga implisit menunjukkan kenaikan harga barang dan jasa (dari sisi produsen) dalam periode satu tahun. Selama kurun waktu 2012-2014 tingkat inflasi di Kota Langsa menunjukkan tren yang meningkat. Inflasi paling tinggi terjadi pada tahun 2014 yang mencapai 4,92 persen. Perkembangan angka inflasi Kota Langsa disajikan pada grafik berikut :

Grafik 2.4
Laju Implisit (Inflasi) Tahun 2011-2014 Kota Langsa (persen)



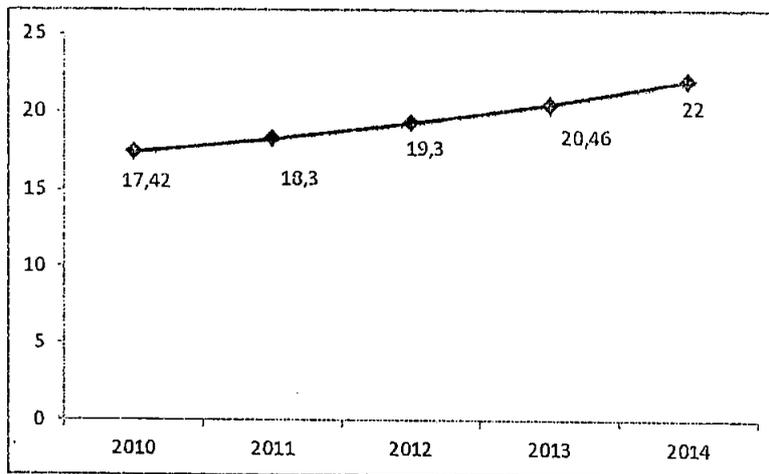
Sumber : BPS Kota Langsa, 2015

2.2.1.3. PDRB per Kapita

PDRB per Kapita merupakan suatu indikator yang dihitung dengan cara membagi data PDRB terhadap jumlah penduduk pada pertengahan tahun. PDRB per kapita atas harga berlaku berguna untuk menunjukkan nilai PDRB per-kepala atau satu orang

penduduk. PDRB per kapita Kota Langsa ADHB selama kurun waktu 2010-2014 cenderung meningkat. Pada tahun 2010 nilai PDRB per kapita Kota Langsa sebesar 17,42 juta rupiah dan nilainya terus meningkat dari tahun ke tahun. Kemudian pada tahun 2014, PDRB per kapita Kota Langsa menjadi 22 juta rupiah.

Grafik 2.5
PDRB per Kapita ADHB Kota Langsa
Tahun 2010-2014 (juta rupiah)



Sumber : BPS Kota Langsa, Tahun 2015

Peningkatan PDRB per kapita yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2010-2014 tersebut merupakan cerminan perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat Kota Langsa. Perbaikan kesejahteraan ekonomi masyarakat ini akan meningkatkan daya beli masyarakat yang berakibat kepada meningkatnya tambahan permintaan terhadap barang atau jasa yang selanjutnya akan meningkatkan siklus distribusi barang atau jasa. Kondisi akhir yang diharapkan dari dampak kenaikan pendapatan per kapita adalah meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat.

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat

2.2.2.1. Pendidikan

Pendidikan berperan sebagai dasar dalam membentuk kualitas manusia yang mempunyai daya saing dan kemampuan dalam menyerap teknologi yang akan dapat meningkatkan produktivitas suatu daerah. Pentingnya peran pendidikan menandakan bahwa pembangunan sektor pendidikan harus

menjadi prioritas utama dalam pembangunan sumber daya manusia.

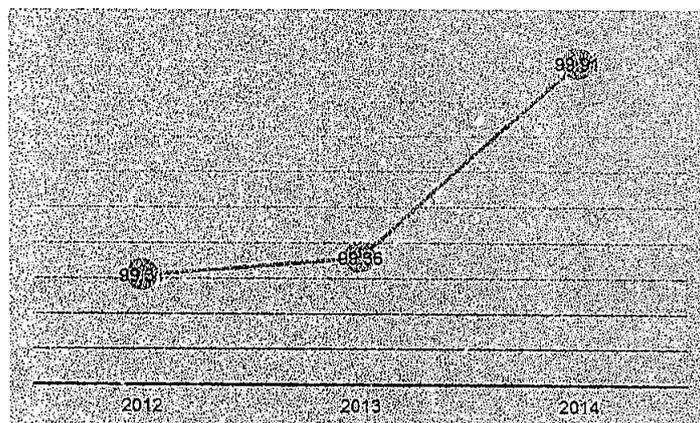
2.2.2.1.1. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Angka Melek Huruf dapat digunakan untuk:

1. mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama di daerah;
2. menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media;
3. menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis.

Selain menjadi gambaran kasar terhadap akses pendidikan, indikator angka melek huruf juga menjadi dasar bagi seseorang dalam meningkatkan kualitas hidupnya terkait pengembangan pembelajaran berkelanjutan dalam hal mendapatkan ilmu pengetahuan dan informasi, serta penggalian potensi.

Grafik 2.6
Perkembangan Angka Melek Huruf
Tahun 2012-2014 Kota Langsa (persen)



Sumber : BPS Aceh, Tahun 2016

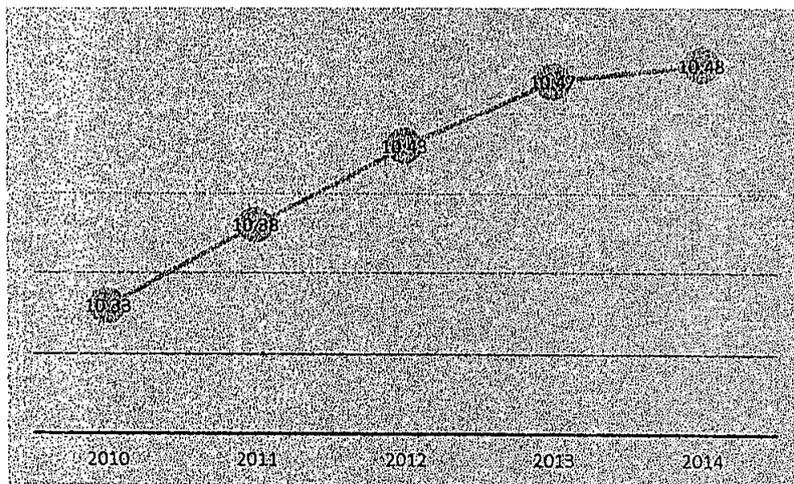
Perkembangan Angka Melek Huruf periode 2012-2014 terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2012 sebesar 99,31 persen dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 99,36, dan terus meningkat pada tahun 2014 menjadi 99,91 persen.

2.2.2.1.2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Lamanya sekolah atau *years of schooling* adalah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan Tingkat Pendidikan Terakhir (TPT). Pada prinsipnya angka ini merupakan transformasi dari bentuk kategori TPT menjadi bentuk numerik.

Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Di Kota Langsa, selama 2010-2014 terjadi peningkatan kualitas pendidikan yaitu dari 10,33 tahun di tahun 2010 menjadi 10,48 tahun di tahun 2014 (setara SLTA). Peningkatan rata-rata lama sekolah di Kota Langsa ini, dapat dimaknai bahwa penduduk Kota Langsa semakin sadar akan pentingnya pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

Grafik 2.7
Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah
Tahun 2010-2014 Kota Langsa (Tahun)



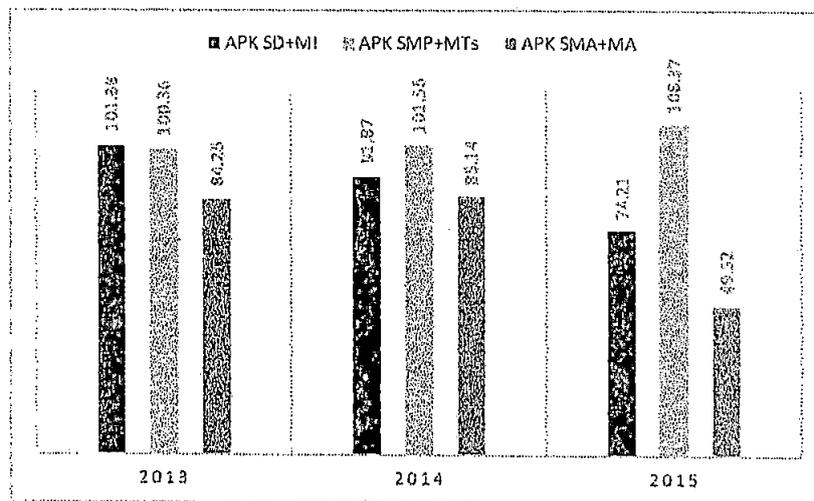
Sumber : BPS Kota Langsa, Tahun 2016

2.2.2.1.3. Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan

SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK didapat dengan membagi jumlah penduduk yang sedang bersekolah (atau jumlah siswa), tanpa memperhitungkan umur, pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut. Angka Partisipasi Kasar Kota Langsa pada tahun 2015 di tingkat SD mencapai 74,21 persen, tingkat SLTP sebesar 108,37 persen dan tingkat SLTA sebesar 49,52 persen.

Grafik 2.8
Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SD/SLTP/SLTA
Tahun 2013-2015 Kota Langsa (persen)

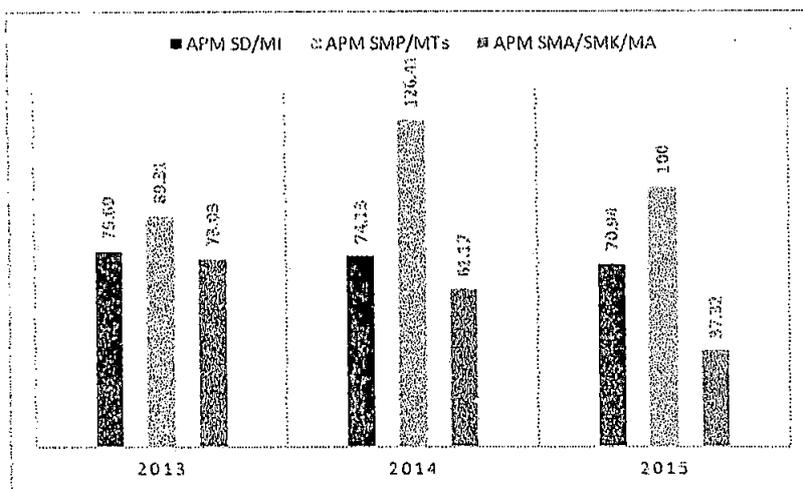


Sumber : BPS dan Dinas Pendidikan Kota Langsa, Tahun 2016

2.2.2.1.4. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Angka partisipasi murni adalah perbandingan penduduk usia antara 7 hingga 18 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun.

Grafik 2.9
Perkembangan APM Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Tahun 2013-2015 Kota Langsa (persen)



Sumber : LPPD dan Dinas Pendidikan Kota Langsa, Tahun 2016

Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi, jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

Perkembangan APM pada jenjang pendidikan SD/MI pada tahun 2015 adalah sebesar 70,94 persen, pada jenjang SMP/MTs sebesar 100 persen dan pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA sebesar 37,32 persen.

2.2.2.2. Kesehatan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Dalam pengertian ini maka kesehatan harus dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh terdiri dari unsur-unsur fisik, mental dan sosial. Tujuan pembangunan kesehatan antara lain adalah : 1) peningkatan kemampuan masyarakat untuk menolong dirinya sendiri dalam bidang kesehatan; 2) perbaikan mutu lingkungan hidup yang menjamin kesehatan; 3) peningkatan status gizi masyarakat; 4) pengurangan kesakitan

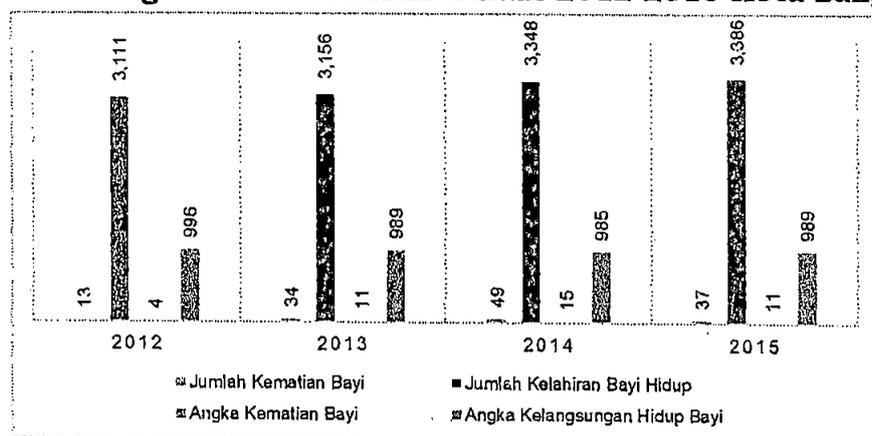
(morbiditas) dan kematian (mortalitas); serta 5) pengembangan keluarga sehat sejahtera.

2.2.2.2.1. Angka Kelangsungan Hidup Bayi dan Angka Kematian Bayi

Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Angka kelangsungan hidup bayi = (1-angka kematian bayi). AKB dihitung dengan jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Angka kematian bayi (AKB) menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat dimana angka kematian itu dihitung. Kegunaan AKB untuk pengembangan perencanaan berbeda antara kematian neonatal dan kematian bayi yang lain.

Perkembangan AKB di Kota Langsa cenderung mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir, yaitu dari 4 bayi per 1.000 kelahiran pada tahun 2014, naik menjadi 15 bayi per 1.000 kelahiran, dan turun menjadi 11 bayi pada tahun 2015. Angka ini masih di bawah target MDGs yakni 17 bayi per 1.000 kelahiran di tahun 2015. Untuk lebih jelasnya, perkembangan AKB dan AKHB Kota Langsa dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.10
Perkembangan AKB dan AKHB Tahun 2012-2015 Kota Langsa



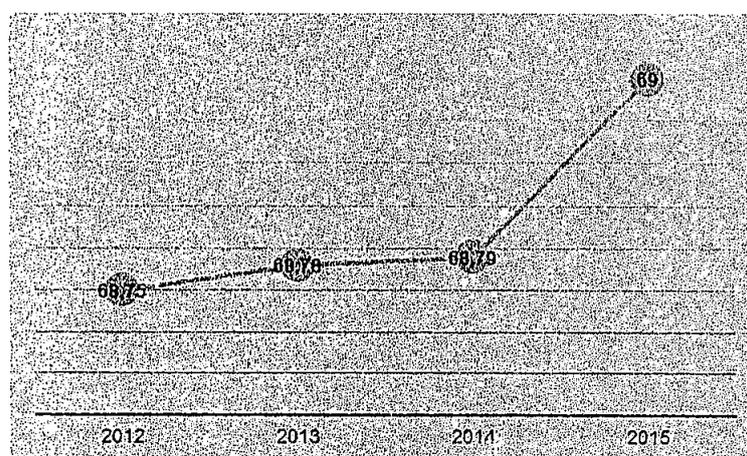
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Langsa, 2016

2.2.2.2.2. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada

khususnya. Idealnya, angka harapan hidup dihitung berdasarkan angka kematian menurut umur (*Age Specific Death Rate/ASDR*) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian.

Grafik 2.11
Perkembangan Angka Harapan Hidup
Tahun 2012-2015 Kota Langsa (Tahun)



Sumber : BPS Kota Langsa dan Dinas Kesehatan Kota Langsa, 2016

Tetapi, karena sistem registrasi penduduk belum berjalan dengan baik, maka untuk menghitung angka harapan hidup digunakan dengan mengutip angka yang diterbitkan oleh BPS. Perkembangan angka harapan hidup masyarakat Kota Langsa tahun 2012-2015 terus mengalami peningkatan, yaitu dari 68,75 tahun pada tahun 2012 naik menjadi 69 tahun pada tahun 2015.

2.2.2.2.3. Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Keadaan tubuh anak atau bayi, dilihat dari berat badan menurut umur. Gizi buruk merupakan bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun. Status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan. Apabila berat badan menurut umur sesuai dengan standar, anak disebut gizi baik. Sedangkan di bawah standar disebut gizi kurang. Apabila jauh di bawah standar

dikatakan gizi buruk. Pada tahun 2015, di Kota Langsa tidak terdapat Balita penderita gizi buruk.

Tabel 2.5
Perkembangan Jumlah Balita Gizi Buruk
Tahun 2012-2015 Kota Langsa

Keterangan	2012	2013	2014	2015
Jumlah Balita gizi buruk	6	9	3	0
Jumlah Balita	18.879	20.713	17.271	17.894
Jumlah Balita gizi buruk yang tertangani	6	9	3	0
Persentase Balita Gizi Buruk (%)	0,03	0,04	0,02	0,00

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Langsa, 2016

2.2.2.3. Pertanahan

Sertifikat adalah sebagai surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. Bukti kepemilikan atau tanda bukti hak tanah tersebut antara lain, sertifikat tanah dengan status Hak Milik (HM), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Pakai (HP). Di Kota Langsa, pada tahun 2014 sertifikat hak atas tanah yang paling banyak diterbitkan adalah yang berasal dari hak tanggungan, yakni sebanyak 739 sertifikat dari jumlah keseluruhan 3.067 sertifikat.

Tabel 2.6
Banyaknya Kegiatan Pelayanan Sertifikat Hak Atas Tanah yang
Diterbitkan Tahun 2014 Kota Langsa

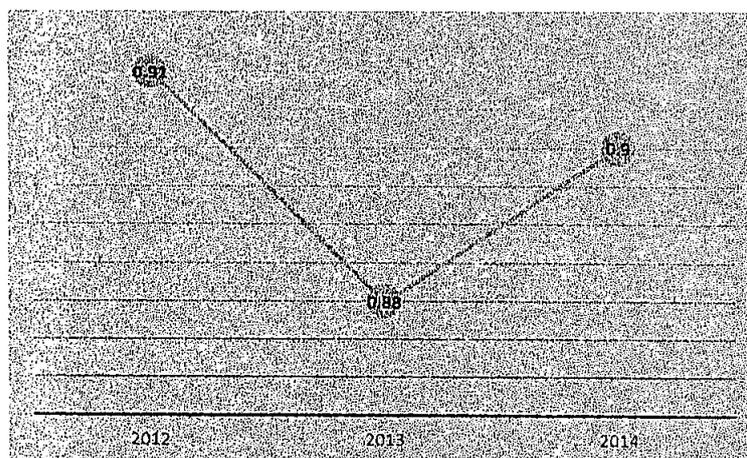
Jenis Kegiatan Pelayanan	Jumlah Sertifikat Yang diterbitkan
Jual Beli	669
Hibah	63
Pemisahan Hak	253
Warisan	93
Hak Tanggungan	739
Pengakuan Hak	605
Pemberian Hak	635
Jumlah	3.067

Sumber : BPS Kota Langsa, Tahun 2015

2.2.2.4. Kesempatan Kerja (Rasio penduduk yang bekerja)

Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja, sehingga dapat menyerap pertambahan angkatan kerja. Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Jika yang tersedia adalah angka pengangguran, maka angka yang digunakan adalah (1 - angka pengangguran).

Grafik 2.12
Rasio Penduduk yang Bekerja Tahun 2012-2014 Kota Langsa



Sumber : BPS Kota Langsa, Tahun 2016

Angka rasio penduduk yang bekerja di Kota Langsa dari tahun 2012-2014 relatif tinggi yaitu rata-rata di atas 0,80. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar angkatan kerja di Kota Langsa telah memperoleh kesempatan kerja di atas 80 persen, sedangkan sisanya masih mencari kerja.

2.2.2.5. Angka Kriminalitas

Perkembangan Kota Langsa yang pesat dengan kemajemukan masyarakat, akan berdampak pada perubahan sosial di masyarakat. Disisi lain, peningkatan jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan keterbatasan fasilitas infrastruktur daerah akan berdampak negatif, seperti semakin bertambahnya

tingkat pengangguran dan bertambahnya angka kemiskinan yang pada akhirnya akan meningkatkan angka kriminalitas.

Tabel 2.7
Jumlah Tindak Kriminal Tahun 2012-2015 Kota Langsa

No.	Jenis Kriminalitas	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Kasus Narkoba	0	0	0	0
2	Jumlah Kasus Pembunuhan	1	0	0	0
3	Jumlah Kejahatan Seksual	17	21	20	6
4	Jumlah Kasus Penganiayaan	133	108	131	136
5	Jumlah Kasus Pencurian	412	351	436	430
6	Jumlah Kasus Penipuan	80	63	58	58
7	Jumlah Kasus Pemalsuan Uang	1	0	1	1
	Jumlah	644	543	646	631

Sumber : Polres Kota Langsa dan SIPD Kota Langsa, Tahun 2016

Angka kriminalitas berhubungan erat dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Angka kriminalitas dapat ditekan jika kesejahteraan masyarakat meningkat. Dalam kurun waktu selama tiga tahun perkembangan angka kriminalitas di Kota Langsa sangat berfluktuasi, jumlah tindak kriminal yang terendah terjadi pada tahun 2013 yaitu 543 kasus dan tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu 646 kasus. Diantara tujuh jenis tindak kriminal di Kota Langsa, jumlah kasus pencurian merupakan kasus yang paling tinggi, yaitu dengan rata-rata 400 kasus setiap tahunnya.

2.2.2.6. Seni Budaya dan Olah Raga

Sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan yaitu untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab serta mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Berdasarkan data yang ada, jumlah grup kesenian di Kota Langsa hingga tahun 2015 adalah sebanyak 76 grup dengan jumlah gedung kesenian sebanyak 3 gedung.

Tabel 2.8
Perkembangan Grup dan Gedung Kesenian
Tahun 2012-2015 Kota Langsa

Uraian	2012	2013	2014	2015
Jumlah Grup Kesenian	71	84	84	76
Jumlah Gedung Kesenian	3	3	3	3

Sumber : Disporabudpar Kota Langsa dan SIPD Kota Langsa, Tahun 2016

Perkembangan bidang pemuda dan olah raga di Kota Langsa selama kurun waktu 2012 – 2015 dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain ketersediaan sarana dan prasarana olah raga jumlah klub dan cabang olah raga. Jumlah klub olah raga di Kota Langsa hingga tahun 2015 adalah sebanyak 32 klub dengan 1 gedung olah raga.

Terdapat berbagai permasalahan yang harus diatasi dalam upaya pengembangan prestasi olahraga dimasa mendatang, antara lain terbatasnya sarana dan prasarana olahraga masyarakat, rendahnya partisipasi masyarakat di bidang olahraga, pembinaan dan upaya pembibitan atlit olahraga yang belum optimal, manajemen olahraga yang belum profesional, dan rendahnya penghargaan bagi olahragawan berprestasi.

Tabel 2.9
Perkembangan Klub dan Gedung Olah Raga
Tahun 2012-2015 Kota Langsa

Uraian	2012	2013	2014	2015
Jumlah Klub Olah Raga	32	32	32	32
Jumlah Gedung Olah Raga	1	1	1	1

Sumber : Disporabudpar Kota Langsa, Tahun 2016

2.2.2.7. Ketenagakerjaan

Prioritas dalam pembangunan perekonomian adalah penciptaan lapangan pekerjaan atau dengan kata lain berkurangnya tingkat pengangguran. Pengangguran terbuka (*open unemployment*) adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 tahun ke atas) yang sedang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (sebelumnya dikategorikan sebagai bukan angkatan kerja), dan yang sudah

punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja (sebelumnya dikategorikan pekerjaan bekerja), dan pada waktu yang bersamaan mereka tak bekerja (*jobless*). Pada tahun 2012 tingkat pengangguran terbuka sebesar 8,79%, tahun 2013 meningkat secara signifikan menjadi 11,74%, kemudian di tahun 2014 turun menjadi 9,89 persen.

Tabel 2.10
Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan
Tahun 2012-2014 Kota Langsa

Uraian	2012	2013	2014
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	58,85	56,51	57,94
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPK) (%)	8,79	11,74	9,89

Sumber : BPS Kota Langsa, Tahun 2016

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

2.3.1.1. Pendidikan

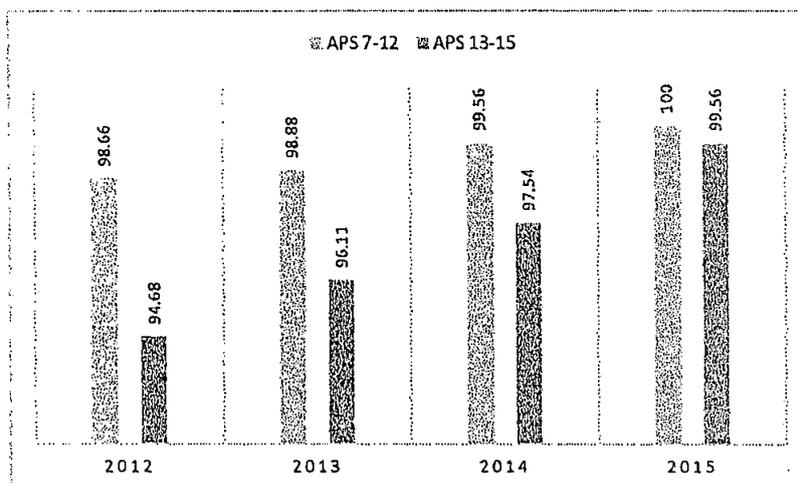
2.3.1.1.1. Pendidikan Dasar

2.3.1.1.1.1. Angka Partisipasi Sekolah

APS adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Angka Partisipasi Sekolah (APS) dikenal sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan layanan pendidikan di suatu wilayah baik provinsi, kabupaten atau kota di Indonesia. Semakin tinggi nilai APS, maka daerah tersebut dianggap berhasil menyelenggarakan layanan akses pendidikan. Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda.

Perkembangan APS usia 7-12 tahun di Kota Langsa mengalami peningkatan pada tahun 2015 yaitu menjadi sebesar 100 persen dibandingkan pada tahun 2014 yang sebesar 99,56 persen. Perkembangan APS usia 13-15 cenderung meningkat dibandingkan dengan APS usia 7-12 tahun 2014 yaitu menjadi 99,56 persen.

Grafik 2.13
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Usia
Pendidikan Dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun)
Tahun 2012-2015 Kota Langsa (persen)



Sumber : Dinas Pendidikan dan BPS Aceh, Tahun 2016 (diolah)

2.3.1.1.1.2. Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah per 10.000 jumlah penduduk usia sekolah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia sekolah. Pada rentang usia 7-12 tahun hingga di tahun 2015 rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah adalah sebanyak 36 sekolah, hal ini berarti setiap 10.000 penduduk usia 7-12 tahun tersedia 36 sekolah SD/MI, sedangkan pada usia 13-15 tahun adalah sebanyak 26 sekolah, dimana setiap 10.000 penduduk usia 13-15 tahun tersedia 27 sekolah SMP/MTs.

2.3.1.1.1.3. Rasio Ketersediaan Guru Terhadap Murid

Indikator pendidikan lainnya yang perlu diperhatikan adalah rasio guru terhadap murid. Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru pada tingkat pendidikan tertentu per 1.000 jumlah murid sekolah. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar dan juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Rasio guru terhadap murid pendidikan usia 7-12 tahun adalah sebesar 73, ini berarti setiap 1.000 murid usia 7-12 tahun tersedia 73 orang guru SD/MI. Rasio guru terhadap murid

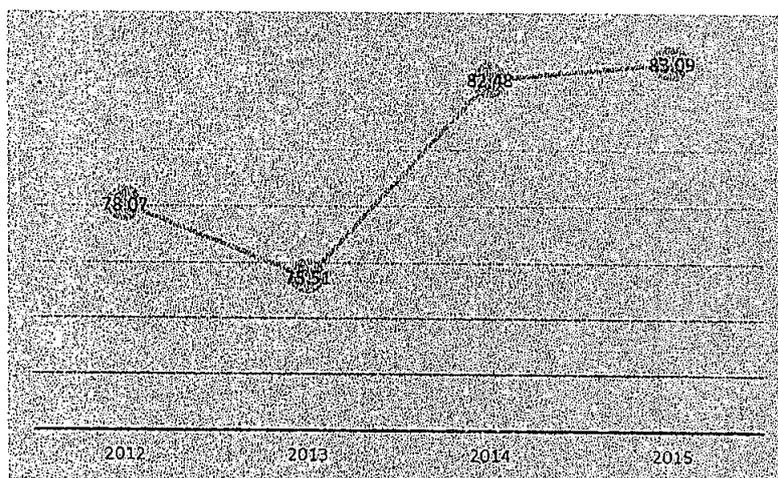
pendidikan SMP/MTs pada tahun 2015 adalah sebesar 87, yang berarti bahwa setiap 1.000 murid usia 13-15 tahun adalah sebanyak 87 orang guru SMP/MTs.

2.3.1.1.2. Pendidikan Menengah

2.3.1.1.2.1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka partisipasi sekolah dapat menggambarkan berapa banyak penduduk usia pendidikan yang sedang bersekolah. Pada tingkat jenjang pendidikan menengah, APS adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan menengah (16-18 tahun) yang masih menempuh pendidikan menengah per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan menengah.

Grafik 2.14
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Usia Pendidikan Menengah (usia 16-18 tahun) Tahun 2012-2015 Kota Langsa (persen)



Sumber : Langsa Dalam Angka dan Statistik Pendidikan Aceh, Tahun 2016

APS usia 16-18 tahun di Kota Langsa selama periode 2012-2015 mengalami pasang surut. Pada tahun 2012, APS mencapai 78,07 persen, turun pada tahun 2013 menjadi sebesar 75,51 persen, dan kemudian naik pada tahun 2014 menjadi 82,48 persen, dan tahun 2015 terus naik menjadi 83,09 persen.

2.3.1.1.2.2. Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah menunjukkan kemampuan sekolah untuk menampung semua penduduk usia pendidikan.

Rasio ketersediaan sekolah jenjang pendidikan menengah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan menengah per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan menengah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan menengah.

Perkembangan jumlah gedung sekolah menengah tahun 2015 adalah sebanyak 26 unit, dengan jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun sebanyak 9.886 jiwa. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah adalah sebanyak 3 sekolah, hal ini berarti bahwa setiap 1.000 ribu penduduk usia 16-18 tahun tersedia sekolah sebanyak 3 unit.

2.3.1.1.2.3. Rasio Ketersediaan Guru Terhadap Murid

Ketersediaan jumlah guru yang ideal akan ikut mempengaruhi kualitas pendidikan. Agar jumlah guru terhadap murid tetap teralokasi dengan baik, perlu dilakukan perhitungan antara lain dengan cara menghitung rasio guru terhadap murid. Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan menengah per 1.000 jumlah murid pendidikan menengah. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar, disamping juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Perkembangan jumlah guru sekolah menengah tahun 2015 adalah sebanyak sebanyak 1.094, sedangkan rasio guru terhadap murid pada tahun 2015 adalah sebanyak 113, artinya setiap 1.000 murid usia 16-18 tahun tersedia sebanyak 113 orang guru.

2.3.1.1.4. Pendidikan Dayah

Dayah di Aceh merupakan lembaga pendidikan tradisional Islam yang bertujuan untuk membimbing generasi Islam secara umum melalui pendidikannya untuk menjadi manusia yang berkepribadian islami. Jumlah pesantren atau dayah di Kota Langsa meningkat dari 12 pesantren menjadi 14 pesantren, baik tradisional maupun modern. Jumlah guru pesantren di Kota Langsa cenderung mengalami penurunan di tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012, namun pada tahun 2014 kembali meningkat menjadi 175 ustadz/guru. Berbanding terbalik

dengan jumlah ustadz/guru, jumlah santri/murid di seluruh pesantren justru terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2012 sebanyak 3.244 santri, naik menjadi 3.994 santri/murid diakhir tahun 2014. Jumlah ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Langsa khususnya para orang tua santri/murid semakin sadar akan pentingnya pendidikan keagamaan bagi putra dan putri mereka.

Tabel 2.11
Jumlah Pesantren, Ustadz dan Santri
Tahun 2012-2014 Kota Langsa

Uraian	2012	2013	2014
Pesantren	12	14	14
Ustadz/Guru	359	122	175
Santri/Murid	3.244	3.777	3.994

Sumber : BPS Kota Langsa, Tahun 2015

2.3.1.2. Kesehatan

2.3.1.2.1. Rasio Posyandu Terhadap Satuan Balita

Posyandu adalah suatu wadah dalam pelayanan kesehatan masyarakat dari Keluarga Berencana dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan keluarga berencana yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini.

Tabel 2.12
Rasio Posyandu per Satuan Balita
Tahun 2012-2015 Kota Langsa

Uraian	2012	2013	2014	2015
Posyandu	108	118	120	120
Balita	18.879	20.713	17.271	17.894
Rasio	1.000 : 6	1.000 : 6	1.000 : 7	1.000 : 7

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Langsa, Tahun 2016

Jumlah Posyandu tahun 2012 sebanyak 108 unit, tahun 2013 naik menjadi 118 unit dan hingga akhir tahun 2014 dan 2015 kembali mengalami peningkatan sebanyak dua unit menjadi 120 unit yang tersebar di lima kecamatan. Jumlah Balita di Kota Langsa pada tahun 2012 sebanyak 18.879 orang, meningkat pada tahun 2013 menjadi 20.713 Balita, dan pada tahun 2014

mengalami penurunan menjadi 17.271 Balita, namun pada tahun 2015 kembali naik menjadi 17.894 Balita. Perkembangan rasio Posyandu per satuan Balita dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2013 rasio Posyandu terhadap 1.000 Balita adalah sebanyak enam Posyandu dan akhir tahun 2015 menjadi tujuh Posyandu terhadap 1.000 Balita.

2.3.1.2.2. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu dan Polindes Terhadap Satuan Penduduk

Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan seperti Puskesmas, Poliklinik, dan Polindes merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota Langsa dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan memberikan kemudahan akses dan fasilitas sarana kesehatan kepada masyarakat.

Tabel 2.13
Jumlah Puskesmas, Poliklinik, Pustu, dan Polindes Tahun 2013-2015 Kota Langsa

Sarana dan Prasarana Kesehatan	2013	2014	2015
Jumlah Puskesmas	5	5	5
Jumlah Poliklinik Kesehatan	10	17	18
Jumlah Puskesmas Pembantu	8	8	7
Jumlah Poskesdes/Polindes	52	52	52
Sub Jumlah	75	82	82
Jumlah Penduduk	157.011	162.814	165.890
Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu dan Polindes Terhadap Satuan Penduduk	0,48	0,50	0,49

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Langsa, Tahun 2016

Jumlah Puskesmas, Poliklinik, Pustu dan Polindes di Kota Langsa tahun 2014 sebanyak 82 unit dengan rasio sebesar 0,50, meningkat dari tahun 2013 yang sebesar 0,48. Hal ini berarti, bahwa di tahun 2014 sebanyak 1.000 penduduk di Kota Langsa dapat dilayani oleh 0,50 Puskesmas, Poliklinik, Pustu dan Polindes.

2.3.1.2.3. Rasio Rumah Sakit Terhadap Satuan Penduduk

Rumah sakit adalah suatu organisasi yang terdiri dari tenaga medis profesional yang terorganisir serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan

kesehatan, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien.

Jumlah rumah sakit di Kota Langsa pada tahun 2014 adalah sebanyak empat unit terdiri satu unit milik pemerintah daerah dan tiga unit milik swasta, dengan rasio rumah sakit terhadap satuan penduduk sebanyak 0,02 rumah sakit, artinya setiap 1.000 penduduk di Kota Langsa dapat dilayani oleh 0,02 rumah sakit.

Tabel 2.14
Jumlah Rumah Sakit Tahun 2012-2015 Kota Langsa

Sarana dan Prasarana Kesehatan	2012	2013	2014	2015
Rumah Sakit	3	4	4	4
Pemerintah	1	1	1	1
Swasta	2	3	3	3
Jumlah Penduduk	154.722	157.011	162.814	165.890
Rasio Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk	0,019	0,025	0,024	0,024

Sumber : Dinas Kesehatan dan BPS Kota Langsa, Tahun 2016

2.3.1.2.4. Rasio Dokter Terhadap Satuan Penduduk

Indikator rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk. Jumlah dokter dan dokter spesialis di Indonesia belum memenuhi kebutuhan sesuai rasio jumlah penduduk Indonesia. Selain itu, distribusi dokter tidak merata serta kualitasnya masih perlu ditingkatkan. Jumlah dokter di Kota Langsa dalam tiga tahun terakhir cenderung mengalami penurunan, dimana pada tahun 2013 jumlah dokter baik spesialis dan dokter umum berjumlah 70 orang, turun pada akhir tahun 2014 menjadi 59 orang dokter dengan rasio jumlah dokter terhadap jumlah penduduk mencapai 0,35 orang dokter atau dengan kata lain di tahun 2015, setiap 1.000 penduduk dapat dilayani oleh 0,35 dokter.

Tabel 2.15
Jumlah Dokter Tahun 2013-2015 Kota Langsa

Uraian	2013	2014	2015
Jumlah Dokter	70	51	59
Dokter Spesialis	24	18	23
Dokter Umum	46	33	36
Jumlah Penduduk	157.011	162.814	165.890
Rasio Jumlah Dokter Terhadap Jumlah Penduduk	0,445	0,313	0,355

Sumber : RSUD dan Dinkes Kota Langsa, Tahun 2016

2.3.1.2.5. Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk

Ketersediaan jumlah tenaga kesehatan, distribusi tenaga kesehatan kurang merata, kompetensi tenaga yang kurang memadai dan pengembangan profesi yang masih belum sesuai harapan masih menjadi permasalahan yang perlu terus diselesaikan. Langkah awal yang perlu dilakukan adalah dengan menghitung rasio tenaga medis per jumlah penduduk. Rasio tenaga medis per jumlah penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada penduduk. Di Kota Langsa, untuk rasio tenaga medis sebesar 3,56 pada tahun 2015, hal ini berarti setiap 1.000 penduduk di Kota Langsa dapat dilayani oleh 3,56 orang tenaga medis.

Tabel 2.16
Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk
Tahun 2013-2015 Kota Langsa

Uraian	2013	2014	2015
Jumlah Tenaga Medis (Perawat dan Bidan)	765	524	591
Jumlah Penduduk	157.011	162.814	165.890
Rasio Jumlah Tenaga Medis (Perawat dan Bidan) Terhadap Jumlah Penduduk	4,87	3,21	3,56

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Langsa, Tahun 2016

2.3.1.3. Pekerjaan Umum

2.3.1.3.1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

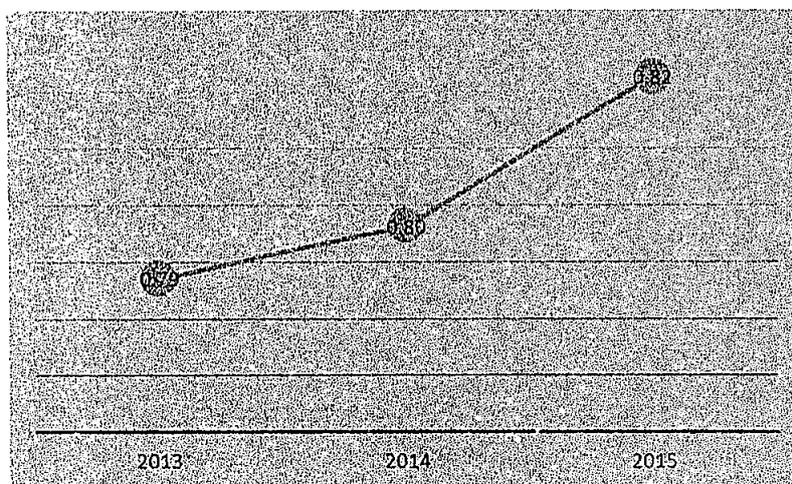
Kinerja jaringan berdasarkan kondisi dengan terminologi baik, sedang, sedang rusak, rusak dan rusak berat. Terminologi

ini didasarkan pada besarnya persentase tingkat kerusakan dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Kondisi Baik (B) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi baik menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan $\leq 6\%$), sehingga arus lalu-lintas dapat berjalan lancar sesuai dengan kecepatan disain dan tidak ada hambatan yang disebabkan oleh kondisi jalan.
- b. Kondisi Sedang (S) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi sedang menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan 6 s/d 10 %). Kerusakan yang ada belum (atau sedikit saja) menimbulkan gangguan terhadap kelancaran arus pergerakan lalu-lintas.
- c. Kondisi Sedang Rusak (SR) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi sedang menuju rusak menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan 10 s/d 16 %). Kerusakan yang ada mulai menimbulkan gangguan terhadap kelancaran arus pergerakan lalu-lintas, sehingga kendaraan harus mengurangi kecepatannya.
- d. Kondisi Rusak (R) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi rusak menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan 16 s/d 20 %). Kerusakan yang ada sudah sangat menghambat kelancaran arus pergerakan lalu-lintas, sehingga kendaraan harus berjalan secara perlahan-lahan, mengurangi kecepatannya, kadangkala harus berhenti akibat adanya kerusakan atau hambatan pada permukaan perkerasan.
- e. Kondisi Rusak Berat (RB) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi rusak berat menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan $> 20\%$). Kerusakan yang ada sudah sangat parah dan nyaris tidak dapat lagi dilewati oleh kendaraan roda-4, atau hanya dapat dilewati dengan kecepatan sangat rendah.

Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik di Kota Langsa pada tahun 2013 mencapai 0,79 atau sekitar 79 persen dari total panjang jalan kota. Angka ini terus meningkat ini tahun 2014 dan 2015 yang masing-masing mencapai 80 persen dan 82 persen. dari total panjang jalan kota yang terbangun.

Grafik 2.15
Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik
Tahun 2013-2015 Kota Langsa



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa, Tahun 2016

2.3.1.3.2. Irigasi

Pengertian jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Selanjutnya secara operasional dibedakan ke dalam tiga kategori yaitu jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier.

Dari ketiga kelompok jaringan tersebut, yang langsung berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi ke dalam petakan sawah adalah jaringan irigasi tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter serta bangunan pelengkap. Perkembangan luas jaringan irigasi di Kota Langsa dari tahun 2013-2015 terus mengalami peningkatan meskipun relatif sedikit lambat, dimana pada tahun 2013 persentase luas irigasi dalam

kondisi baik sebanyak 7 persen naik menjadi 10 persen di tahun 2015.

Tabel 2.17
Perkembangan Luas Irigasi Tahun 2013-2015 Kota Langsa

Uraian	Satuan	2013	2014	2015
Luas irigasi dalam kondisi baik	ha	130	158	177,4
Luas irigasi keseluruhan	ha	1.774	1.774	1.774
Persentase luas irigasi dalam kondisi baik	%	7	9	10

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa, 2016

2.3.1.3.3. Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk

Pembahasan mengenai rasio tempat ibadah per satuan penduduk dibatasi pada pemeluk Islam, hal ini dilakukan mengingat pemeluk Islam adalah agama mayoritas yang dipeluk oleh penduduk Kota Langsa. Tempat ibadah dalam hal ini Masjid dan Meunasah, selain merupakan tempat yang digunakan oleh umat Islam untuk beribadah, juga merupakan pusat kehidupan komunitas muslim serta kegiatan-kegiatan perayaan hari besar, diskusi, dan kajian keagamaan. Jumlah Masjid dan Meunasah di Kota Langsa pada tahun 2014 dan 2015 adalah sebanyak 337 unit.

Tabel 2.18
Perkembangan Jumlah Masjid dan Meunasah
Tahun 2014-2015 Kota Langsa

Kecamatan	2014		2015	
	Mesjid	Meunasah	Mesjid	Meunasah
Langsa Lama	15	59	15	59
Langsa Baro	19	57	19	57
Langsa Kota	13	56	13	56
Langsa Timur	11	48	11	48
Langsa Barat	9	50	9	50
<i>Sub Jumlah</i>	<i>67</i>	<i>270</i>	<i>67</i>	<i>270</i>
Jumlah (Mesjid+Meunasah)	337		337	

Sumber : Dinas Syariat Islam dan BPS Kota Langsa, 2016

2.3.1.3.4. Sempadan Sungai

Garis sempadan sungai merupakan garis batas luar pengamanan sungai yang membatasi adanya pendirian bangunan di tepi sungai dan ditetapkan sebagai perlindungan sungai. Jaraknya bisa berbeda di tiap sungai, tergantung kedalaman sungai, keberadaan tanggul, posisi sungai, serta pengaruh air laut. Garis ini diciptakan untuk menjamin kelestarian dan fungsi sungai, serta menjaga masyarakat dari bahaya bencana di sekitar sungai, seperti banjir dan longsor. Pada tahun 2013 hingga tahun 2015, panjang sempadan sungai yang dipakai bangunan liar di Kota Langsa mencapai 16 persen atau sepanjang 2 km dari 12,4 km panjang seluruh sempadan sungai.

Tabel 2.19
Perkembangan Panjang Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar Tahun 2013-2015 Kota Langsa

Uraian	Satuan	2013	2014	2015
Panjang sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	km	2	2	2
Panjang seluruh sempadan sungai	km	12.4	12.4	12.4
Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	%	16	16	16

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa, 2016

2.3.1.3.5. Turap

Dinding penahan tanah/turap adalah suatu konstruksi yang bertujuan untuk menahan tanah agar tidak longsor dan meninggikan lereng alam suatu tanah. Di lapangan, dinding penahan tanah dapat ditemui pada saluran air di samping jalan, pada pinggir sungai agar tebing sungai tidak longsor, pada bendungan dan saluran irigasi dan dinding penahan bukit agar tidak longsor.

Tabel 2.20
Perkembangan Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung
dan Aliran Sungai Rawan Longsor
Tahun 2013-2015 Kota Langsa

Uraian	Satuan	2013	2014	2015
Jumlah lokasi pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	km	0,21	0,21	0,21
Jumlah seluruh wilayah rawan longsor	km	12,4	12,4	12,4
Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota	%	1,7	1,7	1,7

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa, 2015

Pembangunan turap di aliran sungai selama periode 2013-2015 relatif tetap yaitu hanya 0,21 km atau sekitar 1,7 persen dari jumlah seluruh wilayah longsor yang mencapai 12,4 km.

2.3.1.4. Perumahan

2.3.1.4.1. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Air Bersih (*clean water*) adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah dimasak. Air Minum (*drinking water*) adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum (Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002).

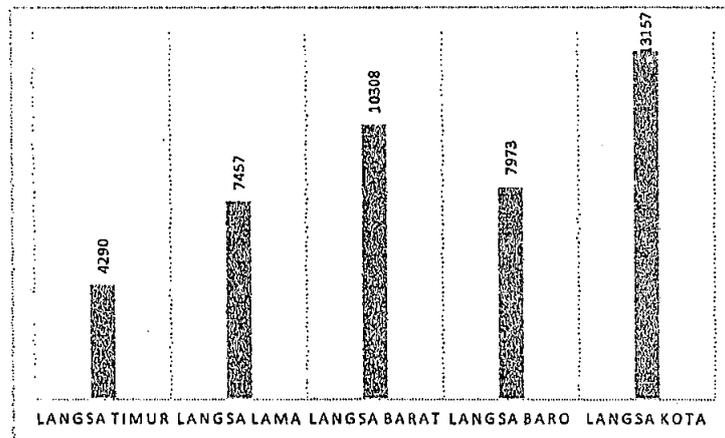
Sumber air bersih dapat dibedakan atas (1) Air Hujan; (2) Air Sungai dan Danau; (3) Mata Air; (4) Air Sumur Dangkal; dan (5) Air Sumur Dalam. Pada tahun 2014, persentase penduduk berakses air minum layak di Kota Langsa mencapai 96,17% atau sekitar 31.750 RT dari 33.015 RT.

2.3.1.4.2. Rumah Tangga Pengguna Listrik

Pelanggan PLN di Kota Langsa dari tahun ke tahun terus meningkat. Perkembangan jumlah pelanggan listrik pada tahun 2014 didominasi oleh pelanggan yang berdomisili di kecamatan Langsa Kota yang mencapai 13.157 pelanggan, diikuti oleh pelanggan yang berada di kecamatan Langsa Barat sebanyak 10.308 pelanggan. Sedangkan di kecamatan Langsa Timur, memiliki pelanggan PLN yang paling sedikit yaitu hanya sebanyak

4.290 pelanggan. Ini dapat dimaklumi mengingat dari sisi jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi masyarakat kecamatan Langsa Timur yang relatif sedikit.

Grafik 2.16
Banyaknya Jumlah Pelanggan Listrik PLN
Tahun 2014 Kota Langsa



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa, 2016

2.3.1.4.3. Rumah Tangga Bersanitasi

Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi, sebagai berikut:

- a. Fasilitas Air bersih;
- b. Pembuangan Tinja;
- c. Pembuangan air limbah (air bekas);
- d. Pembuangan sampah.

Perkembangan persentase rumah tangga bersanitasi di Kota Langsa sepanjang tahun 2013-2015 cenderung mengalami stagnasi dari 48 persen RT menjadi 49 persen pada tahun 2014 dan 2015.

Tabel 2.21
Perkembangan Rumah Tinggal Berakses Sanitasi
Tahun 2013-2015 Kota Langsa

Uraian	Satuan	2013	2014	2015
Jumlah Rumah Tinggal Berakses Sanitasi	Unit	13.443	15.443	17.743
Jumlah Rumah Tinggal	Unit	28.208	31.788	35.931
Persentase Rumah Tinggal Berakses Sanitasi	%	48	49	49

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa, 2016

2.3.1.4.4. Rumah Layak Huni

Rasio rumah layak huni adalah perbandingan jumlah rumah layak huni dengan jumlah rumah tinggal. Secara umum rumah layak huni adalah rumah yang memiliki kecukupan minimal unsur ruang dan luas ruang serta kualitas bangunannya yang memenuhi standar teknis. Terkait dengan kebutuhan rumah layak huni, pemerintah Kota Langsa juga berusaha untuk terus menambah jumlah rumah dengan cara membangun dan melakukan rehab bagi para penduduk yang dikategorikan tidak mampu. Upaya ini, sedikit banyaknya telah membuahkan hasil yang ditandai dengan meningkatnya persentase rumah layak huni pada tahun 2014 yaitu sebanyak 44 persen menjadi 45 persen di tahun 2014 dan 2015.

Tabel 2.22
Perkembangan Rumah Layak Huni
Tahun 2013-2015 Kota Langsa

Uraian	Satuan	2013	2014	2015
Jumlah rumah layak huni	unit	12.365	14.165	16.265
Jumlah rumah tinggal	unit	28.208	31.788	35.931
Rasio rumah layak huni		0.44	0.45	0.45

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa, 2016

2.3.1.4.5. Lingkungan Pemukiman Kumuh

Perkembangan lingkungan permukiman di daerah perkotaan tidak terlepas dari pesatnya laju pertumbuhan penduduk baik karena faktor pertumbuhan penduduk secara alami serta proses urbanisasi.

Tabel 2.23
Perkembangan Lingkungan Pemukiman Kumuh
Tahun 2013-2015 Kota Langsa

Uraian	Satuan	2013	2014	2015
Luas pemukiman kawasan kumuh	ha	90,14	90,14	72,105
Luas Wilayah	ha	26.241	26.241	26.241
Lingkungan pemukiman kumuh	%	0,34	0,34	0,27

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa, 2016

Pertumbuhan penduduk dan terbatasnya lahan di Kota Langsa, telah menyebabkan semakin berkembangnya rumah petak kecil yang diperjualbelikan dan disewakan kepada para pendatang.

Rumah-rumah petak kecil tersebut kemudian berkembang menjadi kawasan padat dan kumuh yang disebut dengan kawasan kumuh (*slum area*). Kawasan kumuh adalah sebuah kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi di sebuah kota yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin. Di beberapa wilayah, kawasan kumuh juga menjadi pusat masalah kesehatan karena kondisinya yang tidak higienis.

Perkembangan luas lingkungan pemukiman kumuh tahun 2013-2015 di Kota Langsa menunjukkan tren yang positif, dimana pada tahun 2014 persentase lingkungan pemukiman kumuh sebesar 0,34 persen, turun pada tahun 2015 menjadi 0,27 persen.

2.3.1.5. Penataan Ruang

Penataan ruang di Kota Langsa sepenuhnya mengacu pada RTRW Kota Langsa yang tercantum dalam Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Langsa Tahun 2012-2032. Tujuan penataan ruang di wilayah Kota Langsa berdasarkan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Sebagai dasar untuk memformulasikan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kota Langsa;
2. Memberikan arahan bagi indikasi program utama dalam RTRW Kota Langsa;
3. Sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota Langsa.

Selanjutnya mengenai penetapan kawasan strategis Kota Langsa yang diatur dalam RTRW Kota Langsa Tahun 2012-2032 dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang yaitu:

- a) Kawasan strategis dari sudut pandang kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:
 1. Kawasan strategis dari sudut pandang kepentingan ekonomi yaitu kawasan Pusat Perdagangan dan Jasa atau *Central Bisnis Distric (CBD)* seluas 253,91 Ha;
 2. Kawasan industri Alue Raya di Gampong Sungai Lueng Kecamatan Langsa Timur seluas 600,83 Ha;
 3. Kawasan industri Buket Rata di Gampong Buket Rata Kecamatan Langsa Timur seluas 300 Ha;

4. Kawasan industri Timbang Langsa di Gampong Timbang Langsa Kecamatan Langsa Baro seluas 50 Ha;
 5. Kawasan industri eks Kopalmas di Gampong Kuala Langsa Kecamatan Langsa Barat seluas 115,52 Ha;
 6. Kawasan industri sedang Alue Dua di Gampong Alue Dua Kecamatan Langsa Baro seluas 56,92 Ha;
 7. Kawasan industri penyangga di Gampong Sungai Pauh Kecamatan Langsa Barat seluas 56,92 Ha;
 8. Pelabuhan Kuala Langsa di Gampong Kuala Langsa Kecamatan Langsa Barat seluas 13,00 Ha.
- b) Kawasan strategis ditinjau dari sudut pandang kepentingan sosial budaya, meliputi:
1. Kawasan pendidikan di Gampong Meurandeh Kecamatan Langsa Lama seluas 223,41 Ha; dan
 2. Kawasan kesehatan di Gampong Pondok Kelapa Kecamatan Langsa Baro seluas 15,32 Ha.

2.3.1.5.1. Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

Ruang Terbuka Hijau kota adalah bagian dari ruang-ruang terbuka (*open spaces*) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi guna mendukung manfaat langsung atau tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan tersebut. Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang luas minimal Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang harus ada pada kawasan permukiman adalah sebesar 30%. Dari luas tersebut 20% diantaranya adalah RTH Publik dan sebesar 10% adalah untuk RTH privat. Pada tahun 2014, persentase ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB di Kota Langsa adalah sebesar 74,41 persen.

2.3.1.6. Perencanaan Pembangunan

Ketersediaan dokumen perencanaan sangat diperlukan untuk menjamin agar program kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Kota Langsa dapat berjalan sesuai seperti yang

direncanakan. Dokumen perencanaan daerah yang ada di Kota Langsa antara lain sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagaimana tertuang dalam Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Langsa Tahun 2007-2027;
2. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang dituangkan dalam Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Langsa Tahun 2013-2032;
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagaimana yang tertuang dalam Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah melalui Qanun Kota Langsa Nomor 19 tentang Perubahan Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Langsa Tahun 2012-2017;
4. Rencana Kerja Pembangunan Kota (RKPK) sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Walikota Langsa Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Kota Langsa Tahun 2017.

2.3.1.7. Perhubungan

Perkembangan urusan perhubungan sangat erat kaitannya dengan ketersediaan infrastruktur daerah, peningkatan jumlah kendaraan serta perkembangan jumlah penduduk. Sebagai kota yang terletak di jalan lintas Sumatera, jumlah arus penumpang angkutan umum baik yang masuk dan keluar daerah terus meningkat dari 188.307 penumpang pada tahun 2013 menjadi 216.916 penumpang pada tahun 2015. Peningkatan arus penumpang ini juga ikut meningkatkan jumlah izin trayek yang dikeluarkan, yakni dari 5 izin trayek menjadi 8 izin trayek.

Tabel 2.24
Perkembangan Indikator Urusan Perhubungan
Tahun 2013-2015 Kota Langsa

Uraian	2013	2014	2015
Jumlah arus penumpang angkutan umum	188.307	206.586	216.916
Jumlah izin trayek yang dikeluarkan	5	8	8
Jumlah uji KIR angkutan umum	890	909	954
Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	30 menit	30 menit	30 menit
Jumlah terminal	1	1	1
Jumlah pelabuhan	1	1	1

Sumber : Dishubkominfo Kota Langsa, 2016

Peningkatan jumlah angkutan umum selama periode 2013-2015 terus mengalami, kenaikan ini diikuti dengan jumlah angkutan umum yang lakukan uji KIR dari 890 angkutan naik menjadi 954 angkutan, dengan rata-rata lama pengujian 30 menit. Jumlah terminal dan pelabuhan di Kota Langsa selama beberapa periode masih tetap sama yaitu masing-masing sebanyak satu buah.

2.3.1.8. Lingkungan Hidup

2.3.1.8.1. Penanganan Sampah

Dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2008, pengelolaan sampah dimaksudkan adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap berbagai jenis bahan pokok dan hasil teknologi serta meningkatnya usaha atau kegiatan penunjang pertumbuhan ekonomi suatu daerah, juga memberikan kontribusi yang besar terhadap kuantitas dan kualitas sampah yang dihasilkan. Perkembangan laju *volume* timbunan sampah di Kota Langsa mengalami peningkatan setiap tahunnya. *Volume* timbunan persampahan tergantung pada *volume* jenis sampah yang dihasilkan, diantaranya sampah pemukiman atau perumahan, sampah pasar, sampah industri dan penyapuan jalan atau fasilitas umum. Tercatat selama periode 2012-2014, persentase penanganan sampah di Kota Langsa mengalami peningkatan, pada tahun 2012 persentase penanganan sampah sebesar 14 persen,

meningkat tahun 2013 menjadi 15 persen dan hingga tahun 2014 persentase penanganan sampah di kota kembali meningkat secara signifikan mencapai 28 persen.

Tabel 2.25
Penanganan Sampah Tahun 2012-2014 Kota Langsa

No.	URAIAN	2012	2013	2014
1	Volume Sampah yang Tertangani (m3)	27	29	56
2	Volume Produksi Sampah (m3)	196	196	197
3	Penanganan Sampah (%)	14	15	28

Sumber : BLHKP Kota Langsa, Tahun 2015

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumberdaya. Dari sudut pandang kesehatan lingkungan, pengelolaan sampah dipandang baik jika sampah tersebut tidak menjadi media berkembang biaknya bibit penyakit serta sampah tersebut tidak menjadi medium perantara menyebarkan suatu penyakit.

2.3.1.9. Pertanahan

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam utama, selain mempunyai nilai batiniah yang mendalam bagi masyarakat, juga berfungsi sangat strategis dalam memenuhi kebutuhan negara dan masyarakat yang makin beragam dan meningkat. Demikian pentingnya kegunaan tanah bagi hidup dan kehidupan manusia, maka campur tangan negara melalui aparatnya termasuk pemerintah daerah dalam tatanan hukum pertanahan merupakan hal yang mutlak. Hal ini ditindaklanjuti dengan pemberian landasan kewenangan hukum untuk bertindak dalam mengatur segala sesuatu yang terkait dengan tanah. Khusus tanah negara, pada tahun 2014 Pemerintah Kota Langsa telah berhasil menyelesaikan kasus negara sebesar 100 persen. Angka ini meningkat secara signifikan dari tahun 2013 yang hanya sebesar 44,44 persen. Perkembangan luas lahan bersertifikat di Kota Langsa tahun 2013 dan 2014 cenderung mengalami penurunan dari tahun 2012. Tahun 2012, luas lahan bersertifikat sebesar 90,08 persen turun menjadi 43,38 persen pada tahun

2013 namun kembali naik menjadi 67,36 persen pada tahun 2014. Terkait dengan perkembangan urusan pertanahan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.26
Perkembangan Urusan Pertanahan
Tahun 2012-2014 Kota Langsa

Uraian	2012	2013	2014
Luas Lahan Bersertifikat	90,08	43,38	67,36
Penyelesaian Kasus Tanah Negara	0	44,44	100
Penyelesaian Izin Lokasi	0	100	0

Sumber : LPPD Kota Langsa, Tahun 2015

2.3.1.10. Kependudukan dan Catatan Sipil

Salah satu tujuan utama dari administrasi kependudukan adalah tersedianya dokumen kependudukan, yaitu sebagai dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Permasalahan utama urusan kependudukan dan catatan sipil adalah masalah administrasi kependudukan. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Pada tahun 2013 dan 2014, persentase kepemilikan KTP di Kota Langsa mencapai 100 persen. Angka ini turun menjadi 91 persen pada tahun 2015. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya jumlah penduduk wajib KTP dan juga jumlah penduduk yang telah memiliki KTP. Penerapan KTP berbasis NIK juga telah diwujudkan di Kota Langsa dengan tujuan agar data kependudukan seluruh penduduk terekam dengan baik dan tidak tumpang tindih.

Tabel 2.27
Perkembangan Pelayanan Administrasi Kependudukan
Tahun 2013-2015 Kota Langsa

Uraian	2013	2014	2015
Jumlah penduduk yang telah memiliki KTP (jiwa)	119.436	93.919	82.968
Jumlah penduduk wajib KTP (jiwa)	119.436	93.919	91.657
Kepemilikan KTP (%)	100	100	91
Penerapan KTP berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah

Sumber : Disdukcapil Kota Langsa, Tahun 2016

2.3.1.11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan adalah usaha sistematis dan terencana untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Pemberdayaan perempuan sebagai sumber daya insani, diupayakan agar potensi yang dimiliki perempuan dalam hal kuantitas maupun kualitas tidak dibawah laki-laki. Sedangkan tujuan pemberdayaan perempuan adalah untuk meningkatkan status, posisi dan kondisi perempuan agar dapat mencapai kemajuan yang setara dengan laki-laki. Perkembangan pemberdayaan perempuan antara lain dapat dilihat dari jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintahan maupun swasta. Jumlah persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah di Kota Langsa mengalami penurunan dari tahun 2014-2015, yaitu 85 persen menjadi 80 persen dari jumlah pekerja perempuan.

Tabel 2.28
Perkembangan Partisipasi Perempuan
Tahun 2013-2015 Kota Langsa

Uraian	2013	2014	2015
Jumlah Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintahan	2.883	3.929	2.984
Jumlah Pekerja Perempuan di Lembaga Swasta	647	711	725
Jumlah Pekerja Perempuan	3.530	4.640	3.709
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah (%)	82	85	80
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta (%)	18	15	20

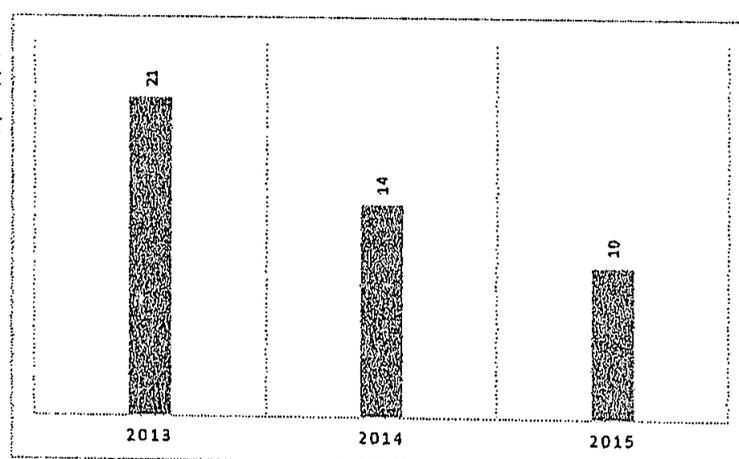
Sumber : BKKBPP Kota Langsa, Tahun 2016

Berbanding terbalik, persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta selama dua (2) tahun terakhir 2014-2015

meningkat yaitu dari 15 persen naik menjadi 20 persen dari jumlah pekerja perempuan.

Terkait dengan permasalahan gender lainnya, kekerasan rumah tangga menurut pasal 1 butir 1 UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Jumlah kejadian KDRT di Kota Langsa pada tahun 2013 sebanyak 21 kasus, turun di tahun 2014 menjadi 14 kasus, dan pada tahun 2015 kembali turun menjadi 10 kasus. Diharapkan di masa yang akan datang, selain adanya campur tangan Pemerintah Kota Langsa, diperlukan juga peran aktif masyarakat dalam upaya menekan seminimal mungkin jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), mengingat dampak dari KDRT akan menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, seksual, psikis, dan/atau penelantaran di dalam kehidupan rumah tangga.

Grafik 2.17
Jumlah Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Tahun 2013-2015 Kota Langsa



Sumber : BKKBPP Kota Langsa, Tahun 2016

2.3.1.12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Salah satu tujuan keluarga berencana adalah untuk mewujudkan keluarga sejahtera bahagia yaitu dengan keluarga kecil dan ketahanan keluarga dengan mengendalikan kelahiran. Selain itu, tujuan lainnya dari program keluarga berencana dan keluarga sejahtera adalah untuk meningkatkan Partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap KB. Rasio akseptor KB di Kota Langsa periode 2013-2015 cenderung mengalami sedikit penurunan dari 0,72 di tahun 2013 menjadi 0,71 di tahun 2015. Penurunan ini diakibatkan oleh melambatnya pertumbuhan jumlah pengguna akseptor KB dan jumlah pasangan usia subur.

Tabel 2.29
Perkembangan Rasio Akseptor KB
Tahun 2013-2015 Kota Langsa

Uraian	2013	2014	2015
Jumlah Pengguna Akseptor KB	16.543	17.278	17.280
Jumlah Pasangan Usia Subur	23.024	24.261	24.270
Rasio Akseptor KB	0.72	0.71	0.71

Sumber : BKKBPP Kota Langsa, Tahun 2016

2.3.1.13. Sosial

Penanganan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menjadi salah satu program prioritas pemerintah termasuk Kota Langsa. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup; memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian; meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial; meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan

berkelanjutan; dan meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Tabel 2.30
Jumlah Panti Asuhan dan PMKS yang Tertangani
Tahun 2013-2015 Kota Langsa

Uraian	2013	2014	2015
Jumlah Panti Asuhan baik swasta dan pemerintah dan Jumlah Panti Rehabilitasi baik swasta dan pemerintah	5	5	5
Jumlah PMKS yang diberikan bantuan	270	6.796	3.851
Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan	2.146	4.483	4.483
Jumlah PMKS yang tertangani	270	6.796	3.851
Jumlah PMKS yang ada	2.146	22.413	18.562
PMKS yg memperoleh bantuan sosial (%)	13	152	86
Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (%)	13	30	21

Sumber : Dinsosmobduknaker Kota Langsa, Tahun 2016

Beberapa penyebab maraknya jumlah PMKS di Kota Langsa antara lain disebabkan oleh faktor ekonomi, juga faktor mobilitas penduduk/PMKS yang berasal dari luar daerah yang ingin mencari peruntungan di Kota Langsa. Kebersamaan dari semua pihak untuk mengurangi angka PMKS, khususnya peran pemerintah daerah, keterlibatan masyarakat, baik secara langsung maupun melalui kelompok-kelompok masyarakat diharapkan akan membuahkan hasil yang maksimal.

Jumlah panti asuhan dan panti rehabilitasi adalah sebanyak lima panti yang terdiri dari empat panti asuhan dan satu panti rehabilitasi. Persentase jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial sebesar 86 persen pada tahun 2015, turun dari tahun 2014 yang mencapai 152 persen. Sedangkan persentase penanganan PMKS juga menurun pada tahun 2015 yang hanya sebesar 21 persen dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 30 persen.

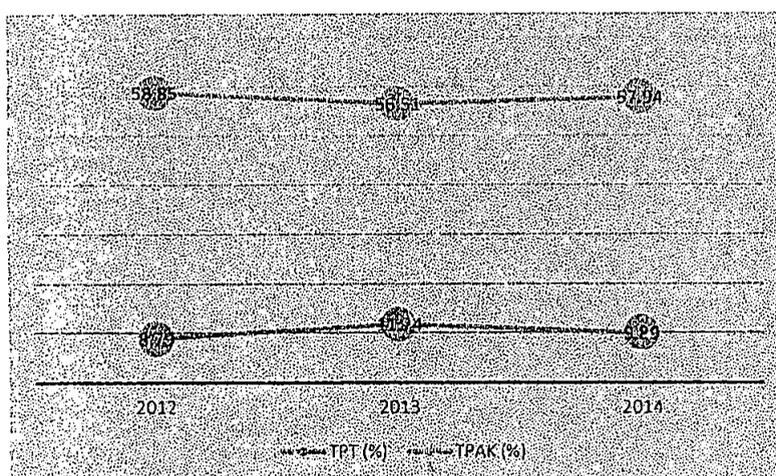
2.3.1.14. Ketenagakerjaan

Indikator keberhasilan kinerja bidang ketenakerjaan dapat diukur dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPAK memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi pada periode

tertentu. TPAK Kota Langsa pada tahun 2014 adalah sebesar 57,94 persen. Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2013 yang hanya sebesar 56,51 persen.

TPT mengindikasikan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. TPT Kota Langsa pada tahun 2014 adalah sebesar 9,89 persen yang berarti dari 100 penduduk angkatan kerja, terdapat 9,89 orang pengangguran.

Grafik 2.18
Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan
Tahun 2012-2014 Kota Langsa



Sumber : Statistik Daerah Kota Langsa, 2015

2.3.1.15. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Koperasi Aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha. Jumlah koperasi aktif di Kota Langsa periode 2013-2015 sangat berfluktuasi, dimana pada tahun 2013 sebanyak 28 persen meningkat pada tahun 2014 menjadi 40 persen, dan kemudian turun di tahun 2015 menjadi 35 persen.

Terkait dengan perkembangan UKM dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.31
Perkembangan Indikator Usaha Kecil Menengah dan Koperasi
Tahun 2013-2015 Kota Langsa

Uraian	2013	2014	2015
Jumlah Koperasi Aktif	91	136	117
Jumlah Seluruh Koperasi	323	339	333
Jumlah UKM Aktif Non BPR/LKM UKM	510	490	2.944
Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	552	464	668
Jumlah Seluruh UKM	1.062	954	3.612
Persentase koperasi aktif (%)	28	40	35
Persentase Usaha Mikro dan Kecil (%)	52	49	18

Sumber : Diskoperindagkop Kota Langsa, Tahun 2016

2.3.1.16. Kebudayaan

Melestarikan dan mempertahankan suatu kebudayaan bisa dilakukan dengan cara mendalami atau paling tidak mengetahui tentang budaya itu sendiri. Mempertahankan nilai budaya, salah satunya dengan mengembangkan seni budaya tersebut disertai dengan keadaan yang kita alami sekarang ini, yang bertujuan untuk menguatkan nilai-nilai budayanya. Pelestarian budaya di Kota Langsa selama ini dilakukan dengan mengadakan berbagai penyelenggaraan festival seni dan budaya, meskipun intensitasnya tidak begitu tinggi namun kegiatan ini sudah menjadi kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Langsa. Selain penyelenggaraan seni dan budaya, penyediaan sarana penyelenggaraan juga memiliki peran penting dalam pelestarian kebudayaan itu sendiri. Di Kota Langsa, jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya adalah sebanyak 3 unit.

Tabel 2.32
Perkembangan Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya
Tahun 2012-2015 Kota Langsa

No.	Indikator	2012	2013	2014	2015
1	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya (unit)	3	3	3	3

Sumber : Disporabudpar Kota Langsa, Tahun 2016

2.3.1.17. Kepemudaan dan Olahraga

Organisasi pemuda adalah sekelompok pemuda yang bekerjasama dengan suatu perencanaan-perencanaan kerja dan peraturan-peraturan, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jumlah perkembangan organisasi pemuda di Kota Langsa hingga akhir tahun 2015, telah terjadi penurunan menjadi lima organisasi dari tahun sebelumnya yang mencapai 17 organisasi kepemudaan. Penurunan jumlah ini berakibat kepada penurunan kegiatan kepemudaan dari tiga kegiatan pada tahun 2014 menjadi satu kegiatan pada tahun 2015.

Untuk tetap menjaga prestasi dibidang kepemudaan dan olah raga, Pemerintah Kota Langsa melalui SKPK terkait berupaya tetap melakukan program peningkatan peran serta kepemudaan melalui kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan di wilayah Kota Langsa. Kegiatan ini tentu saja bertujuan untuk menjadikan pemuda-pemuda yang ada di Kota Langsa menjadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, kreatif, inovatif, dan mandiri.

Terkait dengan olah raga, organisasi olahraga adalah organisasi formal yang dibentuk oleh sekelompok masyarakat olahraga yang bekerjasama dengan suatu perencanaan-perencanaan kerja dan peraturan-peraturan, untuk mencapai suatu tujuan pembangunan dunia olahraga. Di Kota Langsa, organisasi olah raga selama periode 2013-2015 berjumlah 32 organisasi atau klub olah raga dari berbagai cabang.

Tabel 2.33
Perkembangan Kepemudaan dan Olah Raga
Tahun 2013-2015 Kota Langsa

Uraian	2013	2014	2015
Jumlah Organisasi Pemuda	17	17	5
Jumlah Organisasi Olahraga	32	32	32
Jumlah Kegiatan Kepemudaan	2	3	1
Jumlah Kegiatan Olahraga	7	2	6
Jumlah Lapangan Olahraga	303	300	285

Sumber : Disporabudpar Kota Langsa, Tahun 2016

2.3.1.18. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Upaya peningkatan kesatuan bangsa masih menjadi perhatian utama dari tingkat pusat hingga daerah tingkat II, beberapa manfaat yang diperoleh dari upaya tersebut antara lain memperkuat jati diri NKRI, memperkuat ketahanan nasional dalam menghadapi segala ancaman dan gangguan dalam bernegara, memudahkan pencapaian nasional sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke empat, serta menciptakan suasana yang tenteram aman dan damai.

Sebagai daerah konflik dimasa lalu, Kota Langsa tetap berupaya memberikan perhatian khusus terhadap urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri agar suasana damai seperti saat sekarang ini tetap dapat dipertahankan. Pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri Kota Langsa diarahkan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta pencegahan tindak kriminal, meningkatkan wawasan kebangsaan dan persatuan kesatuan bangsa, meningkatkan upaya pemberantasan penyalahgunaan penyakit masyarakat (pekat), serta meningkatkan pendidikan politik dan demokrasi masyarakat. Kinerja urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.34
Perkembangan Indikator Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Tahun 2014-2015 Kota Langsa

Uraian	2014	2015
Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	1	1
Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah	1	1
Jumlah LSM	60	64
Jumlah Ormas	25	41
Jumlah OKP	17	17
Jumlah LSM aktif	32	32
Jumlah Ormas aktif	39	42
Jumlah OKP aktif	5	5
Jumlah partai nasional	12	12
Jumlah partai lokal	3	3

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kota Langsa, Tahun 2016

2.3.1.19. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

2.3.1.19.1. Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Setiap anggota masyarakat membutuhkan rasa aman, rasa aman secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu situasi dan kondisi fisik yang teratur, tertib sesuai norma-norma yang berlaku. Ketertiban adalah keadaan yang sesuai dengan hukum, norma-norma serta kesepakatan bersama. Ketertiban lebih dekat dengan upaya penegakan hukum dan pemenuhan norma-norma. Di luar istilah keamanan dan ketertiban, terdapat pula istilah ketentraman dan ketertiban. Ketentraman secara umum dapat didefinisikan sebagai suasana batin dari individu dan atau masyarakat karena terpenuhinya kebutuhan dan keinginan sesuai norma-norma.

Tabel 2.35
Jumlah Polisi Pamong Praja, Personil Wilayatul Hisbah,
Berbagai Pelanggaran dan Penyelesaian Ketertiban
Tahun 2013-2015 Kota Langsa

No.	Uraian	2013	2014	2015
1	Jumlah Personil Satuan Polisi Pamong Praja	319	319	324
2	Jumlah Personil Wilayatul Hisbah	83	83	83
3	Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat	66	66	66
4	Jumlah Pos Kamling	212	212	212
5	Jumlah Perkara Penegakan Qanun (Pajak dan Retribusi Daerah)	100	162	257
6	Jumlah Penyelesaian Perkara Qanun (Pajak dan Retribusi Daerah)	100	105	164
7	Jumlah Pelanggaran Qanun (Pajak dan Retribusi Daerah)	45	162	169
8	Jumlah Patroli Petugas Satpol PP Pemantaun dan Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	432	720	1.008
9	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	17	95	168
10	Jumlah Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	17	100	181
11	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	20	20	20
12	Rasio jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	4	4	4
13	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	1 : 3	1 : 3	1 : 3
14	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)	100	95	93

Sumber : Kantor Satpol PP & WH Kota Langsa, Tahun 2016

Kapasitas Pemerintah Kota Langsa dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat diperlihatkan dengan jumlah polisi Pamong Praja dan personil Wilayahul Hisbah, serta jumlah Poskamling dalam memberdayakan masyarakat disetiap gampong untuk ikut berperan aktif dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta keamanan lingkungan. Perkembangan rasio jumlah Polisi Pamong Praja terhadap 10.000 penduduk cenderung tidak berubah selama periode 2013-2015, yaitu 20 personil Polisi Pamong Praja terhadap 10.000 penduduk Kota Langsa. Sedangkan rasio jumlah Poskamling untuk setiap gampong adalah tetap tidak berubah, dimana setiap gampong di Kota Langsa telah memiliki ± 3 Poskamling.

Terkait penyelesaian pelanggaran K3 selama tiga tahun terakhir cenderung mengalami penurunan, dimana pada tahun 2013 yaitu sebanyak 100 persen, turun pada tahun 2014 menjadi 95 persen, dan pada tahun 2015 kembali turun menjadi 93 persen.

2.3.1.19.2. Pelaksanaan Syariat Islam

Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh termasuk di Kota Langsa meliputi bidang aqidah, syar'iyah, dan akhlak. Setiap pemeluk agama Islam di Aceh wajib menaati dan mengamalkan syari'at Islam dan setiap orang yang bertempat tinggal atau berada di Aceh wajib menghormati pelaksanaan syari'at Islam. Pemerintahan Aceh termasuk Pemerintah Kota Langsa menjamin kebebasan, membina kerukunan, menghormati nilai-nilai agama yang dianut oleh umat beragama dan melindungi sesama umat beragama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya.

Dalam hal penegakan syariat Islam, jumlah penyelesaian perkara penegakan qanun syariat Islam mengalami peningkatan dari 596 kasus di tahun 2014 naik menjadi 1.439 kasus pada tahun 2015, jumlah ini tentunya harus menjadi perhatian serius bagi SKPK pelaksana serta pemangku kepentingan lainnya agar jumlah kasus perkara penegakan syariat Islam turun secara

signifikan dari tahun ke tahun. Terkait dengan pelaksanaan syariat Islam di Kota Langsa dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.36
Perkembangan Indikator Pelaksanaan Syariat Islam
Tahun 2013-2015 Kota Langsa

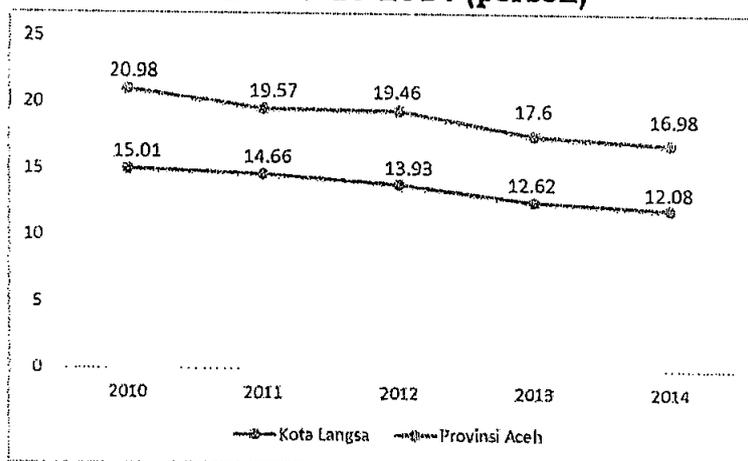
Uraian	2013	2014	2015
Jumlah perkara penegakan qanun syariat Islam	617 Kasus	596 Kasus	1.439 Kasus
Jumlah penyelesaian perkara penegakan qanun syariat Islam	617 Kasus	596 Kasus	1.439 Kasus
Jumlah Hafiz	32 Orang	26 Orang	26 Orang
Jumlah Ulama	30 Orang	30 Orang	30 Orang
Jumlah Imam (Imam Gampong, Imam Masjid dan Imam Meunasah)	328 Orang	352 Orang	352 Orang
Jumlah Da'i	82 Orang	85 Orang	90 Orang
Jumlah Jema'ah Haji	132 Orang	159 Orang	122 Orang

Sumber : Dinas Syariat Islam Kota Langsa, Tahun 2016

2.3.1.19.3. Angka Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah penting yang harus terus diperhatikan dan ditekan pertumbuhannya. Tingkat kemiskinan mencerminkan buruk tidaknya upaya peningkatan kesejahteraan di suatu daerah. Persentase penduduk miskin di Kota Langsa pada tahun 2010 sebesar 15,01 persen turun menjadi 14,66 persen pada tahun 2011. Penurunan ini terus berlanjut hingga pada tahun 2014 menjadi 12,08 persen dari jumlah penduduk Kota Langsa.

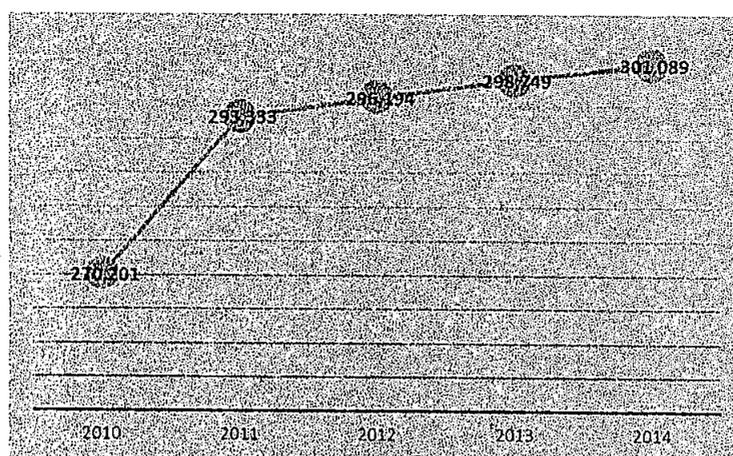
Grafik 2.19
Persentase Penduduk Miskin Kota Langsa
Tahun 2010-2014 (persen)



Sumber : BPS Aceh, Tahun 2016

Indikator kemiskinan lain yang dapat digunakan untuk mengukur perkembangan kemiskinan adalah angka garis kemiskinan. Garis kemiskinan menggambarkan batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan yang memisahkan seseorang tergolong miskin atau tidak. Hingga tahun 2014 angka garis kemiskinan Kota Langsa berada pada level Rp.301.089.

Grafik 2.20
Garis Kemiskinan Tahun 2010-2014 Kota Langsa (rupiah)



Sumber : LPPKD, Tahun 2016

Berbagai program kegiatan dari berbagai sumber pendanaan masih tetap dilakukan oleh Pemerintah Kota Langsa dalam rangka menekan angka kemiskinan. Antara lain adalah dengan menyediakan rumah sehat sederhana bagi penduduk miskin yang berada di setiap desa baik berupa bangun baru ataupun rehab. Selain beberapa kegiatan yang bersifat fisik, Pemerintah Kota Langsa juga masih tetap melaksanakan kegiatan non fisik seperti memberikan dukungan penuh (*sharing*) terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin.

2.3.1.19.4. Aparatur Pemerintahan

Secara umum, Pegawai Negeri Sipil (PNS) mempunyai peran utama sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan; menjalankan fungsi manajemen pelayanan publik; pengelola pemerintahan; *manager/corporate leader*; dan administrator (pengelola asset dan keuangan negara/ daerah). Dengan demikian,

tuntutan reformasi birokrasi secara langsung akan membawa konsekuensi bagi arah perbaikan sistem kepegawaian negara yang harus diikuti, khususnya masalah kinerja aparatur birokrasi PNS yang sampai saat ini masih dianggap belum sesuai harapan. Upaya-upaya peningkatan kinerja aparatur selama ini masih terus dilakukan, misalnya dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan serta pemberian kesempatan tugas dan izin belajar. Selain itu, pemberian penghargaan terhadap aparatur yang berprestasi masih terus dilakukan. Lebih rinci terkait perkembangan indikator kepegawaian dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.37
Perkembangan Indikator Kepegawaian
Tahun 2013-2015 Kota Langsa

Uraian	2013	2014	2015
Kepemilikan Karpeg (%)	85	85	85
Kepemilikan Taspen (%)	100	96	100
Kepemilikan Karis dan Karsu (%)	90	80	100
Kepemilikan Sertifikat Sumpah (%)	0	100	0
Penerbitan SK Tugas Belajar (jumlah SK)	8	20	10
Penerbitan Surat Izin Belajar (jumlah SK)	137	50	30
Pelaksanaan Diklat CPNS (%)	0	100	100
Penjatuhan Hukuman Disiplin Aparatur (orang)	45	53	15
Proses Perceraian Aparatur (orang)	20	26	20
Kepemilikan Karpeg Elektronik (%)	0	100	95
Ketersediaan Daftar Urut Kepegawaian (DUK) (%)	0	95	95
Pemberian Penghargaan Aparatur yang Berprestasi (orang)	268	137	100
Jumlah Aparatur yang Mencapai BUP (orang)	59	45	36
Jumlah Pensiun Janda/Duda/Yatim (orang)	18	17	15
Jumlah Pensiun Atas Permintaan Sendiri (APS) (orang)	1	2	1
Jumlah SK Kenaikan Pangkat Periode April dan Oktober (orang)	959	1.098	1.100
Jumlah SK Impasing Jabatan (orang)	175	143	1.100
Jumlah Tenaga Honorer yang Diangkat Menjadi CPNS (melalui formasi K1 dan K2 atau yang sejenisnya) (orang)	213	58	0

Sumber : BKPP Kota Langsa, Tahun 2016

2.3.1.20. Ketahanan Pangan

Peningkatan ketahanan pangan dimaksudkan untuk mengoperasionalkan pembangunan dalam rangka

mengembangkan sistem ketahanan pangan baik di tingkat nasional maupun ditingkat masyarakat. Pangan dalam arti luas mencakup pangan yang berasal dari tanaman, ternak dan ikan untuk memenuhi kebutuhan atas karbohidrat, protein lemak dan vitamin serta mineral yang bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia. Ketahanan pangan diartikan sebagai terpenuhinya pangan dengan ketersediaan yang cukup, tersedia setiap saat di semua daerah, mudah memperoleh, aman dikonsumsi dan harga yang terjangkau.

Tabel 2.38
Perkembangan Luas Tanam, Luas Panen, Produksi Komoditi
Tanaman Pangan Tahun 2014 Kota Langsa

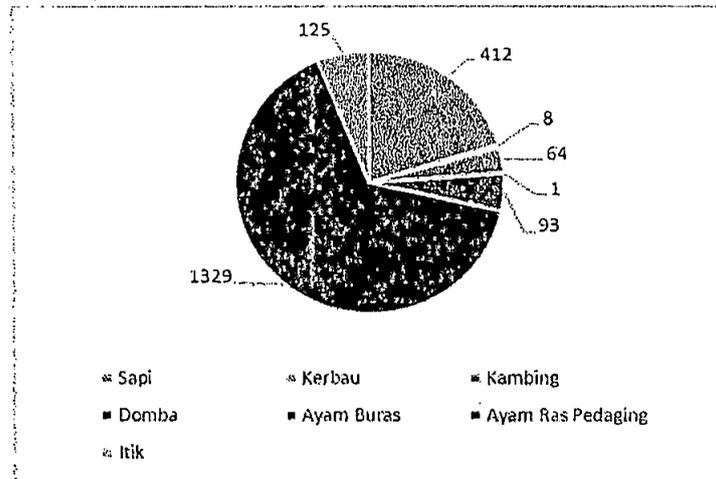
Komoditi	Luas Tanam (ha)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)
Padi	3.199	3.317	13.579
Jagung	3	2	7
Ubi Kayu	7	7	7

Sumber : BPS Kota Langsa, Tahun 2016

Ketahanan pangan di bidang tanaman pada tahun 2014 untuk komoditi padi mencapai nilai produksi sebesar 13.579 ton yang ditanam di area seluas 3.199 ha. Selanjutnya komoditi jagung dan ubi kayu mencapai tujuh ton yang ditanam di area seluas tiga hektar untuk jagung dan tujuh hektar untuk ubi kayu.

Terkait dengan ketahanan pangan yang berasal dari ternak, jumlah produksi daging ternak masih didominasi oleh ayam ras pedaging yaitu sebesar 1.329 ton, selanjutnya diikuti oleh produksi daging sapi yang mencapai 412 ton. Sedangkan jumlah produksi daging yang paling rendah, dihasilkan oleh daging domba yang hanya sebesar satu ton. Terkait dengan nilai produksi daging ternak tahun 2014 di Kota Langsa dapat dilihat dalam grafik berikut.

Grafik 2.21
Jumlah Produksi Daging Ternak
Tahun 2014 Kota Langsa (ton)



Sumber : BPS Kota Langsa, Tahun 2016

2.3.1.21. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam pasal dua (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga disebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK merupakan upaya memandirikan masyarakat dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. Sasaran Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan PKK adalah Keluarga di perdesaan dan perkotaan yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan kemampuan mental spiritual dan fisik material. Jumlah PKK di Kota Langsa periode tahun 2013-2015 adalah sebanyak 71 PKK dengan status seluruhnya adalah aktif.

2.3.1.22. Statistik

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, yang dimaksud dengan statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan

antarunsur dalam penyelenggaraan statistik. Statistik penting artinya dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam pembangunan. Hal tersebut mendasari perlu diselenggarakannya kegiatan statistik daerah yang bertujuan untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat dan mutakhir.

Data statistik yang selama ini tersedia di Kota Langsa adalah (1) Langsa Dalam Angka dengan jenis data yang ditampilkan meliputi sektor pemerintahan, kependudukan, dan tenaga kerja, kesejahteraan, pertanian, industri serta ekonomi dan keuangan; (2) PDRB Kota Langsa yang dapat memberikan gambaran tentang kondisi makro hasil pembangunan ekonomi di Kota Langsa; (3) IPM Kota Langsa yang memberikan informasi dengan derajat pendapatan per kapita masyarakat, usia harapan hidup penduduk, serta angka melek huruf masyarakat Kota Langsa; dan (4) Statistik Daerah yang memuat berbagai informasi/indikator terpilih yang terkait dengan pembangunan di berbagai sektor di Kota Langsa yang diharapkan dapat menjadi bahan rujukan/kajian dalam perencanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan.

2.3.1.23. Kearsipan

Menurut Undang-Undang nomor 7 tahun 1991, arsip adalah : (1) naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga-lembaga Negara dan badan-badan pemerintah dalam bentuk corak apapun baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok dalam rangka pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemerintah; (2) naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh badan-badan dalam bentuk tunggal maupun berkelompok dalam rangka pelaksanaan kehidupan kebangsaan. Mengelola arsip diperlukan teknik/cara mengelola arsip yang baik, benar dan terpadu. Hal ini bisa didapat melalui pelatihan-pelatihan pengelolaan arsip. Sebagai tindak lanjut dari pentingnya pengelolaan arsip, Pemerintah Kota Langsa selama ini selalu melaksanakan kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan.

Dengan kegiatan ini diharapkan agar pengelolaan arsip di lingkungan Pemerintah Kota Langsa agar dapat lebih baik lagi sehingga seluruh dokumen arsip akan menjadi informasi penting bagi generasi masa yang akan datang.

2.3.1.24. Komunikasi dan Informatika

Salah satu media penerapan teknologi informasi adalah *website*. Selama ini *website* telah menjadi kebutuhan yang wajib dan sebagai salah satu bentuk pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah bagi masyarakat luas. Saat ini, Pemerintah Kota Langsa telah menyediakan *website* resmi, yang dapat diakses oleh masyarakat luas melalui <http://www.langsakota.go.id>, ragam informasi terkait Kota Langsa dapat secara mudah diakses oleh siapapun juga. Selain *website*, di Kota Langsa juga terdapat 59 tower BTS (*base transceiver station*) yang berlokasi di lima kecamatan. Namun pemberian izin oleh pemerintah daerah melalui satuan kerja terkait terhadap pembangunan tower tersebut oleh pihak swasta perlu kembali dikaji dan harus mengikuti prosedur yang berlaku.

2.3.1.25. Perpustakaan

Perpustakaan adalah suatu wadah atau tempat di mana didalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat, yang disusun menurut sistim tertentu, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan. Perpustakaan bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat, sebagai penunjang kelangsungan pendidikan, serta sebagai sarana strategis dalam peningkatan sumberdaya manusia. Semakin banyaknya jumlah sarana dan prasarana perpustakaan maka semakin tinggi pula tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat. Di Kota Langsa hingga saat ini terdapat satu unit perpustakaan daerah dengan jumlah koleksi judul buku mencapai 7.266 judul buku dan 43.849 jumlah koleksi buku pada tahun 2015, dengan jumlah pengunjung mencapai 13.011 orang. Selain itu juga terdapat tiga unit mobil perpustakaan keliling yang siap melayani masyarakat hingga ke pelosok-pelosok kota.

Tabel 2.39
Perkembangan Indikator Kepustakaan
Tahun 2013- 2015 Kota Langsa

Uraian	2013	2014	2015
Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun	5.327	9.638	13.011
Jumlah koleksi judul buku yang tersedia	4.710	6.750	7.266
Jumlah koleksi buku yang tersedia	23.549	33.749	43.849

Sumber : Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, Tahun 2016

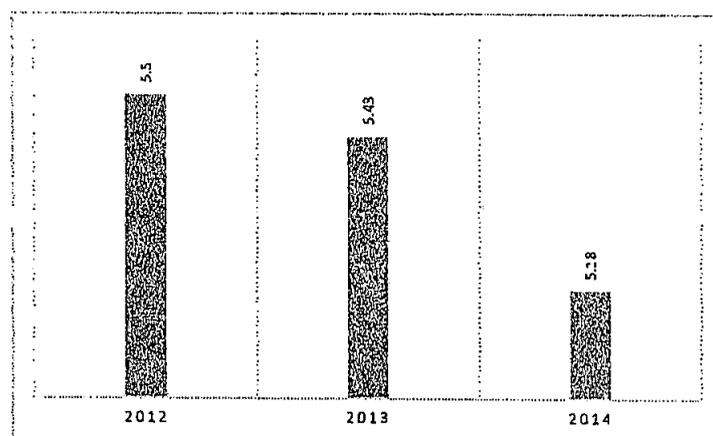
2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.3.2.1. Pertanian

Pembahasan subkategori pertanian mencakup pertanian tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, serta jasa pertanian dan perburuan hewan yang ditujukan untuk dijual. Kondisi di Kota Langsa, sebagai akibat kompetisi dengan sektor lain dalam hal penggunaan sumber daya lahan dan air, telah terjadi alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian, sehingga kontribusi sektor pertanian Kota Langsa cenderung mengalami penurunan.

Grafik 2.22

Kontribusi Sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian Terhadap PDRB Tahun 2012-2014 Kota Langsa (persen)



Sumber : BPS Kota Langsa, Tahun 2016

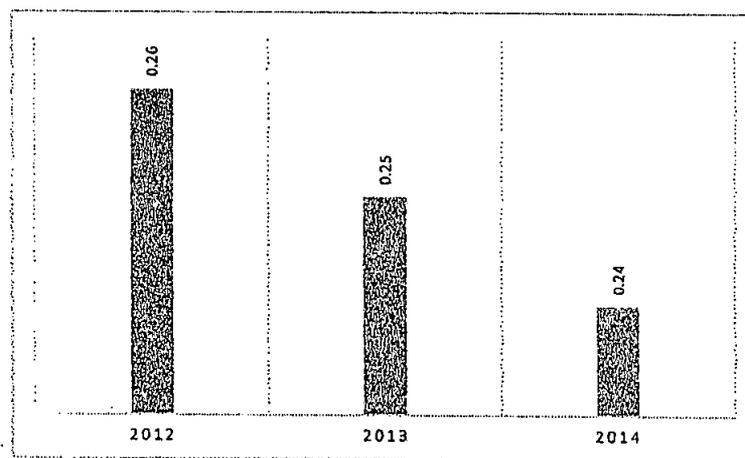
Alih fungsi lahan tersebut lebih banyak terjadi pada lahan sawah produktif dengan frekuensi tanam dan tingkat produktivitas tinggi. Berdasarkan PDRB ADHB, kontribusi sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian menurun dari 5,5 persen tahun 2012 menjadi 5,18 persen pada tahun 2014.

2.3.2.2. Kehutanan

Aktivitas sub kategori kehutanan meliputi kegiatan penebangan segala jenis kayu serta pengambilan daun-daunan, getah-getahan, dan akar-akaran, termasuk jasa yang menunjang kegiatan kehutanan berdasarkan system balas jasa/kontrak. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan kehutanan meliputi kayu gelondongan (baik yang berasal dari hutan rimba maupun hutan budidaya), kayu bakar, rotan, bamboo, dan hasil hutan lainnya termasuk juga jasa yang menunjang kegiatan kehutanan atas dasar balas jasa atau kontrak, termasuk kegiatan reboisasi hutan yang dilakukan atas dasar kontrak. Perkembangan kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Kota Langsa mengalami penurunan pada kurun waktu tahun 2012-2014, dimana kontribusi sektor kehutanan dan penebangan kayu mengalami penurunan dari 0,26 persen menjadi 0,24 persen terhadap PDRB ADHB.

Grafik 2.23

Kontribusi Sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu Terhadap PDRB Tahun 2012-2014 Kota Langsa (persen)



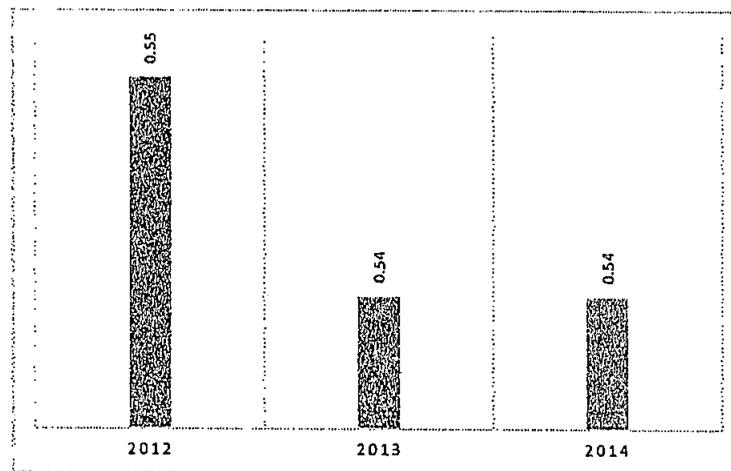
Sumber : BPS Kota Langsa, Tahun 2016

2.3.2.3. Energi dan Sumber Daya Mineral

Pertambangan dan penggalian dikelompokkan dalam empat subkategori, yaitu pertambangan dan gas bumi, pertambangan batubara dan lignit, pertambangan bijih logam serta pertambangan dan penggalian lainnya. Secara umum, pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya

pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian.

Grafik 2.24
Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian Terhadap PDRB
Tahun 2012-2014 Kota Langsa (persen)

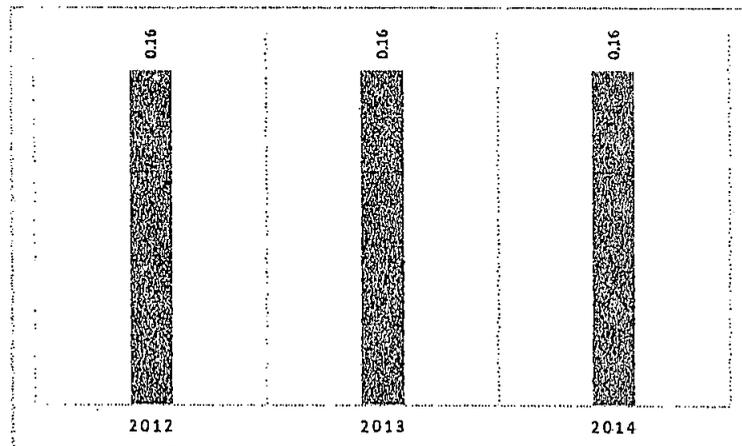


Sumber : BPS Kota Langsa, Tahun 2016

Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB ADHB periode 2012-2014 cenderung mengalami penurunan dari 0,55 persen menjadi 0,54 persen. Hal ini dapat dimaklumi mengingat ketersediaan lahan penambangan khususnya galian di Kota Langsa sangat terbatas.

Selain sektor pertambangan dan penggalian, sub sektor kelistrikan yang merupakan bagian dari sektor energi mencakup pembangkitan, pengiriman dan penyaluran tenaga listrik kepada konsumen, baik yang diselenggarakan oleh PT PLN maupun perusahaan swasta, seperti pembangkitan listrik oleh perusahaan milik pemerintah daerah, dan listrik yang diusahakan oleh swasta (perorangan maupun perusahaan) dengan tujuan untuk dijual. Listrik yang dibangkitkan atau diproduksi meliputi listrik yang dijual, dipakai sendiri, hilang dalam transmisi dan distribusi, dan listrik yang dicuri. Kontribusi sektor pengadaan listrik di Kota Langsa cenderung mengalami stagnasi yaitu sebesar 0,16 persen pada periode 2012-2014.

Grafik 2.25
Kontribusi Sektor Pengadaan Listrik Terhadap PDRB
Tahun 2012-2014 Kota Langsa (persen)

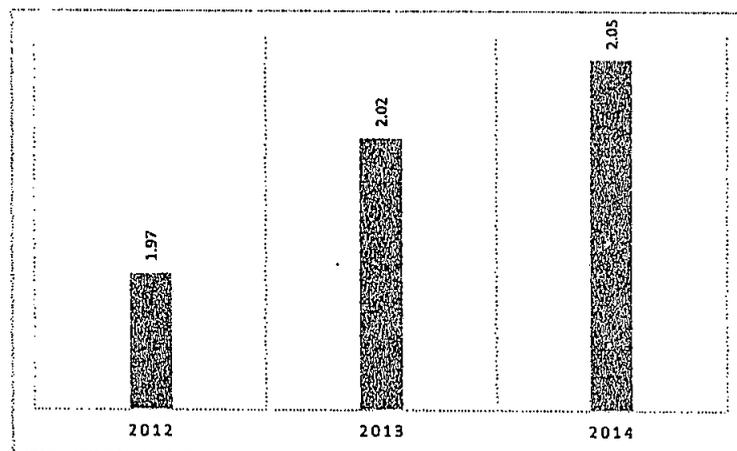


Sumber : BPS Kota Langsa, Tahun 2016

2.3.2.4. Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu dari sektor ekonomi yang paling penting dan potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber penerimaan negara dan daerah. Secara luas, pariwisata dipandang sebagai kegiatan yang mempunyai multidimensi dari rangkaian suatu proses pembangunan. Pembangunan sektor pariwisata menyangkut aspek sosial budaya, ekonomi dan politik.

Grafik 2.26
Kontribusi Sektor Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan
Minum Terhadap PDRB Tahun 2012-2014 Kota Langsa (persen)



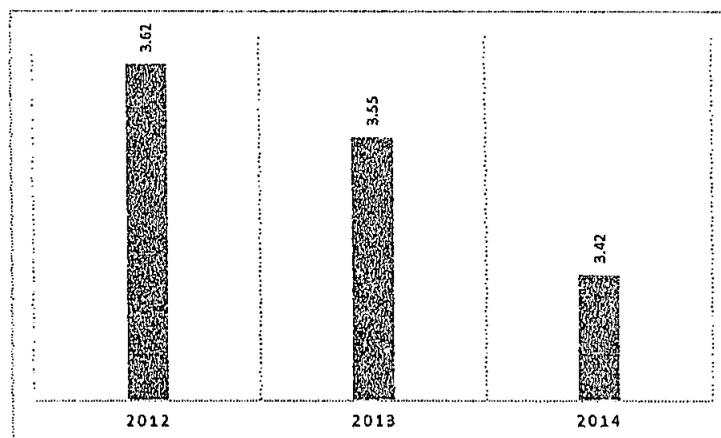
Sumber : BPS Kota Langsa, Tahun 2016

Dalam rangka usaha memperbesar pendapatan asli daerah, pengembangan dan pendayagunaan sumber daya dan potensi pariwisata daerah perlu digalakkan sehingga dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan ekonomi. Perkembangan pariwisata di Kota Langsa dapat ditinjau dari sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor ini terus mengalami peningkatan selama periode 2012-2014, dimana kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB ADHB pada tahun 2012 adalah sebesar 1,97 persen dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 2,05 persen.

2.3.2.5. Kelautan dan Perikanan

Salah satu sektor perekonomian yaitu sektor kelautan dan perikanan berperan sangat besar bagi pembangunan di wilayah Indonesia, mengingat luas perairan yang lebih besar dibanding luas daratan dengan potensi perikanan yang sangat banyak dan beragam. Demikian juga wilayah Kota Langsa memiliki potensi perikanan khususnya perikanan laut dan tambak yang sangat melimpah, karena sebagian besar wilayahnya berada tepat bersebelahan dengan Selat Malaka.

Grafik 2.27
Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB
Tahun 2012-2014 Kota Langsa (persen)



Sumber : BPS Kota Langsa, Tahun 2016

Meskipun sebagai salah satu sektor unggulan, namun kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB cenderung mengalami penurunan. Penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh berkurangnya produktivitas lahan tambak dimana sebagian besar lahan pertambakan beralih fungsi menjadi lahan pemukiman

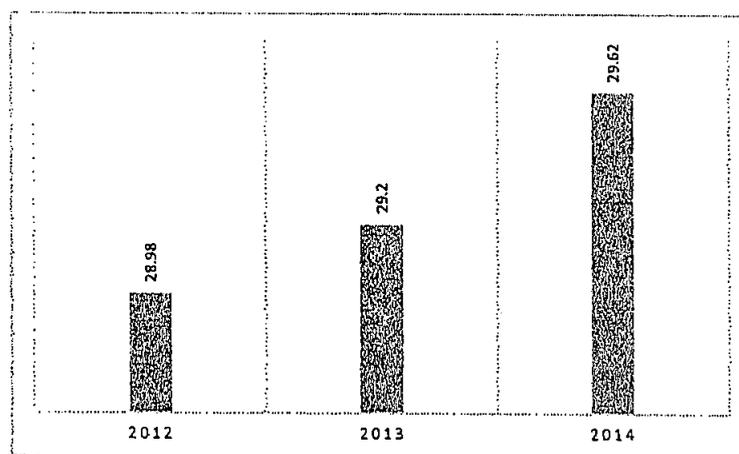
penduduk. Penurunan produktivitas sektor perikanan dapat dilihat dari penurunan sektor perikanan terhadap PDRB ADHB Kota Langsa tahun 2012-2014, dimana dari 3,62 persen pada tahun 2012 turun menjadi 3,42 persen di tahun 2014.

2.3.2.6. Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan salah satu bagian dari sistem mata rantai perekonomian suatu daerah atau wilayah yang pengaruhnya sangat kuat terhadap perkembangan dan pertumbuhan daerah baik secara internal dan eksternal.

Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor unggulan Kota Langsa yang terus menunjukkan tren perkembangan yang pesat. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya kontribusi sektor ini terhadap perekonomian Kota Langsa, dimana pada tahun 2012 kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil, dan sepeda motor terhadap PDRB ADHB adalah sebesar 28,98 persen, naik menjadi 29,62 persen pada tahun 2014.

Grafik 2.28
Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor Terhadap PDRB Tahun 2012-2014 Kota Langsa (persen)



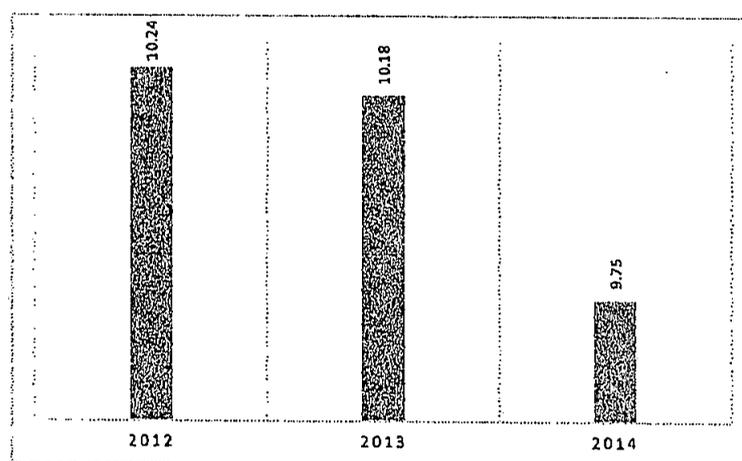
Sumber : BPS Kota Langsa, Tahun 2016

2.3.2.7. Perindustrian

Perindustrian adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang nilai yang lebih tinggi untuk

penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perkerayaan industri. Industri umumnya dikenal sebagai mata rantai selanjutnya dari usaha-usaha mencukupi kebutuhan ekonomi. Di Kota Langsa, sektor industri pengolahan memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian kota. Meskipun memberikan kontribusi yang besar, namun perkembangan kontribusi sektor perindustrian khususnya industri pengolahan terhadap PDRB ADHB selama tiga tahun terakhir mengalami penurunan. Pada tahun 2012 kontribusi sektor industri sebesar 10,24 kemudian terus mengalami penurunan hingga pada tahun 2014 menjadi 9,75 persen.

Grafik 2.29
Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB
Tahun 2012-2014 Kota Langsa



Sumber : BPS Kota Langsa, Tahun 2016

Dengan dukungan sumber daya manusia dan keberagaman budaya lokal, ke depan industri pengolahan ini diprediksi akan kembali berkembang mengingat posisi strategis Kota Langsa di jalur utama Sumatera dan pintu gerbang provinsi Aceh dinilai memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi kota kreatif.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

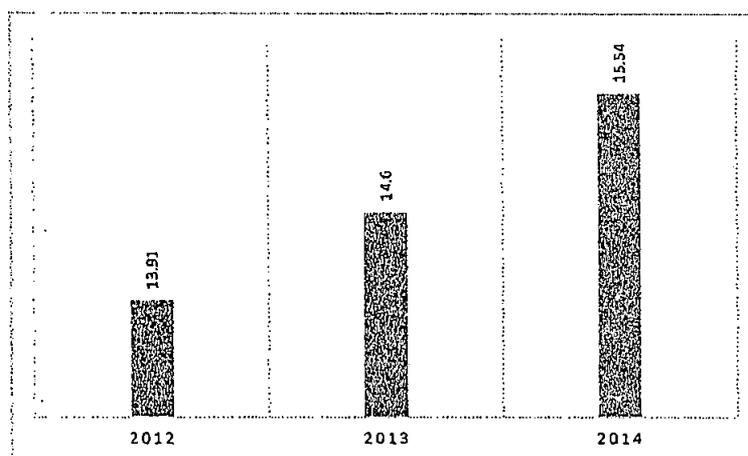
2.4.1.1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

2.4.1.1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup berbagai pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga atas barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan individu ataupun kelompok secara langsung. Pengeluaran rumah tangga mencakup makanan dan minuman selain restoran, pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya, perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan, transportasi dan komunikasi, restoran dan hotel serta lainnya.

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah.

Grafik 2.30
Nilai Konsumsi Rumah Tangga per Kapita ADHB
Tahun 2012-2014 Kota Langsa (juta rupiah)



Sumber : BPS Kota Langsa, Tahun 2016 (diolah)

Selama periode 2012-2014, nilai konsumsi Rumah Tangga (RT) per kapita Kota Langsa cenderung mengalami kenaikan. Nilai konsumsi RT per kapita Kota Langsa tahun 2012 sebesar 13,91 juta rupiah meningkat menjadi 15,5 juta rupiah tahun 2014.

2.4.1.1.2. Nilai Tukar Petani

Nilai tukar petani (NTP) adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase. Nilai tukar petani merupakan salah satu indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan petani. Jika $NTP > 100$, berarti petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya. $NTP = 100$, berarti petani mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya. $NTP < 100$, berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya. Dikarenakan sektor pertanian bukan sektor unggulan Kota Langsa, maka analisis NTP ditinjau dari NTP Provinsi Aceh.

Tabel 2.40
Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP)
Tahun 2012-2014 Provinsi Aceh

No.	Uraian	2012	2013	2014
1	Indeks Yang Diterima Petani (LT)	137,16	141,46	110,81
2	Indeks Yang Dibayar Petani (LB)	131,71	137,13	115,87
3	NTP	101,14	103,16	95,64

Sumber : BPS Aceh, Tahun 2015

Nilai tukar petani di Provinsi Aceh sempat mengalami kenaikan pada tahun 2013 yang mencapai 103,16 persen dari tahun 101,14 persen pada tahun 2012, dan pada tahun 2014 NTP di Provinsi Aceh kembali turun pada angka 95,64 persen.

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Infrastruktur adalah penunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaan (*availability*) fasilitas untuk mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah. Semakin lengkap ketersediaan wilayah/infrastruktur, semakin kuat dalam menghadapi daya saing daerah. Kondisi daya saing daerah terkait dengan fasilitas

wilayah/infrastruktur dapat dilihat dari aksesibilitas daerah, penataan wilayah, fasilitas bank dan non bank, ketersediaan air bersih, fasilitas listrik, ketersediaan restoran dan rumah makan serta ketersediaan penginapan. Namun demikian, pembahasan berikut ini hanya meliputi infrastruktur yang memiliki peranan vital di Kota Langsa.

2.4.2.1. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan merupakan salah satu indikator penting aksesibilitas daerah yang digunakan untuk melihat ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan dalam rangka memberikan kemudahan/akses bagi seluruh masyarakat dalam melakukan segala aktivitas di semua lokasi dengan kondisi dan karakteristik fisik yang berbeda. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan perekonomian suatu daerah, telah ikut menyebabkan jumlah perjalanan/mobilisasi yang dilakukan setiap individu semakin meningkat. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah perbandingan panjang jalan terhadap jumlah kendaraan. Rasio panjang jalan selama periode 2013-2015 mengalami penurunan dari 0,0095 pada tahun 2013 turun menjadi 0,0087 pada akhir tahun 2015, penurunan ini disebabkan oleh tingginya pertumbuhan kendaraan dibandingkan dengan peningkatan panjang jalan.

Tabel 2.41
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan
Tahun 2013-2015 Kota Langsa

Uraian	2013	2014	2015
Panjang Jalan (km)	313,37	315,62	316,61
Jumlah Kendaraan (unit)	32.896	34.541	36.268
Rasio	0.0095	0.0091	0.0087

Sumber : BPS Kota Langsa, Tahun 2015 (diolah)

2.4.3. Penataan Ruang

Tata ruang adalah wujud dari struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Pola ruang adalah

distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

Tabel 2.42
Pola Ruang Eksisting Kota Langsa

No.	Pola Ruang	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Hutan	5.346,80	22,34
2	Industri	57,27	0,24
3	Pelabuhan	30,26	0,13
4	Pemukiman	2.546,83	10,64
5	Perkebunan	9.017,64	37,67
6	Pusat Perdagangan	215,58	0,90
7	Rumah Sakit	4,97	0,02
8	Sawah	1.243,08	5,19
9	Sungai	2.162,24	9,03
10	Tambak	3.278,72	13,70
11	TPA	16,18	0,07
12	Pemukaman	15,90	0,07
13	Waduk	2,70	0,01
14	Pertahanan dan Keamanan	3,87	0,02
15	Fasilitas Olah Raga	40,92	0,17
	Total	23.982,94	100

Sumber : RTRW Kota Langsa Tahun 2012-2032

Berdasarkan pola ruang eksisting, diketahui bahwa pola ruang di Kota Langsa paling dominan peruntukannya untuk kawasan perkebunan (37,67 persen), disusul kemudian untuk kawasan hutan (22,34 persen), tambak (13,70 persen), dan pemukiman (10,64 persen).

2.4.4. Lembaga Keuangan

Menurut Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 menyatakan bahwa lembaga keuangan ialah suatu badan ataupun lembaga yang kegiatannya untuk menarik hasil dana dari masyarakat yang kemudian menyalurkannya kepada masyarakat kembali. Jumlah bank umum di Kota Langsa 11 unit, terdiri dari 7 unit bank umum konvensional dengan 19 kantor bank dan 4 unit bank umum syariah dengan 7 unit kantor bank.

Tabel 2.43
Jumlah Bank dan Kantor Bank Kota Langsa

Jenis Bank	Banyaknya	
	Bank	Kantor Bank
Bank Umum	11	26
- Bank Umum-Konvensional	7	19
Bank Pemerintah	3	13
Bank Swasta Nasional	1	5
Bank Pemerintah Daerah	1	1
- Bank Umum-Syariah	4	7
Kantor Cabang	2	5
Kantor Cabang Pembantu	2	2
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	2	2
Kantor Pusat	2	2
Jumlah	13	28

Sumber : BPS Kota Langsa (Langsa Dalam Angka Tahun 2015)

Selain bank umum, Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) merupakan salah satu lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Jumlah BPR di Kota Langsa adalah sebanyak 2 bank dan 2 kantor bank, kesemuanya merupakan BPR Syariah. BPR memiliki fungsi sebagai lembaga yang memberikan berbagai jasa keuangan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil. Semakin banyak jumlah BPR, maka akan semakin mudah bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil di Kota Langsa dalam mengakses keuangan dalam rangka meningkatkan perekonomiannya.

2.4.5. Ketersediaan Penginapan/Hotel

Semakin berkembangnya investasi ekonomi daerah, maka akan meningkatkan daya tarik kunjungan ke daerah tersebut. Dengan semakin banyaknya jumlah kunjungan orang dan wisatawan ke suatu daerah maka perlu didukung oleh ketersediaan penginapan/hotel. Ketersediaan penginapan/hotel merupakan salah satu aspek yang penting dalam meningkatkan daya saing daerah, terutama dalam menerima dan melayani

jumlah kunjungan dari luar daerah. Hingga tahun 2015, di Kota Langsa terdapat 15 hotel/penginapan.

Tabel 2.44
Jumlah Hotel, Kamar dan Tempat Tidur pada Akomodasi
Tahun 2015 Kota Langsa

Nama Akomodasi	Jumlah Kamar	Tempat Tidur
Hotel Kartika	62	115
Hotel Harmoni	90	148
Losmen Pase	20	40
Ferla Inn	24	45
Losmen Diah	17	32
Losmen Haiva	11	20
Hotel Rahmat Thalita	14	28
Hotel Training Kartini	12	27
Wisma Anggrek	15	30
Losmen Pillar	21	46
Losmen Ramille	15	30
Hotel Ridho	14	28
Wisma Nabila	10	12
Wisma Mutiara	15	30
Grace Hotel	20	46

Sumber : BPS Kota Langsa, Tahun 2016

Tingkat hunian kamar di hotel berbintang lebih tinggi dari jenis akomodasi lainnya yaitu sebesar 60 persen dengan tingkat pemakaian tempat tidur sebesar 51 persen, sedangkan akomodasi lainnya dengan tingkat hunian sebesar 36 persen dan tingkat pemakaian tempat tidur sebesar 28 persen. Baik hotel berbintang maupun jenis akomodasi lainnya, rata-rata lama menginap tamu sebanyak 1,8 hari.

2.4.6. Fokus Iklim Berinvestasi

Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki pada jangka waktu tertentu dengan harapan mendapatkan keuntungan. Investasi yang akan masuk ke suatu daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Daya saing investasi suatu daerah tidak terjadi dengan serta merta. Pembentukan daya saing investasi, berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya kemudahan

perizinan. Kemudahan perizinan adalah proses pengurusan perizinan yang terkait dengan persoalan investasi relatif sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Lama proses perizinan merupakan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu perizinan (dalam hari). Dalam rangka mempermudah investasi, Pemerintah Kota Langsa terus berupaya untuk mempercepat proses perizinan, hal ini dibuktikan dengan rata-rata lama proses perizinan di Kota Langsa selama periode 2013-2015 adalah selama 7 hari.

Tabel 2.45
Perkembangan Indikator Pelayanan Perizinan
Tahun 2013-2015 Kota Langsa

Indikator	2013	2014	2015
Rata-rata Lama Proses Perizinan	7	7	7
Ketersediaan SOP Pelayanan	ada	ada	ada

Sumber : KP2T Kota Langsa, Tahun 2016

2.4.7. Fokus Sumber Daya Manusia

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM berkaitan erat dengan tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik pula kualitas SDM di wilayah tersebut. Kualitas SDM pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3. Perkembangan rasio lulusan S1/S2/S3 per 10.000 penduduk di Kota Langsa periode 2013-2014 mengalami penurunan dari 673 lulusan S1/S2/S3 per 10.000 penduduk menjadi 667 lulusan di tahun 2014.

Tabel 2.46
Rasio Lulusan S1/S2/S3 Tahun 2012-2014 Kota Langsa

Indikator	2012	2013	2014
Lulusan S1/S2/S3	10.172	10.563	10.868
Penduduk	154.722	157.011	162.814
Rasio Lulusan S1/S2/S3	657	673	667

Sumber : BPS & Disdukcapil, Tahun 2016 (diolah)

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Pembangunan merupakan suatu proses yang dilakukan secara terencana dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Disadari bahwa kebutuhan pembangunan semakin meningkat, mendasak, tidak terbatas serta semakin kompleks. Di sisi lain, kemampuan pemerintah relatif sangat terbatas, terutama keterbatasan di bidang keuangan. Sedangkan kebutuhan pembangunan yang terus meningkat, membutuhkan anggaran biaya yang semakin besar pula. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dengan dana yang terbatas, diperlukan perencanaan dan kebijakan yang tepat, termasuk kebijakan anggaran yang tepat dan terarah. Untuk itu, diperlukan alokasi anggaran dengan prinsip ekonomis yang dimuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota setiap tahunnya. Besar kecilnya anggaran yang dialokasikan sangat tergantung pada besaran manfaat yang diharapkan, selain ditentukan oleh kemampuan kota itu sendiri.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, ayat (1), Pasal 17 menyebutkan bahwa APBD (APBK) disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Dengan demikian, dalam penyusunannya, dipayakani agar belanja operasional tidak melampaui pendapatan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Berdasarkan arahan undang-undang tersebut, dapat dipahami bahwa diperlukan suatu kebijakan yang tepat dalam proses penyusunan dan pelaksanaan APBD, sehingga alokasi anggaran untuk setiap kegiatan adalah sebagai satu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip tertentu untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang harus dibuat, disusun dan dilaksanakan secara benar dan konsisten dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kebijakan keuangan daerah yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Langsa, mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA), yang disepakati bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Langsa.

Kemudian Pemerintah Kota Langsa bersama DPRK Langsa melaksanakan pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang menjadi acuan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK). Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dari masing-masing SKPK disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja (kinerja) yang dicapai. Sebagaimana diketahui, bahwa sejak tahun 2001, pemerintah telah menetapkan kebijakan anggaran dengan menganut sistem anggaran berbasis kinerja (*performance budget*) yang memuat prinsip anggaran surplus/defisit. Sistem anggaran ini menggunakan model vertikal dengan struktur yang terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan.

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBK

Kebijakan pendapatan daerah sejak lima tahun yang lalu, mengacu pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, berkenaan dengan Pasal 179 ayat (1) dan ayat (2). Berdasarkan pasal dan ayat tersebut di atas, Pemerintah Kota Langsa memiliki sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri atas:

- 1) Pendapatan Asli Daerah;
- 2) Dana Perimbangan;
- 3) Dana Otonomi Khusus; dan
- 4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pasal 180 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, menjelaskan bahwa sumber PAD terdiri atas : 1) Pajak Daerah; 2) Retribusi Daerah; 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Milik dan Hasil Penyertaan Modal; 4) Zakat; dan 5) Lain-lain PAD yang Sah. Selain itu, dana perimbangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 181, bersumber dari : 1) Dana Bagi Hasil Pajak; 2) Dana Bagi Hasil yang Bersumber dari Hidrokarbon dan Sumberdaya Alam Lain; 3) Dana Alokasi Umum (DAU); dan 4) Dana Alokasi Khusus (DAK).

Di sisi lain, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas : 1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); 2) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan 3) Pajak Penghasilan (PPh). Hasil yang bersumber dari sumberdaya alam berasal dari : 1) Kehutanan; 2)

Pertambangan; 3) Perikanan; 4) Pertambangan Minyak Bumi; 5) Pertambangan Gas Bumi; dan 6) Pertambangan Panas Bumi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka secara rinci tentang kinerja pendapatan daerah Kota Langsa tahun 2012-2015 adalah seperti digambarkan dalam tabel 3-1. Tabel tersebut memperlihatkan bahwa pendapatan daerah terus meningkat setiap tahunnya, kendatipun ada beberapa jenis sumber pendapatan yang tumbuh meningkat, menurun dan ada yang meningkat tajam.

Tabel 3.1
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2012-2015 (Rupiah)

NO	URAIAN		2012*	2013*	2014*	2015
1.	PENDAPATAN DAERAH		470.985.346.660,08	568.604.409.638,87	751.849.914.120,00	818.157.958.122,00
	1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	35.464.721.911,08	64.236.271.011,87	105.021.202.287,00	114.529.994.341,00
	1.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	5.222.137.932,00	5.729.914.000,00	7.494.319.000,00	9.550.000.000,00
	1.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	29.119.647.916,00	8.600.083.229,00	13.718.522.158,00	5.405.424.740,00
	1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	300.000.000,00	413.617.460,00	391.835.870,00	518.845.242,00
	1.1.4.	Penerimaan Zakat, Infaq dan Sadaqah	-	-	1.400.000.000,00	2.191.549.393,00
	1.1.5.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	822.936.063,08	49.492.656.322,87	82.016.525.259,00	96.864.174.966,00
	1.2.	DANA PERIMBANGAN	394.244.876.058,00	443.922.034.879,00	477.056.552.547,00	515.118.393.509,00
	1.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	33.302.917.058,00	32.760.222.879,00	24.934.217.547,00	25.295.675.509,00
	1.2.2.	Dana Alokasi Umum	337.337.339.000,00	381.240.982.000,00	419.767.005.000,00	425.446.753.000,00
	1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	23.604.620.000,00	29.920.830.000,00	32.355.330.000,00	64.375.965.000,00
	1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	41.275.748.691,00	60.446.103.748,00	169.772.159.286,00	188.509.570.272,00
	1.3.1.	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	1.3.2.	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	6.603.058.459,00	12.885.625.748,00	17.135.561.925,00	17.135.561.925,00
	1.3.3.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	33.738.477.000,00	47.560.478.000,00	70.820.311.000,00	89.447.393.000,00
	1.3.4.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	934.213.232,00	-	81.816.286.361,00	81.926.615.347,00

Sumber : APBK Langsa (diolah)

*) setelah perubahan

Kontribusi masing-masing sumber pendapatan daerah selama empat tahun yang lalu, rata-rata masih didominasi oleh dana perimbangan, teristimewa dari jenis Dana Alokasi Umum (DAU). Ini mengindikasikan bahwa pendapatan daerah masih sangat tergantung pada peranan pusat melalui dana perimbangan.

Tabel 3.2
Kontribusi Sumber Pendapatan Daerah
Tahun 2012-2015 (Persen)

NO	URAIAN		2012*	2013*	2014*	2015
1.	PENDAPATAN DAERAH		100,00	100,00	100,00	100,00
	1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	7,53	11,30	13,97	14,00
	1.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	1,11	1,01	1,00	1,17
	1.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	6,18	1,51	1,82	0,66
	1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	0,06	0,07	0,05	0,06
	1.1.4.	Penerimaan Zakat, Infaq dan Sadaqah	-	-	0,19	0,27
	1.1.5.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,17	8,70	10,91	11,84
	1.2.	DANA PERIMBANGAN	83,71	78,07	63,45	62,96
	1.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	7,07	5,76	3,32	3,09
	1.2.2.	Dana Alokasi Umum	71,62	67,05	55,83	52,00
	1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	5,01	5,26	4,30	7,87
	1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8,76	10,63	22,58	23,04
	1.3.1.	Pendapatan Hibah				
	1.3.2.	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	1,40	2,27	2,28	2,09
	1.3.3.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	7,16	8,36	9,42	10,93
	1.3.4.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,20	-	10,88	10,01

Sumber : Tabel 3-1 (diolah)

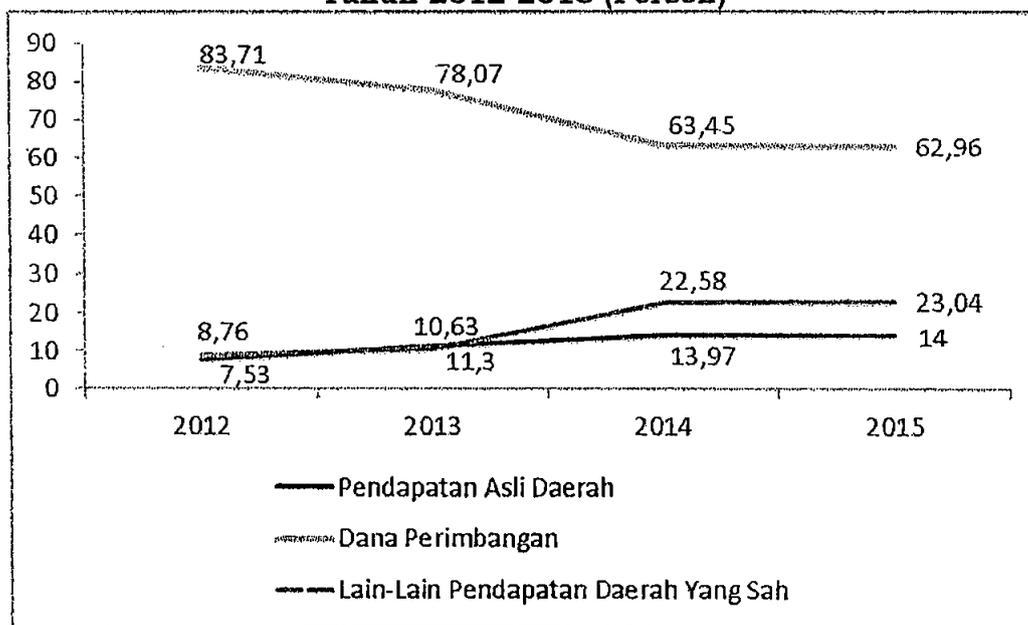
*) setelah perubahan

Besarnya ketergantungan ini, salah satunya dikarenakan oleh belum maksimalnya perolehan PAD selama ini. Ini terlihat dari PAD selama tahun 2012 hingga tahun 2015, tidak sampai dari 15 persen setiap tahunnya. Sementara dana perimbangan berperan di atas 60 hingga 80 persen lebih setiap tahun anggaran, dengan jumlah terbesar bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Tercatat bahwa PAD berkontribusi meningkat sejak tahun 2012 hingga 2015. Selanjutnya lain-lain pendapatan daerah yang sah relatif

memperlihatkan tren positif dari 8,76 persen ditahun 2012 menjadi 23,04 persen tahun 2015. Lebih rinci perlu dipahami bahwa meningkatnya lain-lain pendapatan daerah yang sah ternyata lebih banyak disumbang dari dana penyesuaian dan otonomi khusus, dari 7,16 persen tahun 2012 menjadi 10,93 persen di tahun 2015. Sebagaimana ditunjukkan oleh grafik 3.1 pertumbuhan dana perimbangan sejak tahun 2012 hingga 2015 cenderung menurun walaupun masih relatif tinggi.

Grafik 3.1
Perkembangan Sumber Pendapatan Daerah
Tahun 2012-2015 (Persen)



Sumber : APBK Langsa (diolah).

3.1.2 Derajat Kemandirian Daerah

Hubungan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah merupakan suatu sistem yang mengatur bagaimana sejumlah dana yang tersedia dapat dibagi di berbagai tingkat pemerintahan, dan bagaimana mencari sumber-sumber pembiayaan daerah untuk mendukung kegiatan-kegiatan di sektor publik. Pada dasarnya, realitas hubungan fiskal antara pusat dan daerah ditandai oleh dominannya peranan bantuan dan sumbangan. Kondisi ini muncul karena terbatasnya kemampuan daerah dalam menggali sumber PAD. Hal ini mempunyai implikasi langsung terhadap kebutuhan dana yang cukup besar. Untuk itu, perlu diatur hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang bermaksud untuk membiayai pelaksanaan fungsi yang menjadi kewenangannya sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 dalam hal keuangan daerah terjadi pergeseran, bahwa

penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Derajat desentralisasi sebagaimana hasil penemuan Munir, dkk dari Tim Fisipol pada UGM (2004) : derajat desentralisasi fiskal, khususnya komponen PAD dibandingkan dengan Total Penerimaan Daerah (TPD), menggunakan skala interval sebagai berikut :

Tabel 3.3
Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal

PAD/TPD (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
00.00 – 10.00	Sangat Kurang
10.01 – 20.00	Kurang
20.01 – 30.00	Cukup
30.01 – 40.00	Sedang
40.01 – 50.00	Baik
> 50.00	Sangat Baik

Sumber : Munir, Tim Peneliti UGM

Berikut ini dapat dilihat berdasarkan tabel di atas tentang derajat desentralisasi pendapatan asli daerah terhadap dana perimbangan.

Tabel 3.4
Derajat Desentralisasi Tahun 2012 – 2015 Kota Langsa

Tahun	PAD (Rp)	Dana Perimbangan (Rp)	Derajat Desentralisasi (%)	Keterangan
2012	35.464.721.911	394.244.876.058	9,00	Sangat Kurang
2013	64.236.271.012	443.922.034.879	14,47	Kurang
2014	105.021.202.287	477.056.552.547	22,01	Cukup
2015	114.529.994.341	515.118.393.509	22,23	Cukup

Sumber : APBK Langsa

Berdasarkan tabel di atas, derajat desentralisasi dari tahun 2012 sampai dengan 2015 terjadi kenaikan. Dimulai pada tahun 2012 dan 2013 derajat desentralisasi yang terjadi sebesar 9,00 persen dan 14,47 persen. Selanjutnya pada tahun 2014 terjadi peningkatan terhadap derajat desentralisasi menjadi sebesar 22,01 persen. Selanjutnya pada tahun 2015 kembali meningkat menjadi 22,23 persen.

Sesuai dengan kondisi tersebut dapat dinyatakan bahwa tingkat derajat desentralisasi fiskal kota masih di kategorikan dalam skala cukup. Solusi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota adalah dengan cara memperbesar penerimaannya dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga akan menyebabkan skala derajat desentralisasinya akan berubah menjadi baik atau minimal pada tingkat sedang.

3.1.3 Tingkat Kemandirian Kota

Untuk melihat tingkat kemandirian kota dari tahun 2012 sampai dengan 2015 didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional. Tingkat kemandirian ini dapat dilihat berdasarkan selisih antara total penerimaan umum daerah tahun 2012 sampai dengan 2015. Pendapatan umum daerah terdiri atas pendapatan asli daerah ditambah dana bagi hasil dan dana alokasi umum.

Sementara itu, belanja pegawai negeri sipil daerah terdiri atas gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil daerah yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras, dan tunjangan pajak penghasilan (PPh Pasal 21).

Pengelompokan kemampuan keuangan daerah untuk kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 21 Tahun 2007 seperti terdapat pada tabel berikut.

Tabel 3.5
Pengelompokan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri
Nomor 21 Tahun 2007 Untuk Kabupaten dan Kota

No	Besarnya Kemampuan Daerah (Rp)	Pengelompokan
1.	> 400.000.000.000,00	Tinggi
2.	200.000.000.000.s.d 400.000.000.000,00	Sedang
3.	< 200.000.000.000,00	Rendah

Sumber : Permendagri No. 21 Tahun 2007

Secara umum tingkat kemandirian kota memperlihatkan kecenderungan membaik. Sesuai dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2007 untuk Kota Langsa selama kurun waktu empat tahun terakhir, terlihat bahwa kemampuan keuangan kota mengalami peningkatan yang sangat baik. Peningkatan ini telah meningkatkan level tingkat kemandirian kota dari sedang meningkat pada level tinggi.

Tercatat bahwa pada tahun 2012, tingkat kemandirian daerah dari Rp.206,5 miliar menjadi Rp.267,5 miliar lebih di tahun 2013. Pada tahun 2014 dan 2015 masing-masing menjadi Rp.402,4 miliar dan Rp.442,4 miliar. Ke depan diharapkan agar Pemerintah Kota untuk dapat mempertahankan kondisi ini dengan cara meningkatkan potensi dan menggali pajak sekaligus retribusi yang baru. Sementara pengeluaran

untuk belanja pegawai perlu dilakukan efisiensi dan pengkajian menyeluruh menyangkut penerimaan pegawai baru di lingkungan Pemerintahan Kota. Disamping perlunya optimalisasi penerimaan kota secara seimbang dengan tidak memberatkan pelaku usaha dan masyarakat untuk tujuan peningkatan pendapatan kota.

Tabel 3.6
Perkembangan Tingkat Kemandirian
Tahun 2012 - 2015 Kota Langsa

Tahun	Pendapatan Umum Daerah (Rp)	Belanja PNS Daerah (Rp)	Tingkat Kemandirian (Rp)	Keterangan
2012	470.985.346.660	264.431.736.769	206.553.609.891	Sedang
2013	568.604.409.639	301.045.712.131	267.558.697.508	Sedang
2014	751.849.914.120	349.445.512.825	402.404.401.295	Tinggi
2015	818.157.958.122	375.701.745.555	442.456.212.568	Tinggi

Sumber : APBK Langsa

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Kebijakan belanja daerah masa lalu mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (51) menjelaskan bahwa, "Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih". Mengingat sifatnya yang demikian, maka penyusunan pengalokasian belanja semestinya dilakukan dengan cermat, efektif dan efisien, sesuai dengan kebutuhan. Sejalan dengan itu, alokasi belanja dilakukan secara transparan dan akuntabel dan tetap diupayakan agar tidak terjadinya penyimpangan yang merugikan pemerintah dan masyarakat.

Selanjutnya, belanja daerah sebagai salah satu komponen dalam struktur APBD (APBK), diarahkan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 (Pasal 31) untuk dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan. Dalam hal ini, termasuk urusan-urusan yang penanganannya dalam bidang atau bagian tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dengan pemerintah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Menyangkut dengan penyusunan anggaran atau belanja penyelenggaraan urusan wajib, Pemerintah Kota tetap mempedomani

ketentuan yang diatur dalam Permendagri tersebut. Belanja yang dialokasikan, diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, yang diutamakan pada peningkatan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, di samping mengembangkan jaminan sosial kemasyarakatan lainnya.

Pasal 36 ayat (1) Permendagri yang sama menetapkan kelompok belanja yang terdiri atas: a) Belanja Tidak Langsung; dan b) Belanja Langsung. Seterusnya, ayat (2) menyatakan bahwa kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan, sama sekali tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Berikut ayat (3) menerangkan bahwa belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Pelaksanaan anggaran yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota di masa lalu, baik berkenaan dengan belanja tidak langsung maupun belanja langsung, mengacu pada Pasal 37 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang menyebutkan bahwa kelompok belanja tidak langsung meliputi: a) Belanja Pegawai; b) Pembayaran Bunga; c) Subsidi; d) Hibah; e) Bantuan Sosial; f) Belanja Bagi Hasil; g) Bantuan Keuangan; dan h) Belanja Tidak Terduga. Sedangkan belanja langsung, terdiri dari: a) Belanja Pegawai, b) Belanja Barang dan Jasa; dan c) Belanja Modal. Upaya Pemerintah Kota dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka besaran alokasi anggaran untuk belanja tidak langsung senantiasa diusahakan dan diarahkan untuk tidak melebihi alokasi belanja langsung.

Berdasarkan pada upaya dan arahan tersebut, maka untuk mencapai kinerja penyusunan anggaran yang baik, Pemerintah Kota masa lalu telah menempuh hal-hal sebagai berikut:

- 1) Memprioritaskan alokasi belanja kota pada program dan kegiatan pembangunan yang dinilai dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat banyak.
- 2) Mengacu pada prinsip dasar anggaran yaitu *value for money* (setiap rupiah yang dianggarkan harus memiliki nilai yang berarti), efektif dan efisien sesuai dengan program/kegiatan yang telah diprioritaskan.
- 3) Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar SKPK dalam setiap implementasi program/kegiatan pembangunan sehingga

tercapainya manfaat yang optimal serta terhindarnya tumpang-tindih program/kegiatan.

- 4) Meningkatkan pengawasan, di samping melakukan evaluasi berkala terhadap capaian hasil/manfaat dari setiap alokasi belanja kota yang telah digunakan untuk masing-masing program dan kegiatan pembangunan yang diprioritaskan.

Pemerintah Kota Langsa tetap berupaya mengelola anggaran secara efektif dan efisien sesuai ketentuan yang berlaku. Walaupun, pada tahun 2012-2013 kebutuhan aparatur semakin meningkat, namun belanja tidak langsung tetap saja relatif lebih tinggi dibanding dengan belanja langsung. Pada tahun 2014-2015, Pemerintah Kota berhasil meningkatkan efisiensi anggaran, hal ini terlihat pada porsi belanja langsung yang lebih besar dari belanja tidak langsung. Untuk lebih jelasnya, perkembangan belanja daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Realisasi Belanja Daerah Tahun 2012-2015 (Rupiah)

NO.	URAIAN	2012	2013	2014	2015
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	280.199.702.897,00	323.183.543.131,00	374.065.485.824,54	413.969.587.554,36
1.1	Belanja Pegawai	264.431.736.769,00	301.045.712.131,00	349.445.512.824,54	375.701.745.554,36
1.2	Belanja Bunga	379.000.000,00	1.051.767.000,00	-	-
1.3	Belanja Hibah	10.523.635.128,00	8.710.464.000,00	4.010.000.000,00	1.825.000.000,00
1.4	Belanja Bantuan Sosial	3.353.331.000,00	-	7.519.773.000,00	2.913.557.000,00
1.5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	1.262.000.000,00	11.636.600.000,00	11.627.600.000,00	33.127.645.000,00
1.6	Belanja Tidak Terduga	250.000.000,00	739.000.000,00	1.462.600.000,00	401.640.000,00
2	BELANJA LANGSUNG	173.185.967.180,00	253.357.613.866,00	403.730.256.246,00	456.371.905.654,33
2.1	Belanja Pegawai	77.685.094.840,00	82.191.049.158,00	106.044.975.518,00	69.885.650.189,00
2.2	Belanja Barang dan Jasa	46.907.127.057,00	104.719.959.891,00	141.897.604.147,00	188.236.674.347,33
2.3	Belanja Modal	48.593.745.283,00	66.446.604.817,00	155.787.676.581,00	198.249.581.118,00
	BELANJA	453.385.670.077,00	576.541.156.997,00	777.795.742.070,54	870.341.493.208,69
	SURPLUS / (DEFISIT)	17.599.676.583,08	-7.936.747.358,13	-25.945.827.950,54	-52.183.535.086,69

Sumber : APBK Langsa 2008-2011 (diolah)

Struktur belanja dalam APBK mengalami perubahan dari kelompok belanja aparatur dan belanja pelayanan publik berdasarkan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 menjadi kelompok belanja tidak langsung dan belanja langsung berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan juga Permendagri Nomor 59 Tahun 2007. Belanja Daerah terdiri dari:

1. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja Bunga, (c) Belanja Subsidi, (d) Belanja Hibah, (e) Belanja Bantuan Sosial, (f) Belanja Bagi Hasil, (g) Belanja Bantuan Keuangan, dan (h) Belanja Tidak Terduga.
2. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja barang dan jasa, dan (c) Belanja Modal.

Tabel 3.8
Proporsi Realisasi Belanja Daerah Tahun 2012-2015 (Persen)

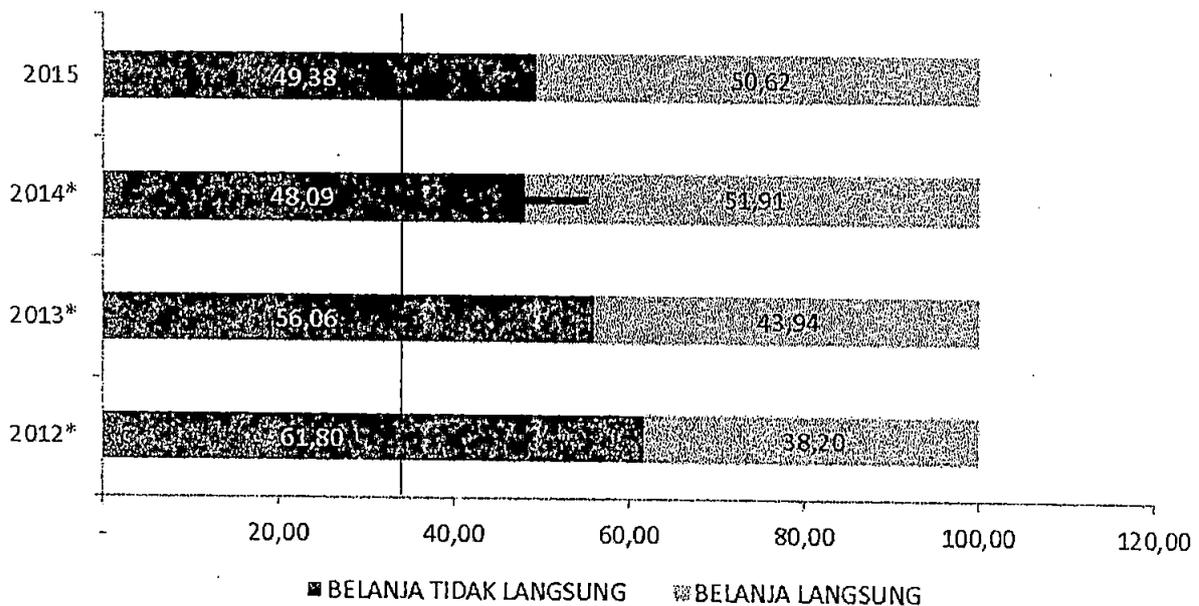
NO.	URAIAN	2012	2013	2014	2015
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	61,80	56,06	48,09	47,56
1.1	Belanja Pegawai	58,32	52,22	44,93	43,17
1.2	Belanja Bunga	0,08	0,18	-	-
1.3	Belanja Hibah	2,32	1,51	0,52	0,21
1.4	Belanja Bantuan Sosial	0,74	-	0,97	0,33
1.5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	0,28	2,02	1,49	3,81
1.6	Belanja Tidak Terduga	0,06	0,13	0,19	0,05
2	BELANJA LANGSUNG	38,20	43,94	51,91	52,44
2.1	Belanja Pegawai	17,13	14,26	13,63	8,03
2.2	Belanja Barang dan Jasa	10,35	18,16	18,24	21,63
2.3	Belanja Modal	10,72	11,53	20,03	22,78
	BELANJA	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: APBK Langsa (diolah)

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa dalam rangka upaya meningkatkan kinerja aparatur, Pemerintah Kota Langsa sesuai dengan kemampuan anggaran belanja yang tersedia setiap tahun, telah mengalokasikan belanja, baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung yang berkenaan dengan meningkatnya kebutuhan aparatur. Pengalokasian tersebut, disamping diupayakan untuk tidak melebihi

belanja pelayanan publik (belanja langsung) diupayakan pula penghematan pada pos-pos pengeluaran yang dianggap layak/pantas untuk efisiensinya belanja aparatur.

Grafik 3.2
Perbandingan Belanja Daerah Tahun 2012-2015 (Persen)



Sumber: APBK Langsa (diolah)
*) setelah perubahan

Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan oleh Permendagri Nomor 37 Tahun 2012 disebutkan bahwa alokasi belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja langsung yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mempedomani SPM yang telah ditetapkan, Analisis Standar Belanja (ASB), dan standar satuan harga. ASB dan standar satuan harga ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD.

Selain itu, penganggaran untuk pengadaan kebutuhan barang milik daerah, menggunakan dasar perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan memperhatikan standar barang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006. Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

3.2.2 Analisis Pembiayaan Daerah

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan dapat juga diartikan sebagai seluruh transaksi-transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam anggaran pemerintah, terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan dapat bersumber dari : a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Lalu; b) Penerimaan Pinjaman Daerah; c) Dana Cadangan Daerah; dan d) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Sehubungan dengan pembiayaan daerah ini, Pemerintah Kota selama lima tahun yang lalu, telah menempuh kebijakan-kebijakan dalam rangka:

- 1) Menjaga agar tidak terjadi defisit anggaran daerah pada setiap tahun anggaran, melalui upaya peningkatan pendapatan daerah;
- 2) Menjaga agar pendapatan daerah dapat lebih besar dari belanja daerah;
- 3) Mengingatkan agar setiap SKPK tetap komit dalam pemanfaatan plafon anggaran yang tersedia tetap sesuai dengan skala prioritas yang telah disepakati dan selalu menekankan pada efisiensi anggaran; dan
- 4) Program dan kegiatan yang dilaksanakan harus sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMK dan tetap menjaga keadilan dalam pelaksanaan pembangunan kota.

Meskipun demikian, dalam proses pelaksanaan pembangunan kota, dijumpai kendala-kendala seperti kenaikan harga, dan faktor lainnya yang tidak terduga sehingga rencana anggaran yang ditetapkan dapat saja

berubah, walau tanpa mengurangi maksud dan tujuan program. Kendala dan faktor-faktor yang tidak terduga lainnya, maka defisit anggaran belanja kota dimasa lalu tidak dapat dihindari. Berdasarkan uraian di atas, dapat disajikan analisis pembiayaan daerah berkenaan dengan menutup defisit riil anggaran Kota Langsa untuk tahun 2012 dan 2015 disajikan di tabel berikut.

Tabel 3.9
Kondisi Pembiayaan Daerah Tahun 2012-2015 (Rupiah)

NO.	URAIAN	2012	2013	2014	2015
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	21.282.073.882,92	9.359.948.922,13	27.187.767.950,54	52.683.535.086,69
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	7.619.315.818,92	8.397.343.477,13	26.766.105.950,54	52.683.535.086,69
1.2	Penerimaan Pinjaman Daerah	13.662.758.064,00	962.605.445,00	421.662.000,00	-
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	38.881.750.466,00	1.423.201.564,00	1.241.940.000,00	500.000.000,00
2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	80.000.000,00	500.000.000,00	1.000.000.000,00	500.000.000,00
2.2	Pembayaran Pokok Utang	38.801.750.466,00	923.201.564,00	241.940.000,00	-
	PEMBIAYAAN NETTO	-17.599.676.583,08	7.936.747.358,13	25.945.827.950,54	52.183.535.086,69
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	-	-	-	-

Sumber: APBK Langsa (diolah)

3.3 Kerangka Pendanaan

3.3.1 Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama

Selanjutnya mengikuti Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, maka Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Langsa Tahun 2012-2015 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.10
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Daerah Tahun 2012-2015 (Rupiah)

NO.	URAIAN	2012	2013	2014	2015
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG				
1.1	Belanja Pegawai	264.431.736.769,00	301.045.712.131,00	349.445.512.824,54	375.701.745.554,36
2	BELANJA LANGSUNG				
2.1	Belanja Pegawai	77.685.094.840,00	82.191.049.158,00	106.044.975.518,00	69.885.650.189,00
2.2	Belanja Modal	48.593.745.283,00	66.446.604.817,00	155.787.676.581,00	198.249.581.118,00

Sumber : APBK Langsa (diolah).

3.3.2 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah

Pada bagian ini akan dimuat suatu analisis pendapatan dan belanja daerah untuk lima tahun ke depan, yaitu tahun 2012-2017. Analisis tersebut dilakukan melalui suatu proyeksi terhadap pendapatan daerah,

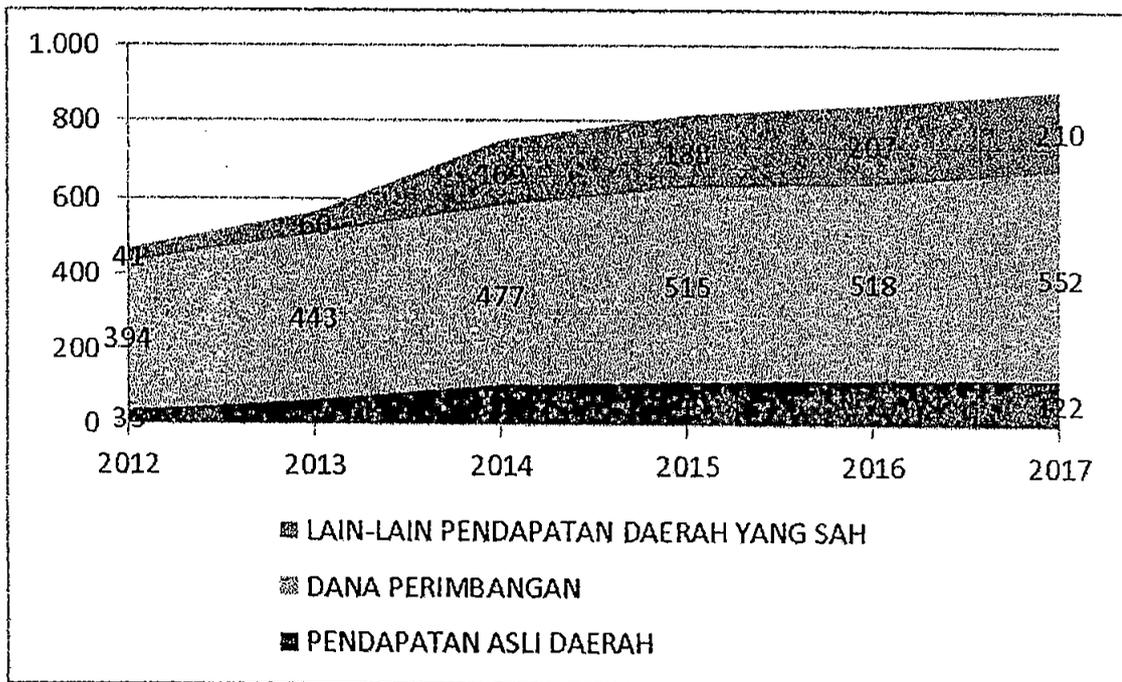
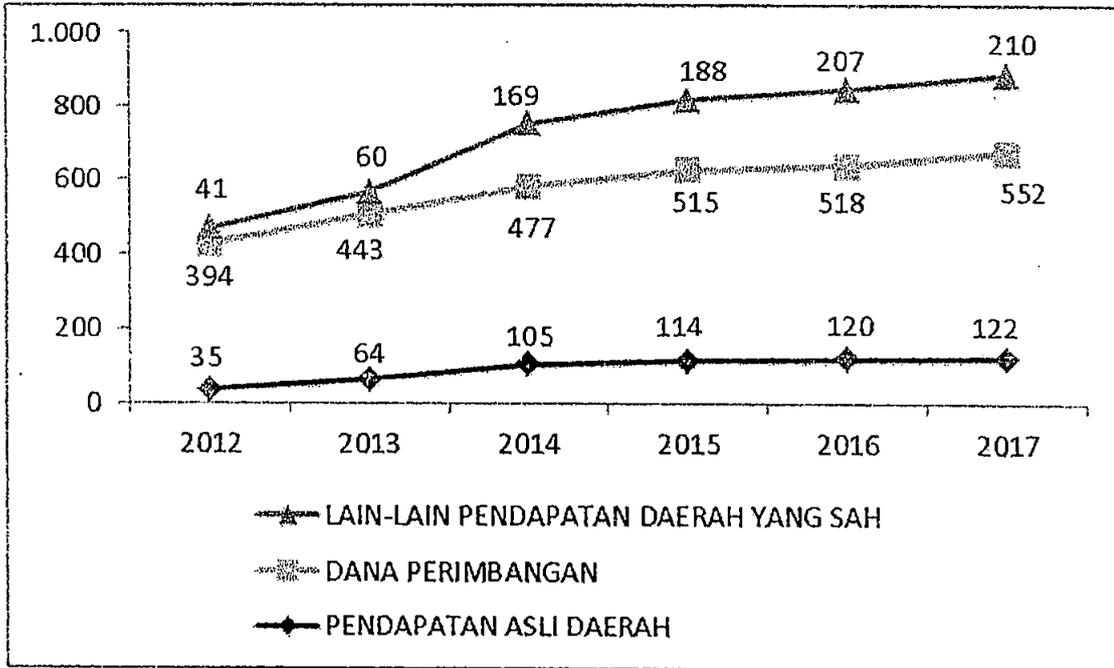
belanja daerah dan pembiayaan daerah, yang akan dikelola Pemerintah Kota di masa yang akan datang. Proyeksi tersebut dilakukan berdasarkan data keuangan masa lalu (lima tahun sebelumnya), dengan menggunakan asumsi-asumsi serta kebijaksanaan-kebijaksanaan yang mungkin atau terpaksa ditempuh. Kebijaksanaan tersebut mengingat perkembangan data keuangan kota masa lalu relatif fluktuatif, baik menyangkut pendapatan daerah, belanja daerah, maupun pembiayaan daerah yang berakibat kepada relatif kurang rasionalnya tingkat pertumbuhan yang terjadi di ketiga unsur keuangan tersebut. Untuk menghindari besarnya bias dalam perkembangan keuangan daerah masa depan, maka ditempuh kebijaksanaan untuk menetapkan angka pertumbuhan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah yang dianggap layak dan wajar tanpa mengurangi tujuan dan sasaran anggaran itu sendiri.

Kemampuan keuangan Pemerintah Kota yang diperkirakan meningkat setiap tahun merupakan modal yang dapat dimanfaatkan untuk membiayai program-program pembangunan yang direncanakan selama lima tahun ke depan, yaitu:

1. Rencana pembiayaan untuk program-program yang menjadi prioritas utama seperti program-program unggulan dari walikota dan wakil walikota, serta kebijakan nasional yang harus dilaksanakan oleh kota. Kebijakan tersebut, meliputi biaya pendidikan sebesar 20 persen dan kesehatan sebesar 10 persen. Berikutnya program prioritas utama merupakan program yang langsung terkait dengan kebutuhan masyarakat, dengan memiliki dampak positif dan manfaat yang besar bagi masyarakat.
2. Pembiayaan program pembangunan prioritas kedua adalah berkaitan dengan tupoksi SKPK berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing SKPK
3. Pembiayaan program-program pada prioritas ketiga adalah untuk memenuhi kebutuhan biaya-biaya tidak langsung, misalnya tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, bantuan-bantuan sosial, belanja tidak terduga, dan sebagainya.

Prioritas-prioritas pembiayaan tersebut di atas, sesuai dengan arahan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, yang menyebutkan bahwa alokasi pembiayaan harus mengutamakan urusan prioritas terhadap program-program pembangunan yang direncanakan.

Grafik 3.3
Realisasi, Proyeksi dan Komposisi Keuangan Daerah
Tahun 2012-2017 Kota Langsa (milyar rupiah)



Tabel 3.11
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2012-2017 (Rupiah)

NO	URAIAN		2012*	2013*	2014*	2015	2016	2017
1.	PENDAPATAN DAERAH		470.985.346.660,08	568.604.409.638,87	751.849.914.120,00	818.157.958.122,00	846.976.334.142,00	885.101.437.043,00
	1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	35.464.721.911,08	64.236.271.011,87	105.021.202.287,00	114.529.994.341,00	120.337.863.917,00	122.744.621.195,00
	1.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	5.222.137.932,00	5.729.914.000,00	7.494.319.000,00	9.550.000.000,00	9.615.000.000,00	9.807.300.000,00
	1.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	29.119.647.916,00	8.600.083.229,00	13.718.522.158,00	5.405.424.740,00	5.624.026.709,00	5.736.507.243,00
	1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	300.000.000,00	413.617.460,00	391.835.870,00	518.845.242,00	518.845.242,00	529.222.147,00
	1.1.4.	Penerimaan Zakat, Infaq dan Sadakah	-	-	1.400.000.000,00	2.191.549.393,00	2.100.000.000,00	2.142.000.000,00
	1.1.5.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	822.936.063,08	49.492.656.322,87	82.016.525.259,00	96.864.174.966,00	102.479.991.966,00	104.529.591.805,00
	1.2.	DANA PERIMBANGAN	394.244.876.058,00	443.922.034.879,00	477.056.552.547,00	515.118.393.509,00	518.694.190.000,00	552.333.092.820,00
	1.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	33.302.917.058,00	32.760.222.879,00	24.934.217.547,00	25.295.675.509,00	22.488.672.000,00	23.163.332.160,00
	1.2.2.	Dana Alokasi Umum	337.337.339.000,00	381.240.982.000,00	419.767.005.000,00	425.446.753.000,00	451.951.928.000,00	483.588.562.960,00
	1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	23.604.620.000,00	29.920.830.000,00	32.355.330.000,00	64.375.965.000,00	44.253.590.000,00	45.581.197.700,00
	1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	41.275.748.691,00	60.446.103.748,00	169.772.159.286,00	188.509.570.272,00	207.944.280.225,00	210.023.723.028,00
	1.3.1.	Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-	-
	1.3.2.	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	6.603.058.459,00	12.885.625.748,00	17.135.561.925,00	17.135.561.925,00	14.308.829.166,00	14.451.917.458,00
	1.3.3.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	33.738.477.000,00	47.560.478.000,00	70.820.311.000,00	89.447.393.000,00	112.955.110.000,00	114.084.661.100,00
	1.3.4.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	934.213.232,00	-	81.816.286.361,00	81.926.615.347,00	80.680.341.059,00	81.487.144.470,00

Sumber: APEK Longsa (diolah).
*) setelah perubahan

Tabel 3.12
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2012-2017 (Rupiah)

NO	URAIAN		2012*	2013*	2014*	2015	2016	2017
2.	BELANJA DAERAH		453.385.670.077,00	576.541.156.997,00	777.795.742.070,54	870.341.493.208,69	863.376.334.142,00	903.101.437.043,00
	2.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	280.199.702.897,00	323.183.543.131,00	374.065.485.824,54	413.969.587.554,36	462.439.740.465,00	386.839.116.024,00
	2.1.1.	Belanja Pegawai	264.431.736.769,00	301.045.712.131,00	349.445.512.824,54	375.701.745.554,36	382.704.324.657,00	320.139.014.221,00
	2.1.2.	Belanja Bunga	379.000.000,00	1.051.767.000,00	-	-	-	-
	2.1.3.	Belanja Hibah	10.523.635.128,00	8.710.464.000,00	4.010.000.000,00	1.825.000.000,00	10.655.275.000,00	8.913.328.162,00
	2.1.4.	Belanja Bantuan Sosial	3.353.331.000,00		7.519.773.000,00	2.913.557.000,00	2.500.000.000,00	2.091.294.725,00
	2.1.5.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	1.262.000.000,00	11.636.600.000,00	11.627.600.000,00	33.127.645.000,00	66.080.140.808,00	55.277.219.971,00
	2.1.6.	Belanja Tidak Terduga	250.000.000,00	739.000.000,00	1.462.600.000,00	401.640.000,00	500.000.000,00	418.258.945,00
	2.2.	BELANJA LANGSUNG	173.185.967.180,00	253.357.613.866,00	403.730.256.246,00	456.371.905.654,33	400.936.593.677,00	516.262.321.019,00
	2.2.1.	Belanja Pegawai	77.685.094.840,00	82.191.049.158,00	106.044.975.518,00	69.885.650.189,00	67.703.541.657,00	87.177.843.350,00
	2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.907.127.057,00	104.719.959.891,00	141.897.604.147,00	188.236.674.347,33	189.074.031.119,00	243.459.438.947,00
	2.2.3.	Belanja Modal	48.593.745.283,00	66.446.604.817,00	155.787.676.581,00	198.249.581.118,00	144.159.020.901,00	185.625.038.722,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	17.599.676.583,08	(7.936.747.358,13)	(25.945.827.950,54)	(52.183.535.086,69)	(16.400.000.000,00)	(18.000.000.000,00)

Sumber: APBK Langsa (diolah).

*) setelah perubahan

Tabel 3.13
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2012-2017 (Rupiah)

NO	URAIAN		2012*	2013*	2014*	2015	2016	2017
	3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	21.282.073.882,92	9.359.948.922,13	27.187.767.950,54	52.683.535.086,69	18.400.000.000,00	20.000.000.000,00
	3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	7.619.315.818,92	8.397.343.477,13	26.766.105.950,54	52.683.535.086,69	18.400.000.000,00	20.000.000.000,00
	3.1.2.	Penerimaan Pinjaman Daerah	13.662.758.064,00	962.605.445,00	421.662.000,00	-	-	-
	3.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	38.881.750.466,00	1.423.201.564,00	1.241.940.000,00	500.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
	3.2.1.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	80.000.000,00	500.000.000,00	1.000.000.000,00	500.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
	3.2.2.	Pembayaran Pokok Utang	38.801.750.466,00	923.201.564,00	241.940.000,00	-	-	-
		PEMBIAYAAN NETTO	(17.599.676.583,08)	7.936.747.358,13	25.945.827.950,54	52.183.535.086,69	16.400.000.000,00	18.000.000.000,00
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	-	-	-	-	-	-

Sumber: APBK Langsa (diolah)

*) setelah perubahan

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1 Permasalahan dan Tantangan Pembangunan

Sejak terbentuk secara definitif pada tahun 2001, Pemerintah Kota Langsa terus berupaya melaksanakan pembangunan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Disamping hasil pembangunan yang telah dicapai, baik yang terkait dengan urusan wajib maupun pilihan yang diemban Pemerintah Kota dalam melaksanakan pembangunan, dijumpai pula beberapa permasalahan pembangunan yang harus diatasi dan dituntaskan dalam jangka menengah ke depan (periode 2012-2017). Permasalahan tersebut akan diatasi secara terpadu, komprehensif, dan tepat, mengingat dampaknya berpotensi besar menghambat kemajuan pembangunan kota. Umumnya, inti permasalahan tersebut terjadi akibat terbatasnya kemampuan anggaran pemerintah, kurangnya sarana dan prasarana pendukung, dan relatif rendahnya kualitas sumberdaya manusia. Adapun permasalahan pembangunan kota yang harus diatasi dalam jangka menengah ke depan dirangkum sebagai berikut.

4.1.1 Implementasi Syariat Islam Belum Maksimal

Provinsi Aceh diberi kewenangan khusus oleh Pemerintah Pusat melalui penyelenggaraan keistimewaan Aceh untuk melaksanakan Syariat Islam. Lebih lanjut, lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh semakin memperkuat legitimasi dan menjadi momentum bagi Pemerintah Kota untuk mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertaqwa sesuai dengan ajaran Islam. Nilai-nilai Islami yang selama ini kurang maksimal diamalkan masyarakat, harus dibangkitkan kembali dan diaktualisasikan secara terus menerus dalam setiap kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Implementasi Syariat Islam secara kaffah harus ditingkatkan di seluruh aspek kehidupan, baik perorangan, keluarga, di kalangan pemerintahan, maupun di lingkungan sosial kemasyarakatan.

Belum sempurnanya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai Islami di kalangan masyarakat kota merupakan permasalahan

serius yang menyebabkan Syariat Islam belum terlaksana secara kaffah. Kehidupan modernisasi yang didorong perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) turut pula menggeser nilai-nilai syariat Islam. Kondisi tersebut telah mewabah pada generasi muda dan teraktualisasi dalam kehidupan sehari-hari. Lebih lanjut, masih lemahnya pengawasan dari instansi terkait juga menyebabkan masih terjadinya pelanggaran syariat Islam di kota ini. Jumlah pelanggaran berikut penyelesaian penegakan qanun syari'at Islam di Kota Langsa relatif masih tinggi meskipun tren perkembangannya mengalami penurunan, dimana pada tahun 2012 sebanyak 624 pelanggaran dan pada tahun 2014 menjadi 596 pelanggaran.

Untuk mewujudkan masyarakat kota yang Islami, pemantapan akidah dan pemahaman ajaran Islam mutlak diprioritaskan. Selain itu, program-program dan kegiatan-kegiatan yang menitikberatkan unsur keagamaan juga harus ditingkatkan, termasuk mengoptimalkan peran ulama dalam mendorong pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah di kota untuk lima tahun mendatang.

4.1.2 Tata Kelola Pemerintahan yang Belum Maksimal

Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good governance*) merupakan amanah yang harus diwujudkan dalam upaya meningkatkan pelayanan yang prima bagi masyarakat. Dalam kaitan itu, birokrasi dan struktur organisasi pemerintah yang dibentuk harus efektif dan efisien serta mampu meningkatkan pelayanan publik berkualitas yang dibutuhkan masyarakat. Jika ini dapat direalisasikan, maka tata kelola pemerintahan yang baik dapat diwujudkan dalam jangka waktu menengah (periode 2012-2017). Karena itu, upaya strategis yang harus dilakukan Pemerintah Kota dalam jangka menengah ke depan, mulai dari penataan birokrasi, memodernisasi birokrasi, penataan kembali struktur organisasi, perbaikan sistem kerja, pembuatan indikator kinerja organisasi dan kinerja pegawai, pembuatan prosedur operasi standar (SOP), dan penyusunan standar pelayanan minimal (SPM).

Tata kelola pemerintahan yang baik tercermin pula dari pengelolaan keuangan daerah yang menganut prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesional. Meskipun Kota Langsa dalam beberapa tahun terakhir telah menerima penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) namun untuk penilaian akuntabilitas kinerja dalam hal ini Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Kota Langsa, angka penilaiannya masih rendah dengan kategori penilaian C.

4.1.3 Masih Rendahnya Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi kota hingga akhir tahun 2011 masih cenderung melambat dari pertumbuhan ekonomi nasional, meskipun terus bergerak naik dalam dua tahun terakhir. Dalam kurun waktu tersebut, pertumbuhan ekonomi kota juga menunjukkan fluktuasi. Kondisi tersebut mengindikasikan pondasi ekonomi Kota Langsa masih rawan dari berbagai gejolak dan guncangan ekonomi, baik dipicu secara internal maupun eksternal. Akhir tahun 2014, tercatat pertumbuhan ekonomi kota sebesar 4,43 persen, jauh lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,02 persen namun lebih tinggi dari provinsi Aceh yang sebesar 4,13 persen.

Masih rendahnya pertumbuhan ekonomi kota berkait erat dari berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi Pemerintah Kota dalam upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas. Seperti, masih terbatasnya investasi swasta, minimnya anggaran yang diimplementasikan untuk sektor-sektor produktif, belum optimalnya pendayagunaan sumberdaya ekonomi lokal, dan belum optimalnya pemanfaatan pelabuhan Kuala Langsa. Karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih tepat dan terarah guna meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi berkualitas dalam jangka menengah ke depan. Kebijakan yang dapat mendorong minat para calon investor untuk menanamkan modalnya adalah salah satu upaya yang sangat penting untuk dilaksanakan, disamping pula upaya keras mendorong meningkatkan kapasitas UMKM dan optimalisasi pendayagunaan pelabuhan Kuala Langsa dalam mendukung aktivitas perdagangan dan perluasan penyerapan tenaga kerja.

4.1.4 Masih Tingginya Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran

Kurun waktu 2012-2013, tingkat kemiskinan kota cenderung lebih tinggi dari angka kemiskinan nasional, meskipun terlihat lebih rendah dari provinsi. Tahun 2013, angka persentase kemiskinan di kota mencapai 12,62 persen, sementara kemiskinan nasional sebesar 11,47 persen dan provinsi sebesar 17,60 persen. Masih rendahnya capaian

pertumbuhan ekonomi selama beberapa tahun terakhir ikut menyebabkan terhambatnya pengurangan angka kemiskinan.

Dalam jangka menengah ke depan, kebijakan dan implementasi pembangunan yang *pro growth*, *pro job* dan *pro-poor* akan sangat bermanfaat dan memberikan efek pengganda bagi kesinambungan pendapatan masyarakat. Pengurangan kemiskinan harus dilakukan secara sinergis dan komprehensif yang melibatkan antarSKPK. Dukungan anggaran dan implementasi program pembangunan *pro growth*, *pro job* dan *pro-poor* dari pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh dinilai pula sangat strategis serta diharapkan intensitasnya terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan. Antara lain, mencakup penguatan program PNPM mandiri perdesaan dan perkotaan, peningkatan alokasi dana gampong, bantuan kredit usaha kerja bagi pelaku UMKM, bantuan raskin, dan pemberdayaan sosial-ekonomi lainnya yang diharapkan dapat mengurangi penduduk miskin secara bertahap dan berkelanjutan.

4.1.5 Rendahnya Produktivitas Koperasi dan UMKM

Koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan basis ekonomi kerakyatan dan menempati posisi strategis dalam upaya mendorong perekonomian kota, memperluas penyerapan tenaga kerja, dan meningkatkan kesejahteraan warga kota. Berbagai program pembangunan yang digulirkan dalam kurun waktu lima tahun terakhir diakui bahwa berdampak positif dalam upaya pemberdayaan koperasi dan UMKM. Di sisi lain, koperasi dan UMKM masih pula dihadapkan berbagai permasalahan klasik yang belum teratasi secara tuntas sehingga memerlukan penanganan cepat dan berkelanjutan. Berbagai masalah tersebut telah menyebabkan rendahnya produktivitas koperasi dan UMKM di kota.

Permasalahan spesifik yang dihadapi koperasi dan UMKM mencakup terbatasnya akses UMKM terhadap sumberdaya produktif, kurang kondusifnya iklim usaha, masih rendahnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi, dan terbatasnya jangkauan pemasaran produk UMKM. Terbatasnya akses UMKM terhadap sumber daya produktif, terutama terhadap permodalan, teknologi, informasi, dan pasar. Kurang kondusifnya iklim usaha diantaranya terkait dengan lemahnya koordinasi lintas SKPK dalam upaya pengembangan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM, persaingan usaha yang tidak sehat, dan pungutan sebagai

sumber PAD yang memberatkan UMKM. Kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi yang lemah akibat manajemen pengelolaan koperasi kurang profesional, koperasi terbentuk tanpa didasari kepentingan ekonomi bersama, dan masih adanya pertentangan kepentingan dalam koperasi. Dampak dari beberapa hal tersebut, jumlah koperasi aktif di Kota Langsa pada tahun 2014 masih sangat rendah yaitu hanya sebesar 9,88 persen.

Pemberdayaan koperasi dan UMKM harus menjadi perhatian sungguh-sungguh mengingat kota termasuk pusat perdagangan barang dan jasa di wilayah timur provinsi. Bahkan, dalam jangka menengah ke depan kota harus menjadi sentral perdagangan barang dan jasa terbesar di wilayah utara-timur Aceh yang didukung dengan optimalisasi pemanfaatan pelabuhan Kuala Langsa. Karena itu, pemberdayaan koperasi dan UMKM dalam periode 2012-2017 diharapkan memberikan kontribusi positif dalam memperluas penyediaan lapangan kerja, mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi kota yang berkualitas, dan memeratakan peningkatan pendapatan.

4.1.6 Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia (SDM) berperan penting dalam pembangunan kota. Manusia sebagai *human capital* pembangunan tidak akan berfungsi optimal bila tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM. Kota telah mengalami kemajuan penting dalam peningkatan kualitas SDM yang diukur dari *Human Development Index* atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Data BPS menunjukkan IPM kota sebesar 72,75 pada tahun 2012 (perhitungan metode baru). Angka IPM tersebut meningkat signifikan hingga mencapai 73,90 pada tahun 2014 dan termasuk dalam kategori menengah atas. Namun demikian, peningkatan IPM tersebut belum sepenuhnya berimplikasi signifikan dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat yang lebih baik dan sejahtera. Angka persentase kemiskinan kota mencapai 12,62 persen dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) mencapai 11,74 persen (kondisi tahun 2013).

Dalam pengukuran IPM, pendidikan dan kesehatan merupakan komponen utama, selain pendapatan. Membaiknya kinerja pendidikan dan kesehatan akan mendorong peningkatan kualitas SDM yang

tercermin dari IPM. Meskipun angka IPM kota terus meningkat, namun variabel pembentuk IPM belum mencapai angka maksimum. Tingkat taraf pendidikan penduduk masih rendah. Data BPS mengungkapkan angka rata-rata lama sekolah kota baru tercapai 10,47 tahun (kondisi tahun 2013), sementara angka maksimum 15 tahun (standar UNDP). Hal tersebut bermakna bahwa rata-rata lama sekolah masyarakat Kota Langsa telah menamatkan pendidikan setingkat SMP dan belum menamatkan pendidikan SMA. Kondisi tersebut belum memadai dalam mengantisipasi persaingan global.

Demikian pula dengan angka harapan hidup yang sebesar 68,79 tahun, sedangkan angka maksimum adalah 85 tahun (standar UNDP). Sejalan dengan perkembangan IPTEK, peningkatan kualitas SDM merupakan prioritas yang harus dilaksanakan kurun waktu lima tahun ke depan. Dalam upaya peningkatan kualitas SDM, beberapa masalah di bidang pendidikan dan kesehatan yang harus diatasi dalam lima tahun ke depan, mencakup : a) masih ditemui anak didik yang tidak melanjutkan pendidikan atau putus sekolah dalam mengecap pendidikan; b) masih kurangnya tenaga pendidik (guru) pada mata pelajaran tertentu; c) distribusi tenaga pendidik yang berkualitas yang belum merata; d) belum meratanya distribusi sumberdaya kesehatan yang berkualitas; e) pelayanan kesehatan yang belum optimal; f) masih ditemuinya angka kematian bayi dan angka kematian ibu hamil; dan g) masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan.

4.1.7 Belum Optimalnya Pemanfaatan Pelabuhan Kuala Langsa

Kedudukan kota yang berada di wilayah pesisir timur provinsi dan dikelilingi Selat Malaka di bagian utara, memiliki peluang yang sangat besar untuk mendorong percepatan aktivitas perdagangan ekspor-impor dengan manca negara. Lebih lanjut, terbukanya peluang untuk mewujudkan arus perputaran orang, barang, dan jasa melalui jalur laut, baik antarwilayah pantai timur maupun dengan Provinsi Sumatera Utara. Hal tersebut sangat memungkinkan diwujudkan mengingat Kota Langsa memiliki pelabuhan Kuala Langsa. Selat Malaka yang mengelilingi kota di bagian utara merupakan peluang untuk pemanfaatan potensi sumberdaya pesisir dan kekayaan laut. Potensi perikanan darat dan laut akan didayagunakan dan dikelola secara berkelanjutan (*sustainable*

development) sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir dan mendorong kemajuan wilayah pesisir dalam jangka menengah ke depan.

Pelabuhan Kuala Langsa termasuk pelabuhan regional yang dipersiapkan menjadi salah satu pintu masuk untuk pantai wilayah timur Aceh. Keberadaan pelabuhan tersebut diharapkan berfungsi sebagai *feeder* (pengumpan) bagi pelabuhan besar lainnya dalam rangka meningkatkan perekonomian provinsi pada umumnya dan mendorong percepatan pembangunan kota pada khususnya dengan memanfaatkan semua potensi SDM dan Sumber Daya Alam (SDA) di seluruh kawasan dan daerah *hinterland*.

Untuk mendukung Pelabuhan Kuala Langsa sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi (*engine growth*) kota dibutuhkan sarana dan prasarana pelabuhan yang memadai. Masih banyak fasilitas penunjang yang perlu dibenahi dan disiapkan seperti pengerukan alur pelayaran dan pembangunan tangki timbun CPO. Selain itu, tumpang tindihnya kebijakan pengelolaan pelabuhan yang belum sesuai amanat UUPA, turut pula menghambat lalu lintas perdagangan ekspor-impor. Regulasi dan perhatian yang sungguh-sungguh dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh untuk mengoptimalkan fungsi pelabuhan Kuala Langsa merupakan syarat utama. Adanya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh diharapkan dapat berimplikasi signifikan dalam mendorong peningkatan aktivitas ekonomi di pelabuhan Kuala Langsa yang sekaligus berdampak positif terhadap percepatan pembangunan kota.

4.1.8 Terbatasnya Investasi dan Rendahnya Pendapatan Asli Daerah

Untuk mendorong percepatan pembangunan sekaligus mencapai visi jangka menengah kota dibutuhkan penanaman modal (investasi) yang cukup. Investasi tersebut diperlukan untuk membangun infrastruktur dan pengembangan kawasan perkotaan. Kebijakan pembiayaan pembangunan infrastruktur perlu diprioritaskan, baik bersumber dari dana masyarakat dan dunia usaha, maupun investor asing dalam rangka penyelenggaraan pembangunan sarana dan prasarana secara proporsional. Hal tersebut merupakan tantangan yang memerlukan berbagai penyempurnaan kebijakan investasi di kota dan pengaturan pajak.

Kondisi keuangan daerah masih didominasi dana perimbangan (DAU, DAK, dan bagi hasil pajak dan non pajak) dalam mendorong kinerja pembangunan kota. Implikasinya, tingkat ketergantungan Pemerintah Kota terhadap pemerintah pusat dalam hal pendanaan pembangunan cukup besar. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diharapkan berperan penting dalam pendanaan pembangunan masih belum optimal. Salah satunya, adalah belum lengkapnya data tentang objek pajak dan retribusi daerah yang akurat. Data potensi PAD sangat berperan penting dalam penentuan target setiap tahun. Data potensi PAD juga sangat diperlukan sebagai masukan dalam perumusan kebijakan peningkatan PAD serta pengelolaan PAD yang transparan dan akuntabel. Selama ini, dampak dari masih rendahnya PAD terhadap belanja adalah rendahnya tingkat kemandirian daerah.

Selain itu, belum memadainya sarana pendukung bagi instansi pengelola PAD dan terbatasnya aparatur yang turut mengelola pajak daerah dan retribusi daerah menyebabkan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah tidak optimal. Dengan demikian, hasil penerimaan yang dicapai pun masih relatif rendah atau tidak mencapai target yang telah direncanakan.

Lemahnya penegakan hukum atau sanksi bagi wajib pajak juga mempengaruhi kecilnya kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Meskipun Pemerintah Kota telah menetapkan qanun-qanun yang mengatur PAD termasuk sanksinya, namun akibat lemahnya penegakan hukum atau pelaksanaan sanksi tersebut berdampak terhadap wajib pajak semakin leluasa untuk tidak membayar pajak.

Perkembangan aktivitas ekonomi di sisi lain, masih sangat bergantung dari pengeluaran (belanja) Pemerintah Kota. Sementara peran dunia usaha/swasta masih relatif kecil dalam mendorong percepatan ekonomi.

Upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah bersumber dari PAD merupakan keharusan dan dilakukan secara berkelanjutan. Peningkatan berbagai sumber PAD dapat dilakukan pada tingkatan kebijakan dan administrasi. Upaya peningkatan PAD dengan kebijakan dilakukan melalui strategi ekstensifikasi jenis pungutan retribusi daerah serta memperbaiki administrasi pajak daerah dan retribusi daerah melalui perbaikan sistem dan prosedur koleksi melalui perbaikan basis

data, penghitungan potensi penerimaan, mekanisme penagihan, dan lain sebagainya yang ditujukan untuk intensifikasi pungutan pajak dan retribusi.

Selanjutnya, strategi intensifikasi diarahkan untuk mengoptimalkan tingkat pemungutan penerimaan potensi objek-objek PAD yang sudah berjalan (*on-going*) yang didukung dengan penyempurnaan atau qanun-qanun yang telah ada, pemantapan sumberdaya pemungut, dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung. Sedangkan strategi ekstensifikasi diarahkan untuk meningkatkan penerimaan PAD melalui perluasan objek-objek PAD yang sesuai dengan aturan/perundang-undangan yang berlaku disertai dengan qanun, dan optimalisasi potensi-potensi sumberdaya ekonomi berbasis sektor unggulan. Penyempurnaan administrasi perpajakan perlu dilakukan melalui e-pajak daerah.

4.2 Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi kemajuan kota. Berdasarkan permasalahan pembangunan serta mempertimbangkan isu-isu dan dinamika secara nasional dan regional, dengan menggunakan analisis SWOT maka dirangkum isu-isu strategis selama periode 2012-2017.

4.2.1 Analisis SWOT

A. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

Pelaksanaan analisis lingkungan strategis merupakan bagian dari komponen perencanaan strategis dan merupakan suatu proses untuk selalu menempatkan organisasi pada posisi strategis sehingga dalam perkembangannya akan selalu berada pada posisi yang menguntungkan. Lingkup analisis lingkungan strategis meliputi Analisis Lingkungan Internal (ALI) dan Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)..

I. Analisis Lingkungan Internal (ALI)

a. Kekuatan

1. Penduduk mayoritas beragama Islam;
2. Keinginan reformasi birokrasi pemerintahan tergolong tinggi;

3. Letak strategis kota;
4. Adanya pelabuhan Kuala Langsa untuk jalur penyebarangan dan perdagangan;
5. Kemudahan akses media komunikasi dan informasi;
6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tergolong tinggi;
7. Banyaknya lembaga pendidikan, kesehatan, dan sosial;
8. Adanya jaringan kerjasama antar daerah, LSM, dan perguruan tinggi;
9. Tingginya potensi perikanan, perkebunan, pertanian, dan pariwisata;
10. Daya beli masyarakat terus meningkat;
11. Tingginya pertumbuhan ekonomi di sektor perdagangan;
12. Memiliki Keanekaragaman sosial dan budaya;
13. Aparatur gampong berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong dan tugas sosial kemasyarakatan;
14. Tingginya keinginan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban serta keberlanjutan perdamaian.

b. Kelemahan

1. Penegakan dan implementasi Syariat Islam belum optimal;
2. Tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa belum maksimal;
3. Tata ruang kota serta pusat-pusat pasar dan perdagangan belum tertata dengan baik;
4. Sarana dan prasarana pelabuhan masih belum memadai;
5. Ketersediaan dan validitas data indikator pembangunan masih rendah;
7. Pelayanan pendidikan berkualitas belum merata;
8. Pelayanan dasar publik belum optimal;
9. Kemampuan sumber pendanaan/finansial Pemerintah Kota masih sangat terbatas;
10. Penataan permukiman masyarakat dan lingkungan hidup yang serasi dan lestari belum tertata dengan baik;
11. Kualitas sumber daya manusia masih rendah;
12. Tingkat pengangguran masih tinggi;
13. Pemasaran produk lokal masih lemah;

14. Tingkat kemiskinan masih tinggi;
15. Kapasitas Pemerintah Gampong masih rendah;
16. Kerentanan keberlanjutan perdamaian.

II. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)

a. Peluang

1. Terdapat qanun tentang pelaksanaan Syariat Islam;
2. Reformasi di bidang politik dan birokrasi pemerintah;
3. Adanya sumber dana pembangunan yang bersumber dari TDBH Migas dan Otsus;
4. Perdagangan dan investasi dengan pihak dalam dan luar negeri;
5. Pengembangan dan pemanfaatan Iptek;
6. Kemudahan akses pasar internasional;
7. Tingginya tuntutan peningkatan pelayanan dasar publik;
8. Adanya kerjasama antar daerah;
9. Pengembangan ekonomi kecil dan menengah berbasis syariah;
10. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap stabilitas keamanan.

b. Ancaman

1. Maraknya penyakit masyarakat;
2. Migrasi penduduk sulit dikendalikan;
3. Inkonsistensi kebijakan pembangunan;
4. Globalisasi ekonomi dan informasi;
5. Dampak globalisasi terhadap sosial dan budaya;
6. Persaingan pelayanan masyarakat antar daerah;
7. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga dan aparat hukum/birokrasi masih rendah;
8. Wilayah rawan bencana;
9. Instabilitas keamanan

4.2.2. Isu-Isu Strategis Pembangunan Kota Langsa Tahun 2012-2017

Berdasarkan analisis SWOT di atas maka yang menjadi isu strategis pembangunan kota selama lima tahun ke depan (2012-2017) adalah sebagai berikut:

1. Penegakan dan implementasi Syariat Islam belum optimal;
2. Tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa belum maksimal;

3. Belum tertatanya ruang kota serta pusat-pusat pasar dan perdagangan yang tertib, bersih, indah, menarik, dan nyaman;
4. Pelayanan pendidikan berkualitas belum merata;
5. Belum optimalnya pelayanan publik;
6. Rendahnya kualitas pembangunan infrastruktur kota dan wilayah;
7. Rendahnya produktivitas UKM dan belum berkembangnya sentra-sentra ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan, serta masih tingginya tingkat kemiskinan;
8. Belum optimalnya penataan permukiman masyarakat dan lingkungan hidup yang serasi dan lestari;
9. Masih rendahnya kapasitas Pemerintah Gampong dan pembinaan masyarakat; dan
10. Kerentanan keberlanjutan perdamaian.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

5.1 Visi

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan cita-cita atau kondisi ideal yang diinginkan di masa depan dengan memperhatikan kondisi kekinian, potensi sumber daya lokal (SDA, SDM, dan kemampuan keuangan), serta dinamika dan isu-isu strategis yang berkembang. Visi diartikan pula sebagai suatu kondisi idaman masa depan yang hendak dicapai. Idaman tersebut adalah suatu kondisi daerah yang lebih baik dari sebelumnya serta taraf hidup sosial-ekonomi masyarakatnya yang lebih baik pula.

Sesuai amanah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa visi dan misi dari Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah terpilih, dalam hal ini Walikota dan Wakil Walikota Langsa terpilih melalui Pemilukada kota tahun 2012, ditetapkan menjadi dasar visi dan misi pembangunan kota periode 2012-2017. Atas dasar tersebut, dengan mengedepankan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, Pemerintah Kota menetapkan visi pembangunan kota tahun 2012-2017 sebagai berikut :

“ Mewujudkan Langsa Menjadi Kota Berperadaban dan Islami”

Kata-kata yang dirangkai menjadi kalimat visi di atas memiliki kandungan arti atau makna sebagai berikut :

Kota Berperadaban bermakna sebagai sebuah kota yang memiliki jati diri, harga diri, berbudaya, dan mandiri dalam upaya mencapai kemakmuran masyarakat Kota Langsa, berlandaskan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa, ekonomi lokal yang tangguh, serta berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).

Sementara itu, ***Kota yang islami*** memiliki arti sebuah kota yang dihuni masyarakatnya yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT serta berakhlak karimah dengan melaksanakan kewajiban sesuai Syariat Islam serta senantiasa memelihara hubungan yang harmonis antarummat beragama.

Beberapa asumsi penting yang harus dipenuhi agar visi yang ditetapkan dapat diwujudkan diantaranya adalah :

- 1) Terciptanya keberlanjutan perdamaian di Aceh secara keseluruhan termasuk di Kota Langsa, selama terciptanya kondisi keamanan dan ketertiban dalam masyarakat;
- 2) Kestabilan makro ekonomi serta kondusifnya kondisi sosial dan politik secara nasional;
- 3) Tersedianya anggaran pembangunan daerah yang memadai setiap tahun serta difokuskan pada program pembangunan prioritas; dan
- 4) Dukungan dan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat Kota Langsa, termasuk jajaran eksekutif dan legislatif, maupun kalangan dunia usaha (swasta).

5.2 Misi

Misi adalah kondisi ideal yang harus diciptakan agar visi yang telah ditetapkan dapat dicapai dan terealisasi menjadi kenyataan dalam lima tahun ke depan. Misi juga berupa panggilan tugas sesuai fungsi masing-masing untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka mewujudkan visi sampai waktu yang telah disepakati bersama.

Sejalan dengan Misi dari Walikota dan Wakil Walikota terpilih dalam Pemilukada kota tahun 2012, ditetapkan beberapa misi pembangunan dalam jangka menengah ke depan sebagai berikut :

1. Menegakkan dan menjalankan Syariat Islam secara kaffah;
2. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, amanah, demokratis, berkeadilan, transparan, dan akuntabel;
3. Mewujudkan penataan ruang kota serta pusat-pusat pasar dan perdagangan yang tertib dan BERIMAN (bersih, indah, menarik, dan nyaman);
4. Mewujudkan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan serta ketahanan budaya daerah;
5. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas;
6. Mewujudkan pembangunan infrastruktur berkualitas guna mendorong percepatan pengembangan kota dan wilayah;
7. Mendorong peningkatan UMKM dan membangun sentra-sentra ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan;

8. Mewujudkan permukiman masyarakat yang layak huni dan menata lingkungan hidup yang serasi dan lestari;
9. Memperkuat kapasitas pemerintah gampong dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat; dan
10. Mewujudkan keamanan dan ketertiban serta keberlanjutan perdamaian sesuai Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA).

5.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan pembangunan Kota Langsa selama 2012-2017 ditetapkan berdasarkan 10 (sepuluh) misi pembangunan yang telah diuraikan sebelumnya. Selanjutnya, sasaran pembangunan Kota Langsa ditetapkan sesuai dengan masing-masing tujuan pembangunan. Keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan secara rinci diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : Mewujudkan Langsa Menjadi Kota Berberadaban dan Islami		
Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 1 :		
Menegakkan dan menjalankan Syariat Islam secara kaffah	Melaksanakan Syariat Islam secara kaffah dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat	Berkurangnya kegiatan-kegiatan asusila dan amoral lainnya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam
		Meningkatnya peran dan fungsi ulama dalam pemberdayaan ummat dan pengayom dalam kehidupan keagamaan
Misi 2 :		
Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, amanah, demokratis, berkeadilan, transparan, dan akuntabel	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas, bersih dan berwibawa (good governance)	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas, amanah, bersih, dan berwibawa (LKIP Pemerintah Kota Langsa dari C menjadi B, serta indeks kepuasan masyarakat)
		Meningkatnya aparatur yang beretos kerja tinggi, profesional, dan disiplin dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah;
		Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah dan sistem pelaporan keuangan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan profesional (perolehan WTP)

Visi : Mewujudkan Langsa Menjadi Kota Berberadaban dan Islami		
Misi	Tujuan	Sasaran
		Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan (RPJPD, RTRW, RPJMD, RKPD);
		Meningkatnya kemandirian daerah dan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur penerimaan daerah (kemampuan keuangan daerah dari rendah menjadi tinggi)
Misi 3 :		
Mewujudkan penataan ruang kota serta pusat-pusat pasar dan perdagangan yang tertib dan BERIMAN (bersih, indah, menarik, dan nyaman);	Menciptakan tata ruang kota serta pengembangan pusat pasar dan perdagangan yang BERIMAN (bersih, indah, menarik, dan nyaman);	Meningkatnya pembangunan perkotaan yang memperhatikan pengelolaan lingkungan dan berwawasan mitigasi bencana
		Meningkatnya pengembangan pusat pasar dan perdagangan yang BERIMAN (bersih, indah, menarik, dan nyaman)
Misi 4 :		
Mewujudkan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan serta ketahanan budaya daerah;	Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) Kota Langsa yang berkualitas dan berdaya saing serta menguatkan ketahanan budaya daerah guna mendorong percepatan pembangunan;	Meningkatnya kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan (rata-rata lama sekolah dari 10,43 tahun menjadi 11,07 tahun)
		Meningkatnya kualifikasi dan kompetensi guru serta tenaga kependidikan dalam mendorong peningkatan pelayanan pendidikan berkualitas (persentase Guru yang memenuhi Kualifikasi SI/D-IV dari 71,16 % menjadi 90,79%)
		Berkembangnya budaya daerah dan kearifan lokal yang mendukung pembangunan daerah
Misi 5 :		
Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mewujudkan Kota Langsa yang berperadaban;	Meningkatnya pelayanan kesehatan berkualitas dan terjangkau (angka harapan hidup 68,75 tahun menjadi 68,88 tahun)
		Meningkatnya pelayanan administrasi publik yang baik dan cepat (pengurusan izin 7 hari)
Misi 6 :		
Mewujudkan pembangunan infrastruktur berkualitas guna mendorong percepatan pengembangan kota dan wilayah;	Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur guna mendorong percepatan pengembangan Kota dan wilayah;	Meningkatnya pembangunan infrastruktur pelayanan publik perkotaan dan wilayah yang berkualitas;
		Meningkatnya sarana dan prasarana pelabuhan Kuala Langsa yang memadai dalam mendukung aktivitas perdagangan ekspor dan impor;

Visi : Mewujudkan Langsa Menjadi Kota Berberadaban dan Islami		
Misi	Tujuan	Sasaran
		Meningkatnya distribusi air bersih yang memadai dalam upaya pemerataan distribusi air bersih bagi masyarakat
		Meningkatnya pelayanan jasa transportasi yang efisien, ekonomis, dan aman.
Misi 7 :		
Mendorong peningkatan UMKM dan membangun sentra-sentra ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan;	Menguatkan kapasitas UMKM dan membangun ekonomi kerakyatan berlandaskan potensi sumber daya ekonomi lokal;	Meningkatnya kapasitas koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam mendorong peningkatan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi kota;
		Meningkatnya kapasitas produksi perikanan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan;
		Meningkatnya produktivitas komoditas unggulan perkebunan berbasis sumberdaya lokal dan mendukung pengembangan perdagangan ekspor;
		Meningkatnya pemanfaatan sumber daya pesisir dan kelautan yang ramah lingkungan dan berbasis pembangunan berkelanjutan
		Meningkatnya kapasitas produksi dan produktivitas pertanian dalam rangka mendukung kebutuhan pangan
		Meningkatnya pertumbuhan ekonomi (4,75 persen menjadi 4,87 persen)
		Menurunnya tingkat kemiskinan (13,93 persen menjadi 10,62 persen)
Misi 8 :		
Mewujudkan permukiman masyarakat yang layak huni dan menata lingkungan hidup yang serasi dan lestari;	Menciptakan permukiman masyarakat layak huni dan penataan lingkungan yang serasi dan harmonis	Meningkatnya lingkungan permukiman yang berkualitas dalam upaya menciptakan kota tanpa permukiman kumuh
		Meningkatnya kualitas kinerja cakupan pelayanan limbah, dan persampahan (penanganan sampah 14 persen menjadi 75 persen)

Visi : Mewujudkan Langsa Menjadi Kota Berberadaban dan Islami		
Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 9 :		
Menguatkan kapasitas pemerintah gampong dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat	Mewujudkan kapasitas lembaga pemerintah gampong yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat	Menguatnya kapasitas dan tata kelola pemerintahan gampong yang baik dalam pelaksanaan pembangunan
		Meningkatnya peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan (partisipasi perempuan di lembaga pemerintah sebesar 63,38 persen)
Misi 10 :		
Mewujudkan keamanan dan ketertiban serta keberlanjutan perdamaian sesuai Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA)	Menciptakan keamanan dan ketertiban serta keterlibatan masyarakat dalam rangka keberlanjutan perdamaian sesuai dengan Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA)	Meningkatnya kondisi daerah yang aman dan kondusif serta keberlanjutan perdamaian
		Meningkatnya kualitas demokrasi dan politik menuju masyarakat yang berkeadilan, tertib, aman dan bermartabat

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

6.1 Strategi Pembangunan

Strategi adalah kegiatan, mekanisme, atau sistem untuk mengantisipasi secara menyeluruh dan meramalkan pencapaian tujuan ke depan melalui pendekatan rasional. Strategi disusun dengan memadukan antara kekuatan (*strength*, S) dengan peluang (*opportunity*, O) yang dikenal sebagai strategi S-O, memadukan kelemahan (*weakness*, W) dengan peluang (*opportunity*, O) yang dikenal sebagai strategi W-O, dan memadukan kekuatan (*strength*, S) dengan ancaman (*threat*, T) yang dikenal sebagai strategi S-T.

Strategi S-O dimaksudkan sebagai upaya memaksimalkan setiap unsur kekuatan yang dimiliki untuk merebut setiap unsur peluang yang ada seoptimal mungkin, strategi W-O dimaksudkan sebagai upaya memperbaiki masing-masing unsur kelemahan agar dapat memanfaatkan seoptimal mungkin setiap unsur peluang yang ada, sedangkan strategi S-T dimaksudkan sebagai upaya untuk memaksimalkan setiap unsur kekuatan untuk menangkal dan menundukkan setiap unsur tantangan seoptimal mungkin.

Dengan demikian akan diperoleh berbagai strategi pilihan yang merupakan hasil perpaduan antar unsur kekuatan, kelemahan, dan peluang. Masing-masing strategi pilihan tersebut harus diuji kembali relevansi dan kekuatan relasinya dengan visi, misi, dan nilai-nilai organisasi pemerintah kota.

6.1.1 Kekuatan - Peluang (S-O)

1. Peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam dalam setiap kehidupan bermasyarakat;
2. Peningkatan profesionalisme, akuntabilitas, dan sistem kerja instansi dan aparat pemerintah daerah dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih (*good governance*);
3. Peningkatan kualitas infrastruktur, meliputi jalan, jembatan, drainase, tanggul, listrik, transportasi, ICT, internet dalam mendukung percepatan pengembangan kota dan wilayah;
4. Penataan ruang kota dan wilayah yang aman, nyaman, efektif, integratif, produktif, dan berkelanjutan sesuai RTRW Kota Langsa;

5. Peningkatan kualitas infrastruktur pelabuhan Kuala Langsa dalam rangka mendorong aktivitas perdagangan ekspor-impor;
6. Penyediaan pusat data dan informasi secara terpadu, integratif, dan berbasis e-planning (e-klik);
7. Pemerataan layanan kesehatan berkualitas sesuai dengan SPM Kesehatan dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
8. Peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah sesuai dengan standar nasional, melalui pemerataan kualitas tenaga pendidik dan fasilitas pendidikan;
9. Peningkatan peran aktif kelompok masyarakat/dunia usaha (swasta) untuk memberi perhatian besar pada pembangunan pendidikan;
10. Penguatan kerjasama dan kemitraan strategis antara BUMN, pelaku usaha, perbankan, dan pemerintah dalam mendorong pengembangan koperasi UMKM, serta percepatan perdagangan ekspor-impor melalui Pelabuhan Kuala Langsa;
11. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pelaku usaha yang profesional dan berdaya saing;
12. Peningkatan kualitas lingkungan permukiman yang sehat dan aman;
13. Peningkatan iklim usaha yang kondusif, pemberian kemudahan prosedur investasi dan perizinan bagi investor lokal, luar daerah dan luar negeri guna mendorong peningkatan investasi dan aktivitas bisnis;
10. Pelestarian budaya daerah dan kearifan lokal.

6.1.2 Kekuatan – Ancaman (S-T)

1. Peningkatan sosialisasi dan penguatan pelaksanaan qanun-qanun Syariat Islam;
2. Penguatan kapasitas wilayatul hisbah dan lembaga sosial keagamaan dalam mengawasi dan menyahuti dinamika dalam kehidupan masyarakat yang bertentangan dengan nilai-nilai Islami;
3. Penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) perencana, peningkatan kualitas data, dan penerapan teknologi komunikasi dan guna menghasilkan perencanaan pembangunan berkualitas;

4. Peningkatan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah yang berkeadilan dengan memperhatikan kondisi yang kondusif bagi kegiatan dunia usaha dan investasi;
5. Perluasan layanan pendidikan non-formal yang bermutu dan berkualitas;
6. Peningkatan sosialisasi dan peran aktif kelompok masyarakat/dunia usaha (swasta) untuk memberi perhatian besar pada pembangunan pendidikan;
7. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan (RSU, Puskesmas, dan jaringannya);
8. Pemberantasan praktik KKN dan penyalahgunaan wewenang sesuai ketentuan dan perundangan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta mendorong penumbuhan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah;
9. Peningkatan akses koperasi dan UMKM terhadap sumber daya produktif guna mendorong peningkatan penyediaan lapangan kerja dan berdampak positif terhadap perekonomian daerah;
10. Pembangunan kawasan perkotaan yang memperhatikan pengelolaan lingkungan dan berwawasan mitigasi bencana;
11. Penguatan sistem keamanan dan ketertiban lingkungan melalui kerjasama yang intensif aparat penegak hukum dengan seluruh komponen masyarakat guna menangkal setiap ancaman keamanan dan ketertiban.

6.1.3 Kelemahan – Peluang (W-O)

1. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan Kuala Langsa;
2. Pemanfaatan teknologi informasi guna menjaga validitas data indikator pembangunan;
3. Pemerataan pendidikan melalui perluasan akses pendidikan bagi masyarakat;
4. Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga medis/sumber daya manusia (SDM) bidang kesehatan;
5. Peningkatan kerjasama pembangunan dengan berbagai elemen masyarakat;
6. Pembangunan permukiman masyarakat berdasarkan rencana tata ruang wilayah;

7. Peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis syariah guna menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran;
8. Penguatan peran Mukim dan aparatur Gampong dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong dan tugas-tugas sosial kemasyarakatan.

6.2 Rumusan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota

Langsa

Rumusan strategi pembangunan Kota Langsa diperoleh dari analisa SWOT dan diselaraskan dengan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Langsa 2012-2017 dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 6.1
Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : Mewujudkan Langsa Menjadi Kota Berberadaban dan Islami				
Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 1 :				
Menegakkan dan menjalankan Syariat Islam secara kaffah	Melaksanakan Syariat Islam secara kaffah dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat	Berkurangnya kegiatan-kegiatan asusila dan amoral lainnya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam	Peningkatan syiar Islam dan kegiatan keagamaan dalam upaya penguatan akidah dan pemberantasan pelanggaran Syariat Islam	Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran Islam dalam setiap kehidupan, baik di rumah tangga, lingkungan masyarakat, maupun di lingkungan pemerintahan
		Meningkatnya peran dan fungsi ulama dalam pemberdayaan ummat dan pengayom dalam kehidupan keagamaan	Penguatan fungsi dan peran ulama dalam setiap perumusan kebijakan pembangunan yang berkenaan dengan keagamaan dan sosial kemasyarakatan	Melibatkan ulama dalam setiap perumusan kebijakan pembangunan yang berkenaan dengan keagamaan dan sosial kemasyarakatan
Misi 2 :				
Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, amanah, demokratis, berkeadilan, transparan, dan akuntabel	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas, bersih dan berwibawa (good governance)	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas, amanah, bersih, dan berwibawa (LKIP Pemerintah Kota Langsa dari C menjadi B, serta indeks kepuasan masyarakat)	Peningkatan profesionalisme, akuntabilitas, dan sistem kerja instansi dan aparat pemerintah daerah dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih (<i>good governance</i>)	Mengoptimalkan profesionalisme, akuntabilitas, dan sistem kerja instansi dan aparat pemerintah daerah dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa

Visi : Mewujudkan Langsa Menjadi Kota Berberadaban dan Islami

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatnya aparatur yang beretos kerja tinggi, profesional, dan disiplin dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah;	Pembenahan struktur organisasi Pemerintah Kota Langsa yang efektif dan efisien dalam kerangka tugas dan fungsi yang harmonis sesuai aturan dan perundangan	
		Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah dan sistem pelaporan keuangan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan profesional (perolehan WTP)	Peningkatan kompetensi dan profesionalitas sumber daya aparatur guna memacu peningkatan kinerja dan pelayanan yang prima bagi kepentingan masyarakat	
		Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan (RPJPD, RTRW, RPJMD, RKPD);		
		Meningkatnya kemandirian daerah dan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur penerimaan daerah (kemampuan keuangan daerah dari rendah menjadi tinggi)	Peningkatan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah yang berkeadilan dengan memperhatikan kondisi yang kondusif bagi kegiatan dunia usaha dan investasi	Mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah, termasuk melakukan intensifikasi PAD sesuai qanun dan perundangan
Misi 3 :				

Visi : Mewujudkan Langsa Menjadi Kota Berberadaban dan Islami				
Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan penataan ruang kota serta pusat-pusat pasar dan perdagangan yang tertib dan BERIMAN (bersih, indah, menarik, dan nyaman);	Menciptakan tata ruang kota serta pengembangan pusat pasar dan perdagangan yang BERIMAN (bersih, indah, menarik, dan nyaman);	Meningkatnya pembangunan perkotaan yang memperhatikan pengelolaan lingkungan dan berwawasan mitigasi bencana	Penataan ruang kota dan wilayah yang aman, nyaman, efektif, integratif, produktif, dan berkelanjutan	Mengembangkan ruang kota dan wilayah yang aman, nyaman, efektif, integratif, produktif, dan berkelanjutan sesuai RTRW Kota Langsa
		Meningkatnya pengembangan pusat pasar dan perdagangan yang BERIMAN (bersih, indah, menarik, dan nyaman)	Penataan pusat pasar dan perdagangan di Kota Langsa yang BERIMAN (bersih, indah, menarik, dan nyaman)	Mengembangkan pusat pasar dan perdagangan di Kota Langsa yang BERIMAN (bersih, indah, menarik, dan nyaman) guna mendorong aktivitas perdagangan dan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah
Misi 4 :				
Mewujudkan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan serta ketahanan budaya daerah;	Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) Kota Langsa yang berkualitas dan berdaya saing serta menguatkan ketahanan budaya daerah guna mendorong percepatan pembangunan;	Meningkatnya kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan (rata-rata lama sekolah dari 10,43 tahun menjadi 11,51 tahun)	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan sesuai SPM pendidikan	Meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan standar nasional, melalui pemerataan kualitas tenaga pendidik dan fasilitas pendidikan

Visi : Mewujudkan Langsa Menjadi Kota Berberadaban dan Islami

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatnya kualifikasi dan kompetensi guru serta tenaga kependidikan dalam mendorong peningkatan pelayanan pendidikan berkualitas (persentase Guru yang memenuhi Kualifikasi SI/D-IV dari 71,16 % menjadi 90,79%)		
		Berkembangnya budaya daerah dan kearifan lokal yang mendukung pembangunan daerah	Pelestarian budaya daerah dan kearifan lokal dalam mendorong penguatan ketahanan budaya daerah dan mendukung pencapaian Kota Langsa berperadaban	Menumbuhkembangkan nilai-nilai budaya daerah termasuk pengembangan sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya dan pola perilaku yang tidak sesuai dengan norma, adat-istiadat, dan budaya leluhur daerah guna menuju kemajuan, kemandirian dan ketahanan budaya daerah yang mendukung pembangunan daerah dan Syariat Islam
Misi 5 :				

Visi : Mewujudkan Langsa Menjadi Kota Berberadaban dan Islami

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mewujudkan Kota Langsa yang berperadaban;	Meningkatnya pelayanan kesehatan berkualitas dan terjangkau (angka harapan hidup 68,75 tahun menjadi 68,88 tahun)	Pemerataan layanan kesehatan berkualitas sesuai dengan SPM Kesehatan dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan cakupan layanan kesehatan berkualitas yang merata sesuai SPM Kesehatan
		Meningkatnya pelayanan administrasi publik yang baik dan cepat (pengurusan izin 7 hari)	Peningkatan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan secara cepat dan berkualitas	Mempercepat proses pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan secara cepat dan berkualitas
Misi 6 :				
Mewujudkan pembangunan infrastruktur berkualitas guna mendorong percepatan pengembangan kota dan wilayah;	Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur guna mendorong percepatan pengembangan Kota dan wilayah;	Meningkatnya pembangunan infrastruktur pelayanan publik perkotaan dan wilayah yang berkualitas;	Percepatan revitalisasi dan relokasi BLUD RSUD Langsa dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan berkualitas	Melakukan percepatan revitalisasi dan relokasi BLUD RSUD Langsa sebagai salah satu rumah sakit regional wilayah timur Aceh
		Meningkatnya sarana dan prasarana pelabuhan Kuala Langsa yang memadai dalam mendukung aktivitas perdagangan ekspor dan impor;	Pengembangan Pelabuhan Kuala Langsa	Meningkatkan kualitas infrastruktur Pelabuhan Kuala Langsa dalam rangka mendorong aktivitas perdagangan ekspor-impor

Visi : Mewujudkan Langsa Menjadi Kota Berberadaban dan Islami

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatnya distribusi air bersih yang memadai dalam upaya pemerataan distribusi air bersih bagi masyarakat	Pembangunan jaringan air bersih dalam upaya meningkatkan pemerataan distribusi air bersih bagi masyarakat	Membangun jaringan air bersih yang integral dan terpadu dalam upaya meningkatkan pemerataan distribusi air bersih bagi masyarakat dan mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan milenium (Millenium Development Goal/MDGs)
		Meningkatnya pelayanan jasa transportasi yang efisien, ekonomis, dan aman.	Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam perencanaan transportasi kota	Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi yang efektif dan efisien yang menghubungkan antargampong dan antarwilayah
Misi 7 :				
Mendorong peningkatan UMKM dan membangun sentra-sentra ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan;	Menguatkan kapasitas UMKM dan membangun ekonomi kerakyatan berlandaskan potensi sumber daya ekonomi lokal;	Meningkatnya kapasitas koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam mendorong peningkatan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi kota;	Peningkatan akses koperasi dan UMKM terhadap sumber daya produktif (permodalan, sarana produksi, teknologi, informasi, dan pemasaran) guna mendorong peningkatan penyediaan lapangan kerja dan berdampak positif terhadap perekonomian daerah	Mendorong dan membangun kemitraan strategis antara BUMN, pelaku usaha, perbankan, dan pemerintah dalam rangka pengembangan koperasi UMKM

Visi : Mewujudkan Langsa Menjadi Kota Berberadaban dan Islami

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatnya kapasitas produksi perikanan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan;	Pembinaan dan pendampingan nelayan guna meningkatkan kesinambungan pendapatan	Memberdayakan, membina, dan melakukan pendampingan nelayan secara berkelanjutan guna meningkatkan kesinambungan pendapatan (income generating) masyarakat nelayan
		Meningkatnya produktivitas komoditas unggulan perkebunan berbasis sumberdaya lokal dan mendukung pengembangan perdagangan ekspor;	Pengembangan sentra-sentra industri potensial sesuai potensi sumberdaya ekonomi lokal (pertanian, perikanan dan perkebunan)	Mempercepat pembangunan sentra-sentra industri potensial sesuai potensi sumberdaya ekonomi lokal (pertanian, perikanan dan perkebunan) termasuk Pembangunan Pabrik Minyak Goreng
		Meningkatnya pemanfaatan sumber daya pesisir dan kelautan yang ramah lingkungan dan berbasis pembangunan berkelanjutan		
		Meningkatnya kapasitas produksi dan produktivitas pertanian dalam rangka mendukung kebutuhan pangan		

Visi : Mewujudkan Langsa Menjadi Kota Berberadaban dan Islami				
Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatnya pertumbuhan ekonomi (4,75 persen menjadi 4,87 persen)	Peningkatan pertumbuhan ekonomi Kota Langsa dan pendapatan perkapita masyarakat	Mendorong berkembangnya investasi swasta serta menyelesaikan infrastruktur pendukung ekonomi sesuai dengan potensi sumber daya ekonomi lokal
		Menurunnya tingkat kemiskinan (13,93 persen menjadi 10,62 persen)		
Misi 8 :				
Mewujudkan permukiman masyarakat yang layak huni dan menata lingkungan hidup yang serasi dan lestari;	Menciptakan permukiman masyarakat layak huni dan penataan lingkungan yang serasi dan harmonis	Meningkatnya lingkungan permukiman yang berkualitas dalam upaya menciptakan kota tanpa permukiman kumuh	Penyediaan sarana dan prasarana permukiman masyarakat yang berkualitas	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana permukiman masyarakat yang berkualitas
		Meningkatnya kualitas kinerja cakupan pelayanan limbah, dan persampahan (penanganan sampah 14 persen menjadi 75 persen)	Peningkatan lingkungan permukiman yang sehat dan nyaman	Melaksanakan gerakan hidup bersih dan sehat dengan melibatkan masyarakat secara aktif
Misi 9 :				
Menguatkan kapasitas pemerintah gampong dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat	Mewujudkan kapasitas lembaga pemerintah gampong yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat	Menguatnya kapasitas dan tata kelola pemerintahan gampong yang baik dalam pelaksanaan pembangunan	Penguatan peran pemerintahan gampong, pemuda dan perempuan dalam tugas-tugas sosial kemasyarakatan	Mengoptimalkan peran Mukim dan aparat Gampong (termasuk tuha peuet, tuha lapan), pemuda dan perempuan dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong

Visi : Mewujudkan Langsa Menjadi Kota Berberadaban dan Islami

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				dan tugas-tugas sosial kemasyarakatan
		Meningkatnya peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan (partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 67,51 persen menjadi 69,78 persen)		
Misi 10 :				
Mewujudkan keamanan dan ketertiban serta keberlanjutan perdamaian sesuai Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA)	Menciptakan keamanan dan ketertiban serta keterlibatan masyarakat dalam rangka keberlanjutan perdamaian sesuai dengan Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA)	Meningkatnya kondisi daerah yang aman dan kondusif serta keberlanjutan perdamaian	Penguatan sistem keamanan dan ketertiban lingkungan serta keberlanjutan perdamaian melalui kerjasama yang intensif aparat penegak hukum dengan seluruh komponen masyarakat guna menangkal setiap ancaman keamanan dan ketertiban di daerah	Membangun kepercayaan (trust building) seluruh komponen masyarakat dan stakeholders guna mendorong keberlanjutan perdamaian dan percepatan pembangunan daerah

Visi : Mewujudkan Langsa Menjadi Kota Berberadaban dan Islami				
Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatnya kualitas demokrasi dan politik menuju masyarakat yang berkeadilan, tertib, aman dan bermartabat	Peningkatan peran aktif politik masyarakat melalui partai lokal/orsospol/LSM secara demokratis, menghormati keberagaman aspirasi, dan menjunjung tinggi supremasi hukum serta bermanfaat dalam menunjang pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas pendidikan politik masyarakat dan mendorong tumbuhnya demokrasi serta menghargai hak azasi manusia (HAM)

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Kebijakan umum pada dasarnya merupakan wujud ataupun bentuk dari kebijakan Pemerintah Kota yang bersifat umum. Keberadaan bentuk kebijakan umum itu sendiri diperlukan untuk menyelaraskan antara konsep rencana pembangunan dengan potensi sumber daya yang dimiliki kota, yang diharapkan mampu mewujudkan pelaksanaan pembangunan kota yang efisien dan efektif, serta dapat berdampak dan bermanfaat bagi masyarakat kota.

Kebijakan juga merupakan bentuk pedoman pelaksanaan program dan kegiatan yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Perumusan kebijakan pembangunan kota dalam jangka menengah ke depan tentunya tidak terlepas dari penilaian keterkaitan antara visi dan misi pembangunan kota dengan isu-isu strategis yang telah ditentukan. Selain itu, kebijakan yang disusun juga menjadi bagian dari strategi pencapaian tujuan dan sasaran maupun visi dan misi pembangunan kota, yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik serta meningkatkan daya saing kota melalui pemerintahan yang bersih dan berwibawa, guna **Mewujudkan Langa Menjadi Kota yang Berperadaban dan Islami.**

Kebijakan umum Pemerintah Kota dalam pembangunan jangka menengah ini hendaknya dapat menjadi acuan bagi segenap perangkat daerah dalam merumuskan program sektoral maupun program lintas sektoral, sehingga dapat dicapai kinerja yang optimal sesuai dengan tugas dan fungsi keberadaannya. Dengan memperhatikan visi dan misi pembangunan kota serta mencermati gambaran umum potensi kota, maka Pemerintah Kota memandang perlu untuk menetapkan arah kebijakan umum dan program pembangunan.

Adapun arah kebijakan umum pembangunan Kota Langa tahun 2012 – 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.1
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kota Langsa

Prioritas Pembangunan/ Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
PENEGAKAN SYARIAT ISLAM					
Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran Islam dalam setiap kehidupan, baik di rumah tangga, lingkungan masyarakat, maupun di lingkungan pemerintahan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keagamaan	Meningkatnya Syiar Islam	50%	80%	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
	Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Ibadah				
	Program Pengawasan, Pencegahan dan Penertiban Pelaksanaan Syariat Islam				
	Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Islami				
Melibatkan ulama dalam setiap perumusan kebijakan pembangunan yang berkenaan dengan keagamaan dan sosial kemasyarakatan	Program Pendidikan Non Formal	Meningkatnya Penegakan Qanun Syariat Islam; Meningkatnya Syiar Islam	50%; 50%	85%; 85%	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah; Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
	Program Pembinaan dan Pengembangan Syiar Islam				
	Program Peningkatan Peran Serta Ulama				
TATA KELOLA PEMERINTAHAN					
Mengoptimalkan profesionalisme, akuntabilitas, dan sistem kerja instansi dan aparatur pemerintah daerah dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kebutuhan dan Operasional Unit Kerja Satuan Perangkat Daerah	100%	100%	Seluruh Perangkat Daerah
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kebutuhan Sarana dan Prasarana yang Representatif			
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Stimulan Bagi Meningkatnya Kinerja Aparatur			

Prioritas Pembangunan/ Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur; Jumlah Peserta Diklat	100%; 106 Orang	100%; 486 Orang	Seluruh Perangkat Daerah; Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Program Pengembangan Data/Informasi	Pemenuhan Data dan Informasi Kebutuhan Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Dokumen	7 Dokumen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Dinas Komunikasi dan Informatika
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Pengembangan Aplikasi dan Informasi, Iklan dan Parlementaria	12 Bulan; 12 Bulan; -; -	48 Bulan; 60 Bulan; 12 Bulan; 36 Bulan	Dinas Komunikasi dan Informatika; Sekretariat Daerah; Sekretariat DPRK; Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	Perumusan Aplikasi Perangkat Lunak	-	12 Bulan	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Program fasilitasi Peningkatan SDM Aparatur komunikasi dan informasi	Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur Komunikasi dan Informasi	-	12 Bulan	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media	Informasi Berita, Iklan dan Parlementaria	-	12 Bulan	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Pengelolaan dan Pengembangan Data dan Informasi Statistik Daerah	-	12 Bulan	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Program Penyelenggaraan Komunikasi Persandian	Dukungan Penyelenggaraan Komunikasi Persandian	-	12 Bulan	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Program Kerjasama Pembangunan	Verifikasi Realisasi Fisik, Keuangan terhadap Program dan Kegiatan	1 Dokumen	1 Dokumen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Penyelesaian Masalah Perbatasan Daerah	3 Desa/Gampong; -	26 Desa/Gampong; 1 Dokumen	Sekretariat Daerah; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Prioritas Pembangunan/ Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Air Minum	31,16%	33,9%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan dengan Qanun/Perwal	Ada	Ada	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Sekretariat Daerah
	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Dokumen Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi; Dukungan Operasional Pelaksanaan PNPM/P2KP	1 Dokumen; 12 Bulan	6 Dokumen; 36 Bulan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Dokumen Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	1 Dokumen	5 Dokumen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah	Fasilitasi Penelitian, Pengembangan, Inovasi dan Teknologi	-	1 Dokumen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Peningkatan Analisis Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Fasilitasi Penelitian, Pengembangan, Inovasi dan Teknologi	-	1 Dokumen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Pengelolaan Arsip Secara Baku	2,56%	2,56%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Pengelolaan Arsip Secara Baku	2,56%	2,56%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Pengelolaan Arsip Secara Baku	2,56%	2,56%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Prioritas Pembangunan/ Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; Meningkatkan Penilaian LKIP Pemerintah Kota Langsa	100%; C	100%; B	Sekretariat Daerah
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Ran-Qanun yang dibahas	12 Ran-Qanun	55 Ran-Qanun	Sekretariat DPRK
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	452 Kali	2.260 Kali	Sekretariat DPRK
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Penilaian Laporan Keuangan Daerah; Evaluasi Percepatan Realisasi Anggaran	WTP; 12 Bulan	WTP; 48 Bulan	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah; Sekretariat Daerah
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Evaluasi Permasalahan Pembangunan dan Penggunaan dana Tanggap Darurat; Aksi Pengawasan Penyaluran dan Monitoring Kebijakan Subsidi Pemerintah; Pelaksanaan Tindak Lanjut Temuan Pengawasan; Meningkatkan Penilaian Keuangan Daerah	2 Dokumen; 12 Bulan; 0; WTP	8 Dokumen; 60 Bulan; 12 Bulan; WTP	Sekretariat Daerah; Inspektorat
	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Meningkatnya Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Pengawasan	8 Kali	40 Kali	Inspektorat
	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan; Evaluasi Proposal Usulan Masyarakat; Laporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	12 Bulan; 100 Proposal; -	48 Bulan; 300 Proposal; XII Triwulan	Inspektorat; Sekretariat Daerah; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Inspektorat

Prioritas Pembangunan/ Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Program Pelaksanaan Unsur Kewilayahan Pemerintah Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	-	12 Bulan	Seluruh Kecamatan
	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Updating IUJK dan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik	12 Bulan	60 Bulan	Sekretariat Daerah
	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kerjasama Daerah Dalam Pelayanan Publik; Pelaksanaan MUSDA MPU	12 Bulan; 0 Orang	60 Bulan; 100 Orang	Sekretariat Daerah; Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
	Program Penataan Peraturan Perundang- Undangan	Penyusunan produk hukum daerah; Jumlah Pengesahan Judul Ran- Qanun	536 Produk Hukum; 10 Judul	4.278 Produk Hukum; 60 Judul	Sekretariat Daerah; Sekretariat DPRK
	Program Pendidikan Kedinasan	Dukungan Tugas Belajar; Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur	35 Orang; 65 Orang	190 Orang; 65 Orang	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; Sekretariat Daerah
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Meningkatnya Karir Aparatur; Evaluasi Jabatan dan Organisasi Kelembagaan Perangkat Daerah	1.000 Orang; 2 Dokumen	1.100 Orang; 24 Dokumen	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; Sekretariat Daerah
	Program Pembinaan dan Pengembangan Korps Profesi Aparatur Sipil Negara	Pengembangan Korps Profesi Aparatur Sipil Negara	-	12 Bulan	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PENATAAN RUANG KOTA					
Mengembangkan ruang kota dan wilayah yang aman, nyaman, efektif, integratif, produktif, dan berkelanjutan sesuai RTRW Kota Langsa	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Panjang Jalan Kota Dalam Kondisi Baik	80%	89%	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong- Gorong;	Panjang Seluruh Drainase Primer	55%	75%	Dinas Pekerjaan Umum; Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Pelaksanaan Pembangunan Talud/Turap/Bronjong	7 Unit	8 Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase Panjang Jalan Kota Dalam Kondisi Baik	80%	89%	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Prioritas Pembangunan/ Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Program Rehabilitasi Pemeliharaan Talud/ Bronjong	Persentase Talud/Bronjong Dalam Kondisi Baik	-	90%	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan	Informasi Data Base Jalan dan Jembatan	1 Dokumen	1 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	1 Unit	11 Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	Program Pengendalian Banjir	Meningkatnya Kualitas DAS	3 Kegiatan	6 Kegiatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Meningkatnya Infrastruktur Jalan Perdesaan	750 meter	5.865 meter	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	Program Perencanaan Tata Ruang	Ketersediaan RDTRK, RTRK dan RTBL; Ketersediaan Dokumen Perencanaan Minapolitan	1 Dokumen	9 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Pemanfaatan Ruang	Meningkatnya Kepatuhan Pemanfaatan Ruang	5 Kecamatan	5 Kecamatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap RTRW; Laporan Pengawasan Pemanfaatan Ruang	5 Kecamatan; 1 Dokumen	5 Kecamatan; 2 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Prioritas Pembangunan/ Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Sertifikasi Tanah Kepemilikan Pemerintah Daerah	8 Sertifikat	28 Sertifikat	Dinas Pertanahan; Sekretariat Daerah; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Kesehatan; Rumah Sakit Umum Daerah; Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Dinas Perhubungan; Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana; Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong; Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah	Proses Dokumentasi Kepemilikan Tanah	-	12 Bulan	Dinas Pertanahan
	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Jumlah dokumen pengembangan wilayah strategis	-	1 Dokumen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Membangun jaringan air bersih yang integral dan terpadu dalam upaya meningkatkan pemerataan distribusi air bersih bagi masyarakat dan mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan milenium (Millenium Development Goals/MDGs)	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Banyaknya Pelanggan Air Bersih	10.506 Pelanggan	12.796 Pelanggan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Meningkatnya Ketersediaan Cadangan Air Bagi Petani	-	50%	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum	31,16%	33,90%	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Prioritas Pembangunan/ Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Ketersediaan Pengelolaan Air Limbah	-	1 Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi yang efektif dan efisien yang menghubungkan antargampong dan antarwilayah	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Cakupan Pelaksanaan Pelayanan Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	1 Pelabuhan Laut, 1 Terminal Bis	1 Pelabuhan Laut, 1 Terminal Bis	Dinas Perhubungan
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Menurunnya Angka Kecelakaan Lalu Lintas	77 LAKA	48 LAKA	Dinas Perhubungan
	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Jumlah Kendaraan yang Telah Diuji	890 Unit	1.080 Unit	Dinas Perhubungan
	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Menurunnya Angka Kecelakaan Lalu Lintas	77 LAKA	48 LAKA	Dinas Perhubungan
	Program Peningkatan Kelayakan pengoperasian kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Yang Telah Diuji	890 Unit	1.080 Unit	Dinas Perhubungan
Meningkatkan kualitas infrastruktur Pelabuhan Kuala Langsa dalam rangka mendorong aktivitas perdagangan ekspor-impor	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	1 Pelabuhan Laut, 1 Terminal Bis	1 Pelabuhan Laut, 1 Terminal Bis	Dinas Perhubungan
PENDIDIKAN					
Meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan standar nasional, melalui pemerataan kualitas tenaga pendidik dan fasilitas pendidikan	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Cakupan Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini	41,41%	57,95%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Kelulusan (AL) SD/MI; Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99,09%; 86,17%	100%; 100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pendidikan Menengah	Angka Kelulusan (AL) SMA/MA/SMK	98,40%	99,75%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pendidikan Non Formal	Angka Melek Huruf	99,31%	99,56%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah; Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama

Prioritas Pembangunan/ Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Program Pendidikan Luar Biasa	Meningkatnya Pelayanan Pendidikan Luar Biasa	85%	86%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Pendidik yang Memenuhi Kualifikasi S1/D4	71,16%	90,79%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	7.728 Kunjungan	16.721 Kunjungan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Meningkatnya Kerjasama Kelembagaan Bidang Pendidikan	75%; -, 75%	95%; 95%; 80%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah; Sekretariat Daerah
	Program Peningkatan Peran Serta Majelis Pendidikan Daerah	Kemitraan Majelis Pendidikan Daerah	-	12 Bulan	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS					
Meningkatkan cakupan layanan kesehatan berkualitas yang merata sesuai SPM Kesehatan	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Ketersediaan <i>Buffer Stock</i> Obat; Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	20%; 30%	30%; 30%	Dinas Kesehatan; Rumah Sakit Umum Daerah
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Perbaikan Gizi BALITA dan BUMIL KEK	477 Orang	1.761 Orang	Dinas Kesehatan
	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Pengawasan Jajanan Sekolah	-	5 Kecamatan	Dinas Kesehatan
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Pola Hidup Sehat	-	5 Kecamatan	Dinas Kesehatan
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Pembinaan Gizi Masyarakat	-	5 Kecamatan	Dinas Kesehatan
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Sadar Hidup Sehat	-	5 Kecamatan	Dinas Kesehatan
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	5 Puskesmas	5 Puskesmas	Dinas Kesehatan

Prioritas Pembangunan/ Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Standarisasi Pelayanan Kesehatan	-	5 Puskesmas dan 1 RSUD	Dinas Kesehatan; Rumah Sakit Umum Daerah
	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	5 Puskesmas	5 Puskesmas	Dinas Kesehatan
	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya	5 Puskesmas; 8 Pustu; 52 Polindes	5 Puskesmas; 8 Pustu; 52 Polindes	Dinas Kesehatan
	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Optimalisasi Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	1 RSUD	1 RSUD	Rumah Sakit Umum Daerah
	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya Kualitas Jaminan Kesehatan	5 Kecamatan	5 Kecamatan	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Menurunnya Angka Kematian Bayi	4 Bayi	5 Bayi	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Meningkatnya Angka Harapan Hidup	68,75 Tahun	68,88 Tahun	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	89,34%	97,68%	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan	5 Puskemas; 1 RSUD	5 Puskemas; 1 RSUD	Dinas Kesehatan; Rumah Sakit Umum Daerah
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Balita	Menurunnya Angka Kematian Ibu Melahirkan	2 Orang	1 Orang	Dinas Kesehatan

Prioritas Pembangunan/ Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Melakukan percepatan revitalisasi dan relokasi BLUD RSUD Langsa sebagai salah satu rumah sakit regional wilayah timur Aceh	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	1 RSUD	1 RSUD	Rumah Sakit Umum Daerah
Mempercepat proses pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan secara cepat dan berkualitas	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Perizinan	Lamanya Proses Perizinan	7 hari	7 hari	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Kepemilikan KTP	74,40%	95,23%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN					
Mendorong dan membangun kemitraan strategis antara BUMN, pelaku usaha, perbankan, dan pemerintah dalam rangka pengembangan koperasi UMKM	Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah Yang Konduksif	Dukungan Pengembangan Usaha Kecil Menengah	25 Kelompok	55 Kelompok	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Rekomendasi Dukungan Usaha/Industri Kecil Menengah	4.000 Rekomendasi	8.000 Rekomendasi	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Dukungan Industri Kecil Menengah	5 Kecamatan	5 Kecamatan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	9,88%	65,54%	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Mendorong berkembangnya investasi swasta serta menyelesaikan infrastruktur pendukung ekonomi sesuai dengan	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Meningkatnya Penerbitan SIUP dan TDUP	490 Izin	710 Izin	Sekretariat Daerah; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Meningkatnya Sistem Informasi Investasi Daerah	-	12 Bulan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Prioritas Pembangunan/ Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
potensi sumber daya ekonomi lokal	Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana Dan Prasarana Daerah	Data dan Informasi Potensi Sumber Daya Daerah	-	1 Dok	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Perizinan	Dukungan Pelaksanaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Perizinan Daerah	-	12 Bulan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Mempercepat pembangunan sentra- sentra industri potensial sesuai potensi sumberdaya ekonomi lokal (pertanian, perikanan dan perkebunan) termasuk Pembangunan Pabrik Minyak Goreng	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani	101,14 poin	104 poin	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Produktivitas Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar	-	0,36%	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Promosi Hasil Pengolahan Pertanian dan Perkebunan	1 Kali	5 Kali	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	8 Unit	30 Unit	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (ADHB)	5,50%	5,21%	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Temu Tekhnis Tenaga Penyuluh	24 Kali	120 Kali	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Penyediaan Sarana Medis Kesehatan Ternak	-	12 Bulan	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
	Program Peningkatan Produksi Hasil Pternakan	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (ADHB)	5,50%	5,21%	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (ADHB)	5,50%	5,21%	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (ADHB)	5,50%	5,21%	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan

Prioritas Pembangunan/ Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Meningkatnya Rehabilitasi Kawasan Hutan dan Lahan	12 Bulan	48 Bulan	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Meningkatnya Pengawasan Hutan dan Lahan	12 Bulan	48 Bulan	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (ADHB)	0,26%	0,21%	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
Memberdayakan, membina, dan melakukan pendampingan nelayan secara berkelanjutan guna meningkatkan kesinambungan pendapatan (income generating) masyarakat nelayan	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB (ADHB)	3,62%	4,02%	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB (ADHB)	3,62%	4,02%	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB (ADHB)	3,62%	4,02%	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB (ADHB)	3,62%	4,02%	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
	Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat	Ketahanan Budaya Kelautan	-	12 Bulan	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
Mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah, termasuk melakukan intensifikasi PAD sesuai qanun dan perundangan	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum Terhadap PDRB (ADHB)	2%	6,76%	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum Terhadap PDRB (ADHB)	2%	6,76%	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
	Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan-kawasan konservasi laut dan hutan	Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum Terhadap PDRB (ADHB)	2,00%	6,76%	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata

Prioritas Pembangunan/ Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Mengembangkan pusat pasar dan perdagangan di Kota Langsa yang BERIMAN (bersih, indah, menarik, dan nyaman) guna mendorong aktivitas perdagangan dan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	12 Bulan	60 Bulan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Penyelenggaraan Pameran Hasil UKM dan IKM	2 Kali	10 Kali	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan	Jumlah Kelompok Pedagang/Usaha Informal	590 Pedagang	680 Pedagang	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah Industri Kecil dan Menengah	301 IKM	1.071 IKM	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Pertumbuhan Industri	23,47%	50,96%	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Program Penataan Struktur Industri	Pertumbuhan Industri	23,47%	50,96%	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Program Peningkatan Peran Serta Baitul Mal	Kemitraan Baitul Mal	-	12 Bulan	Sekretariat Baitul Mal
PENATAAN PERMUKIMAN MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN HIDUP					
Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana permukiman masyarakat yang berkualitas	Program Pengembangan Perumahan	Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Kurang Mampu	5 Unit	466 Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Meningkatnya Lingkungan Permukiman Sehat	-	5 Kecamatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Pemberdayaan pemukiman berbasis masyarakat	-	1 Kegiatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	Program Peningkatan Kesiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran; Monitoring Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Bencana Alam	0,0038%; 12 Kali	0,0037%; 12 Kali	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Cakupan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana	-	70%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Prioritas Pembangunan/ Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB (ADHB)	0,55%	0,52%	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Kontribusi Sektor Listrik dan Gas Terhadap PDRB	0,16%	0,16%	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Mobilisasi Penduduk Lokal	-	150 KK	Dinas Sosial
	Program Transmigrasi Lokal	Pemberdayaan Transmigran Lokal	-	100 Orang	Dinas Sosial
Melaksanakan gerakan hidup bersih dan sehat dengan melibatkan masyarakat secara aktif	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya Penanganan Persampahan	5 Kecamatan	5 Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	5 Kecamatan	5 Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Meningkatnya Pengendalian Pengawasan RTH	12 Bulan	60 Bulan	Dinas Lingkungan Hidup
SOSIAL KEMASYARAKATAN					
Mengoptimalkan peran Mukim dan aparat Gampong (termasuk tuha peuet, tuha lapan), pemuda dan perempuan dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong dan tugas-tugas sosial kemasyarakatan	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Sosialisasi dan Pelatihan Terhadap Anak Putus Sekolah	66 Desa/Gampong	66 Desa/Gampong	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Pelaksanaan Forum Anak	23 Orang	197 Orang	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Jumlah Kasus KDRT	21 KDRT	5 KDRT	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Prioritas Pembangunan/ Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	Partisipasi Perempuan Didalam Lembaga Pemerintahan	64,11%	63,38%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Program Keluarga Berencana	Cakupan Peserta KB Aktif	79%	83%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	Cakupan Peserta KB Aktif	79%	83%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Desiminasi Kesehatan Reproduksi Remaja	-	66 Desa/Gampong	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Program Pelayanan Kontrasepsi	Penyelenggaraan Konsultasi Pelayanan Kontrasepsi	-	12 Bulan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling KRR	Pelayanan Konsultasi Kesehatan Reproduksi Remaja	-	12 Bulan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	-	1 Kali	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Penyediaan Sarana Prasarana Pendukung Bagi Keluarga Kurang Mampu	5 Kecamatan	5 Kecamatan	Dinas Sosial
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial	8,67%	41,83%	Dinas Sosial

Prioritas Pembangunan/ Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Program Pembinaan Anak Terlantar	Penyediaan Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi	4 Unit	4 Unit	Dinas Sosial
	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Jumlah Penyandang Cacat	221 Orang	442 Orang	Dinas Sosial
	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Panti Asuhan	12 Bulan	60 Bulan	Dinas Sosial
	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Meningkatnya Kualitas Hidup Eks Penyandang Penyakit Sosial	12 Bulan	48 Bulan	Dinas Sosial
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Menurunnya Angka Kemiskinan	13,93%	10,62%	Dinas Sosial; Sekreteriat Daerah; Sekretariat Baitul Mal
	Program Perbaikan Perumahan Akibat Dampak Sosial	Menurunnya Angka Kemiskinan	13,93%	10,62%	Dinas Sosial
	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Meningkatnya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	12 Bulan	60 Bulan	Dinas Sosial; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	40 Orang	90 Orang	Dinas Sosial; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Jumlah Pengangguran	6.720 Orang	5.135 Orang	Dinas Sosial; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Pengembangan dan Keresasian Kebijakan Pemuda	Koordinasi Pembangunan Kepemudaan	-	12 Bulan	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Diklat dan Pemberdayaan Pemuda	42 Orang	542 Orang	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata

Prioritas Pembangunan/ Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Upaya Peningkatan Pendapatan Pemuda	-	66 Desa	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Pelaksanaan Pembinaan Cabang Olah Raga	31 Cabang Olah Raga	32 Cabang Olah Raga	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga	13 Cabang Olah Raga	13 Cabang Olah Raga	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	Peningkatan Kualitas Manajemen Keolahragaan	-	12 Bulan	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Meningkatnya Kemandirian Masyarakat Perdesaan	5 Kecamatan	5 Kecamatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong; Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah; Sekretariat Daerah
	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Pembinaan Lembaga Masyarakat Pedesaan	66 Desa/Gampong	66 Desa/Gampong	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	66 Desa/Gampong	66 Desa/Gampong	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur Pemerintah Desa	66 Desa/Gampong	66 Desa/Gampong	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong; Sekretariat Daerah
Menumbuhkembangkan nilai-nilai budaya daerah termasuk pengembangan sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya dan pola perilaku yang tidak sesuai dengan norma, adat-istiadat, dan budaya leluhur daerah guna menuju kemajuan, kemandirian dan ketahanan budaya daerah yang mendukung	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Pengembangan Seni dan Budaya dalam Bidang Pendidikan; Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya; Pengkaderan Ulama; Dukungan Pengelolaan Kebudayaan Daerah	2 Kali; 6 Kali; 6 Kali; 12 Kali; 6 Kali	4 Kali; 18 Kali; 6 Kali; 36 Kali; 12 Kali	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata; Sekretariat Majelis Adat Aceh; Sekretariat Daerah; Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	6 Kali; -	24 Kali; 1 Kali	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Prioritas Pembangunan/ Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
pembangunan daerah dan Syariat Islam	Program Pengembangan Nilai Budaya	Pelestarian Budaya Daerah	-	12 Bulan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Peningkatan Peran Serta Majelis Adat Aceh	Kemitraan Majelis Adat Aceh	-	12 Bulan	Sekretariat Majelis Adat Aceh
KEAMANAN DAN PERDAMAIAN					
Membangun kepercayaan (<i>trust building</i>) seluruh komponen masyarakat dan stakeholders guna mendorong keberlanjutan perdamaian dan percepatan pembangunan daerah	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan); Jumlah Pelanggaran Qanun (Syariat Islam); Jumlah Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	100 Pelanggaran; 617 Pelanggaran	195 Pelanggaran; 500 Pelanggaran	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas; Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah; Sekretariat Dewan
	Program Pemeliharaan Kantantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Pengamanan dan Penanganan Kasus Pelanggaran Qanun	-	36 Kali	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Forum Kerukunan Umat Beragama; Peringatan Hari Besar Islam; Sosialisasi Toleransi Dalam Kehidupan Beragama	12 Bulan Tahun; 12 Kali; 60 Orang	60 Tahun; 111 Kali; 120 Orang	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas; Sekretariat Daerah; Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Penyelenggaraan Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	-	12 Bulan	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas
Meningkatkan kualitas pendidikan politik masyarakat dan mendorong tumbuhnya demokrasi serta menghargai hak azasi manusia (HAM)	Program Sosialisasi, Penyuluhan dan Verifikasi Pemilu Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Umum; Seleksi Anggota KIP dan Panwas PEMILU	-; -	12 Bulan; 25 Orang	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas; Sekretariat DPRK
	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Pembinaan Terhadap LSM, Ormas, dan OKP	12 Bulan	60 Bulan	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas

Prioritas Pembangunan/ Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Ketersediaan Masyarakat Peduli Ketertiban dan Keamanan Lingkungan	-	5 Kecamatan	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah

BAB VIII

INDIKASI PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

8.1 Indikasi Program Prioritas

Sesuai dengan kaidah perencanaan pembangunan daerah, sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, program prioritas harus dipisahkan antara aspek strategis dan operasional ke dalam dua hal, yaitu pertama, program prioritas untuk perencanaan strategis dan kedua, program prioritas untuk perencanaan operasional.

Adapun program prioritas yang ditujukan atau dimaksudkan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan pada dasarnya adalah perencanaan operasional, suatu urusan pemerintahan daerah dinilai strategis, sangat tergantung pada tujuan dan sasaran pembangunan dan strategi pencapaiannya. Urusan tersebut dapat saja menjadi strategis dalam satu tahun pelaksanaan, yang selanjutnya menjadi operasional pada tahun atau pada periode-periode berikutnya.

Seiring dengan itu, suatu urusan pemerintahan atau program-program/kegiatan dalam urusan itu dinilai strategis, maka perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang dilakukan, intensitasnya menjadi lebih tinggi, dibanding dengan yang bersifat operasional. Ini dimaksudkan karena program/kegiatannya memiliki dampak luas terhadap manfaat bagi masyarakat di samping memiliki pengaruh positif bagi penyelesaian permasalahan lain yang timbul bila program/kegiatan tersebut tidak dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Program-program prioritas, baik program strategis maupun program-program operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab kepala perangkat daerah berkenaan. Akan tetapi, bagi suatu program yang termasuk dalam kategori strategik menjadi tanggung jawab bersama kepala perangkat daerah dengan kepala daerah, terutama pada level penetapan kebijakan.

Sementara, pada penyelenggaraan aspek strategis, program-program prioritas bagi pelaksanaan urusan pemerintahan, dilaksanakan agar setiap urusan yang tergolong dalam urusan wajib dapat dilaksanakan setiap tahun, tanpa dipengaruhi oleh visi-misi kepala daerah terpilih. Artinya, suatu prioritas pada beberapa urusan tersebut

yang secara tidak langsung mendukung visi dan misi serta program kepala daerah terpilih, bukan berarti bahwa urusan lain diabaikan dan dikesampingkan. Semuanya harus bermuara kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat luas. Semua ketentuan-ketentuan ini pada prinsipnya telah dilaksanakan sebelumnya oleh Pemerintah Kota, meski tidak tertuang jelas dalam dokumen perencanaan-perencanaan sebelumnya.

Identifikasi program-program prioritas, baik menyangkut urusan wajib maupun pilihan yang akan diimplementasikan perangkat daerah berpedoman pada program prioritas Walikota dan Wakil Walikota terpilih, disamping juga memperhatikan hasil identifikasi permasalahan pembangunan, serta berbagai isu strategis yang mengemuka pada saat ini.

Program pembangunan kota periode 2012-2017 diarahkan untuk melaksanakan program-program yang termasuk ke dalam prioritas pembangunan. Program prioritas pembangunan adalah program pembangunan yang harus segera diselesaikan dalam rangka pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Program prioritas pembangunan didasarkan karena (1) adanya keterbatasan dana yang tersedia; (2) adanya sarana dan prasarana yang telah ada yang masih dimanfaatkan; (3) adanya permasalahan yang sifatnya mendesak untuk dilaksanakan; serta (4) adanya komponen kawasan yang mempunyai *multiplier effect* yang besar untuk merangsang tercapainya struktur yang diinginkan, misalnya jaringan jalan.

8.2 Pendanaan

Pagu indikatif program adalah jumlah dana yang mampu dialokasikan oleh Pemerintah Kota untuk mendanai program prioritas tahunan, yang perhitungannya didasarkan pada satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mempermudah perhitungan pengalokasian pagu pendanaan secara indikatif, terlebih dahulu disusun pagu indikatif, baik untuk urusan wajib dan urusan pilihan.

Dengan memperhatikan visi dan misi kota periode 2012-2017, maka program beserta pendanaannya berdasarkan prioritas pembangunan kota dapat dilihat pada tabel 8.1 :

TABEL 8.1
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN KOTA LANGSA
TAHUN 2013-2016

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (2012)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA TAHUN 2013-2016		SRPD PENANGGUNG JAWAB
				2013*		2014*		2015*		2016		TARGET	(Rp.)	
				REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 5+7+9+11	14 = 6+8+10+12	15
01	URUSAN WAJIB				242.486.563.553		378.114.303.304		406.270.402.097		373.539.733.408		1.400.411.092.362	
01 01	BIDANG PENDIDIKAN				24.955.898.186		37.937.764.256		39.109.654.797		36.849.883.153		138.853.200.392	
01 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kebutuhan Dan Operasional Unit Kerja Satuan Perangkat Daerah	100,00 %	100,00 %	3.894.329.375	100,00 %	2.379.740.000	100,00 %	1.358.722.950	100,00 %	2.519.224.250	100,00 %	10.152.016.575	Dinas Pendidikan
01 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kebutuhan Dan Operasional Unit Kerja Satuan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	100,00 %	350.357.121	100,00 %	435.182.300	100,00 %	785.539.421	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
01 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Yang Representatif	100,00 %	100,00 %	12.407.112.460	100,00 %	1.914.597.000	100,00 %	1.591.972.071	100,00 %	13.017.167.000	100,00 %	28.930.848.531	Dinas Pendidikan
01 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Yang Representatif	-	-	-	-	-	100,00 %	17.000.000	100,00 %	18.300.000	100,00 %	35.300.000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
01 01 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Sumulan Bagi Peningkatan Kinerja Aparatur	100,00 %	100,00 %	1.020.318.750	-	-	-	-	-	-	100,00 %	1.020.318.750	Dinas Pendidikan
01 01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur	100,00 %	-	-	-	-	100,00 %	35.916.000	100,00 %	12.029.920	100,00 %	47.945.920	Dinas Pendidikan
01 01 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Cakupan Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini	41,41 %	41,41 %	294.061.875	45,87 %	1.237.274.929	49,75 %	1.223.718.030	56,63 %	772.862.500	56,63 %	3.527.917.334	Dinas Pendidikan
01 01 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	99,09 %	100,00 %	1.290.490.708	100,00 %	5.176.631.560	100,00 %	2.703.653.150	100,00 %	1.366.025.500	100,00 %	10.536.800.918	Dinas Pendidikan
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	86,17 %	99,70 %	2.436.842.536	100,00 %	12.840.651.060	100,00 %	13.549.379.259	100,00 %	7.794.817.063	100,00 %	36.621.689.918	Dinas Pendidikan
01 01 17	Program Pendidikan Menengah	Angka Kelulusan (AL) SMA/MA/SMK	98,40 %	99,58 %	2.637.476.905	99,75 %	10.641.118.051	99,75 %	15.962.867.830	99,75 %	6.842.879.754	99,75 %	36.384.342.540	Dinas Pendidikan
01 01 18	Program Pendidikan Non Formal	Angka Melek Huruf	99,31 %	99,36 %	29.725.000	99,41 %	313.266.000	99,46 %	1.221.160.851	99,51 %	1.650.690.300	99,51 %	3.214.842.151	Dinas Pendidikan
01 01 18	Program Pendidikan Non Formal	Meningkatnya Penegakan Qanun Syariah Islam	50,00 %	-	-	65,00 %	1.270.000.000	70,00 %	628.350.000	-	-	70,00 %	1.898.350.000	Dinas Syariah Islam
01 01 18	Program Pendidikan Non Formal	Meningkatnya Dakwah Dan Syiar Islam	-	-	-	65,00 %	56.461.000	-	-	76,00 %	78.120.000	76,00 %	134.581.000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
01 01 19	Program Pendidikan Luar Biasa	Meningkatnya Pelayanan Pendidikan Luar Biasa	85,00 %	-	-	-	-	-	-	85,00 %	1.425.000.000	85,00 %	1.425.000.000	Dinas Pendidikan
01 01 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Pendidik Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D4	71,16 %	-	-	80,85 %	933.200.942	80,95 %	135.135.000	90,35 %	120.702.630	90,35 %	1.189.038.572	Dinas Pendidikan
01 01 21	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	7.728 Kunjungan	7.728 Kunjungan	231.800.000	13.721 Kunjungan	33.000.000	14.721 Kunjungan	19.605.000	15.721 Kunjungan	14.456.600	15.721 Kunjungan	298.861.600	Kantor Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi
01 01 22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Meningkatnya Kerjasama Kelembagaan Bidang Pendidikan	75,00 %	75,00 %	108.514.577	80,00 %	924.667.298	85,00 %	265.650.000	90,00 %	754.354.336	90,00 %	2.053.186.211	Dinas Pendidikan
01 01 22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Meningkatnya Kerjasama Kelembagaan Bidang Pendidikan	-	-	-	-	-	85,00 %	46.167.535	90,00 %	28.071.000	90,00 %	74.238.535	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (2012)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA TAHUN 2013-2016		SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2013*		2014*		2015*		2016		TARGET	(Rp.)	
				REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 5+7+9+11	14 = 6+8+10+12	15
01 01 22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Meningkatnya Kejasama Kelembagaan Bidang Pendidikan	75,00 %	75,00 %	605.226.000	80,00 %	217.156.416	-	-	-	-	80,00 %	822.382.416	Sekretariat Daerah
01 02	BIDANG KESEHATAN				73.229.287.360		113.360.107.083		120.228.355.120		125.229.508.932		432.047.258.495	
01 02 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kebutuhan Dan Operasional Unit Kerja Satuan Perangkat Daerah	100,00 %	100,00 %	2.431.124.000	100,00 %	2.219.223.999	100,00 %	1.184.031.010	100,00 %	1.798.629.000	100,00 %	7.633.008.009	Dinas Kesehatan
01 02 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kebutuhan Dan Operasional Unit Kerja Satuan Perangkat Daerah	100,00 %	100,00 %	31.751.267.780	100,00 %	4.829.203.800	100,00 %	2.161.704.000	100,00 %	6.457.222.000	100,00 %	45.199.397.580	Rumah Sakit Umum Daerah
01 02 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Yang Representatif	100,00 %	100,00 %	1.137.450.000	100,00 %	3.568.074.000	100,00 %	1.019.690.000	100,00 %	948.500.000	100,00 %	6.673.714.000	Dinas Kesehatan
01 02 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Yang Representatif	100,00 %	100,00 %	1.857.835.052	100,00 %	457.000.000	-	-	100,00 %	1.000.000.000	100,00 %	3.314.835.052	Rumah Sakit Umum Daerah
01 02 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Stimulan Bagi Peningkatan Kinerja Aparatur	100,00 %	100,00 %	256.753.125	-	-	-	-	100,00 %	41.600.000	100,00 %	298.353.125	Dinas Kesehatan
01 02 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Stimulan Bagi Peningkatan Kinerja Aparatur	100,00 %	100,00 %	291.393.750	100,00 %	15.000.000	-	-	-	-	100,00 %	306.393.750	Rumah Sakit Umum Daerah
01 02 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur	68,75 %	68,78 %	450.060.182	-	-	-	-	-	-	68,88 %	450.080.182	Rumah Sakit Umum Daerah
01 02 15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Ketersediaan Buffer Stock Obat	20,00 %	-	-	-	-	20,00 %	927.751.000	25,00 %	106.900.000	25,00 %	1.034.651.000	Dinas Kesehatan
01 02 15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Penyediaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan	30,00 %	30,00 %	16.073.136.147	-	-	-	-	-	-	30,00 %	16.073.136.147	Rumah Sakit Umum Daerah
01 02 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Perbaikan Gizi Balita Dan Bumil KEK	477 Orang	477 Orang	1.605.895.500	349 Orang	2.245.385.000	285 Orang	51.805.697	300 Orang	2.046.151.914	1.411 Orang	5.949.238.111	Dinas Kesehatan
01 02 22	Program Pencegahan dan Penganggulangan Penyakit Menular	Cakupan Pelaksanaan Pencegahan dan Penganggulangan Penyakit Menular	5 Puskesmas	5 Puskesmas	230.560.000	5 Puskesmas	389.382.000	5 Puskesmas	6.200.000	5 Puskesmas	35.540.000	5 Puskesmas	661.682.000	Dinas Kesehatan
01 02 23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Cakupan Pelaksanaan Standarisasi Pelayanan Kesehatan	5 Puskesmas	-	-	-	-	-	-	5 Puskesmas	234.478.150	5 Puskesmas	234.478.150	Dinas Kesehatan
01 02 23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Pelaksanaan Standarisasi Pelayanan Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	Terakreditasi	100.000.000	Terakreditasi	100.000.000	Rumah Sakit Umum Daerah
01 02 24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	5 Puskesmas	5 Puskesmas	3.350.250.777	5 Puskesmas	8.988.447.949	5 Puskesmas	13.210.562.826	-	-	5 Puskesmas	25.549.261.552	Dinas Kesehatan
01 02 25	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu Dan Jaringannya	5 Puskesmas; 8 Pustu; 52 Polindes	5 Puskesmas; 8 Pustu; 52 Polindes	2.347.993.000	5 Puskesmas; 8 Pustu; 52 Polindes	850.000.000	5 Puskesmas; 8 Pustu; 52 Polindes	7.093.244.085	5 Puskesmas; 8 Pustu; 52 Polindes	5.433.690.000	5 Puskesmas; 8 Pustu; 52 Polindes	15.724.927.085	Dinas Kesehatan
01 02 26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	1 RSUD	1 RSUD	8.076.843.195	1 RSUD	12.706.190.000	1 RSUD	6.542.099.000	1 RSUD	3.104.081.700	1 RSUD	30.429.213.895	Rumah Sakit Umum Daerah
01 02 27	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Optimalisasi Pemanfaatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit	1 RSUD	1 RSUD	1.427.970.800	1 RSUD	1.658.500.000	-	-	-	-	1 RSUD	3.086.470.800	Rumah Sakit Umum Daerah
01 02 28	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya Kualitas Jaminan Kesehatan	5 Kecamatan	5 Kecamatan	25.100.000	-	-	-	-	5 Kecamatan	13.814.668.168	5 Kecamatan	13.839.768.168	Dinas Kesehatan

KODE	BIDANG URUSAN PEMERITTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (2012)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA TAHUN 2013-2016		SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2013*		2014*		2015*		2016		TARGET	(Rp.)	
				REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 5+7+9+11	14 = 6+8+10+12	15
01 02 28	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	* Program Yang Tidak Dilaksanakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rumah Sakit Umum Daerah
01 02 29	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Menurunnya Angka Kematian Bayi	4 Bayi	11 Bayi	253.560.000	-	-	-	-	-	-	11 Bayi	253.560.000	Dinas Kesehatan
01 02 30	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Meningkatnya Angka Usia Harapan Hidup	68,75 Tahun	68,78 Tahun	40.000.000	-	-	-	-	-	-	68,78 Tahun	40.000.000	Dinas Kesehatan
01 02 32	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	89,34 %	84,85 %	1.622.074.052	95,04 %	123.636.560	-	-	97,68 %	108.043.000	97,68 %	1.853.758.612	Dinas Kesehatan
01 02 33	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan	1 RSUD	-	-	1 RSUD	75.034.184.775	1 RSUD	88.031.267.502	1 RSUD	90.000.000.000	1 RSUD	253.065.452.277	Rumah Sakit Umum Daerah
01 02 34	Program Peningkatan Pelayanan Ibu dan Balita	Menurunnya Angka Kematian Ibu	2 Orang	-	-	2 Orang	275.879.000	-	-	-	-	2 Orang	275.879.000	Dinas Kesehatan
01 02 34	Program Peningkatan Pelayanan Ibu dan Balita	* Program Yang Tidak Dilaksanakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rumah Sakit Umum Daerah
01 03	BIDANG PEKERJAAN UMUM				27.051.424.445		81.957.772.911		88.510.609.987		80.011.606.639		277.531.413.992	
01 03 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kebutuhan Dan Operasional Unit Kerja Satuan Perangkat Daerah	100,00 %	100,00 %	1.053.442.000	100,00 %	1.593.388.000	100,00 %	1.510.320.001	100,00 %	1.731.935.000	100,00 %	5.889.085.001	Dinas Pekerjaan Umum
01 03 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Yang Representatif	100,00 %	100,00 %	4.386.085.000	100,00 %	11.514.610.000	100,00 %	12.452.513.000	100,00 %	10.739.500.000	100,00 %	39.092.708.000	Dinas Pekerjaan Umum
01 03 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Stimulan Bagi Peningkatan Kinerja Aparatur	100,00 %	100,00 %	40.640.625	-	-	-	-	-	-	100,00 %	40.640.625	Dinas Pekerjaan Umum
01 03 15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Panjang Jalan Kota Dalam Kondisi Baik	80,00 %	79,00 %	9.348.483.000	82,00 %	40.383.799.500	85,00 %	46.722.618.811	87,00 %	49.956.860.740	89,00 %	146.411.762.051	Dinas Pekerjaan Umum
01 03 16	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Fanjang Seluruh Drainase Primer	55,00 %	55,00 %	4.696.455.820	60,00 %	11.501.103.411	65,00 %	6.501.265.600	70,00 %	6.623.000.000	75,00 %	29.321.824.831	Dinas Pekerjaan Umum
01 03 16	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Panjang Seluruh Drainase Primer	55,00 %	55,00 %	135.000.000	-	-	-	-	-	-	55,00 %	135.000.000	Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan Dan Pertamanan
01 03 17	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Pelaksanaan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	7 Unit	7 Unit	620.520.000	-	-	-	-	-	-	7 Unit	620.520.000	Dinas Pekerjaan Umum
01 03 18	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase Panjang Jalan Kota Dalam Kondisi Baik	80,00 %	79,00 %	2.683.702.000	82,00 %	6.548.140.000	85,00 %	4.038.496.000	87,00 %	275.000.000	87,00 %	13.545.338.000	Dinas Pekerjaan Umum
01 03 22	Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan	Informasi Data Base Jalan dan Jembatan	1 Dok	1 Dok	57.100.000	-	-	-	-	1 Dok	65.100.000	2 Dok	122.200.000	Dinas Pekerjaan Umum
01 03 23	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan	Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan	13 Unit	-	-	-	-	1 Unit	2.270.000.000	-	-	1 Unit	2.270.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
01 03 24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengaliran Lainnya	Banyaknya Pelanggan Air Bersih	10.506 Pelanggan	10.506 Pelanggan	3.999.996.000	11.248 Pelanggan	7.753.432.000	11.739 Pelanggan	9.917.636.575	12.201 Pelanggan	5.215.040.000	12.201 Pelanggan	26.885.504.575	Dinas Pekerjaan Umum
01 03 26	Program Pengembang, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Meningkatnya Ketersediaan Cadangan Air Bagi Petani	2 Unit	-	-	-	2 Unit	1.650.000.000	-	-	-	2 Unit	1.650.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
01 03 27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air minum dan Air Limbah	* Program Yang Tidak Dilaksanakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum
01 03 28	Program Pengendalian Banjir	Meningkatnya Kualitas DAS	3 Keg	-	-	3 Keg	983.500.000	3 Keg	98.360.000	-	-	6 Keg	1.081.860.000	Dinas Pekerjaan Umum

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (2012)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA TAHUN 2013-2016		SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2013*		2014*		2015*		2016		TARGET	(Rp.)	
				REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 5+7+9+11	14 = 6+8+10+12	15
01 03 30	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Meningkatnya Infrastruktur Jalan Perdesaan	750 Meter	750 Meter	30.000.000	1.000 Meter	29.800.000	1.915 Meter	5.000.000.000	1.000 Meter	5.405.170.899	4.665 Meter	10.464.970.899	Dinas Pekerjaan Umum
01 03 0	Program Pengawasan Jasa Konstruksi	* Program Yang Tidak Dilaksanakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum
01 03 0	Program Pengaturan Jasa Konstruksi	* Program Yang Tidak Dilaksanakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat Daerah
01 04	BIDANG PERUMAHAN				5.156.038.375		13.621.747.680		18.175.089.008		15.056.408.288		52.009.283.351	
01 04 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kebutuhan Dan Operasional Unit Kerja Satuan Perangkat Daerah	100,00 %	100,00 %	3.950.291.500	100,00 %	4.013.417.925	100,00 %	1.131.087.000	100,00 %	3.145.974.286	100,00 %	15.241.370.713	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
01 04 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Yang Representatif	100,00 %	100,00 %	325.100.000	100,00 %	489.150.000	100,00 %	401.629.998	100,00 %	853.630.000	100,00 %	2.069.509.998	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
01 04 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Stimulan Bagi Peningkatan Kinerja Aparatur	100,00 %	100,00 %	118.096.875	-	-	100,00 %	120.000.010	-	-	100,00 %	238.096.885	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
01 04 15	Program Pengembangan Perumahan	Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Kurang Mampu	5 Unit	5 Unit	489.950.000	126 Unit	8.420.000.000	110 Unit	13.487.372.000	110 Unit	10.946.804.000	351 Unit	33.344.126.000	Dinas Pekerjaan Umum
01 04 19	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	0,0038 %	0,0038 %	272.000.000	0,0036 %	699.179.755	0,0036 %	35.000.000	0,0036 %	110.000.000	0,0036 %	1.116.179.755	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
01 04 0	Program pencegahan dini dan Penanggulangan korban bencana alam	* Program Yang Tidak Dilaksanakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
01 04 0	Program Penguatan Kelembagaan dan regulasi kebencanaan	* Program Yang Tidak Dilaksanakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Badan Lingkungan Hidup, Keberairan Dan Pertamanan
01 05	BIDANG PENATAAN RUANG				332.050.000		783.395.000		352.730.000		2.226.290.000		3.694.465.000	
01 05 15	Program Perencanaan Tata Ruang	Ketersediaan RDTRK, RTRK dan RTBL	-	-	-	1 Dok	521.000.000	3 Dok	235.000.000	2 Dok	1.172.205.000	6 Dok	1.928.205.000	Dinas Pekerjaan Umum
01 05 15	Program Perencanaan Tata Ruang	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Minapolitan	-	-	-	-	-	-	-	1 Dok	1.000.000.000	1 Dok	1.000.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
01 05 16	Program Pemanfaatan Ruang	Meningkatnya Kepatuhan Pemanfaatan Ruang	5 Kecamatan	5 Kecamatan	198.050.000	-	-	-	-	-	-	5 Kecamatan	198.050.000	Dinas Pekerjaan Umum
01 05 17	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap RTRW	5 Kecamatan	-	-	5 Kecamatan	262.395.000	5 Kecamatan	117.730.000	5 Kecamatan	54.085.000	5 Kecamatan	434.210.000	Dinas Pekerjaan Umum
01 05 17	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Laporan Pengawasan Pemanfaatan Ruang	1 Dok	1 Dok	134.000.000	-	-	-	-	-	-	1 Dok	134.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
01 06	BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN				3.324.436.181		5.333.901.400		4.871.995.000		4.442.850.000		17.973.182.581	
01 06 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kebutuhan Dan Operasional Unit Kerja Satuan Perangkat Daerah	100,00 %	100,00 %	1.082.376.301	100,00 %	2.273.114.000	100,00 %	1.363.385.000	100,00 %	1.470.000.000	100,00 %	6.188.875.301	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
01 06 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Yang Representatif	100,00 %	100,00 %	52.200.000	100,00 %	244.680.000	100,00 %	63.800.000	100,00 %	433.200.000	100,00 %	793.880.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
01 06 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Stimulan Bagi Peningkatan Kinerja Aparatur	100,00 %	100,00 %	19.125.000	-	-	-	-	-	-	100,00 %	19.125.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (2012)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA TAHUN 2013-2016		SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2013*		2014*		2015*		2016		TARGET	(Rp.)	
				REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 5+7+9+11	14 = 6+8+10+12	15
01 06 15	Program Pengembangan Data/Informasi	Pemenuhan Data Dan Informasi Kebutuhan Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Dok	2 Dok	235.000.000	1 Dok	47.840.000	2 Dok	323.760.000	1 Dok	74.075.000	6 Dok	680.675.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
01 06 16	Program Kerjasama Pembangunan	Verifikasi Realisasi Fisik, Keuangan terhadap Program Dan Kegiatan	1 Dok	1 Dok	72.323.000	1 Dok	132.750.000	-	-	-	-	2 Dok	205.073.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
01 06 16	Program Kerjasama Pembangunan	* Program Yang Tidak Dilaksanakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat Daerah
01 06 17	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Penyelesaian Masalah Perbatasan Daerah	3 Desa	-	-	8 Desa	155.500.000	8 Desa	95.800.000	10 Desa	208.800.000	26 Desa	460.100.000	Sekretariat Daerah
01 06 17	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	* Program Yang Tidak Dilaksanakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
01 06 18	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	* Program Yang Tidak Dilaksanakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
01 06 19	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Air Minum	31,16 %	-	-	31,16 %	45.950.000	32,04 %	52.500.000	32,80 %	93.655.000	32,80 %	192.105.000	Dinas Pekerjaan Umum
01 06 19	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Air Minum	29,99 %	29,99 %	131.000.000	21,16 %	338.000.000	32,04 %	1.017.500.000	32,80 %	281.320.000	32,80 %	1.767.820.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
01 06 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan dengan Qanun/Perwal	Ada	Ada	759.112.799	Ada	964.957.400	Ada	1.058.300.000	Ada	1.176.938.000	Ada	3.959.308.199	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
01 06 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan dengan Qanun/Perwal	Ada	Ada	465.699.081	Ada	478.260.000	Ada	424.750.000	Ada	100.460.000	Ada	1.469.109.081	Sekretariat Daerah
01 06 22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Dukungan Operasional Pelaksanaan PNPB/T2KP	12 Bulan	12 Bulan	175.000.000	12 Bulan	192.000.000	12 Bulan	91.000.000	-	-	36 Bulan	458.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
01 06 22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Dokumen Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	1 Dok	1 Dok	98.100.000	1 Dok	195.350.000	1 Dok	175.400.000	2 Dok	300.732.000	5 Dok	769.582.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
01 06 23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Dokumen Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang sosial dan budaya	1 Dok	1 Dok	234.500.000	1 Dok	265.500.000	1 Dok	205.800.000	1 Dok	303.730.000	4 Dok	1.009.530.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
01 06 25	Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	* Program Yang Tidak Dilaksanakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
01 07	BIDANG PERHUBUNGAN				4.524.538.859		5.010.029.028		6.443.725.114		3.503.498.587		19.581.791.588	
01 07 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kebutuhan Dan Operasional Unit Kerja Satuan Perangkat Daerah	100,00 %	100,00 %	2.528.202.379	100,00 %	2.096.376.000	100,00 %	2.298.312.096	100,00 %	2.196.960.000	100,00 %	9.119.850.475	Dinas Perhubungan
01 07 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Yang Representatif	100,00 %	100,00 %	1.106.660.000	100,00 %	300.420.000	100,00 %	465.640.000	100,00 %	337.800.000	100,00 %	2.210.520.000	Dinas Perhubungan
01 07 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Simulasi Bagi Peningkatan Kinerja Aparatur	100,00 %	100,00 %	129.993.750	-	-	-	-	-	-	100,00 %	129.993.750	Dinas Perhubungan

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (2012)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA TAHUN 2013-2016		SKPD PEMANGGUNG JAWAB
				2013*		2014*		2015*		2016		TARGET	(Rp.)	
				REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 5+7+9+11	14 = 6+8+10+12	15
01 07 15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Cakupan Pelaksanaan Pelayanan Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	1 Pelabuhan Laut, 1 Terminal Bis	-	-	1 Pelabuhan Laut, 1 Terminal Bis	350.000.000	1 Pelabuhan Laut, 1 Terminal Bis	1.464.711.513	1 Pelabuhan Laut, 1 Terminal Bis	34.285.000	1 Pelabuhan Laut, 1 Terminal Bis	1.843.996.513	Dinas Perhubungan
01 07 16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Menurunnya Angka Kecelakaan Lalu Lintas	77 LAKA	77 LAKA	150.000.000	66 LAKA	361.000.000	59 LAKA	1.511.594.000	53 LAKA	95.000.000	53 LAKA	2.117.594.000	Dinas Perhubungan
01 07 17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Jumlah Kendaraan Yang Telah Diuji	890 Unit	890 Unit	259.492.000	-	-	-	-	1.002 Unit	312.860.000	1.002 Unit	572.352.000	Dinas Perhubungan
01 07 19	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Menurunnya Angka Kecelakaan Lalu Lintas	77 LAKA	77 LAKA	450.190.730	66 LAKA	1.902.233.028	59 LAKA	703.467.505	53 LAKA	526.593.587	53 LAKA	3.582.484.850	Dinas Perhubungan
01 08	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				12.958.969.125		15.370.025.500		19.841.010.800		18.196.006.958		66.366.012.383	
01 08 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kebutuhan Dan Operasional Unit Kerja Satuan Perangkat Daerah	100,00 %	100,00 %	4.414.458.000	100,00 %	5.008.918.000	100,00 %	6.956.324.000	100,00 %	11.602.410.979	100,00 %	27.982.110.979	Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan Dan Pertamanan
01 08 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Yang Representatif	100,00 %	100,00 %	1.126.483.000	100,00 %	922.200.000	100,00 %	662.582.000	100,00 %	750.320.000	100,00 %	3.461.585.000	Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan Dan Pertamanan
01 08 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Stimulan Bagi Peningkatan Kinerja Aparatur	100,00 %	100,00 %	13.865.625	-	-	-	-	-	-	100,00 %	13.865.625	Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan Dan Pertamanan
01 08 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya Penanganan Persampahan	5 Kecamatan	5 Kecamatan	6.153.162.500	5 Kecamatan	7.070.916.500	5 Kecamatan	7.813.354.000	5 Kecamatan	2.401.180.000	5 Kecamatan	23.438.613.000	Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan Dan Pertamanan
01 08 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	* Program Yang Tidak Dilaksanakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rumah Sakit Umum Daerah
01 08 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	5 Kecamatan	5 Kecamatan	149.000.000	5 Kecamatan	369.600.000	5 Kecamatan	1.464.540.000	5 Kecamatan	835.542.500	5 Kecamatan	2.838.682.500	Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan Dan Pertamanan
01 08 17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	* Program Yang Tidak Dilaksanakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan Dan Pertamanan
01 08 18	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA	* Program Yang Tidak Dilaksanakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan Dan Pertamanan
01 08 19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	* Program Yang Tidak Dilaksanakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan Dan Pertamanan
01 08 20	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	* Program Yang Tidak Dilaksanakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan Dan Pertamanan
01 08 22	Program Pengendalian kebakaran hutan	* Program Yang Tidak Dilaksanakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan Dan Pertamanan
01 08 23	Program Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut	* Program Yang Tidak Dilaksanakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan Dan Pertamanan
01 08 24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Meningkatnya Pengendalian Pengawasan RTH	12 Bulan	12 Bulan	1.102.000.000	12 Bulan	1.978.391.000	12 Bulan	2.944.210.800	12 Bulan	2.606.553.479	48 Bulan	8.631.155.279	Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan Dan Pertamanan
01 09	BIDANG PERTANAHAN				1.821.350.000		1.673.800.000		6.858.140.080		646.414.231		10.999.704.311	
01 09 16	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	* Program Yang Tidak Dilaksanakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pengelola Keuangan Dan Asset
01 09 15	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Sertifikasi Tanah Kepemilikan Pemerintah Daerah	8 Sertifikat	8 Sertifikat	1.021.350.000	7 Sertifikat	1.673.800.000	7 Sertifikat	6.858.140.080	3 Sertifikat	646.414.231	25 Sertifikat	10.999.704.311	Sekretariat Daerah

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RFJMD (2012)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA TAHUN 2013-2016		SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2013*		2014*		2015*		2016		TARGET	(Rp.)	
				REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 5+7+9+11	14 = 6+8+10+12	15
01 10	BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL				1.478.731.750		1.293.879.250		999.617.000		767.708.200		4.539.936.200	
01 10 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kebutuhan Dan Operasional Unit Kerja Satuan Perangkat Daerah	100,00 %	100,00 %	1.243.938.000	100,00 %	1.154.479.250	100,00 %	819.725.000	100,00 %	628.539.250	100,00 %	3.846.681.500	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
01 10 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Yang Representatif	100,00 %	100,00 %	66.400.000	100,00 %	89.400.000	100,00 %	88.400.000	100,00 %	32.900.000	100,00 %	277.100.000	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
01 10 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Stimulan Bagi Peningkatan Kinerja Aparatur	100,00 %	100,00 %	14.343.750							100,00 %	14.343.750	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
01 10 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Kepemilikan KTP	74,40 %	87,73 %	154.050.000	67,70 %	50.000.000	75,98 %	91.492.000	85,25 %	106.268.950	85,25 %	401.810.950	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
01 11	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				1.833.587.490		2.114.141.790		1.941.076.434		1.559.525.285		7.448.330.999	
01 11 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kebutuhan Dan Operasional Unit Kerja Satuan Perangkat Daerah	100,00 %	100,00 %	513.515.390	100,00 %	578.011.790	100,00 %	888.869.792	100,00 %	750.994.000	100,00 %	2.731.390.972	Badan Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan
01 11 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Yang Representatif	100,00 %	100,00 %	131.950.000	100,00 %	115.150.000	100,00 %	117.350.000	100,00 %	134.100.000	100,00 %	498.550.000	Badan Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan
01 11 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Stimulan Bagi Peningkatan Kinerja Aparatur	100,00 %	100,00 %	21.037.500			100,00 %	18.000.000			100,00 %	39.037.500	Badan Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan
01 11 15	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Sosialisasi dan Pelatihan Terhadap Anak Patus Sekolah	66 Desa	66 Desa	734.000.000	66 Desa	817.570.000	66 Desa	546.668.811	66 Desa	185.346.285	66 Desa	2.283.585.096	Badan Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan
01 11 16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Pelaksanaan Forum Anak	23 Orang	23 Orang	83.084.600	20 Orang	70.000.000	48 Orang	103.000.000	53 Orang	113.333.000	144 Orang	369.417.600	Badan Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan
01 11 17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Jumlah Kasus KDRT	21 KDRT	21 KDRT	150.000.000	14 KDRT	339.210.000	10 KDRT	97.000.000	8 KDRT	67.557.000	6 KDRT	653.867.000	Badan Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan
01 11 18	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Partisipasi Perempuan Didalam Lembaga Pemerintahan	64,11 %	64,53 %	200.000.000	63,38 %	194.200.000	63,38 %	170.187.831	63,38 %	308.095.000	63,38 %	872.482.831	Badan Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan
01 12	BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA				879.850.000		988.406.000		1.313.088.000		1.129.593.500		4.310.937.500	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (2012)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA TAHUN 2013-2016		SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2013*		2014*		2015*		2016		TARGET	(Rp.)	
				REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 5+7+9+11	14 = 6+8+10+12	15
01 12 15	Program Keluarga Berencana	Cakupan Peserta KB Aktif	79,00 %	79,00 %	864.850.000	79,00 %	967.951.000	80,00 %	1.290.088.000	81,00 %	1.103.668.500	81,00 %	4.226.557.500	Badan Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan
01 12 18	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	Cakupan Peserta KB Aktif	79,00 %	79,00 %	15.000.000	79,00 %	20.455.000	80,00 %	23.000.000	81,00 %	25.925.000	81,00 %	84.380.000	Badan Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan
01 13	BIDANG SOSIAL				3.210.892.547		7.891.283.941		9.109.048.315		7.349.995.790		27.561.220.593	
01 13 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kebutuhan Dan Operasional Unit Kerja Satuan Perangkat Daerah	100,00 %	100,00 %	913.619.297	100,00 %	1.077.011.941	100,00 %	1.256.717.000	100,00 %	958.200.000	100,00 %	4.205.548.238	Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk
01 13 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Yang Representatif	100,00 %	100,00 %	216.865.000	100,00 %	455.290.000	100,00 %	296.750.000	100,00 %	162.725.000	100,00 %	1.131.630.000	Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk
01 13 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Stimulan Bagi Peningkatan Kinerja Aparatur	100,00 %	100,00 %	23.906.250	-	-	-	-	-	-	100,00 %	23.906.250	Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk
01 13 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	* Program Yang Tidak Dilaksanakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk
01 13 15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adet Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Penyediaan Sarana Prasarana Pendukung Bagi Keluarga Kurang Mampu	5 Kecamatan	5 Kecamatan	152.150.000	-	-	-	-	-	-	5 Kecamatan	152.150.000	Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk
01 13 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	PMKS Yang memperoleh Bantuan Sosial	8,67 %	8,67 %	446.032.000	61,27 %	2.179.482.500	53,65 %	1.500.780.000	47,32 %	2.025.525.000	47,32 %	6.151.819.500	Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk
01 13 17	Program Pembinaan Anak Terlantar	Penyediaan Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo Dan Panti Rehabilitasi	4 Unit	-	-	4 Unit	139.815.000	-	-	-	-	4 Unit	139.815.000	Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk
01 13 18	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Jumlah Penyandang Cacat	221 Orang	-	-	221 Orang	508.587.500	-	-	-	-	221 Orang	508.587.500	Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk
01 13 19	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Panti Asuhan	12 Bulan	12 Bulan	1.281.550.000	12 Bulan	1.940.125.000	12 Bulan	2.645.730.000	12 Bulan	1.500.759.790	48 Bulan	7.368.164.790	Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk
01 13 20	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Meningkatnya Kualitas Hidup Eks Penyandang Penyakit Sosial	12 Bulan	12 Bulan	62.370.000	-	-	12 Bulan	343.720.000	12 Bulan	34.520.000	36 Bulan	440.610.000	Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk
01 13 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Menurunnya Angka Kemiskinan	-	-	-	-	-	10,97 %	35.000.000	-	-	10,83 %	35.000.000	Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk
01 13 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Menurunnya Angka Kemiskinan	13,93 %	13,93 %	114.400.000	11,43 %	103.900.000	10,97 %	99.500.000	10,83 %	70.320.000	10,83 %	388.120.000	Sekretariat Daerah
01 13 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Menurunnya Angka Kemiskinan	-	-	-	11,43 %	1.487.072.000	10,97 %	2.930.851.315	10,83 %	2.597.946.000	10,83 %	7.015.869.315	Sekretariat Bauraj Mal
01 14	BIDANG KETENAGAKERJAAN				379.823.940		96.370.000		65.811.600		111.355.600		653.361.140	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL TAHUN 2012	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA TAHUN 2013-2016		SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2013*		2014*		2015*		2016		TARGET	(Rp.)	
				REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 5+7+9+11	14 = 6+8+10+12	15
01 14 15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	40 Orang	40 Orang	191.013.100	-	-	-	-	-	-	40 Orang	191.013.100	Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk
01 14 16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Jumlah Pengangguran	6.720 Orang	-	-	6.720 Orang	13.870.000	5.922 Orang	16.050.600	5.779 Orang	41.050.000	5.779 Orang	70.970.600	Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk
01 14 17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Meningkatnya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	12 Bulan	12 Bulan	188.810.840	12 Bulan	82.500.000	12 Bulan	49.761.000	12 Bulan	70.305.600	48 Bulan	391.377.440	Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk
01 15	BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH				291.855.000				509.093.000		22.500.000		823.448.000	
01 15 15	Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	Dukungan Pengembangan Usaha Kecil Menengah	-	-	-	-	-	25 Kelompok	509.093.000	-	-	25 Kelompok	509.093.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
01 15 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Rekomendasi Dukungan Usaha/Industri Kecil Menengah	4.000 Rekomendasi	4.000 Rekomendasi	26.905.000	-	-	-	-	-	-	4.000 Rekomendasi	26.905.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
01 15 17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Dukungan Industri Kecil Menengah	5 Kecamatan	5 Kecamatan	214.950.000	-	-	-	-	-	-	5 Kecamatan	214.950.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
01 15 18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	9,88 %	9,88 %	50.000.000	-	-	-	-	55,34 %	22.500.000	55,34 %	72.500.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
01 16	BIDANG PENANAMAN MODAL				140.200.000		151.940.000		209.534.000		81.902.500		583.576.500	
01 16 15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Meningkatnya Penerbitan SIUP Dan TDUP	490 Izin	490 Izin	140.200.000	520 Izin	151.940.000	590 Izin	209.534.000	655 Izin	81.902.500	655 Izin	583.576.500	Sekretariat Daerah
01 17	BIDANG KEBUDAYAAN				3.263.200.000		3.899.444.700		3.017.130.155		2.139.253.600		12.319.028.355	
01 17 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kebutuhan Dan Operasional Unit Kerja Satuan Perangkat Daerah	-	-	-	100,00 %	126.119.000	100,00 %	392.114.155	100,00 %	379.026.000	100,00 %	897.259.155	Sekretariat Majelis Adat Aceh
01 17 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Yang Representatif	-	-	-	100,00 %	80.000.000	100,00 %	71.400.000	100,00 %	181.000.000	100,00 %	332.400.000	Sekretariat Majelis Adat Aceh
01 17 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Stimulan Bagi Peningkatan Kinerja Aparatur	-	-	-	-	-	100,00 %	38.750.000	-	-	48,00 %	38.750.000	Sekretariat Majelis Adat Aceh
01 17 16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Pengembangan Seni Dan Budaya Dalam Bidang Pendidikan	2 Kali	-	-	2 Kali	54.143.750	1 Kali	7.260.000	-	-	3 Kali	61.403.750	Dinas Pendidikan
01 17 16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya	-	-	-	-	-	-	-	6 Kali	229.537.500	6 Kali	229.537.500	Sekretariat Majelis Adat Aceh
01 17 16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya	6 Kali	-	-	6 Kali	1.119.500.000	6 Kali	678.778.000	6 Kali	112.328.500	18 Kali	1.910.606.500	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (2012)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA TAHUN 2013-2016		SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2013*		2014*		2015*		2016		TARGET	(Rp.)	
				REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 5+7+9+11	14 = 6+8+10+12	15
01 17 16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya	12 Kali	12 Kali	1.766.600.000	12 Kali	1.974.244.950	6 Kali	1.372.288.000	6 Kali	914.805.000	36 Kali	6.027.937.950	Sekretariat Daerah
01 17 16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah Pengkaderan Ulama	-	-	-	-	-	6 Kali	98.790.000	6 Kali	93.990.500	12 Kali	192.780.500	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
01 17 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya	6 Kali	6 Kali	1.357.100.000	6 Kali	545.437.000	6 Kali	357.750.000	6 Kali	228.566.000	24 Kali	2.488.853.000	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata
01 17 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya	6 Kali	6 Kali	139.500.000	-	-	-	-	-	-	6 Kali	139.500.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
01 18	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				4.493.967.875		4.231.092.800		3.436.740.128		5.012.801.046		17.174.601.849	
01 18 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kebutuhan Dan Operasional Unit Kerja Satuan Perangkat Daerah	100,00 %	100,00 %	567.361.000	100,00 %	941.542.800	100,00 %	1.038.839.128	100,00 %	938.803.000	100,00 %	3.486.545.928	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata
01 18 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Yang Representatif	100,00 %	100,00 %	973.700.000	100,00 %	131.300.000	100,00 %	214.051.000	100,00 %	345.770.000	100,00 %	1.664.821.000	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata
01 18 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Stimulan Bagi Peningkatan Kinerja Aparatur	100,00 %	100,00 %	18.646.875	-	-	-	-	-	-	100,00 %	18.646.875	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata
01 18 16	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Diklat Dan Pemberdayaan Pemuda	42 Orang	42 Orang	248.800.000	140 Orang	353.250.000	80 Orang	199.500.000	80 Orang	273.320.000	342 Orang	1.074.870.000	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata
01 18 20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Pelaksanaan Pembinaan Cabang Olah Raga	31 Cabor	31 Cabor	2.685.460.000	32 Cabor	1.630.000.000	10 Cabor	714.040.000	11 Cabor	2.731.935.661	32 Cabor	7.761.435.661	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata
01 18 21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga	13 Cabor	-	-	13 Cabor	1.175.000.000	12 Cabor	1.270.310.000	10 Cabor	722.972.385	10 Cabor	3.168.282.385	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata
01 19	BIDANG KESATUAN BANGSA				10.056.274.986		11.146.959.842		12.596.750.001		10.694.198.919		44.488.183.748	
01 19 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kebutuhan Dan Operasional Unit Kerja Satuan Perangkat Daerah	100,00 %	100,00 %	518.005.000	100,00 %	704.916.340	100,00 %	580.834.182	100,00 %	423.023.937	100,00 %	2.226.779.459	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Linmas
01 19 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kebutuhan Dan Operasional Unit Kerja Satuan Perangkat Daerah	100,00 %	100,00 %	5.518.553.000	100,00 %	5.656.549.861	100,00 %	6.856.200.794	100,00 %	6.193.317.581	100,00 %	24.224.621.236	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah
01 19 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Yang Representatif	100,00 %	100,00 %	31.800.000	100,00 %	81.400.000	100,00 %	203.800.000	100,00 %	59.805.000	100,00 %	376.895.000	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Linmas
01 19 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Yang Representatif	100,00 %	100,00 %	110.950.000	100,00 %	237.800.000	100,00 %	759.800.000	100,00 %	326.152.000	100,00 %	1.434.702.000	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah
01 19 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Stimulan Bagi Peningkatan Kinerja Aparatur	100,00 %	100,00 %	15.300.000	-	-	-	-	-	-	100,00 %	15.300.000	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Linmas
01 19 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Stimulan Bagi Peningkatan Kinerja Aparatur	100,00 %	100,00 %	183.121.875	100,00 %	100.000.000	100,00 %	90.000.000	-	-	100,00 %	373.121.875	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (2012)	CAPAIAN 1 URUSAN DAERAH PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA TAHUN 2013-2016		SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2013*		2014*		2015*		2016		TARGET	(Rp.)	
				REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 5+7+9+11	14 = 6+8+10+12	15
01 19 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur	100,00 %	100,00 %	67.550.000	100,00 %	134.920.000	100,00 %	27.026.000	-	-	100,00 %	229.496.000	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Linmas
01 19 15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	100 Pelanggaran	100 Pelanggaran	39.445.000	162 Pelanggaran	351.482.000	174 Pelanggaran	284.844.756	187 Pelanggaran	278.572.395	187 Pelanggaran	1.154.344.151	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Linmas
01 19 15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah Pelanggaran Qanun (Syariat Islam)	617 Pelanggaran	617 Pelanggaran	269.464.000	596 Pelanggaran	258.500.000	603 Pelanggaran	619.380.000	592 Pelanggaran	529.920.000	592 Pelanggaran	1.677.264.000	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah
01 19 17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Forum Kerukunan Umat Beragama	12 Bulan	12 Bulan	43.265.000	12 Bulan	145.988.145	12 Bulan	98.367.369	12 Bulan	112.277.865	48 Bulan	399.898.379	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Linmas
01 19 17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	* Program Yang Tidak Dilaksanakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah
01 19 17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Peringatan Hari Besar Islam	12 Kali	22 Kali	2.606.656.911	22 Kali	2.595.726.276	23 Kali	2.714.970.000	22 Kali	2.623.265.000	89 Kali	10.540.618.187	Sekretariat Daerah
01 19 17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Sosialisasi Toleransi Dalam Kehidupan Beragama	60 Orang	60 Orang	100.000.000	-	-	-	-	-	-	60 Orang	100.000.000	Dinas Syariat Islam
01 19 20	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	* Program Yang Tidak Dilaksanakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah
01 19 21	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Pembinaan Terhadap LSM, Ormas, Dan OKP	12 Bulan	12 Bulan	546.164.200	12 Bulan	679.677.220	12 Bulan	361.526.900	12 Bulan	147.775.141	48 Bulan	1.735.143.461	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Linmas
01 20	BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN				57.764.737.809		64.489.535.134		61.328.825.708		53.428.803.775		237.011.902.426	
01 20 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kebutuhan Dan Operasional Unit Kerja Satuan Perangkat Daerah	100,00 %	100,00 %	15.818.917.000	100,00 %	20.310.877.400	100,00 %	17.590.696.590	100,00 %	9.503.585.000	100,00 %	63.224.075.990	Sekretariat Daerah
01 20 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kebutuhan Dan Operasional Unit Kerja Satuan Perangkat Daerah	100,00 %	100,00 %	5.496.392.220	100,00 %	5.056.192.450	100,00 %	7.679.088.080	100,00 %	5.859.757.850	100,00 %	24.091.430.600	Sekretariat Dewan
01 20 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kebutuhan Dan Operasional Unit Kerja Satuan Perangkat Daerah	100,00 %	100,00 %	4.800.382.375	100,00 %	5.689.041.000	100,00 %	4.201.930.000	100,00 %	2.301.468.000	100,00 %	16.992.821.375	Dinas Pengelola Keuangan Dan Asset
01 20 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kebutuhan Dan Operasional Unit Kerja Satuan Perangkat Daerah	100,00 %	100,00 %	789.396.259	100,00 %	1.022.339.900	100,00 %	955.835.757	100,00 %	773.280.000	100,00 %	3.541.451.956	Inspektorat
01 20 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kebutuhan Dan Operasional Unit Kerja Satuan Perangkat Daerah	100,00 %	100,00 %	1.432.686.200	100,00 %	1.297.839.655	100,00 %	1.519.865.220	100,00 %	1.338.235.000	100,00 %	5.588.626.075	Dinas Syariat Islam
01 20 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kebutuhan Dan Operasional Unit Kerja Satuan Perangkat Daerah	100,00 %	100,00 %	232.078.785	-	-	-	-	-	-	100,00 %	232.078.785	Komisi Independen Pemilu
01 20 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kebutuhan Dan Operasional Unit Kerja Satuan Perangkat Daerah	100,00 %	100,00 %	371.435.000	100,00 %	562.983.220	100,00 %	426.425.707	100,00 %	558.490.000	100,00 %	1.919.333.927	Kecamatan Langsa Barat

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (2012)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA TAHUN 2013-2016		SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2013*		2014*		2015*		2016		TARGET	(Rp.)	
				REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 5+7+9+11	14 = 6+8+10+12	15
01 20 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kebutuhan Dan Operasional Unit Kerja Satuan Perangkat Daerah	100,00 %	100,00 %	391.712.150	100,00 %	440.697.000	100,00 %	470.974.407	100,00 %	613.219.500	100,00 %	1.916.603.057	Kecamatan Langsa Timur
01 20 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kebutuhan Dan Operasional Unit Kerja Satuan Perangkat Daerah	100,00 %	100,00 %	425.210.000	100,00 %	442.939.000	100,00 %	474.806.707	100,00 %	553.132.000	100,00 %	1.896.087.707	Kecamatan Langsa Baru
01 20 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kebutuhan Dan Operasional Unit Kerja Satuan Perangkat Daerah	100,00 %	100,00 %	394.385.000	100,00 %	454.268.000	100,00 %	513.906.707	100,00 %	550.982.000	100,00 %	1.913.541.707	Kecamatan Langsa Lama
01 20 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kebutuhan Dan Operasional Unit Kerja Satuan Perangkat Daerah	100,00 %	100,00 %	441.010.000	100,00 %	431.047.625	100,00 %	406.706.446	100,00 %	672.525.000	100,00 %	1.951.289.071	Kecamatan Langsa Kota
01 20 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kebutuhan Dan Operasional Unit Kerja Satuan Perangkat Daerah	100,00 %	100,00 %	667.892.000	100,00 %	512.019.000	100,00 %	465.885.000	100,00 %	586.123.000	100,00 %	2.231.919.000	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
01 20 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kebutuhan Dan Operasional Unit Kerja Satuan Perangkat Daerah	-	-	-	100,00 %	589.677.000	100,00 %	479.976.240	100,00 %	643.853.000	100,00 %	1.713.506.240	Sekretariat Baitul Mal
01 20 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kebutuhan Dan Operasional Unit Kerja Satuan Perangkat Daerah	-	-	-	100,00 %	854.392.000	100,00 %	347.943.000	100,00 %	414.535.000	100,00 %	1.616.870.000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
01 20 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kebutuhan Dan Operasional Unit Kerja Satuan Perangkat Daerah	100,00 %	100,00 %	1.033.624.205	100,00 %	1.089.461.890	100,00 %	976.445.120	100,00 %	770.222.784	100,00 %	3.869.753.999	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan
01 20 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Yang Representatif	100,00 %	100,00 %	4.249.604.000	100,00 %	3.089.680.000	100,00 %	2.944.106.000	100,00 %	4.762.600.000	100,00 %	15.045.990.000	Sekretariat Daerah
01 20 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Yang Representatif	100,00 %	100,00 %	802.932.880	100,00 %	316.372.450	100,00 %	545.000.000	100,00 %	938.500.000	100,00 %	2.602.305.330	Sekretariat Dewan
01 20 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Yang Representatif	100,00 %	100,00 %	3.429.808.000	100,00 %	2.259.200.000	100,00 %	4.135.200.000	100,00 %	2.189.408.740	100,00 %	12.013.616.740	Dinas Pengelola Keuangan Dan Asset
01 20 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Yang Representatif	100,00 %	100,00 %	70.300.000	100,00 %	137.500.000	100,00 %	68.200.000	100,00 %	65.250.000	100,00 %	341.250.000	Inspektorat
01 20 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Yang Representatif	100,00 %	100,00 %	322.400.000	100,00 %	153.400.000	100,00 %	150.500.000	100,00 %	116.400.000	100,00 %	742.800.000	Dinas Syariah Islam
01 20 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Yang Representatif	100,00 %	100,00 %	29.300.000	-	-	-	-	-	-	100,00 %	29.300.000	Komisi Independen Pemilu
01 20 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Yang Representatif	100,00 %	100,00 %	123.700.000	100,00 %	170.800.000	100,00 %	208.300.000	100,00 %	61.800.000	100,00 %	564.600.000	Kecamatan Langsa Barat
01 20 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Yang Representatif	100,00 %	100,00 %	59.600.000	100,00 %	64.800.000	100,00 %	105.800.000	100,00 %	64.200.000	100,00 %	294.400.000	Kecamatan Langsa Timur
01 20 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Yang Representatif	100,00 %	100,00 %	53.600.000	100,00 %	60.600.000	100,00 %	98.600.000	100,00 %	54.600.000	100,00 %	267.400.000	Kecamatan Langsa Baru
01 20 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Yang Representatif	100,00 %	100,00 %	46.400.000	100,00 %	63.200.000	100,00 %	108.200.000	100,00 %	64.200.000	100,00 %	282.000.000	Kecamatan Langsa Lama
01 20 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Yang Representatif	100,00 %	100,00 %	76.700.000	100,00 %	53.200.000	100,00 %	96.200.000	100,00 %	52.200.000	100,00 %	278.300.000	Kecamatan Langsa Kota
01 20 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Yang Representatif	100,00 %	100,00 %	161.626.715	100,00 %	26.600.000	100,00 %	170.600.000	100,00 %	108.685.953	100,00 %	467.512.668	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (2012)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA TAHUN 2013-2016		SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2013*		2014*		2015*		2016		TARGET	(Rp.)	
				REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 5+7+9+11	14 = 6+8+10+12	15
01 20 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Yang Representatif	-	-	-	100,00 %	8.400.000	100,00 %	14.400.000	100,00 %	16.800.000	100,00 %	39.600.000	Sekretariat Baitul Mal
01 20 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Yang Representatif	-	-	-	100,00 %	22.200.000	100,00 %	63.400.000	100,00 %	49.400.000	100,00 %	135.000.000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
01 20 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Yang Representatif	100,00 %	100,00 %	172.600.000	100,00 %	61.600.000	100,00 %	240.400.000	100,00 %	234.200.000	100,00 %	708.800.000	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan
01 20 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Stimulan Bagi Peningkatan Kinerja Aparatur	100,00 %	100,00 %	163.990.625	100,00 %	91.300.000	100,00 %	89.620.000	100,00 %	72.620.000	100,00 %	417.530.625	Sekretariat Daerah
01 20 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Stimulan Bagi Peningkatan Kinerja Aparatur	100,00 %	100,00 %	214.015.625	100,00 %	361.000.000	100,00 %	457.840.000	100,00 %	706.900.000	100,00 %	1.739.755.625	Sekretariat Dewan
01 20 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Stimulan Bagi Peningkatan Kinerja Aparatur	100,00 %	100,00 %	78.890.625	-	-	-	-	-	-	100,00 %	78.890.625	Dinas Pengelola Keuangan Dan Asset
01 20 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Stimulan Bagi Peningkatan Kinerja Aparatur	100,00 %	100,00 %	22.950.000	100,00 %	31.078.125	-	-	-	-	100,00 %	54.028.125	Inspektorat
01 20 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Stimulan Bagi Peningkatan Kinerja Aparatur	100,00 %	100,00 %	89.000.000	-	-	-	-	-	-	100,00 %	89.000.000	Dinas Syariah Islam
01 20 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Stimulan Bagi Peningkatan Kinerja Aparatur	100,00 %	100,00 %	8.128.125	-	-	-	-	-	-	100,00 %	8.128.125	Komisi Independen Pemilu
01 20 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Stimulan Bagi Peningkatan Kinerja Aparatur	100,00 %	100,00 %	14.821.875	-	-	-	-	-	-	100,00 %	14.821.875	Kecamatan Langsa Barat
01 20 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Stimulan Bagi Peningkatan Kinerja Aparatur	100,00 %	100,00 %	15.778.125	-	-	-	-	-	-	100,00 %	15.778.125	Kecamatan Langsa Timur
01 20 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Stimulan Bagi Peningkatan Kinerja Aparatur	100,00 %	100,00 %	11.953.125	-	-	-	-	-	-	100,00 %	11.953.125	Kecamatan Langsa Baru
01 20 02	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Stimulan Bagi Peningkatan Kinerja Aparatur	100,00 %	100,00 %	13.387.500	-	-	-	-	-	-	100,00 %	13.387.500	Kecamatan Langsa Lama
01 20 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Stimulan Bagi Peningkatan Kinerja Aparatur	100,00 %	100,00 %	16.734.375	-	-	-	-	-	-	100,00 %	16.734.375	Kecamatan Langsa Kota
01 20 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Stimulan Bagi Peningkatan Kinerja Aparatur	100,00 %	100,00 %	8.128.125	-	-	-	-	-	-	100,00 %	8.128.125	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
01 20 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Stimulan Bagi Peningkatan Kinerja Aparatur	-	-	-	100,00 %	7.990.000	-	-	-	-	100,00 %	7.990.000	Sekretariat Baitul Mal
01 20 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Stimulan Bagi Peningkatan Kinerja Aparatur	-	-	-	100,00 %	21.500.000	100,00 %	32.200.000	100,00 %	21.000.000	100,00 %	74.700.000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
01 20 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Stimulan Bagi Peningkatan Kinerja Aparatur	100,00 %	100,00 %	40.640.625	-	-	-	-	-	-	100,00 %	40.640.625	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan
01 20 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur	100,00 %	100,00 %	158.195.000	-	-	100,00 %	262.270.000	-	-	100,00 %	420.465.000	Sekretariat Daerah
01 20 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur	100,00 %	100,00 %	327.475.000	100,00 %	275.057.000	100,00 %	156.332.000	100,00 %	69.482.500	100,00 %	828.346.500	Inspektorat
01 20 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur	-	-	-	100,00 %	165.947.400	100,00 %	148.155.000	100,00 %	426.343.000	100,00 %	740.445.400	Dinas Syariah Islam
01 20 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur	100,00 %	100,00 %	41.000.000	100,00 %	71.000.000	100,00 %	24.000.000	100,00 %	73.600.000	100,00 %	209.600.000	Kecamatan Langsa Barat

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (2012)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA TAHUN 2013-2016		SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2013*		2014*		2015*		2016		TARGET	(Rp.)	
				REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 5+7+9+11	14 = 6+8+10+12	15
01 20 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur	100,00 %	100,00 %	41.000.000	100,00 %	71.000.000	100,00 %	26.000.000	100,00 %	73.600.000	100,00 %	211.600.000	Kecamatan Langsa Timur
01 20 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur	100,00 %	100,00 %	41.000.000	100,00 %	71.000.000	100,00 %	24.000.000	100,00 %	73.600.000	100,00 %	209.600.000	Kecamatan Langsa Baru
01 20 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur	100,00 %	100,00 %	41.000.000	100,00 %	71.000.000	100,00 %	24.000.000	100,00 %	73.600.000	100,00 %	209.600.000	Kecamatan Langsa Lama
01 20 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur	100,00 %	100,00 %	41.000.000	100,00 %	71.000.000	100,00 %	24.000.000	100,00 %	73.600.000	100,00 %	209.600.000	Kecamatan Langsa Kota
01 20 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur	-	-	-	100,00 %	18.000.000	-	-	100,00 %	37.812.000	100,00 %	55.812.000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
01 20 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur	100,00 %	-	-	100,00 %	999.710.700	100,00 %	284.209.100	-	-	100,00 %	1.283.919.800	Badan Kepegawainan, Pendidikan Dan Pelatihan
01 20 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100,00 %	100,00 %	66.265.500	100,00 %	66.150.000	100,00 %	92.060.000	100,00 %	69.760.000	100,00 %	294.236.500	Sekretariat Daerah
		Meningkatnya Penilaian LAKIP Pemerintah Kota Langsa	C	C	115.170.000	C	117.124.319	C++	114.256.300	C++	79.305.000	C++	425.855.619	Sekretariat Daerah
01 20 15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Ran-Qanun yang dibahas	12 Ran-Qanun	12 Ran-Qanun	2.570.665.531	9 Ran-Qanun	2.197.850.910	14 Ran-Qanun	1.789.592.700	10 Ran-Qanun	2.454.360.200	45 Ran-Qanun	9.012.469.341	Sekretariat Dewan
01 20 16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	452 Kali	452 Kali	1.161.250.000	452 Kali	1.722.200.000	452 Kali	1.794.320.000	452 Kali	3.131.585.000	1.808 Kali	7.809.355.000	Sekretariat Daerah
01 20 17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Evaluasi Percepatan, Realisasi Anggaran	12 Bulan	12 Bulan	100.120.000	12 Bulan	84.770.000	12 Bulan	58.504.000	12 Bulan	30.425.000	48 Bulan	273.819.000	Sekretariat Daerah
01 20 17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Penilaian Keuangan Daerah	WTP	WTP	4.656.595.350	WTP	5.960.873.986	WTP	5.125.159.460	WTP	5.413.888.000	WTP	21.156.516.796	Dinas Pengelola Keuangan Dan Asset
01 20 20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Evaluasi Permasalahan Pembangunan Dan Penggunaan Dana Tanggap Darurat	2 Dek	-	-	2 Dek	50.605.400	2 Dek	46.800.000	2 Dek	35.675.000	6 Dek	133.080.400	Sekretariat Daerah
		Aksi Pengawasan Penyaluran dan Monitoring Kebijakan Subsidi Pemerintah	12 Bulan	12 Bulan	213.450.000	12 Bulan	159.270.000	12 Bulan	145.594.800	12 Bulan	70.380.000	48 Bulan	588.694.800	Sekretariat Daerah
01 20 20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Meningkatnya Penilaian Keuangan Daerah	WTP	WTP	1.308.780.000	WTP	1.482.900.000	WTP	1.397.461.000	WTP	537.720.000	WTP	4.726.861.000	Inspektorat
01 20 21	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Meningkatnya Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Pengawasan	8 Kali	8 Kali	120.000.000	8 Kali	151.000.000	8 Kali	80.000.000	8 Kali	95.000.000	32 Kali	446.000.000	Inspektorat
01 20 21	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	* Program Yang Tidak Dilaksanakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat Daerah
01 20 22	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Laporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	-	-	-	IV Triwulan	67.150.000	IV Triwulan	52.680.000	IV Triwulan	63.098.000	XII Triwulan	182.928.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
01 20 22	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Evaluasi Proposal Usulan Masyarakat	100 Proposal	100 Proposal	44.310.000	-	-	-	-	100 Proposal	45.725.000	200 Proposal	90.035.000	Sekretariat Daerah

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (2012)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA TAHUN 2013-2016		SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2013*		2014*		2015*		2016		TARGET	(Rp.)	
				REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 5+7+9+11	14 = 6+8+10+12	15
01 20 22	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	12 Bulan	-	-	12 Bulan	123.000.000	-	-	12 Bulan	12.000.000	24 Bulan	135.000.000	Inspektorat
01 20 23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Updating IUJK dan Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik	12 Bulan	12 Bulan	146.925.000	12 Bulan	757.800.000	12 Bulan	673.878.500	12 Bulan	537.210.000	48 Bulan	2.115.813.500	Sekretariat Daerah
01 20 24	Program mengintensifikan penguatan penguatan masyarakat	* Program Yang Tidak Dilaksanakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
01 20 25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kerjasama Daerah Dalam Pelayanan Publik	12 Bulan	12 Bulan	186.771.673	12 Bulan	493.994.925	12 Bulan	251.750.000	12 Bulan	401.079.500	48 Bulan	1.333.596.098	Sekretariat Daerah
01 20 25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Pelaksanaan MUSDA MPU	-	-	-	100 Orang	35.794.000	-	-	-	-	100 Orang	35.794.000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
01 20 26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Penyusunan produk hukum daerah	536 Produk Hukum	1.070 Produk Hukum	897.026.000	1.066 Produk Hukum	1.000.219.447	856 Produk Hukum	959.715.500	428 Produk Hukum	557.521.000	3.420 Produk Hukum	3.414.481.947	Sekretariat Daerah
01 20 26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pengesahan Judul Ran-Qanun	10 Judul	10 Judul	38.038.031	10 Judul	32.300.000	15 Judul	127.106.100	15 Judul	49.245.300	50 Judul	246.689.431	Sekretariat Dewan
01 20 26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	* Program Yang Tidak Dilaksanakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Syariat Islam
01 20 28	Program Pendidikan Kedinasan	Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur	65 Orang	65 Orang	114.881.533	-	-	-	-	-	-	65 Orang	114.881.533	Sekretariat Daerah
01 20 28	Program Pendidikan Kedinasan	Dukungan Tugas Belajar	35 Orang	35 Orang	937.000.000	32 Orang	825.000.000	27 Orang	795.100.000	56 Orang	2.809.325.000	150 Orang	5.367.425.000	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan
01 20 29	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Jumlah Peserta Didik	106 Orang	106 Orang	243.585.000	-	-	-	-	-	-	106 Orang	243.585.000	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan
01 20 30	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Evaluasi Jabaran dan Organisasi Kelembagaan Perangkat Daerah	2 Dok	2 Dok	235.471.652	5 Dok	433.807.132	5 Dok	398.929.700	6 Dok	574.615.000	18 Dok	1.642.823.484	Sekretariat Daerah
01 20 30	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Meningkatnya Karir Aparatur	1.000 Orang	1.000 Orang	1.076.050.000	1.100 Orang	881.214.200	1.100 Orang	412.800.527	1.200 Orang	688.428.948	1.100 Orang	3.058.493.675	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan
01 20 31	Sosialisasi, Penyuluhan dan Verifikasi Pemilu Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Umum	-	-	-	12 Bulan	260.000.000	-	-	-	-	12 Bulan	260.000.000	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Linmas
01 20 31	Sosialisasi, Penyuluhan dan Verifikasi Pemilu Pemerintah Daerah	Seleksi Anggota KPU dan Panwas PEMILU	-	10 Orang	249.000.000	-	-	-	-	5 Orang	152.647.500	15 Orang	401.647.500	Sekretariat Dewan
01 20 33	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Perizinan	Lamanya Proses Perizinan	-	-	-	7 Hari	18.600.000	-	-	-	-	7 Hari	18.600.000	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
01 20 0	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	* Program Yang Tidak Dilaksanakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat Daerah
01 20 0	Program Unit Layanan Pengadaan (ULP)	* Program Yang Tidak Dilaksanakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat Daerah
01 20 0	Program Pembinaan Syariat Islam	* Program Yang Tidak Dilaksanakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Syariat Islam
01 20 0	Program Pembinaan dakwah dan syiar islam	* Program Yang Tidak Dilaksanakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Syariat Islam
01 20 0	Program Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam	* Program Yang Tidak Dilaksanakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Syariat Islam
01 22	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				2.474.002.500		4.376.989.065		4.846.774.600		3.661.148.000		15.358.914.165	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (2012)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA TAHUN 2013-2016		SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2013*		2014*		2015*		2016		TARGET	(Rp.)	
				REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 5+7+9+11	14 = 6+8+10+12	15
01 22 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kebutuhan Dan Operasional Unit Kerja Satuan Perangkat Daerah	100,00 %	100,00 %	473.501.500	100,00 %	867.123.000	100,00 %	565.324.000	100,00 %	605.517.500	100,00 %	2.511.466.000	Badan Pemberdayaan Masyarakat
01 22 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Yang Representatif	100,00 %	100,00 %	67.675.000	100,00 %	1.847.200.000	100,00 %	1.374.300.000	100,00 %	1.679.800.000	100,00 %	4.968.975.000	Badan Pemberdayaan Masyarakat
01 22 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Stimulan Bagi Peningkatan Kinerja Aparatur	100,00 %	100,00 %	11.953.125	-	-	-	-	-	-	100,00 %	11.953.125	Badan Pemberdayaan Masyarakat
01 22 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Meningkatnya Kemandirian Masyarakat Perdesaan	5 Kecamatan	5 Kecamatan	-	5 Kecamatan	231.475.000	-	-	-	-	5 Kecamatan	231.475.000	Sekretariat Daerah
01 22 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Meningkatnya Kemandirian Masyarakat Perdesaan	5 Kecamatan	5 Kecamatan	1.188.800.000	5 Kecamatan	601.500.000	5 Kecamatan	1.350.200.000	5 Kecamatan	500.000.000	5 Kecamatan	3.640.500.000	Dinas Syariah Islam
01 22 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Meningkatnya Kemandirian Masyarakat Perdesaan	5 Kecamatan	5 Kecamatan	167.839.000	5 Kecamatan	305.408.800	5 Kecamatan	206.516.200	5 Kecamatan	138.347.000	5 Kecamatan	818.111.000	Badan Pemberdayaan Masyarakat
01 22 16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Pembinaan Lembaga Masyarakat Pedesaan	66 Desa	66 Desa	64.819.550	66 Desa	118.936.500	66 Desa	48.770.000	66 Desa	50.202.500	66 Desa	282.728.550	Badan Pemberdayaan Masyarakat
01 22 17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	66 Desa	66 Desa	288.111.250	66 Desa	405.345.765	66 Desa	1.080.484.400	66 Desa	59.852.500	66 Desa	1.833.793.915	Badan Pemberdayaan Masyarakat
01 22 18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur Pemerintah Desa	66 Desa	66 Desa	211.303.075	-	-	66 Desa	146.000.000	66 Desa	183.920.000	66 Desa	541.223.075	Sekretariat Daerah
01 22 18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur Pemerintah Desa	66 Desa	-	-	-	-	66 Desa	75.180.000	66 Desa	443.508.500	66 Desa	518.688.500	Badan Pemberdayaan Masyarakat
01 22 0	Peningkatan Penerapan Teknologi	* Program Yang Tidak Dilaksanakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Badan Pemberdayaan Masyarakat
01 23	BIDANG KEARSIPAN				27.000.000		37.850.000		22.308.000		20.692.500		107.850.500	
01 24 18	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Pengelolaan Arsip Secara Baku	2,56 %	2,56 %	27.000.000	2,56 %	37.850.000	2,56 %	22.308.000	2,56 %	20.692.500	2,56 %	107.850.500	Kantor Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi
01 25	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				2.121.028.000		1.868.150.000		2.094.640.600		838.630.000		6.922.448.600	
01 25 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Informasi Berita, Iklan dan Parlemenaria	12 Bulan	12 Bulan	731.128.000	12 Bulan	286.000.000	12 Bulan	374.631.200	-	-	36 Bulan	1.391.759.200	Dinas Perhubungan
01 25 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Informasi Berita, Iklan dan Parlemenaria	12 Bulan	12 Bulan	1.389.900.000	12 Bulan	1.582.150.000	12 Bulan	1.060.300.000	12 Bulan	800.730.000	48 Bulan	4.833.080.000	Sekretariat Daerah
01 25 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Informasi Berita, Iklan dan Parlemenaria	-	-	-	-	-	12 Bulan	659.709.400	12 Bulan	37.900.000	24 Bulan	697.609.400	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan
01 26	BIDANG PERPUSTAKAAN				623.419.125		479.717.924		388.654.650		559.158.005	300 SKP	2.050.949.704	
01 26 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kebutuhan Dan Operasional Unit Kerja Satuan Perangkat Daerah	100,00 %	100,00 %	512.378.500	100,00 %	431.717.924	100,00 %	340.654.650	100,00 %	511.158.005	100,00 %	1.795.909.079	Kantor Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi
01 26 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Yang Representatif	100,00 %	100,00 %	101.000.000	100,00 %	48.000.000	100,00 %	48.000.000	100,00 %	48.000.000	100,00 %	245.000.000	Kantor Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (2012)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA TAHUN 2013-2016		SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2013*		2014*		2015*		2016		TARGET	(Rp.)	
				REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 5+7+9+11	14 = 6+8+10+12	15
01 26 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Stimulan Bagi Peningkatan Kinerja Aparatur	100,00 %	100,00 %	10.040.625	-	-	-	-	-	-	100,00 %	10.040.625	Kantor Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi
01 26 0	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan	* Program Yang Tidak Dilaksanakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi
02	URUSAN PILIHAN				10.871.050.313		25.615.952.942		50.101.503.557		27.396.860.269		113.985.367.081	
02 01	BIDANG PERTANIAN				2.283.696.150		5.090.333.000		5.090.913.500		4.801.007.300		17.265.949.950	
02 01 15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani	101 Poin	-	-	103 Poin	220.000.000	-	-	-	-	102 Poin	220.000.000	Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian
02 01 16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Produktivitas Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar	0,36 %	0,36 %	468.216.150	-	-	-	-	-	-	0,36 %	468.216.150	Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian
02 01 17	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Promosi Hasil Pengolahan Pertanian dan Perkebunan	1 Kali	-	-	1 Kali	1.363.533.000	1 Kali	110.700.000	1 Kali	12.305.000	3 Kali	1.486.538.000	Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian
02 01 18	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	8 Unit	-	-	8 Unit	360.000.000	2 Unit	670.750.000	10 Unit	246.680.000	20 Unit	1.277.430.000	Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian
02 01 19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (ADHB)	5,50 %	5,43 %	650.480.000	5,18 %	1.458.660.000	5,19 %	816.300.000	5,20 %	2.828.327.500	5,20 %	5.753.767.500	Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian
02 01 20	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Temu Teknis Tenaga Penyuluh	24 Kali	24 Kali	75.000.000	24 Kali	58.200.000	24 Kali	45.000.000	24 Kali	80.820.000	96 Kali	259.020.000	Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian
02 01 21	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Penyediaan Sarana Medis Kesehatan Ternak	-	-	-	-	-	-	-	12 Bulan	100.000.000	12 Bulan	100.000.000	Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian
02 01 22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (ADHB)	5,50 %	5,43 %	1.090.000.000	5,18 %	1.490.240.000	5,19 %	1.527.609.500	5,20 %	1.469.916.000	5,20 %	5.577.765.500	Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian
02 01 23	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (ADHB)	5,50 %	-	-	5,18 %	139.700.000	5,19 %	42.000.000	5,20 %	23.258.800	5,20 %	204.958.800	Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian
02 01 24	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (ADHB)	5,50 %	-	-	-	-	5,19 %	1.878.554.000	5,20 %	39.700.000	5,20 %	1.918.254.000	Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian
02 02	BIDANG KEHUTANAN				1.874.268.000		319.300.000		1.542.328.000		9.377.859.529		13.113.755.529	
02 02 15	Program Pemanjatan Potensi Sumber Daya Hutan	* Program Yang Tidak Dilaksanakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian
02 02 16	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Meningkatnya Rehabilitasi Kawasan Hutan Dan Lahan	12 Bulan	12 Bulan	1.672.150.000	12 Bulan	176.300.000	12 Bulan	1.282.828.000	12 Bulan	9.377.859.529	48 Bulan	12.509.137.529	Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian
02 02 17	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Meningkatnya Pengawasan Hutan Dan Lahan	12 Bulan	12 Bulan	27.500.000	12 Bulan	143.000.000	12 Bulan	259.500.000	-	-	36 Bulan	430.000.000	Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian
02 02 20	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (ADHB)	0,26 %	0,25 %	174.618.000	-	-	-	-	-	-	0,21 %	174.618.000	Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian
02 03	BIDANG ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL				41.420.000		31.330.000		710.373.000		420.355.000		1.203.478.000	

KODE	BIDANG URUBAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (2012)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA TAHUN 2013-2016		SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2013*		2014*		2015*		2016		TARGET	(Rp.)	
				REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 5+7+9+11	14 = 6+8+10+12	15
02 03 15	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB (ADHB)	0,55 %	-	-	0,54 %	31.330.000	0,53 %	5.913.000	0,53 %	20.355.000	0,52 %	57.598.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
02 03 17	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Kontribusi Sektor Listrik Dan Gas Terhadap PDRB	0,16 %	0,16 %	41.420.000	-	-	0,16 %	704.460.000	0,16 %	400.000.000	0,16 %	1.145.880.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
02 04	BIDANG PARWISATA				14.600.000		4.414.370.000		5.289.603.000		672.348.000		10.390.921.000	
02 04 15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Kontribusi Sektor Akomodasi Dan Makan Minum Terhadap PDRB (ADHB)	2,00 %	2,00 %	14.600.000	2,04 %	141.540.000	3,50 %	190.800.000	5,49 %	152.848.000	5,49 %	499.788.000	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata
02 04 16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Kontribusi Sektor Akomodasi Dan Makan Minum Terhadap PDRB (ADHB)	2,00 %	-	-	2,04 %	4.272.830.000	3,50 %	4.458.160.000	5,49 %	519.500.000	5,49 %	9.250.490.000	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata
02 04 16	Program Pengembang Destinasi Pariwisata	Kontribusi Sektor Akomodasi Dan Makan Minum Terhadap PDRB (ADHB)	2,00 %	-	-	-	-	3,50 %	640.643.000	-	-	5,49 %	640.643.000	Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian
02 05	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				5.884.891.028		13.064.468.642		9.506.269.476		7.534.636.775		35.990.256.921	
02 05 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kebutuhan Dan Operasional Unit Kerja Satuan Perangkat Daerah	100,00 %	100,00 %	1.164.743.153	100,00 %	1.149.622.882	100,00 %	1.507.860.097	100,00 %	1.280.030.325	100,00 %	5.102.256.457	Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian
02 05 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana yang Representatif	Kebutuhan Sarana dan Prasarana yang Representatif	100,00 %	100,00 %	636.250.000	100,00 %	2.488.869.860	100,00 %	1.857.740.379	100,00 %	769.380.000	100,00 %	5.752.240.239	Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian
02 05 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Stimulan Bagi Peningkatan Kinerja Aparatur	100,00 %	100,00 %	41.596.875	-	-	-	-	-	-	100,00 %	41.596.875	Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian
02 05 15	Program Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir	* Program Yang Tidak Dilaksanakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian
02 05 20	Program Pengembangan Budaya Perikanan	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB (ADHB)	3,62 %	-	-	3,42 %	1.384.804.000	3,51 %	2.123.450.000	3,57 %	816.308.950	3,57 %	4.324.562.950	Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian
02 05 21	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB (ADHB)	3,62 %	3,55 %	3.407.316.000	3,42 %	6.596.846.000	3,51 %	4.017.210.000	3,57 %	4.639.860.000	3,57 %	18.663.232.000	Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian
02 05 23	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB (ADHB)	3,62 %	3,55 %	634.985.000	3,42 %	1.442.925.900	-	-	3,57 %	29.057.500	3,57 %	2.106.368.400	Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian
02 05 0	Pengembangan, Pembangunan dan Pengolahan Pelabuhan Perikanan	* Program Yang Tidak Dilaksanakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian
02 06	BIDANG PERDAGANGAN				22.736.385		773.240.800		26.188.125.145		2.084.229.405		29.068.331.735	
02 06 15	Program Perlindungan Konsumen dan Penguaman Perdagangan	Pengawasan Peredaran Barang Dan Jasa	12 Bulan	12 Bulan	22.736.385	12 Bulan	23.450.000	12 Bulan	124.770.024	12 Bulan	126.873.500	48 Bulan	297.829.909	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDEKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (2012)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA TAHUN 2013-2016		SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2013*		2014*		2015*		2016		TARGET	(Rp.)	
				REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 5+7+9+11	14 = 6+8+10+12	15
02 06 18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Penyelenggaraan Pameran Hasil UKM Dan IKM	2 Kali	-	-	2 Kali	477.590.800	2 Kali	26.063.355.121	3 Kali	1.957.355.905	7 Kali	28.498.301.826	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
02 06 19	Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan	Jumlah Kelompok Pedagang/Usaha Informal	590 Pedagang	-	-	590 Pedagang	272.200.000	-	-	-	-	590 Pedagang	272.200.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
02 07	BIDANG INDUSTRI				749.438.750		1.922.910.500		1.773.900.436		2.506.424.260		6.952.673.946	
02 07 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kebutuhan Dan Operasional Unit Kerja Satuan Perangkat Daerah	100,00 %	100,00 %	574.820.000	100,00 %	738.360.000	100,00 %	929.690.436	100,00 %	825.612.760	100,00 %	3.068.483.196	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
02 07 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Yang Representatif	100,00 %	100,00 %	148.800.000	100,00 %	106.000.000	100,00 %	491.000.000	100,00 %	268.000.000	100,00 %	1.013.800.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
02 07 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Stimulan Bagi Peningkatan Kinerja Aparatur	100,00 %	100,00 %	25.818.750	-	-	-	-	-	-	100,00 %	25.818.750	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
02 07 16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah Industri Kecil Dan Menengah	301 IKM	-	-	301 IKM	1.078.550.500	330 IKM	153.210.000	380 IKM	1.322.811.500	1.011 IKM	2.554.572.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
02 07 19	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Pertumbuhan Industri	23,47 %	-	-	-	-	23,47 %	200.000.000	37,82 %	90.000.000	39,21 %	290.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
JUMLAH					253.357.613.866		403.730.256.246		456.371.905.654		400.936.593.677		1.514.396.369.443	

KETERANGAN :

* Setelah Perubahan

TABEL 8.2

**PAGU DANA INDIKATIF MENURUT URUSAN DAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2013-2016**

NO	SKPK	TAHUN								JUMLAH ALOKASI PAGU DANA INDIKATIF TAHUN 2013-2016	
		2013*		2014*		2015*		2016		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 3+5+7+9	12 = 4+6+8+10
1.	Urusan Wajib	315.628.335.364	242.486.563.553	366.191.159.474	378.114.303.304	406.108.253.851	406.270.402.097	453.568.714.704	373.539.733.408	1.541.496.463.393	1.400.411.002.362
	- Bidang Pendidikan	168.947.987.456	24.955.898.186	200.093.561.642	37.937.764.256	220.561.316.074	39.109.654.797	209.477.828.390	36.849.883.153	799.080.693.562	138.853.200.392
	- Dinas Pendidikan Kota Langsa	168.947.987.456	24.118.872.186	200.093.561.642	36.361.146.840	220.186.396.376	38.048.175.141	208.881.946.400	36.275.753.253	798.109.891.874	134.803.947.420
	- Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kota Langsa	-	-	-	-	374.919.698	413.524.656	595.881.990	481.553.300	970.801.688	895.077.956
	- Sekretariat Daerah Kota Langsa	-	605.226.000	-	217.156.416	-	-	-	-	-	822.382.416
	- Dinas Syariah Islam Kota Langsa	-	-	-	1.270.000.000	-	628.350.000	-	-	-	1.898.350.000
	- Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Langsa	-	-	-	56.461.000	-	-	-	78.120.000	-	134.581.000
	- Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	-	231.800.000	-	33.000.000	-	19.605.000	-	14.456.600	-	298.861.600
	- Bidang Kesehatan	52.360.499.505	73.229.287.360	56.797.269.365	113.360.107.083	57.456.079.706	120.228.355.120	62.920.793.437	125.229.508.932	229.534.642.013	432.047.258.495
	- Dinas Kesehatan Kota Langsa	25.929.600.159	13.300.760.454	27.756.395.683	18.660.028.508	28.375.885.412	23.493.284.618	29.691.176.791	24.568.205.232	111.753.058.045	80.022.278.812
	- RSUD Kota Langsa	26.430.899.346	59.928.526.906	29.040.873.682	94.700.078.575	29.080.194.294	96.735.070.502	33.229.616.646	100.661.303.700	117.781.583.968	352.024.979.683
	- Bidang Pekerjaan Umum	4.224.814.649	27.051.424.445	4.757.859.903	81.957.772.911	4.668.962.457	88.510.609.987	5.144.945.105	80.011.606.639	18.796.582.114	277.531.413.982
	- Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa	4.224.814.649	26.916.424.445	4.757.859.903	81.957.772.911	4.668.962.457	88.510.609.987	5.144.945.105	80.011.606.639	18.796.582.114	277.396.413.982
	- Eadan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Langsa	-	135.000.000	-	-	-	-	-	-	-	135.000.000
	- Bidang Perumahan	1.549.506.268	5.156.038.375	1.710.367.956	13.621.747.680	1.652.610.444	18.175.089.008	2.074.760.700	15.056.408.288	6.987.245.368	52.009.283.351
	- Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa	-	489.950.000	-	8.420.000.000	-	13.487.372.000	-	10.946.804.000	-	33.344.126.000
	- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa	1.549.506.268	4.666.088.375	1.710.367.956	5.201.747.680	1.652.610.444	4.687.717.008	2.074.760.700	4.109.604.288	6.987.245.368	18.665.157.351
	- Bidang Penataan Ruang	-	332.050.000	-	783.395.000	-	352.730.000	-	2.226.290.000	-	3.694.465.000
	- Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa	-	198.050.000	-	783.395.000	-	352.730.000	-	1.226.290.000	-	2.560.465.000

NO	SKPK	TAHUN								JUMLAH ALOKASI PAGU DANA INDIKATIF TAHUN 2013-2016	
		2013*		2014*		2015*		2016		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 3+5+7+9	12 = 4+6+8+10
	- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa	-	134.000.000	-	-	-	-	-	1.000.000.000	-	1.134.000.000
	- Bidang Perencanaan Pembangunan	2.140.011.443	3.324.436.181	2.045.613.035	5.333.901.400	2.170.408.191	4.871.995.000	3.365.746.193	-4.442.850.000	9.721.778.862	17.973.182.581
	- Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa	-	175.000.000	-	237.950.000	-	143.500.000	-	93.655.000	-	650.105.000
	- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa	2.140.011.443	2.683.737.100	2.045.613.035	4.462.191.400	2.170.408.191	4.207.945.000	3.365.746.193	4.039.995.000	9.721.778.862	15.393.868.500
	- Sekretariat Daerah Kota Langsa	-	465.699.081	-	633.760.000	-	520.550.000	-	309.200.000	-	1.929.209.081
	- Bidang Perhubungan	2.333.193.140	4.624.538.859	2.477.860.945	5.010.029.028	2.609.323.154	6.443.725.114	3.125.227.482	3.503.498.587	10.545.604.721	19.581.791.588
	- Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa	2.333.193.140	4.624.538.859	2.477.860.945	5.010.029.028	2.609.323.154	6.443.725.114	3.125.227.482	3.503.498.587	10.545.604.721	19.581.791.588
	- Bidang Lingkungan Hidup	1.599.005.830	12.958.969.125	1.761.753.883	15.370.025.500	6.057.976.876	19.841.010.800	6.601.953.629	18.196.006.958	16.020.690.218	66.366.012.383
	- Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Langsa	1.599.005.830	12.958.969.125	1.761.753.883	15.370.025.500	6.057.976.876	19.841.010.800	6.601.953.629	18.196.006.958	16.020.690.218	66.366.012.383
	- Bidang Pertanahan	-	1.821.350.000	-	1.673.800.000	-	6.858.140.080	-	646.414.231	-	10.999.704.311
	- Dinas Pendidikan Kota Langsa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Dinas Kesehatan Kota Langsa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- RSUD Kota Langsa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Langsa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Langsa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	SKPK	TAHUN								JUMLAH ALOKASI PAGU DANA INDIKATIF TAHUN 2013-2016		
		2013*		2014*		2015*		2016*		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 3+5+7+9	12 = 4+6+8+10	
	- Sekretariat Daerah Kota Langsa	-	1.821.350.000	-	1.673.800.000	-	6.858.140.080	-	646.414.231	-	-	10.999.704.311
	- Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian Kota Langsa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Langsa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Bidang Kependudukan Dan Catatan Sipil	1.802.508.795	1.478.731.750	1.908.573.433	1.293.879.250	2.591.892.429	999.617.000	2.943.418.393	767.708.200	9.246.393.050	4.539.936.200	
	- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa	1.802.508.795	1.478.731.750	1.908.573.433	1.293.879.250	2.591.892.429	999.617.000	2.943.418.393	767.708.200	9.246.393.050	4.539.936.200	
	- Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	2.117.046.987	1.833.587.490	2.348.690.117	2.114.141.790	2.377.343.423	1.941.076.434	2.829.869.895	1.559.525.285	9.672.950.422	7.448.330.999	
	- Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	2.117.046.987	1.833.587.490	2.348.690.117	2.114.141.790	2.377.343.423	1.941.076.434	2.829.869.895	1.559.525.285	9.672.950.422	7.448.330.999	
	- Bidang Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera	-	879.850.000	-	988.406.000	-	1.313.088.000	-	1.129.593.500	-	4.310.937.500	
	- Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	-	879.850.000	-	988.406.000	-	1.313.088.000	-	1.129.593.500	-	4.310.937.500	
	- Bidang Sosial	2.532.213.486	3.210.892.547	2.846.037.515	7.891.283.941	2.877.834.045	9.109.048.315	3.442.684.406	7.349.995.790	11.698.769.452	27.561.220.593	
	- Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa	2.532.213.486	3.096.492.547	2.846.037.515	6.300.311.941	2.877.834.045	6.078.697.000	3.442.684.406	4.681.729.790	11.698.769.452	20.157.231.278	
	- Sekretariat Daerah Kota Langsa	-	114.400.000	-	103.900.000	-	99.500.000	-	70.320.000	-	388.120.000	
	- Sekretariat Baitul Mal Kota	-	-	-	1.487.072.000	-	2.930.851.315	-	2.597.946.000	-	7.015.869.315	
	- Bidang Ketenagakerjaan	-	379.823.940	-	96.370.000	-	65.811.600	-	111.355.600	-	653.361.140	
	- Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa	-	379.823.940	-	96.370.000	-	65.811.600	-	111.355.600	-	653.361.140	
	- Bidang Koperasi	-	291.855.000	-	-	-	509.093.000	-	22.500.000	-	823.448.000	
	- Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Langsa	-	291.855.000	-	-	-	509.093.000	-	22.500.000	-	823.448.000	

NO	SKPK	TAHUN								JUMLAH ALOKASI PAGU DANA INDIKATIF TAHUN 2013-2016	
		2013*		2014*		2015*		2016		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 3+5+7+9	12 = 4+6+8+10
	- Bidang Penanaman Modal	-	140.200.000	-	151.940.000	-	209.534.000	-	81.902.500	-	583.576.500
	- Sekretariat Daerah Kota Langsa	-	140.200.000	-	151.940.000	-	209.534.000	-	81.902.500	-	583.576.500
	- Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) Kota Langsa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Bidang Kebudayaan	-	3.263.200.000	476.397.364	3.899.444.700	321.248.556	3.017.130.155	497.581.061	2.139.253.500	1.295.226.981	12.319.028.355
	- Dinas Pendidikan Kota Langsa	-	-	-	54.143.750	-	7.260.000	-	-	-	61.403.750
	- Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Langsa	-	-	476.397.364	206.119.000	321.248.556	502.264.155	497.581.061	789.563.500	1.295.226.981	1.497.946.655
	- Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Langsa	-	1.357.100.000	-	1.664.937.000	-	1.036.528.000	-	340.894.500	-	4.399.459.500
	- Sekretariat Daerah Kota Langsa	-	1.766.600.000	-	1.974.244.950	-	1.372.288.000	-	914.805.000	-	6.027.937.950
	- Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Langsa	-	-	-	-	-	98.790.000	-	93.990.500	-	192.780.500
	- Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Langsa	-	139.500.000	-	-	-	-	-	-	-	139.500.000
	- Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	2.050.522.260	4.493.967.875	2.256.457.799	4.231.092.800	2.265.202.777	3.436.740.128	2.589.097.688	5.012.801.046	9.261.280.524	17.174.601.849
	- Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Langsa	2.050.522.260	4.493.967.875	2.256.457.799	4.231.092.800	2.265.202.777	3.436.740.128	2.589.097.688	5.012.801.046	9.261.280.524	17.174.601.849
	- Sekretariat Daerah Kota Langsa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri	2.845.711.749	10.050.274.986	3.018.277.974	11.146.959.842	3.361.739.736	12.596.750.001	3.891.036.401	10.694.198.919	13.116.765.860	44.488.183.748
	- Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (Kesbang Linmas)	1.685.006.837	1.261.529.200	1.754.782.323	2.298.383.705	1.955.371.649	1.556.399.207	2.337.727.106	1.021.544.338	7.732.887.915	6.137.856.450
	- Kantor Satpol PP dan WH Kota Langsa	1.160.704.912	6.082.088.875	1.263.495.651	6.252.849.861	1.406.368.087	8.325.380.794	1.553.309.295	7.049.389.581	5.383.877.945	27.709.709.111
	- Sekretariat Daerah Kota Langsa	-	2.606.656.911	-	2.595.726.276	-	2.714.970.000	-	2.623.265.000	-	10.540.618.187
	- Sekretariat DPR Kota Langsa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Dinas Syariat Islam Kota Langsa	-	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000

NO	SKPK	TAHUN								JUMLAH ALOKASI PRSU DANA INDIKATIF TAHUN 2013-2016	
		2013*		2014*		2015*		2016		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 3+5+7+9	12 = 4+6+8+10
	- Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian	68.869.087.647	57.764.737.809	80.991.264.334	64.489.535.134	94.251.886.276	61.328.825.708	141.151.779.387	53.428.803.775	385.264.017.644	237.011.902.426
	- Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa	-	-	-	67.150.000	-	52.680.000	-	63.098.000	-	182.928.000
	- Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Langsa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (Kesbang Linmas)	-	-	-	260.000.000	-	-	-	-	-	260.000.000
	- Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa	3.807.163.408	-	4.665.765.208	-	4.425.105.208	-	4.637.605.208	-	17.535.639.032	-
	- Walikota dan Wakil Walikota Langsa	494.116.390	-	594.116.390	-	594.116.390	-	600.316.390	-	2.282.665.560	-
	- Sekretariat Daerah Kota Langsa	8.745.214.851	23.672.348.983	10.307.191.947	28.377.798.623	11.093.798.195	25.422.501.390	13.022.087.036	19.872.085.500	43.168.292.029	97.344.734.496
	- Sekretariat DPR Kota Langsa	2.279.195.413	9.371.044.287	2.534.640.162	7.963.715.810	2.591.849.451	10.598.626.880	2.843.275.864	10.161.410.850	10.248.960.890	38.094.797.827
	- Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa	31.621.593.813	12.965.676.350	35.074.267.048	13.909.114.986	50.788.581.806	13.462.289.460	92.803.159.412	9.904.764.740	210.287.602.079	50.241.845.536
	- Inspektorat Kota Langsa	3.310.032.157	2.639.501.259	3.792.765.950	3.222.875.025	3.952.056.576	2.657.828.797	3.975.117.261	1.552.732.500	15.029.971.944	10.072.937.581
	- Dinas Syariah Islam Kota Langsa	1.974.927.375	1.844.086.200	2.122.204.760	1.617.187.055	2.183.455.888	1.818.620.220	2.587.009.721	1.880.978.000	8.867.597.744	7.160.871.475
	- Sekretariat KIP/KPU Kota Langsa	822.387.187	269.506.910	-	-	-	-	-	-	822.387.187	269.506.910
	- Kecamatan Langsa Kota	1.492.207.204	575.444.375	1.625.638.351	555.247.625	1.642.284.924	526.906.446	2.088.178.330	798.325.000	6.848.308.809	2.455.923.446
	- Kecamatan Langsa Barat	1.482.525.066	550.956.875	1.693.627.220	804.783.220	1.493.749.275	658.725.707	1.783.492.183	693.890.000	6.453.393.744	2.708.355.802
	- Kecamatan Langsa Timur	1.425.498.476	508.090.275	1.651.952.555	576.497.000	1.636.843.755	602.774.407	1.861.638.332	751.019.500	6.575.933.118	2.438.381.182
	- Kecamatan Langsa Lama	1.238.158.758	495.172.500	1.437.826.269	588.468.000	1.590.430.203	646.106.707	1.912.352.732	688.782.000	6.178.767.962	2.418.529.207
	- Kecamatan Langsa Baru	1.136.228.466	531.763.125	1.417.215.442	574.539.000	1.686.809.667	597.406.707	1.980.403.385	681.332.000	6.220.656.962	2.385.040.832
	- Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) Kota Langsa	853.961.909	837.646.840	1.153.886.627	557.219.000	1.115.985.312	636.485.000	1.085.916.762	694.808.953	4.209.750.610	2.726.159.793
	- Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Langsa	8.185.877.172	3.503.499.830	12.814.526.405	3.856.986.790	7.865.330.416	2.709.954.747	7.747.905.541	4.502.176.732	36.613.639.534	14.572.618.099

NO	SKPK	TAHUN								JUMLAH ALOKASI PAGU DANA INDIKATIF TAHUN 2013-2016	
		2013*		2014*		2015*		2016		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 3+5+7+9	12 = 4+6+8+10
	- Sekretariat Baitul Mal Kota Langsa	-	-	64.300.000	606.067.000	498.148.518	494.376.240	719.506.577	660.653.000	1.281.955.095	1.761.096.240
	- Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Langsa	-	-	41.340.000	951.886.000	1.093.340.692	443.543.000	1.503.814.653	522.747.000	2.638.495.345	1.918.176.000
	- Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1.479.800.916	2.474.002.500	1.812.988.038	4.376.989.065	2.008.614.871	4.846.774.600	2.418.199.741	3.661.148.000	7.719.603.566	15.358.914.165
	- Sekretariat Daerah Kota Langsa	-	211.303.075	-	231.475.000	-	146.000.000	-	183.920.000	-	772.698.075
	- Dinas Syariat Islam Kota Langsa	-	1.188.800.000	-	601.500.000	-	1.350.200.000	-	500.000.000	-	3.640.500.000
	- Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa	1.479.800.916	1.073.899.425	1.812.988.038	3.544.014.065	2.008.614.871	3.350.574.600	2.418.199.741	2.977.228.000	7.719.603.566	10.945.716.090
	- Bidang Kearsipan	-	27.000.000	-	37.850.000	-	22.308.000	-	20.692.500	-	107.850.500
	- Sekretariat DPR Kota Langsa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	-	27.000.000	-	37.850.000	-	22.308.000	-	20.692.500	-	107.850.500
	- Bidang Komunikasi Dan Informatika	-	2.121.028.000	-	1.868.150.000	-	2.094.640.600	-	838.630.000	-	6.922.448.600
	- Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa	-	731.128.000	-	286.000.000	-	374.631.200	-	-	-	1.391.759.200
	- Sekretariat Daerah Kota Langsa	-	1.389.900.000	-	1.582.150.000	-	1.060.300.000	-	800.730.000	-	4.833.080.000
	- Sekretariat DPR Kota Langsa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Badan Kepegawajian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Langsa	-	-	-	-	-	659.709.400	-	37.900.000	-	697.609.400
	- Bidang Perpustakaan	776.425.233	623.419.125	888.186.171	479.717.924	875.814.836	388.654.650	993.792.796	559.158.005	3.534.219.036	2.050.949.704
	- Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	776.425.233	623.419.125	888.186.171	479.717.924	875.814.836	388.654.650	993.792.796	559.158.005	3.534.219.036	2.050.949.704
2.	Urusan Pilihan	7.555.207.767	10.871.050.313	7.874.326.351	25.615.952.942	7.861.333.703	50.101.503.557	8.871.025.761	27.396.860.269	32.161.893.582	113.985.367.081
	- Bidang Pertanian	-	2.283.696.150	-	5.090.333.000	-	5.090.913.500	-	4.801.007.300	-	17.265.949.950
	- Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian Kota Langsa	-	2.283.696.150	-	5.090.333.000	-	5.090.913.500	-	4.801.007.300	-	17.265.949.950

NO	SKPK	TAHUN								JUMLAH ALOKASI PAGU DANA INDIKATIF TAHUN 2013-2016	
		2013*		2014*		2015*		2016		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 3+5+7+9	12 = 4+6+8+10
	- Bidang Kehutanan	-	1.874.268.000	-	319.300.000	-	1.542.328.000	-	9.377.859.529	-	13.113.755.529
	- Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian Kota Langsa	-	1.874.268.000	-	319.300.000	-	1.542.328.000	-	9.377.859.529	-	13.113.755.529
	- Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral	-	41.420.000	-	31.330.000	-	710.373.000	-	420.355.000	-	1.203.478.000
	- Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Langsa	-	41.420.000	-	31.330.000	-	710.373.000	-	420.355.000	-	1.203.478.000
	- Bidang Pariwisata	-	14.600.000	-	4.414.370.000	-	5.289.603.000	-	672.348.000	-	10.390.921.000
	- Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Langsa	-	14.600.000	-	4.414.370.000	-	4.648.960.000	-	672.348.000	-	9.750.278.000
	- Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian Kota Langsa	-	-	-	-	-	640.643.000	-	-	-	640.643.000
	- Bidang Kelautan Dan Perikanan	4.716.036.287	5.884.891.028	4.989.050.644	13.064.468.642	5.190.862.263	9.506.260.476	5.806.389.385	7.534.636.775	20.702.338.579	35.990.256.921
	- Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian Kota Langsa	4.716.036.287	5.884.891.028	4.989.050.644	13.064.468.642	5.190.862.263	9.506.260.476	5.806.389.385	7.534.636.775	20.702.338.579	35.990.256.921
	- Bidang Perdagangan	-	22.736.385	-	773.240.800	-	26.188.125.145	-	2.084.229.405	-	29.068.331.735
	- Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Langsa	-	22.736.385	-	773.240.800	-	26.188.125.145	-	2.084.229.405	-	29.068.331.735
	- Bidang Industri	2.839.171.480	749.438.750	2.885.275.707	1.922.910.500	2.670.471.440	1.773.900.436	3.064.636.376	2.506.424.260	11.459.555.003	6.952.673.946
	- Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Langsa	2.839.171.480	749.438.750	2.885.275.707	1.922.910.500	2.670.471.440	1.773.900.436	3.064.636.376	2.506.424.260	11.459.555.003	6.952.673.946
	- Bidang Transmigrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	323.183.543.131	253.357.613.866	374.065.485.825	403.730.256.246	413.969.587.554	456.371.905.654	462.439.740.465	400.936.593.677	1.573.658.356.975	1.514.396.369.443
	TOTAL	576.541.156.997		777.795.742.071		870.341.493.209		863.376.334.142		3.088.054.726.418	

KETERANGAN :

* Setelah Perubahan

TABEL 8.3
PAGU DANA INDIKATIF MENURUT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2013-2016

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	TAHUN								JUMLAH ALOKASI PAGU DANA INDIKATIF TAHUN 2013-2016	
		2013*		2014*		2015*		2016		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 3+5+7+9	12 = 4+6+8+10
1.	Dinas Pendidikan Kota Langsa	168.947.987.456	24.118.872.186	200.093.561.642	36.415.290.590	220.186.396.376	38.055.435.141	208.881.946.400	36.275.753.253	798.109.891.874	134.865.351.170
-	Urusan Wajib	168.947.987.456	24.118.872.186	200.093.561.642	36.415.290.590	220.186.396.376	38.055.435.141	208.881.946.400	36.275.753.253	798.109.891.874	134.865.351.170
-	Bidang Pendidikan	168.947.987.456	24.118.872.186	200.093.561.642	36.361.146.840	220.186.396.376	38.048.175.141	208.881.946.400	36.275.753.253	798.109.891.874	134.803.947.420
-	Bidang Pertanahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Bidang Kebudayaan	-	-	-	54.143.750	-	7.260.000	-	-	-	61.403.750
2.	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kota Langsa	-	-	-	-	374.919.698	413.524.656	595.881.990	481.553.300	970.801.688	895.077.956
-	Urusan Wajib	-	-	-	-	374.919.698	413.524.656	595.881.990	481.553.300	970.801.688	895.077.956
-	Bidang Pendidikan	-	-	-	-	374.919.698	413.524.656	595.881.990	481.553.300	970.801.688	895.077.956
3.	Dinas Kesehatan Kota Langsa	25.929.600.159	13.300.760.454	27.756.395.683	18.660.028.508	28.375.885.412	23.493.284.618	29.691.176.791	24.568.205.232	111.753.058.045	80.022.278.812
-	Urusan Wajib	25.929.600.159	13.300.760.454	27.756.395.683	18.660.028.508	28.375.885.412	23.493.284.618	29.691.176.791	24.568.205.232	111.753.058.045	80.022.278.812
-	Bidang Kesehatan	25.929.600.159	13.300.760.454	27.756.395.683	18.660.028.508	28.375.885.412	23.493.284.618	29.691.176.791	24.568.205.232	111.753.058.045	80.022.278.812
-	Bidang Pertanahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	RSUD Kota Langsa	26.430.899.346	59.928.526.906	29.040.873.682	94.700.078.575	29.080.194.294	96.735.070.502	33.229.616.646	100.661.303.700	117.781.583.968	352.024.979.683
-	Urusan Wajib	26.430.899.346	59.928.526.906	29.040.873.682	94.700.078.575	29.080.194.294	96.735.070.502	33.229.616.646	100.661.303.700	117.781.583.968	352.024.979.683
-	Bidang Kesehatan	26.430.899.346	59.928.526.906	29.040.873.682	94.700.078.575	29.080.194.294	96.735.070.502	33.229.616.646	100.661.303.700	117.781.583.968	352.024.979.683
-	Bidang Pertanahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa	4.224.814.649	27.779.424.445	4.757.859.903	91.399.117.911	4.668.962.457	102.494.211.987	5.144.945.105	92.278.355.639	18.796.582.114	313.951.109.982
-	Urusan Wajib	4.224.814.649	27.779.424.445	4.757.859.903	91.399.117.911	4.668.962.457	102.494.211.987	5.144.945.105	92.278.355.639	18.796.582.114	313.951.109.982
-	Bidang Pekerjaan Umum	4.224.814.649	26.916.424.445	4.757.859.903	81.957.772.911	4.668.962.457	88.510.609.987	5.144.945.105	80.011.606.639	18.796.582.114	277.396.413.982
-	Bidang Perumahan	-	489.950.000	-	8.420.000.000	-	13.487.372.000	-	10.946.804.000	-	33.344.126.000
-	Bidang Penataan Ruang	-	198.050.000	-	783.395.000	-	352.730.000	-	1.226.290.000	-	2.560.465.000
-	Bidang Perencanaan Pembangunan	-	175.000.000	-	237.950.000	-	143.500.000	-	93.655.000	-	650.105.000
-	Bidang Pertanahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	TAHUN								JUMLAH ALOKASI PAGU DANA INDIKATIF TAHUN 2013-2016		
		2013*		2014*		2015*		2016		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 3+5+7+9	12 = 4+6+8+10	
	- Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa	1.549.506.268	4.666.088.375	1.710.367.956	5.201.747.680	1.652.610.444	4.687.717.008	2.074.760.700	4.109.604.288	6.987.245.368	18.665.157.351	
	- Urusan Wajib	1.549.506.268	4.666.088.375	1.710.367.956	5.201.747.680	1.652.610.444	4.687.717.008	2.074.760.700	4.109.604.288	6.987.245.368	18.665.157.351	
	- Bidang Perumahan	1.549.506.268	4.666.088.375	1.710.367.956	5.201.747.680	1.652.610.444	4.687.717.008	2.074.760.700	4.109.604.288	6.987.245.368	18.665.157.351	
7.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa	2.140.011.443	2.817.737.100	2.045.613.035	4.529.341.400	2.170.408.191	4.260.625.000	3.365.746.193	5.103.093.000	9.721.778.862	16.710.796.500	
	- Urusan Wajib	2.140.011.443	2.817.737.100	2.045.613.035	4.529.341.400	2.170.408.191	4.260.625.000	3.365.746.193	5.103.093.000	9.721.778.862	16.710.796.500	
	- Bidang Penataan Ruang	-	134.000.000	-	-	-	-	-	1.000.000.000	-	1.134.000.000	
	- Bidang Perencanaan Pembangunan	2.140.011.443	2.683.737.100	2.045.613.035	4.462.191.400	2.170.408.191	4.207.945.000	3.365.746.193	4.039.995.000	9.721.778.862	15.393.868.500	
	- Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian	-	-	-	67.150.000	-	52.680.000	-	63.098.000	-	182.928.000	
8.	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa	2.333.193.140	5.355.666.859	2.477.860.945	5.296.029.028	2.609.323.154	6.818.356.314	3.125.227.482	3.503.498.587	10.545.604.721	20.973.550.788	
	- Urusan Wajib	2.333.193.140	5.355.666.859	2.477.860.945	5.296.029.028	2.609.323.154	6.818.356.314	3.125.227.482	3.503.498.587	10.545.604.721	20.973.550.788	
	- Bidang Perhubungan	2.333.193.140	4.624.538.859	2.477.860.945	5.010.029.028	2.609.323.154	6.443.725.114	3.125.227.482	3.503.498.587	10.545.604.721	19.581.791.588	
	- Bidang Komunikasi Dan	-	731.128.000	-	286.000.000	-	374.631.200	-	-	-	1.391.759.200	
	- Bidang Pertanahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.	Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Langsa	1.599.005.830	13.093.969.125	1.761.753.883	15.370.025.500	6.057.976.876	19.841.010.800	6.601.953.629	18.196.006.958	16.020.690.218	66.501.012.383	
	- Urusan Wajib	1.599.005.830	13.093.969.125	1.761.753.883	15.370.025.500	6.057.976.876	19.841.010.800	6.601.953.629	18.196.006.958	16.020.690.218	66.501.012.383	
	- Bidang Pekerjaan Umum	-	135.000.000	-	-	-	-	-	-	-	135.000.000	

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	TAHUN								JUMLAH ALOKASI PAGU DANA INDIKATIF TAHUN 2013-2016	
		2013*		2014*		2015*		2016		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 3+5+7+9	12 = 4+6+8+10
	- Bidang Lingkungan Hidup	1.599.005.830	12.958.969.125	1.761.753.883	15.370.025.500	6.057.976.376	19.841.010.800	6.601.953.629	18.196.006.958	16.020.690.218	66.366.012.383
	- Bidang Pertanahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa	1.802.508.795	1.478.731.750	1.908.573.433	1.293.879.250	2.591.892.429	999.617.000	2.943.418.393	767.708.200	9.246.393.050	4.539.936.200
	- Urusan Wajib	1.802.508.795	1.478.731.750	1.908.573.433	1.293.879.250	2.591.892.429	999.617.000	2.943.418.393	767.708.200	9.246.393.050	4.539.936.200
	- Bidang Kependudukan Dan Catatan Sipil	1.802.508.795	1.478.731.750	1.908.573.433	1.293.879.250	2.591.892.429	999.617.000	2.943.418.393	767.708.200	9.246.393.050	4.539.936.200
11.	Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	2.117.046.987	2.713.437.490	2.348.690.117	3.102.547.790	2.377.343.423	3.254.164.434	2.829.869.895	2.689.118.785	9.672.950.422	11.759.268.499
	- Urusan Wajib	2.117.046.987	2.713.437.490	2.348.690.117	3.102.547.790	2.377.343.423	3.254.164.434	2.829.869.895	2.689.118.785	9.672.950.422	11.759.268.499
	- Bidang Pertanahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	2.117.046.987	1.833.587.490	2.348.690.117	2.114.141.790	2.377.343.423	1.941.076.434	2.829.869.895	1.559.525.285	9.672.950.422	7.448.330.999
	- Bidang Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera	-	879.850.000	-	988.406.000	-	1.313.088.000	-	1.129.593.500	-	4.310.937.500
12.	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa	2.532.213.486	3.476.316.487	2.845.037.515	6.396.681.941	2.877.834.045	6.144.508.600	3.442.684.406	4.793.085.390	11.698.769.452	20.810.592.418
	- Urusan Wajib	2.532.213.486	3.476.316.487	2.845.037.515	6.396.681.941	2.877.834.045	6.144.508.600	3.442.684.406	4.793.085.390	11.698.769.452	20.810.592.418
	- Bidang Sosial	2.532.213.486	3.096.492.547	2.845.037.515	6.300.311.941	2.877.834.045	6.078.697.000	3.442.684.406	4.681.729.790	11.698.769.452	20.157.231.278
	- Bidang Ketenagakerjaan	-	379.823.940	-	96.370.000	-	65.811.600	-	111.355.600	-	653.361.140
	- Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Urusan Pilihan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Bidang Transmigrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Langsa	-	-	476.397.364	206.119.000	321.248.556	502.264.155	497.581.061	789.563.500	1.295.226.981	1.497.946.655

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	TAHUN								JUMLAH ALOKASI PAGU DANA INDIKATIF TAHUN 2013-2016	
		2013*		2014*		2015*		2016		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 3+5+7+9	12 = 4+6+8+10
	Urusan Wajib	-	-	476.397.364	206.119.000	321.248.556	502.264.155	497.581.061	789.563.500	1.295.226.981	1.497.946.655
	- Bidang Kebudayaan	-	-	476.397.364	206.119.000	321.248.556	502.264.155	497.581.061	789.563.500	1.295.226.981	1.497.946.655
	- Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Langsa	2.050.522.260	5.865.667.875	2.256.457.799	10.310.399.800	2.265.202.777	9.122.228.128	2.689.097.688	6.026.043.546	9.261.280.524	31.324.339.349
	Urusan Wajib	2.050.522.260	5.851.067.875	2.256.457.799	5.896.029.800	2.265.202.777	4.473.268.128	2.689.097.688	5.353.695.546	9.261.280.524	21.574.061.349
	- Bidang Pertanahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Bidang Kebudayaan	-	1.357.100.000	-	1.664.937.000	-	1.036.528.000	-	340.894.500	-	4.399.459.500
	- Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	2.050.522.260	4.493.967.875	2.256.457.799	4.231.092.800	2.265.202.777	3.436.740.128	2.689.097.688	5.012.801.046	9.261.280.524	17.174.601.849
	Urusan Pilihan	-	14.600.000	-	4.414.370.000	-	4.648.960.000	-	672.348.000	-	9.750.278.000
	- Bidang Pariwisata	-	14.600.000	-	4.414.370.000	-	4.648.960.000	-	672.348.000	-	9.750.278.000
15.	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (Kesbang Linmas)	1.685.006.837	1.261.529.200	1.754.782.323	2.558.383.705	1.955.371.649	1.556.399.207	2.337.727.106	1.021.544.338	7.732.887.915	6.397.856.450
	Urusan Wajib	1.685.006.837	1.261.529.200	1.754.782.323	2.558.383.705	1.955.371.649	1.556.399.207	2.337.727.106	1.021.544.338	7.732.887.915	6.397.856.450
	- Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri	1.685.006.837	1.261.529.200	1.754.782.323	2.298.383.705	1.955.371.649	1.556.399.207	2.337.727.106	1.021.544.338	7.732.887.915	6.137.856.450
	- Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian	-	-	-	260.000.000	-	-	-	-	-	260.000.000
16.	Kantor Satpol PP dan WH Kota Langsa	1.160.704.912	6.082.088.875	1.263.495.651	6.252.849.861	1.406.368.087	8.325.380.794	1.553.309.295	7.049.389.581	5.383.877.945	27.709.709.111
	Urusan Wajib	1.160.704.912	6.082.088.875	1.263.495.651	6.252.849.861	1.406.368.087	8.325.380.794	1.553.309.295	7.049.389.581	5.383.877.945	27.709.709.111
	- Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri	1.160.704.912	6.082.088.875	1.263.495.651	6.252.849.861	1.406.368.087	8.325.380.794	1.553.309.295	7.049.389.581	5.383.877.945	27.709.709.111

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	TAHUN								JUMLAH ALOKASI PAGU DANA INDIKATIF TAHUN 2013-2016	
		2013*		2014*		2015*		2016		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 3+5+7+9	12 = 4+6+8+10
17.	Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa	3.807.163.408	-	4.665.765.208	-	4.425.105.208	-	4.637.605.208	-	17.535.639.032	-
	- Urusan Wajib	3.807.163.408	-	4.665.765.208	-	4.425.105.208	-	4.637.605.208	-	17.535.639.032	-
	- Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian	3.807.163.408	-	4.665.765.208	-	4.425.105.208	-	4.637.605.208	-	17.535.639.032	-
18.	Walikota dan Wakil Walikota Langsa	494.116.390	-	594.116.390	-	594.116.390	-	600.316.390	-	2.282.665.560	-
	- Urusan Wajib	494.116.390	-	594.116.390	-	594.116.390	-	600.316.390	-	2.282.665.560	-
	- Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian	494.116.390	-	594.116.390	-	594.116.390	-	600.316.390	-	2.282.665.560	-
17.	Sekretariat Daerah Kota Langsa	8.745.214.851	32.793.684.050	10.307.191.947	37.541.951.265	11.093.798.195	38.403.783.470	13.022.087.036	25.502.642.231	43.168.292.029	134.242.061.016
	- Urusan Wajib	8.745.214.851	32.793.684.050	10.307.191.947	37.541.951.265	11.093.798.195	38.403.783.470	13.022.087.036	25.502.642.231	43.168.292.029	134.242.061.016
	- Bidang Pendidikan	-	605.226.000	-	217.156.416	-	-	-	-	-	822.382.416
	- Bidang Perencanaan Pembangunan	-	465.699.081	-	633.760.000	-	520.550.000	-	309.200.000	-	1.929.209.081
	- Bidang Pertanahan	-	1.821.350.000	-	1.673.800.000	-	6.858.140.080	-	646.414.231	-	10.999.704.311
	- Bidang Sosial	-	114.400.000	-	103.900.000	-	99.500.000	-	70.320.000	-	388.120.000
	- Bidang Penanaman Modal	-	140.200.000	-	151.940.000	-	209.534.000	-	81.902.500	-	583.576.500
	- Bidang Kebudayaan	-	1.766.600.000	-	1.974.244.950	-	1.372.288.000	-	914.805.000	-	6.027.937.950
	- Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Bidang Kesatuan Bangsa	-	2.606.656.911	-	2.595.726.276	-	2.714.970.000	-	2.623.265.000	-	10.540.618.187

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	TAHUN								JUMLAH ALOKASI PAGU DANA INDIKATIF TAHUN 2013-2016	
		2013*		2014*		2015*		2016		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 3+5+7+9	12 = 4+6+8+10
	- Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian	8.745.214.851	23.672.348.983	10.307.191.947	28.377.798.623	11.093.798.195	25.422.501.390	13.022.087.036	19.872.085.500	43.168.292.029	97.344.734.496
	- Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	-	211.303.075	-	231.475.000	-	146.000.000	-	183.920.000	-	772.698.075
	- Bidang Komunikasi Dan Informatika	-	1.389.900.000	-	1.582.150.000	-	1.060.300.000	-	800.730.000	-	4.833.080.000
18.	Sekretariat DPR Kota Langsa	2.279.195.413	9.371.044.287	2.534.640.162	7.963.715.810	2.591.849.451	10.598.626.880	2.843.275.864	10.161.410.850	10.248.960.890	38.094.797.827
	- Urusan Wajib	2.279.195.413	9.371.044.287	2.534.640.162	7.963.715.810	2.591.849.451	10.598.626.880	2.843.275.864	10.161.410.850	10.248.960.890	38.094.797.827
	- Bidang Kesatuan Bangsa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian	2.279.195.413	9.371.044.287	2.534.640.162	7.963.715.810	2.591.849.451	10.598.626.880	2.843.275.864	10.161.410.850	10.248.960.890	38.094.797.827
	- Bidang Kearsipan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Bidang Komunikasi Dan Informatika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa	31.621.593.813	12.965.676.350	35.074.267.048	13.909.114.986	50.788.581.806	13.462.289.460	92.803.159.412	9.904.764.740	210.287.602.079	50.241.845.536
	- Urusan Wajib	31.621.593.813	12.965.676.350	35.074.267.048	13.909.114.986	50.788.581.806	13.462.289.460	92.803.159.412	9.904.764.740	210.287.602.079	50.241.845.536
	- Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian	31.621.593.813	12.965.676.350	35.074.267.048	13.909.114.986	50.788.581.806	13.462.289.460	92.803.159.412	9.904.764.740	210.287.602.079	50.241.845.536
20.	Inspektorat Kota Langsa	3.310.032.157	2.639.501.259	3.792.765.950	3.222.875.025	3.952.056.576	2.657.828.797	3.975.117.261	1.552.732.500	15.029.971.944	10.072.937.581
	- Urusan Wajib	3.310.032.157	2.639.501.259	3.792.765.950	3.222.875.025	3.952.056.576	2.657.828.797	3.975.117.261	1.552.732.500	15.029.971.944	10.072.937.581

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	TAHUN								JUMLAH ALOKASI PAGU DANA INDIKATIF TAHUN 2013-2016	
		2013*		2014*		2015*		2016		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 3+5+7+9	12 = 4+6+8+10
	- Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian	3.310.032.157	2.639.501.259	3.792.765.950	3.222.875.025	3.952.056.576	2.657.828.797	3.975.117.261	1.552.732.500	15.029.971.944	10.072.937.581
21.	Dinas Syariat Islam Kota Langsa	1.974.927.375	3.132.886.200	2.122.204.760	3.488.687.055	2.183.455.888	3.797.170.220	2.587.009.721	2.380.978.000	8.867.597.744	12.799.721.475
	- Urusan Wajib	1.974.927.375	3.132.886.200	2.122.204.760	3.488.687.055	2.183.455.888	3.797.170.220	2.587.009.721	2.380.978.000	8.867.597.744	12.799.721.475
	- Bidang Pendidikan	-	-	-	1.270.000.000	-	628.350.000	-	-	-	1.898.350.000
	- Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri	-	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000
	- Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian	1.974.927.375	1.844.086.200	2.122.204.760	1.617.187.055	2.183.455.888	1.818.620.220	2.587.009.721	1.880.978.000	8.867.597.744	7.160.871.475
	- Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	-	1.188.800.000	-	601.500.000	-	1.350.200.000	-	500.000.000	-	3.640.500.000
22.	Sekretariat KIP/KPU Kota Langsa	822.387.187	269.506.910	-	-	-	-	-	-	822.387.187	269.506.910
	- Urusan Wajib	822.387.187	269.506.910	-	-	-	-	-	-	822.387.187	269.506.910
	- Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian	822.387.187	269.506.910	-	-	-	-	-	-	822.387.187	269.506.910
23.	Kecamatan Langsa Kota	1.492.207.204	575.444.375	1.625.638.351	555.247.625	1.642.284.924	526.906.446	2.088.178.330	798.325.000	6.848.308.809	2.455.923.446
	- Urusan Wajib	1.492.207.204	575.444.375	1.625.638.351	555.247.625	1.642.284.924	526.906.446	2.088.178.330	798.325.000	6.848.308.809	2.455.923.446

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	TAHUN								JUMLAH ALOKASI PAGU DANA INDIKATIF TAHUN 2013-2016	
		2013*		2014*		2015*		2016		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 3+5+7+9	12 = 4+6+8+10
	- Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian	1.492.207.204	575.444.375	1.625.638.351	555.247.625	1.642.284.924	526.906.446	2.088.178.330	798.325.000	6.848.308.809	2.455.923.446
24.	Kecamatan Langsa Barat	1.482.525.066	550.956.875	1.693.627.220	804.783.220	1.493.749.275	658.725.707	1.783.492.183	693.890.000	6.453.393.744	2.708.355.802
	- Urusan Wajib	1.482.525.066	550.956.875	1.693.627.220	804.783.220	1.493.749.275	658.725.707	1.783.492.183	693.890.000	6.453.393.744	2.708.355.802
	- Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian	1.482.525.066	550.956.875	1.693.627.220	804.783.220	1.493.749.275	658.725.707	1.783.492.183	693.890.000	6.453.393.744	2.708.355.802
25.	Kecamatan Langsa Timur	1.425.498.476	508.090.275	1.651.952.555	576.497.000	1.636.843.755	602.774.407	1.861.638.332	751.019.500	6.575.933.118	2.438.381.182
	- Urusan Wajib	1.425.498.476	508.090.275	1.651.952.555	576.497.000	1.636.843.755	602.774.407	1.861.638.332	751.019.500	6.575.933.118	2.438.381.182
	- Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian	1.425.498.476	508.090.275	1.651.952.555	576.497.000	1.636.843.755	602.774.407	1.861.638.332	751.019.500	6.575.933.118	2.438.381.182
26.	Kecamatan Langsa Lama	1.238.158.758	495.172.500	1.437.826.269	588.468.000	1.590.430.203	646.106.707	1.912.352.732	688.782.000	6.178.767.962	2.418.529.207
	- Urusan Wajib	1.238.158.758	495.172.500	1.437.826.269	588.468.000	1.590.430.203	646.106.707	1.912.352.732	688.782.000	6.178.767.962	2.418.529.207
	- Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian	1.238.158.758	495.172.500	1.437.826.269	588.468.000	1.590.430.203	646.106.707	1.912.352.732	688.782.000	6.178.767.962	2.418.529.207
27.	Kecamatan Langsa Baru	1.136.228.468	531.763.125	1.417.215.442	574.539.000	1.686.809.667	597.406.707	1.980.403.385	681.332.000	6.220.656.962	2.385.040.832
	- Urusan Wajib	1.136.228.468	531.763.125	1.417.215.442	574.539.000	1.686.809.667	597.406.707	1.980.403.385	681.332.000	6.220.656.962	2.385.040.832

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	TAHUN								JUMLAH ALOKASI PAGU DANA INDIKATIF TAHUN 2013-2016	
		2013*		2014*		2015*		2016		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 3+5+7+9	12 = 4+6+8+10
	- Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian	1.136.228.468	531.763.125	1.417.215.442	574.539.000	1.686.809.667	597.406.707	1.980.403.385	681.332.000	6.220.656.962	2.385.040.832
28.	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) Kota Langsa	853.961.909	837.646.840	1.153.886.627	557.219.000	1.115.985.312	636.485.000	1.085.916.762	694.808.953	4.209.750.610	2.726.159.793
	- Urusan Wajib	853.961.909	837.646.840	1.153.886.627	557.219.000	1.115.985.312	636.485.000	1.085.916.762	694.808.953	4.209.750.610	2.726.159.793
	- Bidang Penanaman Modal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian	853.961.909	837.646.840	1.153.886.627	557.219.000	1.115.985.312	636.485.000	1.085.916.762	694.808.953	4.209.750.610	2.726.159.793
29.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Langsa	8.185.877.172	3.503.499.830	12.814.526.405	3.856.986.790	7.865.330.416	3.369.664.147	7.747.905.541	4.540.076.732	36.613.639.534	15.270.227.499
	- Urusan Wajib	8.185.877.172	3.503.499.830	12.814.526.405	3.856.986.790	7.865.330.416	3.369.664.147	7.747.905.541	4.540.076.732	36.613.639.534	15.270.227.499
	- Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian	8.185.877.172	3.503.499.830	12.814.526.405	3.856.986.790	7.865.330.416	2.709.954.747	7.747.905.541	4.502.176.732	36.613.639.534	14.572.618.099
	- Bidang Komunikasi Dan Informatika	-	-	-	-	-	659.709.400	-	37.900.000	-	697.609.400
30.	Sekretariat Baitul Mal Kota Langsa	-	-	64.300.000	2.093.139.000	498.148.518	3.425.227.555	719.506.577	3.258.599.000	1.281.955.095	8.776.965.555
	- Urusan Wajib	-	-	64.300.000	2.093.139.000	498.148.518	3.425.227.555	719.506.577	3.258.599.000	1.281.955.095	8.776.965.555
	- Bidang Sosial	-	-	-	1.487.072.000	-	2.930.851.315	-	2.597.946.000	-	7.015.869.315

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	TAHUN								JUMLAH ALOKASI PAGU DANA INDIKATIF TAHUN 2013-2016	
		2013*		2014*		2015*		2016		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 3+5+7+9	12 = 4+6+8+10
	- Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian	-	-	64.300.000	606.067.000	498.148.518	494.376.240	719.506.577	660.653.000	1.281.955.095	1.761.096.240
31.	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Langsa	-	-	41.340.000	1.008.347.000	1.093.340.692	542.333.000	1.503.814.653	694.857.500	2.638.495.345	2.245.537.500
	- Urusan Wajib	-	-	41.340.000	1.008.347.000	1.093.340.692	542.333.000	1.503.814.653	694.857.500	2.638.495.345	2.245.537.500
	- Bidang Pendidikan	-	-	-	56.461.000	-	-	-	78.120.000	-	134.581.000
	- Bidang Kebudayaan	-	-	-	-	-	98.790.000	-	93.990.500	-	192.780.500
	- Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian	-	-	41.340.000	951.886.000	1.093.340.692	443.543.000	1.503.814.653	522.747.000	2.638.495.345	1.918.176.000
32.	Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa	1.479.800.916	1.073.899.425	1.812.988.038	3.544.014.065	2.008.614.871	3.350.574.600	2.418.199.741	2.977.228.000	7.719.603.566	10.945.716.090
	- Urusan Wajib	1.479.800.916	1.073.899.425	1.812.988.038	3.544.014.065	2.008.614.871	3.350.574.600	2.418.199.741	2.977.228.000	7.719.603.566	10.945.716.090
	- Bidang Pertanahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	1.479.800.916	1.073.899.425	1.812.988.038	3.544.014.065	2.008.614.871	3.350.574.600	2.418.199.741	2.977.228.000	7.719.603.566	10.945.716.090
33.	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	776.425.233	882.219.125	888.186.171	550.567.924	875.814.836	430.567.650	993.792.796	594.307.105	3.534.219.036	2.457.661.804
	- Urusan Wajib	776.425.233	882.219.125	888.186.171	550.567.924	875.814.836	430.567.650	993.792.796	594.307.105	3.534.219.036	2.457.661.804
	- Bidang Pendidikan	-	231.800.000	-	33.000.000	-	19.605.000	-	14.456.600	-	298.861.600
	- Bidang Kearsipan	-	27.000.000	-	37.850.000	-	22.308.000	-	20.692.500	-	107.850.500
	- Bidang Perpustakaan	776.425.233	623.419.125	888.186.171	479.717.924	875.814.836	388.654.650	993.792.796	559.158.005	3.534.219.036	2.050.949.704
34.	Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian Kota Langsa	4.716.036.287	10.042.855.178	4.989.050.644	18.474.101.642	5.190.862.263	16.780.144.976	5.806.389.385	21.713.503.604	20.702.338.579	67.010.605.400
	- Urusan Wajib	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Bidang Pertanahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	TAHUN								JUMLAH ALOKASI PAGU DANA INDIKATIF TAHUN 2013-2016	
		2013*		2014*		2015*		2016		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 3+5+7+9	12 = 4+6+8+10
	Urusan Pilihan	4.716.036.287	10.042.855.178	4.989.050.644	18.474.101.642	5.190.862.263	16.780.144.976	5.806.389.385	21.713.503.604	20.702.338.579	67.010.605.400
	- Bidang Pertanian	-	2.283.696.150	-	5.090.333.000	-	5.090.913.500	-	4.801.007.300	-	17.265.949.950
	- Bidang Kehutanan	-	1.874.268.000	-	319.300.000	-	1.542.328.000	-	9.377.859.529	-	13.113.755.529
	- Bidang Pariwisata	-	-	-	-	-	640.643.000	-	-	-	640.643.000
	- Bidang Kelautan Dan Perikanan	4.716.036.287	5.884.891.028	4.989.050.644	13.064.468.642	5.190.862.263	9.506.260.476	5.806.389.385	7.534.636.775	20.702.338.579	35.990.256.921
35.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Langsa	2.839.171.480	1.244.950.135	2.885.275.707	2.727.481.300	2.670.471.440	29.181.491.581	3.064.636.376	5.033.508.665	11.459.555.003	38.187.431.681
	- Urusan Wajib	-	431.355.000	-	-	-	509.093.000	-	22.500.000	-	962.948.000
	- Bidang Pertanahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Bidang Koperasi	-	291.855.000	-	-	-	509.093.000	-	22.500.000	-	823.448.000
	- Bidang Kebudayaan	-	139.500.000	-	-	-	-	-	-	-	139.500.000
	- Urusan Pilihan	2.839.171.480	813.595.135	2.885.275.707	2.727.481.300	2.670.471.440	28.672.398.581	3.064.636.376	5.011.008.665	11.459.555.003	37.224.483.681
	- Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral	-	41.420.000	-	31.330.000	-	710.373.000	-	420.355.000	-	1.203.478.000
	- Bidang Perdagangan	-	22.736.385	-	773.240.800	-	26.188.125.145	-	2.084.229.405	-	29.068.331.735
	- Bidang Industri	2.839.171.480	749.438.750	2.885.275.707	1.922.910.500	2.670.471.440	1.773.900.436	3.064.636.376	2.506.424.260	11.459.555.003	6.952.673.946
	JUMLAH	323.183.543.131	253.357.613.866	374.065.485.825	403.730.256.246	413.969.587.554	456.371.905.654	462.439.740.465	400.936.593.677	1.573.658.356.975	1.514.396.369.443
	TOTAL	576.541.156.997	777.795.742.071	870.341.493.209	863.376.334.142	3.088.054.726.418					

KETERANGAN :

* Setelah Perubahan

TABEL 8.4
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN KOTA LANGSA
TAHUN 2017

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN		SKPK PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6
01	Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar			<u>361.287.395.875</u>	
01 01	Bidang Pendidikan			<u>34.132.147.512</u>	
01 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kebutuhan Dan Operasional Unit Kerja Satuan Perangkat Daerah	100%	2.826.575.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
01 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Yang Representatif	100%	13.801.846.274	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
01 01 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Stimulan Bagi Peningkatan Kinerja Aparatur	100%	1.099.862.500	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
01 01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur	100%	70.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
01 01 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Cakupan Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini	57,95%	1.361.948.292	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
01 01 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Kelulusan (AL) SD/MI dan SMP/MTs	100%	12.238.257.906	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
01 01 18	Program Pendidikan Non Formal	Angka Melek Huruf	99,56%	427.516.750	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
01 01 19	Program Pendidikan Luar Biasa	Meningkatnya Pelayanan Pendidikan Luar Biasa	86%	1.550.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
01 01 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Pendidik Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D4	90,79%	167.774.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
01 01 21	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Meningkatnya Kerjasama Kelembagaan Bidang Pendidikan	95%	588.366.790	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
01 02	Bidang Kesehatan			<u>214.765.509.125</u>	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN		SKPK PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6
01 02 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kebutuhan Dan Operasional Unit Kerja Satuan Perangkat Daerah	100%	4.979.000.000	Dinas Kesehatan
01 02 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Yang Representatif	100%	2.500.000.000	Dinas Kesehatan
01 02 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Stimulan Bagi Peningkatan Kinerja Aparatur	100%	256.753.125	Dinas Kesehatan
01 02 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur	100%	70.000.000	Dinas Kesehatan
01 02 15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Ketersediaan Buffer Stock Obat	30%	1.166.000.000	Dinas Kesehatan
01 02 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Perbaikan Gizi Balita Dan Bumil KEK	300 Orang	1.911.000.000	Dinas Kesehatan
01 02 17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Pengawasan Jajanan Sekolah	5 Kecamatan	25.000.000	Dinas Kesehatan
01 02 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Pola Hidup Sehat	5 Kecamatan	100.000.000	Dinas Kesehatan
01 02 20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Pembinaan gizi masyarakat	5 Kecamatan	50.000.000	Dinas Kesehatan
01 02 21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Sadar Hidup Sehat	5 Kecamatan	200.000.000	Dinas Kesehatan
01 02 22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	5 Puskesmas	621.000.000	Dinas Kesehatan
01 02 23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Standarisasi Pelayanan Kesehatan	5 Puskesmas	345.000.000	Dinas Kesehatan
01 02 25	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya	5 Puskesmas; 8 Pustu; 52 Polindes	3.050.000.000	Dinas Kesehatan
01 02 26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	1 RSUD	3.196.433.750	Dinas Kesehatan
01 02 27	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata	Optimalisasi Pemanfaatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit	1 RSUD	3.196.433.750	Dinas Kesehatan
01 02 28	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya Kualitas Jaminan Kesehatan	5 Kecamatan	10.392.238.500	Dinas Kesehatan

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN		SKPK PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6
01 02 29	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Menurunnya Angka Kematian Bayi	5 Bayi	115.000.000	Dinas Kesehatan
01 02 30	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Meningkatnya Angka Harapan Hidup	68,88 Tahun	40.000.000	Dinas Kesehatan
01 02 33	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan	5 Puskesmas; 8 Pustu; 52 Polindes	90.000.000.000	Dinas Kesehatan
01 02 33	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan	1 RSUD	92.251.650.000	BLUD RSUD
01 02 34	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Balita	Menurunnya Angka Kematian Ibu Melahirkan	1 Orang	300.000.000	Dinas Kesehatan
01 03	Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			85.114.003.000	
01 03 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kebutuhan Dan Operasional Unit Kerja Satuan Perangkat Daerah	100%	1.769.250.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
01 03 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Yang Representatif	100%	9.225.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
01 03 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Stimulan Bagi Peningkatan Kinerja Aparatur	100%	80.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
01 03 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur	100%	30.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
01 03 15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Panjang Jalan Kota Dalam Kondisi Baik	89%	49.476.753.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
01 03 16	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong	Panjang Seluruh Drainase Primer	75%	7.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
01 03 17	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Pelaksanaan Pembangunan Talud/Turap/Bronjong	1 Unit	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
01 03 18	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase Panjang Jalan Kota Dalam Kondisi Baik	89%	1.350.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
01 03 19	Program Rehabilitasi Pemeliharaan Talud/ Bronjong	Persentase Talud/Bronjong Dalam Kondisi Baik	90%	150.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
01 03 23	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan	10 Unit	1.168.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
01 03 24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Banyaknya Pelanggan Air Bersih	12.796 Pelanggan	6.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN		SKPK PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6
01 03 25	Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku	Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Pengolahan Air Baku	1 Unit	750.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
01 03 26	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Meningkatnya Ketersediaan Cadangan Air Bagi Petani	50%	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
01 03 28	Program Pengendalian Banjir	Meningkatnya Kualitas DAS	3 Keg	1.045.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
01 03 29	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Jumlah dokumen pengembangan wilayah strategis	1 Dok	150.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
01 03 30	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Meningkatnya Infrastruktur Jalan Perdesaan	1.200 Meter	4.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
01 03 34	Program Perencanaan Tata Ruang	Ketersediaan RDTRK, RTRK dan RTBL	3 Dok	1.825.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
01 03 35	Program Pemanfaatan Ruang	Meningkatnya Pemanfaatan Ruang	5 Kecamatan	85.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
01 03 36	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Meningkatnya Kepatuhan Pemanfaatan Ruang	5 Kecamatan	110.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
01 04	Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman			11.837.430.000	
01 04 15	Program Pengembangan Perumahan	Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Kurang Mampu	115 Unit	11.562.430.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
01 04 16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Meningkatnya Lingkungan Permukiman Sehat	5 Kecamatan	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
01 04 17	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Pemberdayaan permukiman berbasis masyarakat	1 Kegiatan	75.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
01 05	Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat			9.064.234.500	
01 05 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kebutuhan Dan Operasional Unit Kerja Satuan Perangkat Daerah	100%	6.567.646.000	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah
01 05 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Yang Representatif	100%	461.954.000	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN		SKPK PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6
01 05 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Stimulan Bagi Peningkatan Kinerja Aparatur	100%	885.213.000	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah
01 05 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur	100%	23.400.000	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah
01 05 15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	500 Pelanggaran	738.021.500	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah
01 05 16	Program Pemeliharaan Kantrantibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Pengamanan Dan Penanganan Kasus Pelanggaran Qanun	36 Kali	200.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah
01 05 17	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Ketersediaan Masyarakat Peduli Ketertiban Dan Keamanan Lingkungan	5 Kecamatan	188.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah
01 06	Bidang Sosial			6.374.071.738	
01 06 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kebutuhan Dan Operasional Unit Kerja Satuan Perangkat Daerah	100%	1.037.500.000	Dinas Sosial
01 06 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Yang Representatif	100%	315.000.000	Dinas Sosial
01 06 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Stimulan Bagi Peningkatan Kinerja Aparatur	100%	34.185.938	Dinas Sosial
01 06 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur	100%	45.000.000	Dinas Sosial
01 06 15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Penyediaan Sarana Prasarana Pendukung Bagi Keluarga Kurang Mampu	5 Kecamatan	300.000.000	Dinas Sosial
01 06 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	PMKS Yang memperoleh Bantuan Sosial	41,83%	1.852.830.000	Dinas Sosial
01 06 17	Program Pembinaan Anak Terlantar	Penyediaan Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo Dan Panti Rehabilitasi	4 Unit	184.555.800	Dinas Sosial
01 06 18	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Jumlah Penyandang Cacat	221 Orang	250.000.000	Dinas Sosial
01 06 19	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Panti Asuhan	12 Bulan	1.870.000.000	Dinas Sosial

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN		SKPK PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6
01 06 20	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Meningkatnya Kualitas Hidup Eks Penyandang Penyakit Sosial	12 Bulan	100.000.000	Dinas Sosial
01 06 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Menurunnya Angka Kemiskinan	10,62%	85.000.000	Dinas Sosial
01 06 22	Program Perbaikan Perumahan Akibat Dampak Sosial	Menurunnya Angka Kemiskinan	10,62%	300.000.000	Dinas Sosial
02	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar			47.463.239.659	
02 01	Bidang Tenaga Kerja			555.375.695	
02 01 15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	50 Orang	150.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
02 01 16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Jumlah Pengangguran	5.135 Orang	160.502.610	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
02 01 17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Meningkatnya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	12 Bulan	244.873.085	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
02 02	Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak			1.977.760.500	
02 02 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kebutuhan Dan Operasional Unit Kerja Satuan Perangkat Daerah	100%	824.623.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
02 02 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Yang Representatif	100%	139.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN		SKPK PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6
02 02 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Stimulan Bagi Peningkatan Kinerja Aparatur	100%	36.037.500	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
02 02 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas.SDM. Aparatur	100%	45.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
02 02 15	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Sosialisasi dan Pelatihan Terhadap Anak Putus Sekolah	66 Desa	315.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
02 02 16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Pelaksanaan Forum Anak	53 Orang	150.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
02 02 17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Jumlah Kasus KDRT	5 KDRT	273.900.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
02 02 18	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender Dalam Pembangunan	Partisipasi Perempuan Didalam Lembaga Pemerintahan	63,38%	194.200.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
02 03	Bidang Pangan			468.216.150	
02 03 16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Produktifitas Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar	0,36%	468.216.150	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan Dan Perikanan

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN		SKPK PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6
02 04	Bidang Pertanahan			1.833.876.231	
02 04 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kebutuhan Dan Operasional Unit Kerja Satuan Perangkat Daerah	100%	782.462.000	Dinas Pertanahan
02 04 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Yang Representatif	100%	205.000.000	Dinas Pertanahan
02 04 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Stimulan Bagi Peningkatan Kinerja Aparatur	100%	80.000.000	Dinas Pertanahan
02 04 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur	100%	45.000.000	Dinas Pertanahan
02 04 15	Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah	Proses Dokumentasi Kepemilikan Tanah	12 Bulan	75.000.000	Dinas Pertanahan
02 04 16	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Sertifikasi Tanah Kepemilikan Pemerintah Daerah	3 Sertifikat	646.414.231	Dinas Pertanahan
02 05	Bidang Lingkungan Hidup			18.421.060.928	
02 05 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kebutuhan Dan Operasional Unit Kerja Satuan Perangkat Daerah	100%	11.778.501.500	Dinas Lingkungan Hidup
02 05 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Yang Representatif	100%	596.248.000	Dinas Lingkungan Hidup
02 05 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Stimulan Bagi Peningkatan Kinerja Aparatur	100%	60.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
02 05 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur	100%	45.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
02 05 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya Penanganan Persampahan	5 Kecamatan	2.595.807.000	Dinas Lingkungan Hidup
02 05 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	5 Kecamatan	1.255.700.000	Dinas Lingkungan Hidup
02 05 24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Meningkatnya Pengendalian Pengawasan RTH	12 Bulan	2.089.804.428	Dinas Lingkungan Hidup
02 06	Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil			1.444.364.000	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN		SKPK PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6
02 06 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kebutuhan Dan Operasional Unit Kerja Satuan Perangkat Daerah	100%	810.852.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
02 06 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Yang Representatif	100%	55.000.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
02 06 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Stimulan Bagi Peningkatan Kinerja Aparatur	100%	30.000.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
02 06 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur	100%	45.000.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
02 06 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Kepemilikan KTP	95,23%	503.512.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
02 07	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa			4.191.680.000	
02 07 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kebutuhan Dan Operasional Unit Kerja Satuan Perangkat Daerah	100%	755.883.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Gampong
02 07 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Yang Representatif	100%	2.458.623.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Gampong
02 07 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Stimulan Bagi Peningkatan Kinerja Aparatur	100%	13.148.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Gampong
02 07 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur	100%	45.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Gampong
02 07 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Meningkatnya Kemandirian Masyarakat Perdesaan	5 Kecamatan	365.370.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Gampong
02 07 16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Pembinaan Lembaga Masyarakat Pedesaan	66 Desa	108.856.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Gampong
02 07 17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	66 Desa	257.500.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Gampong
02 07 18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur Pemerintah Desa	66 Desa	187.300.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Gampong
02 08	Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana			1.844.118.000	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN		SKPK PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6
02 08 15	Program Keluarga Berencana	Cakupan Peserta KB Aktif	83%	1.419.118.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
02 08 16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Desiminasi Kesehatan Reproduksi Remaja	66. Desa..	150.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
02 08 17	Program Pelayanan Kontrasepsi	Penyelenggaraan Konsultasi pelayanan kontrasepsi	12 Bulan	75.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
02 08 18	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	Cakupan Peserta KB Aktif	83%	50.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
02 08 19	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling KRR	Pelayanan Konsultasi Kesehatan Reproduksi Remaja	12 Bulan	75.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
02 08 20	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Peningkatan kapasitas tenaga pendamping kelompok bina keluarga	1 Kali	75.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
02 09	Bidang Perhubungan			4.882.984.055	
02 09 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kebutuhan Dan Operasional Unit Kerja Satuan Perangkat Daerah	100%	2.370.657.750	Dinas Perhubungan

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN		SKPK PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6
02 09 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Yang Representatif	100%	791.352.100	Dinas Perhubungan
02 09 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Stimulan Bagi Peningkatan Kinerja Aparatur	100%	204.900.000	Dinas Perhubungan
02 09 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur	100%	45.000.000	Dinas Perhubungan
02 09 15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Cakupan Pelaksanaan Pelayanan Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	1 Pelabuhan Laut, 1 Terminal Bis	316.022.200	Dinas Perhubungan
02 09 16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Menurunnya Angka Kecelakaan Lalu Lintas	48 Laka	110.000.000	Dinas Perhubungan
02 09 17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Jumlah Kendaraan Yang Telah Diuji	1.080 Unit	62.800.000	Dinas Perhubungan
02 09 18	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Cakupan Pelaksanaan Pelayanan Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	1 Pelabuhan Laut, 1 Terminal Bis	15.830.550	Dinas Perhubungan
02 09 19	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Menurunnya Angka Kecelakaan Lalu Lintas	48 Laka	866.421.455	Dinas Perhubungan
02 09 20	Program Peningkatan Kelayakan pengoperasian kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Yang Telah Diuji	1.080 Unit	100.000.000	Dinas Perhubungan
02 10	Bidang Komunikasi Dan Informatika			1.116.603.100	
02 10 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kebutuhan Dan Operasional Unit Kerja Satuan Perangkat Daerah	100%	560.100.000	Dinas Komunikasi Dan Informatika
02 10 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Yang Representatif	100%	137.000.000	Dinas Komunikasi Dan Informatika
02 10 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Stimulan Bagi Peningkatan Kinerja Aparatur	100%	18.647.000	Dinas Komunikasi Dan Informatika
02 10 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur	100%	45.000.000	Dinas Komunikasi Dan Informatika
02 10 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Berbasis E-Government	12 Bulan	146.856.100	Dinas Komunikasi Dan Informatika
02 10 16	Program Pengkajian Dan Penelitian Bidang Informasi Dan Komunikasi	Perumusan Aplikasi Perangkat Lunak	12 Bulan	75.000.000	Dinas Komunikasi Dan Informatika

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN		SKPK PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6
02 10 17	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur Komunikasi dan Informasi	12 Bulan	54.000.000	Dinas Komunikasi Dan Informatika
02 10 18	Program kerjasama informasi dengan mas media	Informasi Berita, Iklan dan Parleментарia	12 Bulan	80.000.000	Dinas Komunikasi Dan Informatika
02 11	Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah			1.341.303.000	
02 11 15	Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah Yang Konduksif	Dukungan Pengembangan Usaha Kecil Menengah	30 Kelompok	620.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
02 11 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Rekomendasi Dukungan Usaha/Industri Kecil Menengah	4.000 Rekomendasi	50.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
02 11 17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Dukungan Industri Kecil Menengah	5 Kecamatan	450.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
02 11 18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	55,34 %	221.303.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
02 12	Bidang Penanaman Modal			1.177.513.000	
02 12 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kebutuhan Dan Operasional Unit Kerja Satuan Perangkat Daerah	100%	567.015.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
02 12 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Yang Representatif	100%	99.498.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
02 12 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Stimulan Bagi Peningkatan Kinerja Aparatur	100%	10.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN		SKPK PENANGGUNG JAWAB
				5	6	
02 12 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur	100%	45.000.000	Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal Dan
02 12 15	Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi	Meningkatnya Penerbitan SUP Dan TDUP	55 Izin	56.000.000	Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal Dan
02 12 16	Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi	Meningkatnya Sistem Informasi Investasi Daerah	12 Bulan	200.000.000	Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal Dan
02 12 17	Program Penyajian Potensi Sumber Daya, Sarana Dan Prasarana Daerah	Data dan Informasi Potensi Sumber Daya Daerah	1 Dok	100.000.000	Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal Dan
02 12 18	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Perizinan	Dukungan Pelaksanaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Perizinan Daerah	12 Bulan	100.000.000	Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal Dan
02 13 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kebutuhan Dan Operasional Unit Kerja Satuan Perangkat Daerah	100%	1.055.740.000		Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Partwisata
02 13 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Yang Representatif	100%	329.166.000		Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Partwisata
02 13 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Stimulan Bagi Peningkatan Kinerja Aparatur	100%	18.647.000		Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Partwisata
02 13 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur	100%	45.000.000		Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Partwisata
02 13 15	Program Pengembangan Dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Koordinasi Pembangunan Keperumudaan	12 Bulan	200.000.000		Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Partwisata
02 13 16	Program Peningkatan Peran Serta Keperumudaan	Diklat Dan Pemberdayaan Pemuda	200 Orang	607.000.000		Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Partwisata
02 13 17	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda	Upaya Peningkatan Pendapatan Pemuda	66 Desa	100.000.000		Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Partwisata
02 13 19	Program Pengembangan Kebijakan Dan Manajemen Olah Raga	Peningkatan Kualitas Manajemen Keolahragaan	12 Bulan	150.000.000		Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Partwisata
02 13 20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Pelaksanaan Pembinaan Cabang Olah Raga	32 Cabang	2.379.900.000		Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Partwisata
02 13	Bidang Keperumudaan Dan Olah Raga			5.680.253.000		

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN		SKPK PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6
02 13 21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga	13 Cabor	794.800.000	Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata
02 14	Bidang Statistik			200.000.000	
02 14 15	Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah	Pengelolaan dan Pengembangan Data dan Informasi Statistik Daerah	12 Bulan	200.000.000	Dinas Komunikasi Dan Informatika
02 15	Bidang Persandian			200.000.000	
02 15 15	Program penyelenggaraan komunikasi persandian	Dukungan Penyelenggaraan Komunikasi Persandian	12 Bulan	200.000.000	Dinas Komunikasi Dan Informatika
02 16	Bidang Kebudayaan			915.712.000	
02 16 15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Pelestarian Budaya Daerah	12 Bulan	150.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
02 16 16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Dukungan Pengelolaan Kebudayaan Daerah	1 Kali	237.500.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
02 16 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya	1 Kali	528.212.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
02 17	Bidang Perpustakaan			942.100.000	
02 17 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kebutuhan Dan Operasional Unit Kerja Satuan Perangkat Daerah	100%	560.100.000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
02 17 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Yang Representatif	100%	137.000.000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
02 17 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Stimulan Bagi Peningkatan Kinerja Aparatur	100%	15.000.000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
02 17 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur	100%	40.000.000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
02 17 15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahunan	16.721 Kunjungan	190.000.000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN		SKPK PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6
02 18	Bidang Kearsipan			270.320.000	
02 18 15	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Pengelolaan Arsip Secara Baku	2,56 %	83.320.000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
02 18 16	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Pengelolaan Arsip Secara Baku	2,56 %	75.000.000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
02 18 17	Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Pengelolaan Arsip Secara Baku	2,56 %	65.000.000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
02 18 18	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Pengelolaan Arsip Secara Baku	2,56 %	47.000.000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
03	Urusan Pemerintahan Pilihan			24.688.746.897	
03 01	Bidang Kelautan Dan Perikanan			8.629.462.650	
03 01 15	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Upaya Peningkatan Pendapatan Perekonomian Masyarakat Pesisir	12 Bulan	150.000.000	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan Dan Perikanan
03 01 19	Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat	Ketahanan Budaya Kelautan	12 Bulan	75.000.000	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan Dan Perikanan
03 01 20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB (ADHB)	4,02%	3.538.200.100	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan Dan Perikanan
03 01 21	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB (ADHB)	4,02%	3.819.637.550	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan Dan Perikanan
03 01 23	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB (ADHB)	4,02%	1.046.625.000	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan Dan Perikanan
03 02	Bidang Pariwisata			1.430.520.000	
03 02 15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Kontribusi Sektor Akomodasi Dan Makan Minum Terhadap PDRB (ADHB)	6,76%	230.520.000	Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata
03 02 16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Kontribusi Sektor Akomodasi Dan Makan Minum Terhadap PDRB (ADHB)	6,76%	700.000.000	Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN		SKPK PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6
03 02 17	Program Pengembangan Ekowisata Dan Jasa Lingkungan Di Kawasan-Kawasan Konservasi Laut Dan Hutan	Kontribusi Sektor Akomodasi Dan Makan Minum Terhadap PDRB (ADHB)	6,76%	500.000.000	Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata
03 03	Bidang Pertanian			10.026.262.747	
03 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kebutuhan Dan Operasional Unit Kerja Satuan Perangkat Daerah	100%	1.470.500.000	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan Dan Perikanan
03 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Yang Representatif	100%	1.574.269.200	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan Dan Perikanan
03 01 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Stimulan Bagi Peningkatan Kinerja Aparatur	100%	60.000.000	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan Dan Perikanan
03 01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur	100%	45.000.000	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan Dan Perikanan
03 03 15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani	104 Poin	220.000.000	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan Dan Perikanan
03 03 16	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	Promosi Hasil Pengolahan Pertanian dan Perkebunan	2 Kali	75.000.000	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan Dan Perikanan
03 03 17	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan	Meningkatnya Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	10 Unit	500.000.000	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan Dan Perikanan
03 03 18	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (ADHB)	5,21%	2.000.000.000	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan Dan Perikanan
03 03 19	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan	Temu Tekhnis Tenaga Penyuluh	24 Kali	107.493.047	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan Dan Perikanan
03 03 20	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit ternak	Penyediaan Sarana Medis Kesehatan Ternak	12 Bulan	434.897.100	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan Dan Perikanan
03 03 21	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (ADHB)	5,21%	2.006.103.400	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan Dan Perikanan
03 03 22	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (ADHB)	5,21%	233.000.000	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan Dan Perikanan

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN		SKPK PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6
03 03 23	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (ADHB)	5,21%	1.300.000.000	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan Dan Perikanan
03 04	Bidang Perdagangan			2.335.000.000	
03 04 15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Pengawasan Peredaran Barang Dan Jasa	12 Bulan	285.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
03 04 18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Penyelenggaraan Pameran Hasil UKM Dan IKM	3 Kali	1.700.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
03 04 19	Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan	Jumlah Kelompok Pedagang/Usaha Informal	90 Pedagang	350.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
03 07	Bidang Perindustrian			2.267.501.500	
03 07 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kebutuhan Dan Operasional Unit Kerja Satuan Perangkat Daerah	100%	932.250.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
03 07 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Yang Representatif	100%	272.800.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
03 07 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Stimulan Bagi Peningkatan Kinerja Aparatur	100%	30.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
03 01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur	100%	40.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN		SKPK PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6
03 07 16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah Industri Kecil Dan Menengah	60 IKM	607.451.500	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
03 07 18	Program Penataan Struktur Industri	Pertumbuhan Industri	50,96%	150.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
03 07 19	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Pertumbuhan Industri	50,96%	235.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
04	Urusan Pemerintahan Fungsi Pendukung			32.352.392.155	
04 01	Bidang Administrasi Pemerintahan			32.352.392.155	
04 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kebutuhan Dan Operasional Unit Kerja Satuan Perangkat Daerah	100%	5.314.988.700	Sekretariat DPRD
04 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kebutuhan Dan Operasional Unit Kerja Satuan Perangkat Daerah	100%	10.839.183.590	Sekretariat Daerah
04 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kebutuhan Dan Operasional Unit Kerja Satuan Perangkat Daerah	100%	560.100.000	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
04 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Yang Representatif	100%	331.375.000	Sekretariat DPRD
04 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Yang Representatif	100%	4.503.202.000	Sekretariat Daerah
04 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Yang Representatif	100%	137.000.000	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
04 01 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Stimulan Bagi Peningkatan Kinerja Aparatur	100%	525.000.000	Sekretariat DPRD
04 01 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Stimulan Bagi Peningkatan Kinerja Aparatur	100%	118.522.500	Sekretariat Daerah

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN		SKPK PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6
04 01 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Stimulan Bagi Peningkatan Kinerja Aparatur	100%	18.647.000	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
04 01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur	100%	50.000.000	Sekretariat DPRD
04 01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur	100%	75.000.000	Sekretariat Daerah
04 01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur	100%	40.000.000	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
04 01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	75.000.000	Sekretariat Daerah
04 01 15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Ran-Qanun yang dibahas	10 Ran-Qanun	2.266.593.000	Sekretariat DPRD
04 01 16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	452 Kali	5.410.053.800	Sekretariat Daerah
04 01 18	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kerjasama Daerah Dalam Pelayanan Publik	12 Bulan	286.467.500	Sekretariat Daerah
04 01 19	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pengesahan Judul Ran-Qanun	10 Judul	299.775.000	Sekretariat DPRD
04 01 19	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Penyusunan produk hukum daerah	858 Produk Hukum	901.484.065	Sekretariat Daerah
04 01 21	Program Sosialisasi, Penyuluhan dan Verifikasi Pemilu Pemerintah Daerah	Seleksi Anggota KIP dan Panwas PEMILU	10 Orang	400.000.000	Sekretariat DPRD
04 01 22	Program Pembinaan Dan Pengembangan Korps Profesi Aparatur Sipil Negara	Pengembangan Korps Profesi Aparatur Sipil Negara	12 Bulan	200.000.000	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
05	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang			31.333.089.165	
05 01	Bidang Perencanaan			4.927.800.000	
05 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kebutuhan Dan Operasional Unit Kerja Satuan Perangkat Daerah	100%	1.484.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
05 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Yang Representatif	100%	148.800.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN		SKPK PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6
05 01 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Stimulan Bagi Peningkatan Kinerja Aparatur	100%	25.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
05 01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur	100%	50.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
05 01 15	Program Pengembangan Data/Informasi	Pemenuhan Data Dan Informasi Kebutuhan Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dok	85.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
05 01 17	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Penyusunan perencanaan pengembangan perbatasan	1 Dok	75.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
05 01 18	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Jumlah Dokumen Pengembangan Wilayah Strategis	1 Dok	75.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
05 01 19	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Air Minum	33,90%	915.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
05 01 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan dengan Qanun/Perwal	Ada	1.630.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
05 01 22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Dokumen Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	1 Dok	215.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
05 01 23	Program Perencanaan Sosial Budaya	Dokumen Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang sosial dan budaya	1 Dok	225.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
05 02	Bidang Keuangan			10.246.584.371	
05 02 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kebutuhan Dan Operasional Unit Kerja Satuan Perangkat Daerah	100%	2.889.446.350	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
05 02 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Yang Representatif	100%	2.284.592.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
05 02 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Stimulan Bagi Peningkatan Kinerja Aparatur	100%	78.890.625	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN		SKPK PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6
05 02 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur	100%	75.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
05 02 15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Penilaian Keuangan Daerah	WTP	4.918.655.396	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
05 03	Bidang Kepegawaian			3.264.075.294	
05 03 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kebutuhan Dan Operasional Unit Kerja Satuan Perangkat Daerah	100%	1.029.576.110	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
05 03 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Yang Representatif	100%	92.258.236	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
05 03 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Stimulan Bagi Peningkatan Kinerja Aparatur	100%	92.500.000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
05 03 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur	100%	1.327.500.000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
05 03 15	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Meningkatnya Karir Aparatur	1.100 Orang	722.240.948	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
05 04	Bidang Pendidikan dan Pelatihan			2.237.500.000	
05 04 15	Program Pendidikan Kedinasan	Dukungan Tugas Belajar	40 Orang	975.000.000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
05 04 16	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Jumlah Peserta Diklat	380 Orang	1.262.500.000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
05 05	Bidang Penelitian Dan Pengembangan			653.000.000	
05 05 15	Program Kajian Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Fasilitasi Penelitian, Pengembangan, Inovasi dan Teknologi	12 Bulan	278.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN		SKPK PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6
05 05 16	Program Peningkatan Analisis Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Fasilitasi Penelitian, Pengembangan, Inovasi dan Tekhnologi	12 Bulan	375.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
05 06	Bidang Pengawasan			2.223.015.000	
05 06 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kebutuhan Dan Operasional Unit Kerja Satuan Perangkat Daerah	100%	1.033.000.000	Inspektorat
05 06 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Yang Representatif	100%	75.000.000	Inspektorat
05 06 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Stimulan Bagi Peningkatan Kinerja Aparatur	100%	48.165.000	Inspektorat
05 06 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur	100%	150.000.000	Inspektorat
05 06 15	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Meningkatnya Penilaian Keuangan Daerah	WTP	660.000.000	Inspektorat
05 06 16	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Meningkatnya Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Pengawasan	8 Kali	95.000.000	Inspektorat
05 06 17	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	12 Bulan	161.850.000	Inspektorat
05 07	Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri			2.504.564.500	
05 07 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kebutuhan Dan Operasional Unit Kerja Satuan Perangkat Daerah	100%	645.456.500	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (Kesbang Linmas)
05 07 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Yang Representatif	100%	246.598.000	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (Kesbang Linmas)
05 07 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Stimulan Bagi Peningkatan Kinerja Aparatur	100%	16.830.000	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (Kesbang Linmas)

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN		SKPK PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6
05 07 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur	100%	32.702.000	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (Kesbang Linmas)
05 07 15	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Forum Kerukunan Umat Beragama	12 Bulan	165.997.000	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (Kesbang Linmas)
05 07 16	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Penyelenggaraan Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	12 Bulan	773.577.000	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (Kesbang Linmas)
05 07 17	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Pembinaan Terhadap LSM, Ormas, Dan OKP	12 Bulan	623.404.000	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (Kesbang Linmas)
05 08	Bidang Penanggulangan Bencana			5.276.550.000	
05 08 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kebutuhan Dan Operasional Unit Kerja Satuan Perangkat Daerah	100%	3.839.375.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
05 08 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Yang Representatif	100%	611.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
05 08 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Stimulan Bagi Peningkatan Kinerja Aparatur	100%	120.175.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
05 08 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur	100%	250.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
05 08 15	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Cakupan Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana	70%	75.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
05 08 16	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	0,0037%	381.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
06	Urusan Pemerintahan Unsur Kewilayahan			4.308.879.125	
06 01	Bidang Administrasi Pemerintah Kecamatan			4.308.879.125	
06 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kebutuhan Dan Operasional Unit Kerja Satuan Perangkat Daerah	100%	742.500.000	Kecamatan Langsa Kota

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN		SKPK PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6
06 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kebutuhan Dan Operasional Unit Kerja Satuan Perangkat Daerah	100%	598.000.000	Kecamatan Langsa Barat
06 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kebutuhan Dan Operasional Unit Kerja Satuan Perangkat Daerah	100%	649.960.000	Kecamatan Langsa Timur
06 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kebutuhan Dan Operasional Unit Kerja Satuan Perangkat Daerah	100%	592.000.000	Kecamatan Langsa Lama
06 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kebutuhan Dan Operasional Unit Kerja Satuan Perangkat Daerah	100%	609.300.000	Kecamatan Langsa Baru
06 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Yang Representatif	100%	78.000.000	Kecamatan Langsa Kota
06 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Yang Representatif	100%	89.800.000	Kecamatan Langsa Barat
06 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Yang Representatif	100%	100.720.000	Kecamatan Langsa Timur
06 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Yang Representatif	100%	105.500.000	Kecamatan Langsa Lama
06 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Yang Representatif	100%	80.600.000	Kecamatan Langsa Baru
06 01 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Stimulan Bagi Peningkatan Kinerja Aparatur	100%	20.000.000	Kecamatan Langsa Kota
06 01 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Stimulan Bagi Peningkatan Kinerja Aparatur	100%	17.158.500	Kecamatan Langsa Barat
06 01 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Stimulan Bagi Peningkatan Kinerja Aparatur	100%	25.000.000	Kecamatan Langsa Timur
06 01 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Stimulan Bagi Peningkatan Kinerja Aparatur	100%	13.387.500	Kecamatan Langsa Lama
06 01 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Stimulan Bagi Peningkatan Kinerja Aparatur	100%	11.953.125	Kecamatan Langsa Baru
06 01 15	Program Pelaksanaan Unsur Kewilayahan Pemerintah Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	12 Bulan	75.000.000	Kecamatan Langsa Kota
06 01 15	Program Pelaksanaan Unsur Kewilayahan Pemerintah Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	12 Bulan	75.000.000	Kecamatan Langsa Barat

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN		SKPK PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6
06 01 15	Program Pelaksanaan Unsur Kewilayahan Pemerintah Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	12 Bulan	75.000.000	Kecamatan Langsa Timur
06 01 15	Program Pelaksanaan Unsur Kewilayahan Pemerintah Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	12 Bulan	75.000.000	Kecamatan Langsa Lama
06 01 15	Program Pelaksanaan Unsur Kewilayahan Pemerintah Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	12 Bulan	75.000.000	Kecamatan Langsa Baro
06 01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur	100%	40.000.000	Kecamatan Langsa Kota
06 01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur	100%	40.000.000	Kecamatan Langsa Barat
06 01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur	100%	40.000.000	Kecamatan Langsa Timur
06 01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur	100%	40.000.000	Kecamatan Langsa Lama
06 01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur	100%	40.000.000	Kecamatan Langsa Baro
07	Urusan Pemerintahan Unsur Keistimewaan Dan Kekhususan			14.828.578.143	
07 01	Bidang Penegakan Pelaksanaan Qanun Dan Syariat Islam			14.828.578.143	
07 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kebutuhan Dan Operasional Unit Kerja Satuan Perangkat Daerah	100%	1.358.235.000	Dinas Syariat Islam Dan Pendidikan Dayah
07 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kebutuhan Dan Operasional Unit Kerja Satuan Perangkat Daerah	100%	542.000.000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
07 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kebutuhan Dan Operasional Unit Kerja Satuan Perangkat Daerah	100%	409.917.530	Sekretariat Majelis Adat Aceh
07 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kebutuhan Dan Operasional Unit Kerja Satuan Perangkat Daerah	100%	332.561.548	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
07 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kebutuhan Dan Operasional Unit Kerja Satuan Perangkat Daerah	100%	657.218.250	Sekretariat Baitul Mal

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN		SKPK PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6
07 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Yang Representatif	100%	125.000.000	Dinas Syariat Islam Dan Pendidikan Dayah
07 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Yang Representatif	100%	81.400.000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
07 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Yang Representatif	100%	159.200.000	Sekretariat Majelis Adat Aceh
07 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Yang Representatif	100%	19.000.000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
07 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Yang Representatif	100%	15.876.000	Sekretariat Baitul Mal
07 01 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Stimulan Bagi Peningkatan Kinerja Aparatur	100%	89.000.000	Dinas Syariat Islam Dan Pendidikan Dayah
07 01 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Stimulan Bagi Peningkatan Kinerja Aparatur	100%	40.000.000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
07 01 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Stimulan Bagi Peningkatan Kinerja Aparatur	100%	30.000.000	Sekretariat Majelis Adat Aceh
07 01 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Stimulan Bagi Peningkatan Kinerja Aparatur	100%	25.000.000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
07 01 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Stimulan Bagi Peningkatan Kinerja Aparatur	100%	35.000.000	Sekretariat Baitul Mal
07 01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur	100%	100.000.000	Dinas Syariat Islam Dan Pendidikan Dayah
07 01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur	100%	75.000.000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
07 01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur	100%	37.250.000	Sekretariat Majelis Adat Aceh
07 01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur	100%	45.000.000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
07 01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur	100%	50.000.000	Sekretariat Baitul Mal
07 01 15	Program Penyediaan Sarana Dan Prasarana Ibadah	Meningkatnya Syiar Islam	80%	150.000.000	Dinas Syariat Islam Dan Pendidikan Dayah
07 01 16	Program Pengawasan, Pencegahan Dan Penertiban Pelaksanaan Syariat Islam	Meningkatnya Syiar Islam	80%	135.000.000	Dinas Syariat Islam Dan Pendidikan Dayah
07 01 17	Program Pembinaan Dan Pengembangan Syiar Islam	Meningkatnya Syiar Islam	80%	126.000.000	Dinas Syariat Islam Dan Pendidikan Dayah

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN		SKPK PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6
07 01 18	Program Pembinaan Dan Pengembangan Pendidikan Islami	Meningkatnya Syiar Islam	80%	85.000.000	Dinas Syariat Islam Dan Pendidikan Dayah
07 01 19	Program Peningkatan Peran Serta Majelis Pendidikan Daerah	Kemitraan Majelis Pendidikan Daerah	12 Bulan	140.000.000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
07 01 20	Program Peningkatan Peran Serta Ulama	Meningkatnya Syiar Islam	80%	302.750.000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
07 01 21	Program Peningkatan Peran Serta Baitul Mal	Kemitraan Baitul Mal	12 Bulan	9.405.869.315	Sekretariat Baitul Mal
07 01 22	Program Peningkatan Peran Serta Majelis Adat Aceh	Kemitraan Majelis Adat Aceh	12 Bulan	257.300.500	Sekretariat Majelis Adat Aceh
JUMLAH				516.262.321.019	

KETERANGAN :

- RSUD MERUPAKAN UNIT PELAKSANA TEKHNIS DINAS KESEHATAN

TABEL 8.5
PERKIRAAN PAGU DANA INDIKATIF MENURUT URUSAN DAN BIDANG PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2017

KODE	URAIAN	KERANGKA PENDANAAN		
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH
1	2	3	4	5
01	Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	199.525.794.224	361.287.395.875	560.813.190.099
01 01	Bidang Pendidikan	125.733.444.658	34.132.147.512	159.865.592.171
01 01 01	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	125.733.444.658	34.132.147.512	159.865.592.171
01 02	Bidang Kesehatan	63.550.001.371	214.765.509.125	278.315.510.496
01 02 01	Dinas Kesehatan	63.550.001.371	122.513.859.125	186.063.860.496
01 02 02	BLUD RSUD	-	92.251.650.000	92.251.650.000
01 03	Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	5.196.394.556	85.114.003.000	90.310.397.556
01 03 01	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	5.196.394.556	85.114.003.000	90.310.397.556
01 04	Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	-	11.837.430.000	11.837.430.000
01 04 01	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	-	11.837.430.000	11.837.430.000
01 05	Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	1.568.842.388	9.064.234.500	10.633.076.888
01 05 01	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah	1.568.842.388	9.064.234.500	10.633.076.888
01 06	Bidang Sosial	3.477.111.250	6.374.071.738	9.851.182.988
01 06 01	Dinas Sosial	3.477.111.250	6.374.071.738	9.851.182.988
02	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	26.774.342.604	47.463.239.659	74.237.582.263
02 01	Bidang Tenaga Kerja	-	555.375.695	555.375.695
02 01 01	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	555.375.695	555.375.695
02 02	Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	2.858.168.594	1.977.760.500	4.835.929.094
02 02 01	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	2.858.168.594	1.977.760.500	4.835.929.094

KODE	URAIAN	KERANGKA PENDANAAN		
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH
1	2	3	4	5
02 03	Bidang Pangan		468.216.150	468.216.150
02 03 01	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan Dan Perikanan		468.216.150	468.216.150
02 04	Bidang Pertanian	1.886.240.727	1.833.876.231	3.720.116.958
02 04 01	Dinas Pertanian	1.886.240.727	1.833.876.231	3.720.116.958
02 05	Bidang Lingkungan Hidup	6.667.973.165	18.421.060.928	25.089.034.093
02 05 01	Dinas Lingkungan Hidup	6.667.973.165	18.421.060.928	25.089.034.093
02 06	Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2.972.852.577	1.444.364.000	4.417.216.577
02 06 01	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2.972.852.577	1.444.364.000	4.417.216.577
02 07	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	2.442.381.738	4.191.680.000	6.634.061.738
02 07 01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Gampong	2.442.381.738	4.191.680.000	6.634.061.738
02 08	Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana		1.844.118.000	1.844.118.000
02 08 01	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana		1.844.118.000	1.844.118.000
02 09	Bidang Perhubungan	3.156.479.757	4.882.984.055	8.039.463.812
02 09 01	Dinas Perhubungan	3.156.479.757	4.882.984.055	8.039.463.812
02 10	Bidang Komunikasi Dan Informatika	1.973.750.727	1.116.603.100	3.090.353.827
02 10 01	Dinas Komunikasi Dan Informatika	1.973.750.727	1.116.603.100	3.090.353.827
02 11	Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah		1.341.303.000	1.341.303.000
02 11 01	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah		1.341.303.000	1.341.303.000
02 12	Bidang Penanaman Modal	1.096.775.930	1.177.513.000	2.274.288.930
02 12 01	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.096.775.930	1.177.513.000	2.274.288.930
02 13	Bidang Kepemudaan Dan Olah Raga	2.715.988.665	5.680.253.000	8.396.241.665

KODE	URAIAN	KERANGKA PENDANAAN			JUMLAH
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG		
1	2	3	4	5	
02 13 01	Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata	2.715.988.665	5.680.253.000	8.396.241.665	
02 14	Bidang Statistik	-	200.000.000	200.000.000	
02 14 01	Dinas Komunikasi Dan Informatika	-	200.000.000	200.000.000	
02 15	Bidang Persandian	-	200.000.000	200.000.000	
02 15 01	Dinas Komunikasi Dan Informatika	-	200.000.000	200.000.000	
02 16	Bidang Kebudayaan	-	915.712.000	915.712.000	
02 16 01	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	-	915.712.000	915.712.000	
02 17	Bidang Perpustakaan	1.003.730.724	942.100.000	1.945.830.724	
02 17 01	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	1.003.730.724	942.100.000	1.945.830.724	
02 18	Bidang Kearsipan	-	270.320.000	270.320.000	
02 18 01	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	-	270.320.000	270.320.000	
03	Urusan Pemerintahan Pilihan	8.959.736.019	24.688.746.897	33.648.482.916	
03 01	Bidang Kelautan Dan Perikanan	-	8.629.462.650	8.629.462.650	
03 01 01	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan Dan Perikanan	-	8.629.462.650	8.629.462.650	
03 02	Bidang Pariwisata	-	1.430.520.000	1.430.520.000	
03 02 01	Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata	-	1.430.520.000	1.430.520.000	
03 03	Bidang Pertanian	5.864.453.279	10.026.262.747	15.890.716.026	
03 03 01	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan Dan Perikanan	5.864.453.279	10.026.262.747	15.890.716.026	
03 04	Bidang Perdagangan	-	2.335.000.000	2.335.000.000	
03 04 01	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	-	2.335.000.000	2.335.000.000	
03 07	Bidang Perindustrian	3.095.282.740	2.267.501.500	5.362.784.240	
03 07 01	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	3.095.282.740	2.267.501.500	5.362.784.240	

KODE	URAIAN	KERANGKA PENDANAAN			JUMLAH
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG		
1	2	3	4	5	
04	Urusan Pemerintahan Fungsi Pendukung	22.466.625.249	32.352.392.155	54.819.017.404	
04 01	Bidang Administrasi Pemerintahan	22.466.625.249	32.352.392.155	54.819.017.404	
04 01 01	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.683.981.260	-	4.683.981.260	
04 01 02	Walikota dan Wakil Walikota	606.319.554	-	606.319.554	
04 01 03	Sekretariat DPRD	2.871.708.623	9.187.731.700	12.059.440.323	
04 01 04	Sekretariat Daerah	13.152.307.906	22.208.913.455	35.361.221.361	
04 01 05	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI	1.152.307.906	955.747.000	2.108.054.906	
05	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	113.427.460.375	31.333.089.165	144.760.549.540	
05 01	Bidang Perencanaan	3.399.403.655	4.927.800.000	8.327.203.655	
05 01 01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.399.403.655	4.927.800.000	8.327.203.655	
05 02	Bidang Keuangan	93.731.191.006	10.246.584.371	103.977.775.377	
05 02 01	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	93.731.191.006	10.246.584.371	103.977.775.377	
05 03	Bidang Kepegawaian	7.825.384.596	3.264.075.294	11.089.459.890	
05 03 01	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.825.384.596	3.264.075.294	11.089.459.890	
05 04	Bidang Pendidikan dan Pelatihan	-	2.237.500.000	2.237.500.000	
05 04 01	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	2.237.500.000	2.237.500.000	
05 05	Bidang Penelitian Dan Pengembangan	-	653.000.000	653.000.000	
05 05 01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	653.000.000	653.000.000	
05 06	Bidang Pengawasann	4.014.868.434	2.223.015.000	6.237.883.434	
05 06 01	Inspektorat	4.014.868.434	2.223.015.000	6.237.883.434	
05 07	Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri	2.361.104.377	2.504.564.500	4.865.668.877	
05 07 01	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (Kesbang Linmas)	2.361.104.377	2.504.564.500	4.865.668.877	
05 08	Bidang Penanggulangan Bencana	2.095.508.307	5.276.550.000	7.372.058.307	
05 08 01	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.095.508.307	5.276.550.000	7.372.058.307	

KODE	URAIAN	KERANGKA PENDANAAN		
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH
1	2	3	4	5
06	Urusan Pemerintahan Unsur Kewilayahan	9.722.325.612	4.308.879.125	14.031.204.737
06 01	Bidang Administrasi Pemerintah Kecamatan	9.722.325.612	4.308.879.125	14.031.204.737
06 01 01	Kecamatan Langsa Kota	2.109.060.113	955.500.000	3.064.560.113
06 01 02	Kecamatan Langsa Barat	1.801.327.105	819.958.500	2.621.285.605
06 01 03	Kecamatan Langsa Timur	1.880.254.715	890.680.000	2.770.934.715
06 01 04	Kecamatan Langsa Lama	1.931.476.259	825.887.500	2.757.363.759
06 01 05	Kecamatan Langsa Baru	2.000.207.419	816.853.125	2.817.060.544
07	Urusan Pemerintahan Unsur Keistimewaan Dan Kekhususan	5.962.831.942	14.828.578.143	20.791.410.085
07 01	Bidang Penegakan Pelaksanaan Qanun Dan Syariat Islam	5.962.831.942	14.828.578.143	20.791.410.085
07 01 01	Dinas Syariat Islam Dan Pendidikan Dayah	2.612.879.818	2.168.235.000	4.781.114.818
07 01 02	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	1.518.852.800	1.041.150.000	2.560.002.800
07 01 03	Sekretariat Majelis Adat Aceh	502.556.872	893.668.030	1.396.224.902
07 01 04	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	601.840.810	561.561.548	1.163.402.358
07 01 05	Sekretariat Baitul Mal	726.701.643	10.163.963.565	10.890.665.208
JUMLAH		386.839.116.024	516.262.321.019	903.101.437.043

KETERANGAN :

- RSUD MERUPAKAN UNIT PELAKSANA TEKHNIS DINAS KESEHATAN

TABEL 8.6
PERKIRAAN PAGU DANA INDIKATIF MENURUT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2017

KODE	URAIAN	KERANGKA PENDANAAN		
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH
1	2	3	4	5
01	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	125.733.444.658	35.047.859.512	160.781.304.171
01 01	Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	125.733.444.658	35.047.859.512	160.781.304.171
01 01 01	Bidang Pendidikan	125.733.444.658	34.132.147.512	159.865.592.171
01 01 02	Bidang Kebudayaan	-	915.712.000	915.712.000
02	Dinas Kesehatan	63.550.001.371	122.513.859.125	186.063.860.496
02 01	Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	63.550.001.371	122.513.859.125	186.063.860.496
02 01 01	Bidang Kesehatan	63.550.001.371	122.513.859.125	186.063.860.496
03	BLUD RSUD	-	92.251.650.000	92.251.650.000
03 01	Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	-	92.251.650.000	92.251.650.000
03 01 01	Bidang Kesehatan	-	92.251.650.000	92.251.650.000
04	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	5.196.394.556	96.951.433.000	102.147.827.556
04 01	Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	5.196.394.556	96.951.433.000	102.147.827.556
04 01 01	Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	5.196.394.556	85.114.003.000	90.310.397.556
04 01 01	Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	-	11.837.430.000	11.837.430.000
05	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah	1.568.842.388	9.064.234.500	10.633.076.888

KODE	URAIAN	KERANGKA PENDANAAN		
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH
1	2	3	4	5
05 01	Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	1.568.842.388	9.064.234.500	10.633.076.888
05 01 01	Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	1.568.842.388	9.064.234.500	10.633.076.888
06	Dinas Sosial	3.477.111.250	6.374.071.738	9.851.182.988
06 01	Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	3.477.111.250	6.374.071.738	9.851.182.988
06 01 01	Bidang Sosial	3.477.111.250	6.374.071.738	9.851.182.988
07	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.096.775.930	1.732.888.695	2.829.664.625
07 01	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	1.096.775.930	1.732.888.695	2.829.664.625
07 01 01	Bidang Tenaga Kerja	-	555.375.695	555.375.695
07 01 02	Bidang Penanaman Modal	1.096.775.930	1.177.513.000	2.274.288.930
08	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	2.858.168.594	3.821.878.500	6.680.047.094
08 01	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2.858.168.594	3.821.878.500	6.680.047.094
08 01 01	Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	2.858.168.594	1.977.760.500	4.835.929.094
08 01 02	Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	-	1.844.118.000	1.844.118.000
09	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan Dan Perikanan	5.864.453.279	19.123.941.547	24.988.394.826
09 01	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	-	468.216.150	468.216.150
09 01 01	Bidang Pangan	-	468.216.150	468.216.150
09 02	Urusan Pemerintahan Pilihan	5.864.453.279	18.655.725.397	24.520.178.676
09 02 01	Bidang Kelautan Dan Perikanan	-	8.629.462.650	8.629.462.650
09 02 02	Bidang Pertanian	5.864.453.279	10.026.262.747	15.890.716.026

KODE	URAIAN	KERANGKA PENDANAAN		
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH
1	2	3	4	5
10	Dinas Pertanahan	1.886.240.727	1.833.876.231	3.720.116.958
10 01	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	1.886.240.727	1.833.876.231	3.720.116.958
10 01 01	Bidang Pertanahan	1.886.240.727	1.833.876.231	3.720.116.958
11	Dinas Lingkungan Hidup	6.667.973.165	18.421.060.928	25.089.034.093
11 01	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	6.667.973.165	18.421.060.928	25.089.034.093
11 01 01	Bidang Lingkungan Hidup	6.667.973.165	18.421.060.928	25.089.034.093
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2.972.852.577	1.444.364.000	4.417.216.577
12 01	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2.972.852.577	1.444.364.000	4.417.216.577
12 01 01	Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2.972.852.577	1.444.364.000	4.417.216.577
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Gampong	2.442.381.738	4.191.680.000	6.634.061.738
13 01	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2.442.381.738	4.191.680.000	6.634.061.738
13 01 01	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	2.442.381.738	4.191.680.000	6.634.061.738
14	Dinas Perhubungan	3.156.479.757	4.882.984.055	8.039.463.812
14 01	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	3.156.479.757	4.882.984.055	8.039.463.812
14 01 01	Bidang Perhubungan	3.156.479.757	4.882.984.055	8.039.463.812
15	Dinas Komunikasi Dan Informatika	1.973.750.727	1.516.603.100	3.490.353.827
15 01	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	1.973.750.727	1.516.603.100	3.490.353.827
15 01 01	Bidang Komunikasi Dan Informatika	1.973.750.727	1.116.603.100	3.090.353.827
15 01 02	Bidang Statistik	-	200.000.000	200.000.000
15 01 03	Bidang Persandian	-	200.000.000	200.000.000
16	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	3.095.282.740	5.943.804.500	9.039.087.240
16 01	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	-	1.341.303.000	1.341.303.000
16 01 01	Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	-	1.341.303.000	1.341.303.000
16 02	Urusan Pemerintahan Pilihan	3.095.282.740	4.602.501.500	7.697.784.240

KODE	URAIAN	KERANGKA PENDANAAN			JUMLAH
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG		
1	2	3	4	5	
16 02 01	Bidang Perdagangan	-	2.335.000.000	2.335.000.000	
16 02 02	Bidang Perindustrian	3.095.282.740	2.267.501.500	5.362.784.240	
17	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	1.003.730.724	1.212.420.000	2.216.150.724	
17 01	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	1.003.730.724	1.212.420.000	2.216.150.724	
17 01 01	Bidang Perpustakaan	1.003.730.724	942.100.000	1.945.830.724	
17 01 02	Bidang Kearsipan	-	270.320.000	270.320.000	
18	Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata	2.715.988.665	7.110.773.000	9.826.761.665	
18 01	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2.715.988.665	5.680.253.000	8.396.241.665	
18 01 01	Bidang Kepemudaan Dan Olah Raga	2.715.988.665	5.680.253.000	8.396.241.665	
18 02	Urusan Pemerintahan Pilihan	-	1.430.520.000	1.430.520.000	
18 02 01	Bidang Pariwisata	-	1.430.520.000	1.430.520.000	
19	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.683.981.260	-	4.683.981.260	
19 01	Urusan Pemerintahan Fungsi Pendukung	4.683.981.260	-	4.683.981.260	
19 01 01	Bidang Administrasi Pemerintahan	4.683.981.260	-	4.683.981.260	
20	Walikota dan Wakil Walikota	606.319.554	-	606.319.554	
20 01	Urusan Pemerintahan Fungsi Pendukung	606.319.554	-	606.319.554	
20 01 01	Bidang Administrasi Pemerintahan	606.319.554	-	606.319.554	
21	Sekretariat DPRD	2.871.708.623	9.187.731.700	12.059.440.323	
21 01	Urusan Pemerintahan Fungsi Pendukung	2.871.708.623	9.187.731.700	12.059.440.323	
21 01 01	Bidang Administrasi Pemerintahan	2.871.708.623	9.187.731.700	12.059.440.323	
22	Sekretariat Daerah	13.152.307.906	22.208.913.455	35.361.221.361	
22 01	Urusan Pemerintahan Fungsi Pendukung	13.152.307.906	22.208.913.455	35.361.221.361	
22 01 01	Bidang Administrasi Pemerintahan	13.152.307.906	22.208.913.455	35.361.221.361	
23	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI	1.152.307.906	955.747.000	2.108.054.906	

KODE	URAIAN	KERANGKA PENDANAAN			JUMLAH
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG		
		3	4	5	
1	2				5
23 01	Urusan Pemerintahan Fungsi Pendukung	1.152.307.906	955.747.000	2.108.054.906	
23 01 01	Bidang Administrasi Pemerintahan	1.152.307.906	955.747.000	2.108.054.906	
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.399.403.655	5.580.800.000	8.980.203.655	
24 01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	3.399.403.655	5.580.800.000	8.980.203.655	
24 01 01	Bidang Perencanaan	3.399.403.655	4.927.800.000	8.327.203.655	
24 01 02	Bidang Penelitian Dan Pengembangan	-	653.000.000	653.000.000	
25	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	93.731.191.006	10.246.584.371	103.977.775.377	
25 01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	93.731.191.006	10.246.584.371	103.977.775.377	
25 01 01	Bidang Keuangan	93.731.191.006	10.246.584.371	103.977.775.377	
26	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.825.384.596	5.501.575.294	13.326.959.890	
26 01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	7.825.384.596	5.501.575.294	13.326.959.890	
26 01 01	Bidang Kepegawaian	7.825.384.596	3.264.075.294	11.089.459.890	
26 01 01	Bidang Pendidikan dan Pelatihan	-	2.237.500.000	2.237.500.000	
27	Inspektorat	4.014.868.434	2.223.015.000	6.237.883.434	
27 01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	4.014.868.434	2.223.015.000	6.237.883.434	
27 01 01	Bidang Pengawasan	4.014.868.434	2.223.015.000	6.237.883.434	
28	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (Keshang Linmas)	2.361.104.377	2.504.564.500	4.865.668.877	
28 01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	2.361.104.377	2.504.564.500	4.865.668.877	
28 01 01	Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri	2.361.104.377	2.504.564.500	4.865.668.877	
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.095.508.307	5.276.550.000	7.372.058.307	
29 01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	2.095.508.307	5.276.550.000	7.372.058.307	
29 01 01	Bidang Penanggulangan Bencana	2.095.508.307	5.276.550.000	7.372.058.307	
30	Kecamatan Langsa Kota	2.109.060.113	955.500.000	3.064.560.113	
30 01	Urusan Pemerintahan Unsur Kewilayahan	2.109.060.113	955.500.000	3.064.560.113	
30 01 01	Bidang Administrasi Pemerintahan Kecamatan	2.109.060.113	955.500.000	3.064.560.113	

KODE	URAIAN	KERANGKA PENDANAAN		
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH
1	2	3	4	5
31	Kecamatan Langsa Barat	1.801.327.105	819.958.500	2.621.285.605
31 01	Urusan Pemerintahan Unsur Kewilayahan	1.801.327.105	819.958.500	2.621.285.605
31 01 01	Bidang Administrasi Pemerintah Kecamatan	1.801.327.105	819.958.500	2.621.285.605
32	Kecamatan Langsa Timur	1.880.254.715	890.680.000	2.770.934.715
32 01	Urusan Pemerintahan Unsur Kewilayahan	1.880.254.715	890.680.000	2.770.934.715
32 01 01	Bidang Administrasi Pemerintah Kecamatan	1.880.254.715	890.680.000	2.770.934.715
33	Kecamatan Langsa Lama	1.931.476.259	825.887.500	2.757.363.759
33 01	Urusan Pemerintahan Unsur Kewilayahan	1.931.476.259	825.887.500	2.757.363.759
33 01 01	Bidang Administrasi Pemerintah Kecamatan	1.931.476.259	825.887.500	2.757.363.759
34	Kecamatan Langsa Baru	2.000.207.419	816.853.125	2.817.060.544
34 01	Urusan Pemerintahan Unsur Kewilayahan	2.000.207.419	816.853.125	2.817.060.544
34 01 01	Bidang Administrasi Pemerintah Kecamatan	2.000.207.419	816.853.125	2.817.060.544
35	Dinas Syarat Islam Dan Pendidikan Dayah	2.612.879.818	2.168.235.000	4.781.114.818
35 01	Urusan Pemerintahan Unsur Keistimewaan Dan Kekhususan	2.612.879.818	2.168.235.000	4.781.114.818
35 01 01	Bidang Penegakan Pelaksanaan Qanun Dan Syarat Islam	2.612.879.818	2.168.235.000	4.781.114.818
36	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	1.518.852.800	1.041.150.000	2.560.002.800
36 01	Urusan Pemerintahan Unsur Keistimewaan Dan Kekhususan	1.518.852.800	1.041.150.000	2.560.002.800
36 01 01	Bidang Penegakan Pelaksanaan Qanun Dan Syarat Islam	1.518.852.800	1.041.150.000	2.560.002.800
37	Sekretariat Majelis Adat Aceh	502.556.872	893.668.030	1.396.224.902
37 01	Urusan Pemerintahan Unsur Keistimewaan Dan Kekhususan	502.556.872	893.668.030	1.396.224.902
37 01 01	Bidang Penegakan Pelaksanaan Qanun Dan Syarat Islam	502.556.872	893.668.030	1.396.224.902
38	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	601.840.810	561.561.548	1.163.402.358
38 01	Urusan Pemerintahan Unsur Keistimewaan Dan Kekhususan	601.840.810	561.561.548	1.163.402.358
38 01 01	Bidang Penegakan Pelaksanaan Qanun Dan Syarat Islam	601.840.810	561.561.548	1.163.402.358

KODE	URAIAN	KERANGKA PENDANAAN		
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH
1	2	3	4	5
39	Sekretariat Baitul Mal	726.701.643	10.163.963.565	10.890.665.208
39 01	Urusan Pemerintahan Unsur Keistimewaan Dan Kekhususan	726.701.643	10.163.963.565	10.890.665.208
39 01 01	Bidang Penegakan Pelaksanaan Qanun Dan Syariat Islam	726.701.643	10.163.963.565	10.890.665.208
JUMLAH		386.839.116.024	516.262.321.019	903.101.437.043

KETERANGAN :

- RSUD MERUPAKAN UNIT PELAKSANA TEKHNIS DINAS KESEHATAN

BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Pengukuran kinerja merupakan proses membandingkan kinerja dengan ukuran berupa indikator kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target yang direncanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengukuran kinerja dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penetapan kinerja dalam dokumen perencanaan. Hasil pengukuran kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja disajikan dalam pelaporan kinerja.

Penetapan indikator kinerja kota pada dasarnya bertujuan untuk memberi gambaran lengkap tentang tingkat pencapaian hasil penyelenggaraan pemerintahan dalam hubungannya dengan hasil pembangunan kota pada setiap akhir periode perencanaan pembangunan kota. Penetapan indikator kinerja tersebut sangat penting agar manfaat (*outcome*) dari suatu program/kegiatan pembangunan dapat diukur tingkat pencapaian hasil dan manfaatnya. Tingkat capaian target dapat dipantau setiap saat, di samping permasalahan dan kendala yang dihadapi dapat dengan mudah diatasi.

Berdasarkan Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Daerah, yang nantinya akan diukur pada setiap akhir tahun anggaran. Penetapan indikator-indikator tersebut tidak terlepas dengan isu-isu strategis, strategi dan kebijakan yang ditempuh sejak awal dalam menindaklanjuti penanganan isu-isu strategis yang dihadapi.

Sejalan dengan itu, penetapan indikator kinerja daerah juga turut memperhatikan isu-isu nasional dan provinsi, sekaligus memperhatikan keadaan dan kondisi di masa depan. Untuk menetapkan indikator kinerja daerah dalam lima tahun ke depan, juga mengacu kepada capaian kinerja akhir perencanaan pembangunan masa lalu, atau kinerja masa lalu, sebagai kondisi awal RPJM ke depan. Dengan cara ini tentu akan memudahkan dalam menilai capaian kinerja setiap tahun atau sampai akhir RPJM, karena adanya batas titik awal pelaksanaan

program/kegiatan pembangunan. Dengan ini pula tingkat capaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota dengan mudah dapat di ukur.

Tabel 9.1
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja
Fenyelenggaraan Urusan Pemerintahan

BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	2017
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
Pertumbuhan PDRB (ADHK)	%	4,75	4,57	4,43	4,62	4,76	4,87
PDRB Per Kapita (ADHK)	Juta	19,30	20,46	22,00	23,50	25,00	26,50
Persentase penduduk miskin	%	13,93	12,62	12,12	11,62	11,12	10,62
Fokus Kesejahteraan Masyarakat							
Pendidikan							
Angka Melek Huruf	%	99,31	99,36	99,41	99,46	99,51	99,56
Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,43	10,47	10,48	10,82	11,07	11,51
Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A	%	122	124,2	126,2	128,2	130,2	132,2
Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B	%	110	112,2	114,2	116,2	118,2	120,20
Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Paket C	%	101	103,2	105,2	107,2	109,2	111,2
Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A	%	98,2	100	100	100	100	100
Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B	%	85	100	100	100	100	100
Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA/Paket C	%	77,4	100	100	100	100	100

BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kesehatan							
Angka Kematian Bayi	/1000 LH	4	11	14	10	7	5
Angka Kelangsungan Hidup Bayi	/1000 LH	3.098	3.122	3.387	3.457	3.527	3.597
Angka Harapan Hidup	Tahun	68,75	68,78	68,79	68,83	68,85	68,88
Persentase Balita Gizi Buruk	%	0,032	0,043	0,017	0,010	0,008	0
Ketenagakerjaan							
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	58,85	56,51	57,94	58,63	59,12	59,76
Fokus Seni Budaya dan Olahraga							
Kebudayaan							
Jumlah Grup Kesenian	Sanggar	71	84	84	85	86	87
Jumlah Gedung Kesenian	Unit	3	3	3	3	3	3
Kepemudaan dan Olah Raga							
Jumlah Klub Olahraga	Klub	32	32	32	33	34	35
Jumlah Gedung Olahraga	Unit	1	1	1	1	1	1
ASPEK PELAYANAN UMUM							
Fokus Layanan Urusan							
Wajib							
Pendidikan							
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI	%	98,66	98,88	98,96	99,04	99,19	99,25
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs	%	94,68	96,11	96,33	96,52	96,64	96,81
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	%	78,07	75,51	75,67	75,72	75,78	76,31
Angka Putus Sekolah SD/MI	%	0,13	0,11	0,1	0,05	0	0
Angka Putus Sekolah SMP/MTs	%	0,03	0,3	0,72	0,5	0	0
Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA	%	0,19	0,16	0,1	0,5	0,05	0
Angka Kelulusan SD/MI	%	99,09	100	100	100	100	100
Angka Kelulusan SMP/MTs	%	86,17	99,7	100	100	100	100
Angka Kelulusan SMA/SMK/MA	%	98,4	99,58	99,75	99,75	99,75	99,75
Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	%	67,39	110,18	100	100	100	100
Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	83,87	99,63	99,74	99,76	99,78	99,8

BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rasio Ketersediaan Sekolah SD/MI	Rasio (per 10.000)	1:37	1:36	1:36	1:36	1:36	1:36
Rasio Ketersediaan Sekolah SMP/MTs	Rasio (per 10.000)	1:27	1:26	1:26	1:26	1:26	1:26
Rasio Ketersediaan Sekolah SMA/SMK/MA	Rasio (per 10.000)	1:24	1:22	1:22	1:22	1:22	1:22
Rasio Guru/Murid SD/MI	Rasio (per 10.000)	1:704	1:717	1:720	1:725	1:730	1:735
Rasio Guru/Murid SMP/MTs	Rasio (per 10.000)	1:857	1:821	1:831	1:836	1:841	1:846
Rasio Guru/Murid SMA/SMK/MA	Rasio (per 10.000)	1:1.182	1:1.177	1:1.182	1:1.187	1:1.192	1:1.197
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	71,16	73,35	80,85	80,95	90,35	90,79
Kesehatan							
Rasio Posyandu Per Satuan Balita	Rasio (per 1.000)	1:6	1:6	1:7	1:7	1:7	1:7
Rasio Puskemas, Poliklinik, Pustu dan Polindes Terhadap Satuan Penduduk	Rasio (per 1.000)	1:0,46	1:0,48	1:0,50	1:0,50	1:0,50	1:0,50
Rasio Rumah Sakit Terhadap Satuan Penduduk	Rasio (per 1.000)	1:0,02	1:0,03	1:0,02	1:0,02	1:0,02	1:0,02
Rasio Dokter Terhadap Satuan Penduduk	Rasio (per 1.000)	1:0,58	1:0,57	1:0,43	1:0,44	1:0,45	1:0,46
Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk	Rasio (per 1.000)	1:5,7	1:4,87	1:2,26	1:3,5	1:4,6	1:4,9
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	100	58,88	89,73	90,41	95,86	98,97
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki potensi kebidanan	%	89,34	84,85	95,04	96,82	97,68	98,77
Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	-	-	96,97	99,95	99,95	99,95
Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100	100
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	56,97	14,81	13,92	13,78	13,62	13,22
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	100	100	100
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	123,42	168,88	100	100	100	100
Cakupan kujungan bayi	%	89,67	90,3	99,94	100	100	100

BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pekerjaan Umum							
Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	%	80	79	82	85	87	89
Perkembangan panjang jalan	km	293,17	313,37	315,63	320	325	330
Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk	Rasio (per 1.000)	1:1,23	1:2,15	1:2,07	1:3	1:4	1:4
Perumahan							
Lingkungan Pemukiman Kumuh	%	15	10	2	2	2	2
Jumlah Pengguna Listrik	Rumah Tangga	31.625	31.474	31.674	31.774	31.874	31.974
Rumah Tangga ber sanitasi	%	88,42	84,13	84,12	86,75	88,32	90,87
Rumah Layak Huni	%	85,22	87,09	87,45	88,91	89,62	90,45
Penataan Ruang							
Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	%	0,26	5	10	15	20	25
Perencanaan Pembangunan							
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	dok	ada	ada	ada	ada	ada	ada
Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada	dok	ada	ada	ada	ada	ada	ada
Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	dok	ada	ada	ada	ada	ada	ada
Perhubungan							
Jumlah Terminal Bis	Unit	1	1	1	1	1	1
Jumlah Pelabuhan Laut	Unit	1	1	1	1	1	1
Jumlah Orang Yang Terangkut Angkutan Umum	Orang	6-7 Orang/Kenderaan	6-7 Orang/Kenderaan	6-7 Orang/Kenderaan	6-7 Orang/Kenderaan	6-7 Orang/Kenderaan	6-7 Orang/Kenderaan
Lingkungan Hidup							
Persentase Penanganan Sampah	%	14	15	28	50	65	75
Kependudukan dan Catatan Sipil							
Kepemilikan KTP	%	74,4	87,73	67,7	75,98	85,25	95,23
Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	%	24,63	2,35	49,51	98	99	99
Penerapan KTP nasional berbasis NIK	sudah/belum	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah

BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	64,11	64,53	63,38	63,38	63,38	63,38
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera							
Cakupan Peserta KB aktif	%	73,4	73,4	75,05	75,6	75,9	76,2
Sosial							
Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	Unit	4	4	4	4	4	4
Ketenagakerjaan							
Tingkat Pengangguran Terbuka(TPT)	%	8,79	11,74	11,52	11,34	10,89	10,28
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah							
Koperasi aktif	%	55,42	34,37	9,88	29,47	47,39	68,26
Usaha mikro dan kecil	%	87,1	100	99,4	99,5	99,6	99,7
Kebudayaan							
Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	6	6	6	6	6	6
Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Unit	3	3	3	3	3	3
Kepemudaan dan Olahraga							
Lapangan olah raga	Rasio (per 1.000)	1:1,58	1:1,16	1:1,14	1:2	1:2	1:2
Jumlah Organisasi Kepemudaan	OKP/Paguyuban	55	57	59	61	63	65
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri							
Kegiatan pembinaan politik daerah	Kegiatan	2	2	2	2	2	2
Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Kegiatan	2	2	2	2	2	2
Otonomi daerah							
Rasio jumlah Polisi Pamong Praja	Rasio (per 10.000)	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2
Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kota	%	90,18	95	64,81	75	80	85

BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Pembinaan Penegakan Qanun (Syariat Islam)	Kali	624	617	596	550	525	500
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
PKK aktif	%	100	100	100	100	100	100
Posyandu	%	100	100	100	100	100	100
Statistik							
Buku "Kota Dalam Angka"	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Buku "PDRB Kota"	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Kearsipan							
Pengelolaan arsip secara baku	%	2,56	2,56	2,56	2,56	2,56	2,56
Komunikasi dan Informatika							
Website milik pemerintah daerah	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Pameran/expo	Kali	3	2	1	1	1	1
Perpustakaan							
Jumlah Perpustakaan Daerah	Unit	1	1	1	1	1	1
Jumlah Koleksi Jumlah Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	Unit Buku	21.344	21.344	24.641	24.641	24.641	24.641
Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan Selama 1 Tahun	Kunjungan	7.728	7.728	13.721	14.721	15.721	16.721
Fokus Layanan Urusan Pilihan							
Pertanian							
Kontribusi sektor pertanian, peternakan, perkebunan terhadap PDRB (ADHB)	%	5,5	5,43	5,18	5,19	5,20	5,21
Kehutanan							
Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (ADHB)	%	0,26	0,25	0,24	0,23	0,22	0,21
Energi dan Sumber Daya Mineral							
Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB (ADHB)	%	0,55	0,54	0,54	0,53	0,53	0,52

BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pariwisata							
Kontribusi sektor Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB (ADHB)	%	2	2,02	2,04	3,50	5,49	6,76
Kelautan dan Perikanan							
Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB (ADHB)	%	3,62	3,55	3,42	3,51	3,57	4,02
Perdagangan							
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (ADHB)	%	28,98	29,2	29,62	30,23	31,79	32,02
Perindustrian							
Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB (ADHB)	%	10,24	10,18	9,75	10,11	10,15	10,87
ASPEK DAYA SAING DAERAH							
Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah							
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
Pengeluaran konsumsi rumah tangga (ADHB)	Juta	13,91	14,6	15,54	16,6	17,4	18,6
Pertanian							
Nilai Tukar Petani	Poin	101,14	103,16	95,63	98	102	104
Lingkungan Hidup							
Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	%	18,19	96,17	96,19	96,25	96,3	96,35
Fokus Iklim Berinvestasi							
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
Lama proses perijinan	hari	7	7	7	7	7	7

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAEDAH PELAKSANAAN

10.1 Pedoman Transisi

RPJM Kota Langsa Tahun 2012-2017 yang telah disesuaikan ini merupakan dokumen perencanaan kota untuk periode 5 (lima) tahun, disusun berdasarkan visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Sesuai dengan rentang waktunya dan berakhirnya masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota pada tahun 2017, maka dokumen RPJM ini masih dapat digunakan sebagai landasan dan pedoman pada masa periode transisi, sambil menunggu penetapan secara definitif Walikota dan Wakil Walikota periode berikutnya. Hal tersebut dimaksudkan dalam upaya menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan perencanaan.

10.2 Kaedah Pelaksanaan

Program-program pembangunan yang ditetapkan dalam RPJM Kota Langsa Tahun 2012-2017 ini harus benar-benar dapat diimplementasikan oleh organisasi perangkat daerah dalam jajaran Pemerintah Kota. Agar proses implementasi program pembangunan menjadi lebih tepat, relevan, dan terarah, maka setiap perangkat daerah diwajibkan pula menyusun Rencana Strategis (Renstra). Penyusunan Renstra perangkat daerah berpedoman pada RPJM Kota Langsa Tahun 2012-2017. Dalam Renstra perangkat daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tupoksi dan selaras dengan program prioritas Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Program dan kegiatan pembangunan serta alokasi anggaran dalam Renstra perangkat daerah bersifat indikatif yang merupakan penjabaran dari RPJM Kota Langsa Tahun 2012-2017.

Selanjutnya, proses implementasi program pembangunan dalam dokumen RPJM ini harus mengarah kepada pencapaian visi, melalui misi yang diemban oleh semua perangkat daerah dan mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabel, dan prinsip *value for money*, serta partisipatif. Artinya, selain penggunaan anggaran harus diketahui masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan, serta setiap rupiah yang digunakan harus bernilai dan bermanfaat, proses implimentasinya haruslah mendapat dukungan masyarakat sepenuhnya. Karena itu,

diperlukan koordinasi yang kuat antar perangkat daerah dan lintas perangkat daerah, agar program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan selama periode 2012-2017 dapat menuju kearah satu tujuan yang telah disepakati bersama dalam Mewujudkan Langsa menjadi Kota Berperadaban dan Islami.

BAB XI

P E N U T U P

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Langsa Tahun 2012-2017 merupakan arah pembangunan kota yang ingin dicapai dalam kurun waktu masa bakti Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang disusun berdasarkan visi, misi, dan program pembangunan kota. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Langsa Tahun 2012-2017 merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Program-program pembangunan yang ditetapkan dalam perubahan RPJM Kota Langsa Tahun 2012-2017 ini diharapkan agar dapat benar-benar diimplementasikan oleh organisasi perangkat daerah dalam jajaran Pemerintah Kota yang dituangkan dalam bentuk dokumen Renstra perangkat daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tupoksi dan selaras dengan program prioritas Walikota dan Wakil Walikota.

RPJM Kota Langsa Tahun 2012-2017 yang telah disesuaikan ini juga sebagai koridor dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Kota (RKPK), yang disusun setiap tahunnya oleh Pemerintah Kota. Hal ini dinilai penting untuk diperhatikan mengingat RKPK merupakan rujukan utama dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (RAPBK).

Keberhasilan pelaksanaan program-program pembangunan lima tahun ke depan sebagaimana telah diuraikan di muka, sangat ditentukan oleh kemauan kuat (*good will*) dan ketepatan hati (komitmen) pihak eksekutif dan legislatif, yang didukung oleh semangat kerja yang tinggi dari pimpinan perangkat daerah dan masyarakat dari berbagai lapisan, serta adanya dukungan dana pembangunan yang cukup memadai.

Handwritten initials: *al-@* and *R.*

**PELAKSANA TUGAS
WALIKOTA LANGSA,**



KAMARUDDIN ANDALAH